



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintahan Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 5);
15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Perangkat Daerah adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis.
8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
9. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
10. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai misi.
11. Kegiatan/Sub Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)-OPD sebelum disepakati DPRD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA Tahun 2026, PPAS Tahun 2026 serta Rancangan RAPBD Kabupaten Bengkalis.
- (2) Tujuan Penetapan RKPD Tahun 2026 untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergi dan terpadu antara perencanaan pembangunan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten yang selaras dengan perencanaan Provinsi Riau dan Nasional.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika RKPD Tahun 2026 meliputi:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. BAB VII : Penutup.
- (2) Sistematika RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2026.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 30 SEPTEMBER 2025

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 2 OKTOBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 42

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dapat merampungkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 ini. Dengan demikian, pada penyusunan dokumen RKPD tahun 2026 ini telah dilakukan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah sesuai dengan yang tercantum di dalam RPJMD. Selain itu, penyelarasan dilakukan juga dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah yang tertuang dalam rancangan RKP serta program strategis nasional maupun Provinsi Riau.

Dalam proses penyusunannya, Bappeda Kabupaten Bengkalis melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu, kami ucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen RKPD ini. Semoga Allah SWT membalas kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas kita dalam membangun Kabupaten Bengkalis yang kita cintai bersama ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	5
1.4 Maksud dan Tujuan	6
1.5 Sistematika Dokumen RKPD.....	7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	9
2.1 Kondisi Umum Daerah	9
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	9
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	31
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	52
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	135
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis Sampai Tahun 2024.....	143
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	158
2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	158
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.	162
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	169
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	170
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2025	172
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2026	182
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	184
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	185
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah.	187
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan.....	191

BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	193
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	193
4.1.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026	193
4.1.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2026	194
4.1.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026.....	198
4.1.4	Pokok-Pokok Pikiran DPRD.....	204
4.2	Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2026.....	205
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	219
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	221
BAB VII	PENUTUP.....	228

DAFTAR TABEL

TABEL II-1 PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024.....	10
TABEL II-2 TINGGI WILAYAH DAN JARAK KE IBUKOTA KABUPATEN MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024.....	12
TABEL II-3 KONDISI CURAH HUJAN, KELEMBABAN DAN SUHU KABUPATEN BENGKALIS 2024	16
TABEL II-4 SEBARAN TUTUPAN LAHAN KABUPATEN BENGKALIS.....	17
TABEL II-5 DATA KEJADIAN BENCANA DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024.....	20
TABEL II-6 JUMLAH KEJADIAN BENCANA ABRASI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024	21
TABEL II-7 REKAPITULASI PENANGANAN BENCANA BANJIR MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024.....	22
TABEL II-8 JUMLAH KEJADIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024.....	24
TABEL II-9 JUMLAH PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024	25
TABEL II-10 JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024.....	26
TABEL II-11 JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN SEX RATIO KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024.....	27
TABEL II-12 PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA SELAMA SEMINGGU YANG LALU MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA DAN JENIS KELAMIN DI TAHUN 2024.....	30
TABEL II-13 TINGKAT INFLASI DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024.....	37
TABEL II-14 PDRB PER KAPITA PENDUDUK KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 – 2024 (JUTA RUPIAH)	37
TABEL II-15 PERKEMBANGAN PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 – 2024.....	40
TABEL II-16 PERKEMBANGAN KESEMPATAN KERJA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2024	50
TABEL II-17 ANGKA BALITA GIZI BURUK KABUPATEN BENGKALIS 2020-2024	50
TABEL II-18 PERSENTASE BALITA GIZI BURUK KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024.....	50

TABEL II-19 PERKEMBANGAN INDIKATOR KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024	51
TABEL II-20 CAKUPAN PEMBINAAN OLAHRAGA DI KABUPATEN BENGKALIS 2020-2024.....	52
TABEL II-21 PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024.....	53
TABEL II-22 PERKEMBANGAN APM KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024.....	54
TABEL II-23 PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024.....	55
TABEL II-24 PERKEMBANGAN ANGKA PUTUS SEKOLAH DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024 ...	56
TABEL II-25 PERKEMBANGAN ANGKA KELULUSAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024.....	56
TABEL II-26 PERKEMBANGAN ANGKA MELANJUTKAN STUDI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024 56	
TABEL II-27 RASIO GURU-MURID KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024.....	57
TABEL II-28 REALISASI PENCAPAIAN SPM URUSAN PENDIDIKAN TAHUN 2024	59
TABEL II-29 PERKEMBANGAN INDIKATOR KINERJA KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024.....	60
TABEL II-30 ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) PER 1000 KELAHIRAN HIDUP MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023-2024	62
TABEL II-31 ANGKA KELANGSUNGAN HIDUP BAYI KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024 ..	62
TABEL II-32 ANGKA KEMATIAN BALITA PER 1000 KELAHIRAN HIDUP MENURUT KECAMATAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023-2024	63
TABEL II-33 ANGKA KEMATIAN NEONATAL PER 1000 KELAHIRAN HIDUP MENURUT KECAMATAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023-2024	64
TABEL II-34 ANGKA KEMATIAN IBU PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP DALAM KECAMATAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023-2024	64
TABEL II-35 RASIO POSYANDU PER 1000 BALITA KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024 .	65
TABEL II-36 RASIO TENAGA MEDIS PER 1000 PENDUDUK KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024.....	66

TABEL II-37 CAKUPAN KOMPLIKASI KEBIDANAN YANG DITANGANI KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024.....	66
TABEL II-38 CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN YANG MEMILIKI KOMPETENSI KEBIDANAN PER KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024.....	67
TABEL II-39 CAKUPAN DESA/KELURAHAN <i>UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION</i> (UCI) KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024	67
TABEL II-40 PENDERITA DIARE YANG DITANGANI DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024	68
TABEL II-41 PREVALENSI HIV/AIDS (PERSEN) DARI TOTAL POPULASI DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024.....	68
TABEL II-42 CAKUPAN KUNJUNGAN BAYI PER KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024	69
TABEL II-43 CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL K4 PER KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024.....	69
TABEL II-44 CAKUPAN PUSKESMAS PER KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024	70
TABEL II-45 CAKUPAN PUSKESMAS PEMBANTU PER KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024	71
TABEL II-46 CAKUPAN PELAYANAN NIFAS PER KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024.....	71
TABEL II-47 CAKUPAN PEMEBRIAN MAKANAN PENDAMPING ASI PADA ANAK USIA 6-24 BULAN KELUARGA MISKIN PER KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024.....	72
TABEL II-48 CAKUPAN PENJARINGAN KESEHATAN SISWA SD DAN SETINGKAT PER KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024	73
TABEL II-49 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR MASYARAKAT MISKIN PER KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024.....	74
TABEL II-50 PENCAPAIAN SPM URUSAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024	74
TABEL II-51 PERKEMBANGAN INDIKATOR ASPEK PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024	76
TABEL II-52 REALISASI CAPAIAN SPM URUSAN PEKERJAAN UMUM 2024.....	78
TABEL II-53 PERKEMBANGAN INDIKATOR PERUMAHAN RAKYAT, KAWASANA PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024	79
TABEL II-54 CAPAIAN SPM PERUMAHAN RAKYAT 2024.....	80

TABEL II-55 CAPAIAN SPM AKSES AIR MINUM PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2024.....	81
TABEL II-56 CAPAIAN SPM PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK TAHUN 2024	82
TABEL II-57 CAPAIAN SPM PELAYANAN SPALD S AKSES AMAN TAHUN 2024.....	82
TABEL II-58 PERKEMBANGAN CAKUPAN PETUGAS PERLINDUNGAN MASYRAKAT (LINMAS) DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024 (%)	83
TABEL II-59 REALISASI CAPAIAN SPM URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TAHUN 2024.....	84
TABEL II-60 CAPAIAN SPM PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024.....	85
TABEL II-61 PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMADAMAN KEBAKARAN KABUPATEN BENGKALIS URUSAN KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM 2024	86
TABEL II-62 PERKEMBANGAN INDIKATOR SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024 (%).....	86
TABEL II-63 PERSENTASE PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) YANG MEMPEROLEH BANTUAN SOSIAL PER KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024.....	87
TABEL II-64 PERSENTASE PPKS YANG MEMPEROLEH BANTUAN SOSIAL PEMERINTAHAN UNTUK KEBUTUHAN DASAR PER KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024.....	88
TABEL II-65 PERSENTASE PPKS YANG TERTANGANI PER KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023.....	89
TABEL II-66 PENCAPAIAN SPM URUSAN SOSIAL TAHUN 2024	90
TABEL II-67 PERKEMBANGAN INDIKATOR TENAGA KERJA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024.....	91
TABEL II-68 BESARAN PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR DAN DITEMPATKAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024	92
TABEL II-69 JUMLAH TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) PENYANDANG DISABILITAS DI SEKTOR FORMAL KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023.....	93
TABEL II-70 PERKEMBANGAN INDIKATOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024	94
TABEL II-71 PERKEMBANGAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2023-2024	95

TABEL II-72 INDIKATOR URUSAN PANGAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024.....	96
TABEL II-73 PERKEMBANGAN INDIKATOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024	98
TABEL II-74 PERKEMBANGAN INDIKATOR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024	100
TABEL II-75 PERSENTASE KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) PER KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024.....	101
TABEL II-76 PERKEMBANGAN INDIKATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024	102
TABEL II-77 PERKEMBANGAN INDIKATOR PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024	104
TABEL II-78 PERKEMBANGAN INDIKATOR PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024..	105
TABEL II-79 PERKEMBANGAN INDIKATOR KOMUNIKASI DAN INFORMASTIKA DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024	106
TABEL II-80 CAKUPAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKT PADA TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024	107
TABEL II-81 PRESTASI PPID UTAMA KABUPATEN BENGKALIS 2020-2024	108
TABEL II-82 DATA WILAYAH (KELURAHAN/DESA) YANG BELUM TERCOVER MOBILE BROADBAND 4G DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024.....	108
TABEL II-83 PERKEMBANGAN INDIKATOR KOPERASI DAN UMKM DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024.....	111
TABEL II-84 PERKEMBANGAN INDIKATOR PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 - 2024.....	112
TABEL II-85 PERKEMBANGAN URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024.....	112
TABEL II-86 PERKEMBANGAN INDIKATOR STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024	113
TABEL II-87 PERKEMBANGAN INDIKATOR KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024.....	116
TABEL II-88 JUMLAH PENGUNJUNG DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUAPTEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024	118

TABEL II-89 KOLEKSI BUKU YANG TERSEDIA DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024	118
TABEL II-90 RASIO PERPUSTAKAAN PERSATUAN PENDUDUK KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024	118
TABEL II-91 PERSENTASE PENGELOLAAN ARSIP SECARA BAKU DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024.....	120
TABEL II-92 PERSENTASE CAPAIAN INDIKATOR PERIKANAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024	121
TABEL II-93 PERKEMBANGAN INDIKATOR PARIWISATA KABUPATEN BENGKALIS 2020-2024	123
TABEL II-94 PERKEMBANGAN INDIKATOR PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024.....	124
TABEL II-95 KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN/PERKEBUNAN TERHADAP PDRB ADHK KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024	124
TABEL II-96 BANYAKNYA PRODUKSI TENAGA LISTRIK DIRINCI MENURUT GOLONGAN TARIF DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024	125
TABEL II-97 PERKEMBANGAN EKSPOR KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024.....	126
TABEL II-98 CAPAIN INDIKATOR PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023-2024.....	126
TABEL II-99 CAPAIAN INDIKATOR PERINDUSTRIAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023-2024	127
TABEL II-100 PERKEMBANGAN INDIKATOR PERENCANAAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024	128
TABEL II-101 PERKEMBANGAN INDIKATOR KEUANGAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020–2024	129
TABEL II-102 PERKEMBANGAN INDIKATOR KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 – 2024.....	130
TABEL II-103 PERKEMBANGAN INDIKATOR KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024	131
TABEL II-104 PERKEMBANGAN INDIKATOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS 2020-2024.....	132
TABEL II-105 PERKEMBANGAN INDIKATOR PENGAWASAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 – 2024	132
TABEL II-106 PERKEMBANGAN INDIKATOR SEKRETARIAT DEWAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024.....	133

TABEL II-107 PERKEMBANGAN INDIKATOR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023-2024.....	134
TABEL II-108 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT KABUPATEN BENGKALIS MENURUT KECAMATAN TAHUN 2021-2024.....	135
TABEL II-109 DANA MASYARAKAT PADA PERBANKAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024 (Rp. JUTA).....	139
TABEL II-110 JUMLAH PRODUKSI DAN LUAS AREAL KOMODITAS UTAMA PERKEBUNAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2024	140
TABEL II-111 KETAATAN TERHADAP RTRW KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2024.....	140
TABEL II-112 RASIO KRIMINALITAS PER 10.000 PENDUDUK KABUPATEN BENGKALIS 2020-2024	141
TABEL II-113 RASIO KETERGANTUNGAN KABUPATEN BENGKALIS 2020-2024.....	143
TABEL II-114 RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024	144
TABEL II-115 RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM UNGGULAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024.....	153
TABEL II-116 PERUMUSAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	162
TABEL III-1 TINGKAT INFLASI DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024.....	176
TABEL III-2 PROYEKSI PERKENOMIAN KABUPATEN BENGKALIS 2026.....	183
TABEL III-3 REALISASI DAN PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	186
TABEL III-4 REALISASI DAN PROYEKSI PENGELUARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS.....	189
TABEL III-5 REALISASI DAN PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	191
TABEL IV-1 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026	195
TABEL IV-2 HUBUNGAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN PADA RPJMD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 – 2029.....	199
TABEL IV-3 KONSISTENSI POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DENGAN RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026.....	204

TABEL IV-4 SINGKRONINASI TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL, PROVINSI DAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026	206
TABEL IV-5 PRIORITAS PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026.....	210
TABEL IV-6 SINKRONISASI SPM DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN 2026	214
TABEL VI-1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SASARAN PRIORITAS RPJMD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026	221
TABEL VI-2 INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026	221

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR I-1 HUBUNGAN DAN KETERKAITAN PENYUSUNAN RKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA DAN PRIORITAS PROGRAM SERTA KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH	3
GAMBAR I-2 KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN ANTARA PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN BENGKALIS	6
GAMBAR II-1 PETA ADMINISTRATIF KABUPATEN BENGKALIS	10
GAMBAR II-2 PETA TOPOGRAFI KABUPATEN BENGKALIS.....	14
GAMBAR II-3 PETA GEOLOGI KABUPATEN BENGKALIS.....	15
GAMBAR II-4 PETA HIDROLOGI KABUPATEN BENGKALIS.....	16
GAMBAR II-5 PETA KLIMATOLOGI KABUPATEN BENGKALIS	17
GAMBAR II-6 PETA TUTUPAN LAHAN KABUPATEN BENGKALIS.....	18
GAMBAR II-7 PETA WILAYAH RAWAN ABRASI KABUPATEN BENGKALIS	22
GAMBAR II-8 PETA RAWAN BENCANA BANJIR KABUPATEN BENGKALIS.....	23
GAMBAR II-9 PETA RAWAN KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN DI KABUPATEN BENGKALIS	25
GAMBAR II-10 PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN PENDUDUK KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024	28
GAMBAR II-11 RATA-RATA PERTUMBUHAN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024.....	28
GAMBAR II-12 KOMPOSISI PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024.....	30
GAMBAR II-13 STRUKTUR KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 DAN 2024.....	30
GAMBAR II-14 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 - 2024.....	32
GAMBAR II-15 NILAI PDRB HARGA KONSTANT (2010) DAN PDRB HARGA BERLAKU (DALAM TRILIUN) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024.....	33
GAMBAR II-16 STRUKTUR PEREKONOMIAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024.....	35
GAMBAR II-17 STRUKTUR PEREKONOMIAN (PDRB) KABUPATEN BENGKALIS MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2024.....	36
GAMBAR II-18 PERKEMBANGAN GINI RATIO KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 – 2024.....	38
GAMBAR II-19 KETIMPANGAN WILLIAMSON PROVINSI RIAU TAHUN 2020 – 2024	40
GAMBAR II-20 PERBANDINGAN TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN BENGKALIS DAN PROVINSI RIAU TAHUN 2020 – 2024	41

GAMBAR II-21 PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024	44
GAMBAR II-22 PERKEMBANGAN UMUR HARAPAN HIDUP (TAHUN) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024	45
GAMBAR II-23 PERKEMBANGAN HARAPAN LAMA SEKOLAH (TAHUN) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024	46
GAMBAR II-24 PERKEMBANGAN ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TAHUN) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024	47
GAMBAR II-25 PERKEMBANGAN PENGELUARAN PER KAPITA RIIL (RP 000/ORANG/TAHUN) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024	48
GAMBAR II-26 CAPAIAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024 (%)	49
GAMBAR II-27 PERKEMBANGAN PERSENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024 (%)	49
GAMBAR II-28 PERKEMBANGAN GURU YANG MEMENUHI KUALIFIKASI S1/D-IV KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024	57
GAMBAR II-29 PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF MENURUT KELOMPOK UMUR KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024	58
GAMBAR II-30 PERSENTASE LUAS LAHAN BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017-2020	97
GAMBAR II-31 PERKEMBANGAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (LPP) DAN TOTAL FERTILITY RATE (TFR) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024	103
GAMBAR II-32 PERKEMBANGAN JUMLAH UJI KIR DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024	105
GAMBAR II-33 PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG TELAH MENGGUNAKAN SANDI DALAM KOMUNIKASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024	114
GAMBAR II-34 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG TELAH MEMILIKI EMAIL SENAPATI DAN SERTIFIKAT ELETRONIK DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024	114
GAMBAR II-35 INDEK PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024	119
GAMBAR II-36 JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024	122
GAMBAR II-37 KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN BENGKALIS	125
GAMBAR II-38 PERKEMBANGAN CAKUPAN KELOMPOK PENGRAJIN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2024	127
GAMBAR II-39 PERKEMBANGAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA PERKAPITA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024	136

GAMBAR II-40 PERKEMBANGAN TINGKAT PENGELUARAN PANGAN DAN PROPORSI PENGELUARAN PANGAN TERHADAP TINGKAT PENGELUARAN RUMAH TANGGA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024	137
GAMBAR II-41 PERKEMBANGAN TINGKAT PENGELUARAN NON PANGAN DAN PROPORSI PENGELUARAN NON PANGAN TERHADAP TINGKAT PENGELUARAN RUMAH TANGGA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024	137
GAMBAR II-42 PERKEMBANGAN NILAI TUKAR PETANI (NTP) PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024	138
GAMBAR II-43 PERKEMBANGAN RASIO PERDAGANGAN TERHADAP PDRB ADHK TAHUN 2020-2024	139
GAMBAR II-44 ANGKA KRIMINALITAS YANG TERCATAT DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024	141
GAMBAR II-45 PERSENTASE PENDUDUK 15 TAHUN KEATAS MENURUT IJAZAH S1/S2/S3 TAHUN 2020-2024	142
GAMBAR III-1 PERBANDINGAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BENGKALIS TERMASUK MINYAK BUMI DAN GAS DENGAN PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024	173
GAMBAR III-2 STRUKTUR PEREKONOMIAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024	175
GAMBAR III-3 PERSENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) 2020-2024	177
GAMBAR III-4 GINI RATIO KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 – 2024	178
GAMBAR III-5 INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 2020-2024	180
GAMBAR III-6 TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN BENGKALIS 2020-2024	181

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026, merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029, yang disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 Kabupaten Bengkalis, dokumen ini juga merupakan sebagai instrumen dalam mengimplemtasikan muatan yang terkandung pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029.

Penyusunan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 mengacu pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 yang disusun secara simultan terkoordinasi, dikarenakan penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025-2029. Pada RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025-2029 memiliki visi "*Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju Dan Sejahtera Serta Unggul Di Indonesia*" dan diimpletasikan ke dalam tiga Misi pembangunan jangka menengah, yaitu:

- 1) Mewujudkan pengelolaan potensi keuangan daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian.
- 2) Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.
- 3) Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat.

Secara umum arah kebijakan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2026, difokuskan untuk Peningkatan Modal Dasar Transformasi Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Berdaya Saing Melalui Inovasi Dan Infrastruktur Yang Berkelanjutan. Penguatan fokus pembangunan ini juga dilakukan secara terintegrasi dan mendukung kebijakan-kebijakan pembangunan nasional serta provinsi seperti mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pembangunan yang terarah dan terintegrasi untuk meningkatkan produktifitas secara ekonomi dan efektifitas pembangunan spasial daerah. Untuk dapat mencapai fokus pemantapan tersebut maka penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 ini dibuat dengan lebih implementatif melalui pendekatan top down, bottom up, partisipatif, politik, teknokratik yang berorientasi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial.

Selain itu, dokumen RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 juga mempedomani kebijakan yang masih berlaku seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta aturan-aturan lainnya yang masih berlaku.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan menjadi langkah awal dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam perumusan rancangan kebijakan umum APBD. Sebagai bagian dari dokumen perencanaan daerah, RKPD memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan rencana jangka menengah ke dalam perencanaan dan penganggaran tahunan. Tahapan penyusunannya mencakup persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang, hingga perumusan dan penetapan RKPD final.

Dalam proses penyusunannya, RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 menggunakan berbagai pendekatan. Selain pendekatan teknokratik yang berbasis data dan analisis, serta pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, juga diterapkan pendekatan bottom-up. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat diakomodasi, melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dimulai dari tingkat kabupaten/kota.

Di sisi lain, pendekatan top-down juga memainkan peranan penting dalam penyusunan RKPD ini. Hal ini karena dokumen RKPD dirancang berdasarkan visi, misi, dan program kepala daerah serta wakil kepala daerah terpilih, serta mengacu pada program prioritas nasional seperti Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, penyusunan RKPD dilakukan secara terkoordinasi dan selaras dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat, guna mewujudkan sinergi antara arah pembangunan daerah dan nasional.

Secara umum, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

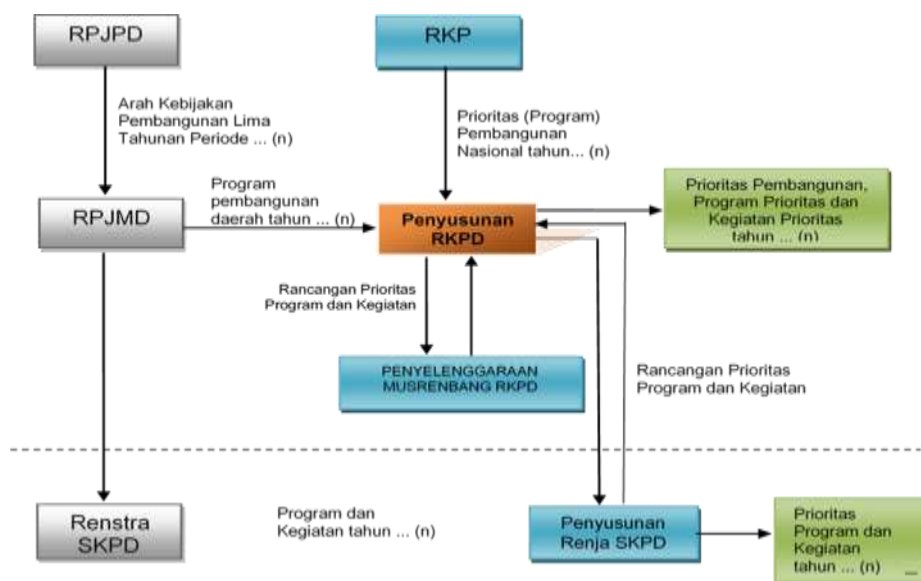
RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029;

RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dirumuskan dengan prinsip spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dengan memperhatikan waktu yang ada;

RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara melalui penganggaran berbasis kinerja dalam mewujudkan kebijakan money follow program, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD;

RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD, dapat diketahui sejauh mana capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kabupaten Bengkalis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Riau yang saling terkait dan sinergi antara dokumen perencanaan daerah dengan nasional pada setiap tingkatan perencanaan seperti yang tertera pada Gambar I 1.



Gambar I-1 Hubungan dan Keterkaitan Penyusunan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dan Prioritas Program serta Kegiatan Pembangunan Daerah

Dari uraian di atas, dijelaskan bahwa keterkaitan pembangunan nasional dan daerah terdapat pada setiap tingkatan perencanaan, baik antar Kementerian/Lembaga maupun Kementerian/Lembaga dengan pemerintah daerah Provinsi, dengan tujuan agar kegiatan pemerintah pusat di daerah terdistribusikan secara adil dan dapat menciptakan sinergitas pembangunan secara nasional.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Penyusunan dokumen perencanaan RKPD Kabupaten Kabupaten Bengkalis 2026 didasari oleh landasan-landasan hukum terkait perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut:

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 -2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkalis 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 5).

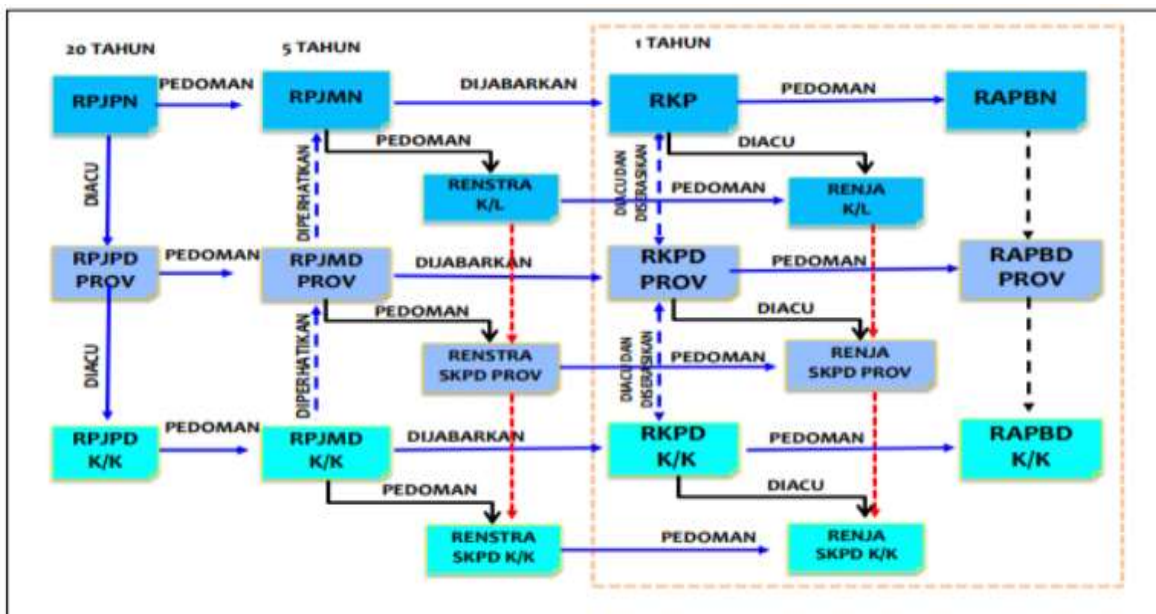
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RKP/program strategis nasional, RPMJD Provinsi, RPJP Kabupaten Bengkalis dan RPJMD Kabupaten Bengkalis serta RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kabupaten. RKPD Kabupaten Bengkalis tahun 2026 memiliki hubungan erat dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) RKPD dan RPJPD 2025-2045; RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 merupakan penjabaran periode pertama RPJPD yakni periode 2025-2029. RKPD berisikan prioritas program dan kegiatan berdasarkan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bengkalis Tahap pertama yang telah disesuaikan dengan RPJPD Provinsi Riau dan RPJPN.
- 2) RKPD dengan Teknokratik RPJMD 2025-2029; RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama dari RPJMD tahun 2025-2029. Namun penyusunan kedua dokumen tersebut dilakukan secara bersamaan, sehingga RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 ini mengacu pada dokumen RPJMD yang disusun secara simultan terkoordinasi. RKPD berisi penjabaran program pembangunan dan capaian kinerja tahunan dalam mendukung target capaian lima tahunan. Melalui RKPD, dapat dilakukan upaya penyesuaian dalam mencapai target pembangunan akhir periode RPJMD.
- 3) RKPD dan Renja PD; RKPD sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen tahunan OPD yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan dan mengacu pada Renstra OPD.
- 4) RKPD dan APBD; RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berdasarkan RKPD.
- 5) RKPD dan RTRW; Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai rencana pola ruang, rencana struktur ruang, dan rencana kawasan strategis Kabupaten Bengkalis sebagai dasar untuk memantapkan lokasi kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.
- 6) RKPD dan RPKD; Dalam penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2027, di mana program-program dalam RPKD telah masuk ke dalam RKPD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam hal penurunan angka kemiskinan.

- 7) RKPD dan TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan); Dalam penyusunan RKPD telah memuat empat pilar pembangunan TPB, yang telah masuk dalam program kegiatan di RKPD
- 8) RKPD dan SPM; Dalam penyusunan RKPD telah memuat indikator SPM ke dalam indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana SPM.
- 9) RKPD dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Provinsi ; Dalam siklus manajemen pembangunan yang meliputi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, RKPD memiliki fungsi dan peran yang cukup krusial. RKPD merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan 20 tahunan yaitu RPJPD dan dokumen perencanaan 5 tahunan yaitu RPJMD serta memperhatikan dan mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan provinsi. Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah.

Penyusunan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 ini juga mensinergikan/ mensinkronisasikan sasaran dan program prioritas pembangunan dengan RKPD Provinsi Riau Tahun 2026 yang mengusung tema “*Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola serta Pemerataan Infrastruktur untuk Penguatan Ekonomi Daerah*” sebagaimana dijelaskan pada Bab IV dalam dokumen ini.



Gambar I-2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten Bengkalis

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 adalah sebagai Pedoman Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPAS antara Bupati dan Pimpinan DPRD.

Penyusunan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 ini bertujuan untuk mewujudkan program pembangunan Kabupaten Bengkalis yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan dan sasaran pada RPJMD 2025-2029. Secara khusus tujuan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 ini dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026;
- 2) Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis kedalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah Riau;
- 3) Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2026 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai belanja dan pembiayaan pembangunan;
- 4) Mengarahkan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah dalam merumuskan, menyusun perencanaan pembangunan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah Tahun 2026;
- 5) Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026;
- 6) Menyatukan tujuan kegiatan semua Perangkat Daerah melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Riau, sehingga RKPD ini bisa menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);
- 7) Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Organisasi penyusunan (sistematika) dokumen RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

2.3.2 Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2026

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

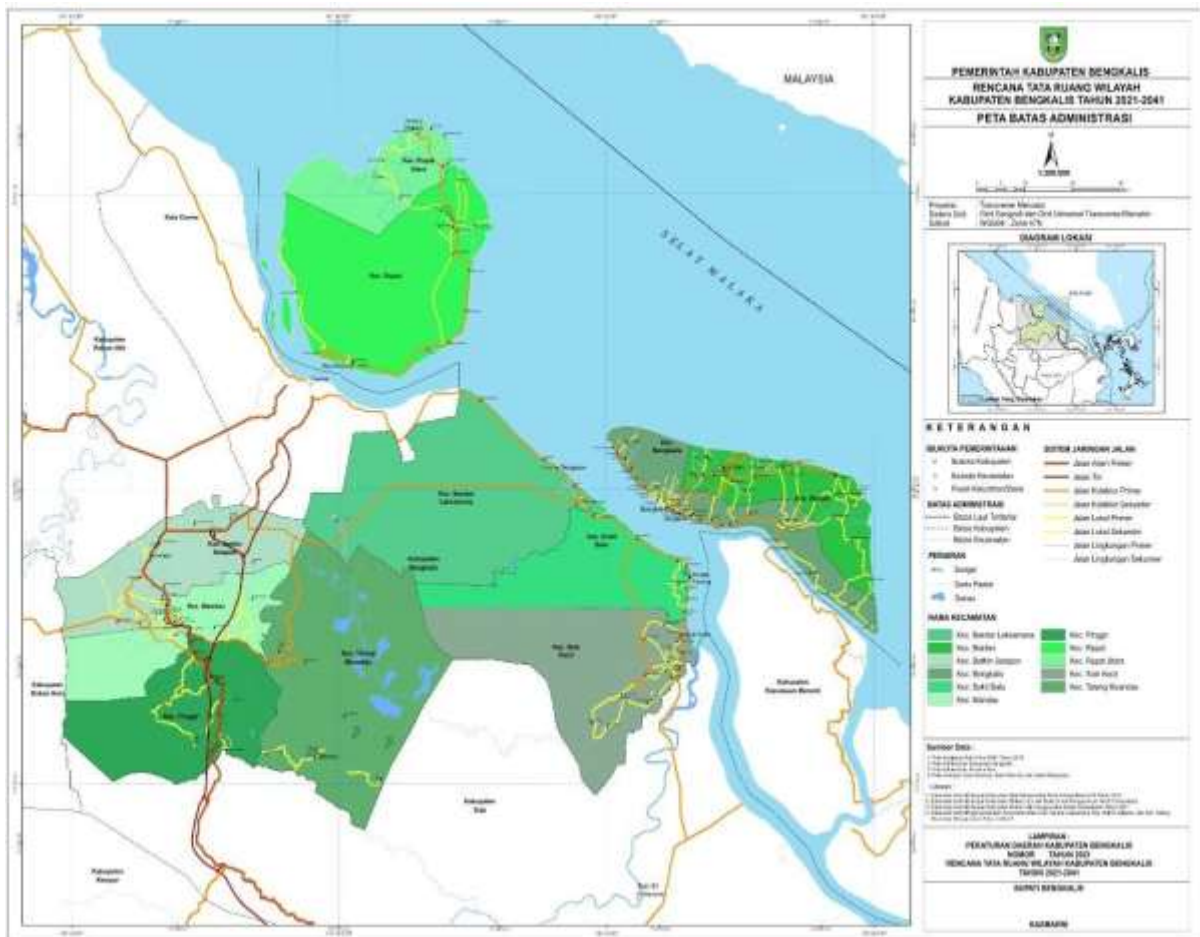
Untuk melakukan pelaksanaan RKPd Tahun 2026, maka perlu diberikan gambaran terlebih dahulu tentang gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bengkalis. Gambaran ini meliputi kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan lainnya sebagai berikut ini.

2.1 Kondisi Umum Daerah

Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera dengan luas wilayah semula 30.646,843 Km. dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, maka luas wilayah Kabupaten Bengkalis menjadi 11.481,77 Km dengan jumlah Kecamatan sebanyak 13 Kecamatan. Selanjutnya pada Tahun 2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis menjadi 8 (Delapan) Kecamatan dengan luas wilayah 7.773,93 Km². Terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Tercatat sebanyak 16 pulau utama disamping pulau-pulau kecil lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Bengkalis menurut data dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkalis memiliki luas 8.628,07 Km², yang terdiri dari kawasan pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan lepas pantai. Terdapat dua pulau utama di samping pulau-pulau kecil lainnya yang ada di Kabupaten Bengkalis. Pulau Bengkalis merupakan pulau utama tempat pusat pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Sementara pusat perekonomian penduduk sebagian besar berada di daratan bagian timur Pulau Sumatera dimana terdapat 7 dari 11 kecamatan yang berlokasi di daratan tersebut. Pulau utama lainnya adalah pulau Rupa yang menjadi destinasi wisata penting di Kabupaten Bengkalis. Berikut adalah peta administrasi Kabupaten Bengkalis.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Gambar II-1 Peta Administratif Kabupaten Bengkulu

Secara administrasi Kabupaten Bengkulu terdiri dari 11 Kecamatan, 19 Kelurahan dan 155 Desa. Adapun (11) sebelas kecamatan dimaksud adalah Kecamatan Bengkulu dan Kecamatan Bantan terletak di Pulau Bengkulu, Kecamatan Rupal dan Rupal Utara terletak di Pulau Rupal, Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil, dan Bandar Laksamana di pesisir Pulau Sumatera, serta Kecamatan Mandau, Bathin Solapan, Pinggir dan Talang Muandau yang terletak di daratan Pulau Sumatera. Adapun luas wilayah pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel II.1 berikut.

Tabel II-1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkulu Tahun 2024

No	Kecamatan	Ibu kota Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (Hektare)	Persentase Luas Wilayah (%)
1	Bengkalis	Bengkalis Kota	3	28	44.010	5,38
2	Bantan	Selat Baru	-	23	46.128	5,14
3	Bukit Batu	Sungai Pakning	1	9	59.744	6,94
4	Bandar Laksamana	Tenggayun	-	7	130.145	15,11
5	Siak Kecil	Lubuk Muda	-	17	94.750	10,99
6	Mandau	Air Jamban	9	2	51.706	6
7	BathinSolapan	Sebangar	-	13	67.371	7,81

No	Kecamatan	Ibu kota Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (Hektare)	Persentase Luas Wilayah (%)
8	Pinggir	Pinggir	2	8	77.442	8,98
9	Talang Muandau	Beringin	-	9	137.874	15,99
10	Rupat	Batu Panjang	4	12	114.372	13,27
11	Rupat Utara	Tanjung Medang	-	8	37.714	4,39
Kabupaten Bengkalis			19	136	861.256	100

Sumber: RTRW Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 – 2042

Jika dirinci luas wilayah kecamatan dan dibandingkan luas Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Talang Muandau merupakan kecamatan terluas, yaitu 137.874 Ha (15,99%) dan Kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Rupat Utara dengan luas 37.714 Ha (4,39%).

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1) Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis wilayah Kabupaten Bengkalis terletak pada posisi $100^{\circ}57'57,6''$ – $102^{\circ}30'25,2''$ Bujur Timur dan $2^{\circ}7'37,2''$ - $0^{\circ}55'33,6''$ Lintang Utara. Sedangkan secara geografis wilayah Kabupaten Bengkalis terbagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: (1) geografis pulau-pulau pesisir, (2) geografis pesisir dan (3) geografis daratan. Sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis berada bersempadan dengan perairan dangkal dan sebagian lagi merupakan terusan dari bentangan daratan Pulau Sumatera bagian tengah dan timur.

Kabupaten Bengkalis yang memiliki geografis pulau-pulau pesisir yaitu Pulau Bengkalis yang terdiri dari Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan dengan luas total daratan dan perairan sekelilingnya 907,33 Km² dan Pulau Rupat yang terdiri dari Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara dengan luas daratan dan perairan sekelilingnya 1.523,70 Km². Pulau Rupat memiliki 15 buah pulau-pulau kecil yang telah memiliki nama dengan karakteristik yang merupakan endapan-endapan geologis hasil dinamika arus dan angin di perairan sekitarnya.

Kawasan geografis pesisir Kabupaten Bengkalis terdiri dari Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil dan Kecamatan Bandar Laksamana dengan luas daratan dan perairan 2.850,53 Km². Kawasan tersebut berada di perairan Selat Pakning yang menghubungkan Pulau Bengkalis dan Pulau Merbau (Kabupaten Kepulauan Meranti). Sedangkan kawasan geografis daratan terdiri dari Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Talang Muandau yang merupakan bentangan tengah dan timur yang terletak di Pulau Sumatera dengan kondisi elevasi daratan yang bergelombang dengan luas total daratan 3.346,51 Km².

Letak Kabupaten Bengkalis dipandang strategis dimana dua pulau-pulunya terletak berdekatan dengan Negara Malaysia dan Jalur Pelayaran Internasional menjadikan posisi Kabupaten Bengkalis sangat strategis. Waktu tempuh dari dua pulau yang berdekatan dengan Selat Malaka beberapa kota di pesisir barat Semenanjung Malaysia cukup singkat. Jarak tempuh antara Desa Tanjung Medang Ibukota Kecamatan Rupat Utara di

Pulau Rupert ke Kota Port Dickson yang berjarak 48,5 km dengan waktu tempuh \pm 45 menit melalui Selat Malaka, sedangkan ke Kota Malaka yang berjarak 67 Km dari Tanjung Medang dapat ditempuh \pm 1,5 jam. Sementara jika melayari Selat Malaka dari Pelabuhan Feri yang berlokasi di Desa Selat Baru Ibukota Kecamatan Bantan Pulau Bengkalis menuju Kota Malaka yang berjarak 75 Km dapat memakan waktu \pm 1,5 jam, Kota Muar adalah kota terdekat dari Pulau Bengkalis hanya berjarak 62 Km dengan waktu tempuh pelayaran selama \pm 45 menit, sedangkan untuk mencapai Kota Batu Pahat yang berjarak 76 Km dari Pulau Bengkalis dapat ditempuh dalam waktu \pm 1 jam.

Posisi ini menempatkan Kabupaten Bengkalis dalam kawasan yang sangat strategis berada di tepi alur Pelayaran Internasional yang paling sibuk di dunia melalui Selat Malaka, berada pada kawasan segitiga pertumbuhan Ekonomi Indonesia Malaysia Thailand-Growth Triangle (IMT-GT), program Indonesia Malaysia Singapore-Growth Triangle (IMS-GT) serta Dunia Melayu Dunia Islam

Topografi

Secara umum kondisi topografi wilayah Kabupaten Bengkalis relatif datar dengan kemiringan lereng rata-rata sebesar 2 - 6 mdpl. Sebagian besar wilayah daratan berbentuk datar dengan kemiringan berkisar antara 0 - 3 mdpl, yaitu mencakup 71% dari luas wilayah atau sekitar dengan 551.949 Ha, kecuali pada sebagian kecil di wilayah Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu yang memiliki kemiringan lereng antar 3-8 mdpl yang mencakup sekitar 19% dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 147.705 Ha. Sebagian kecil wilayah Kabupaten Bengkalis memiliki kemiringan antara 8 - 16 mdpl dengan tekstur berombak hingga bergelombang yang mencakupi luas 2% dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 15.548 Ha dan wilayah dengan kemiringan $>$ 16 mdpl dengan tekstur bergelombang hingga berbukit kecil yang mencakup 8% dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 62.191 Ha.

Wilayah daratan Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan berada pada letak wilayah yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan pada pulau dan pesisir. Wilayah Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Mandau merupakan dua kecamatan dengan wilayah tertinggi, yaitu mencapai 55 mdpl. Sedangkan wilayah Kecamatan Rupert, Rupert Utara, Bengkalis dan Bantan merupakan wilayah terendah dengan tinggi hanya 5 mdpl. Wilayah pesisir yang lebih rendah cenderung rentan terdampak banjir dan abrasi dibanding daerah yang lebih tinggi. Ancaman abrasi terbesar dihadapi oleh Pulau Bengkalis dan Pulau Rupert. Selain berhadapan langsung dengan laut terbuka, yaitu Selat Melaka dengan bangkitan angin yang cukup kencang yang menghasilkan gelombang laut yang cukup besar dan tinggi. Selain itu, kondisi mangrove dan ekosistem pantai yang mulai rusak menjadi penyebab abrasi yang semakin mengancam pada kedua pulau tersebut. Secara rinci ketinggian wilayah dan jarak ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten disajikan pada Tabel II-2 berikut ini.

Tabel II-2 Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibu kota Kabupaten (Km)
1	Mandau	55	103
2	Pinggir	45	100
3	Bathin Solapan	55	106
4	Talang Muandau	45	90
5	Bukit Batu	6	15
6	Siak Kecil	6	25
7	Bandar Laksamana	6	24
8	Rupat	5	71
9	Rupat Utara	5	86
10	Bengkalis	5	-
11	Bantan	5	15

Sumber: RTRW Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 - 2042

Fisiografi wilayah Kabupaten Bengkalis pada umumnya terbagi pada dua klasifikasi, yaitu fisiografi cekungan rawa dan fisiografi daratar, dengan karakteristik sebagai berikut:

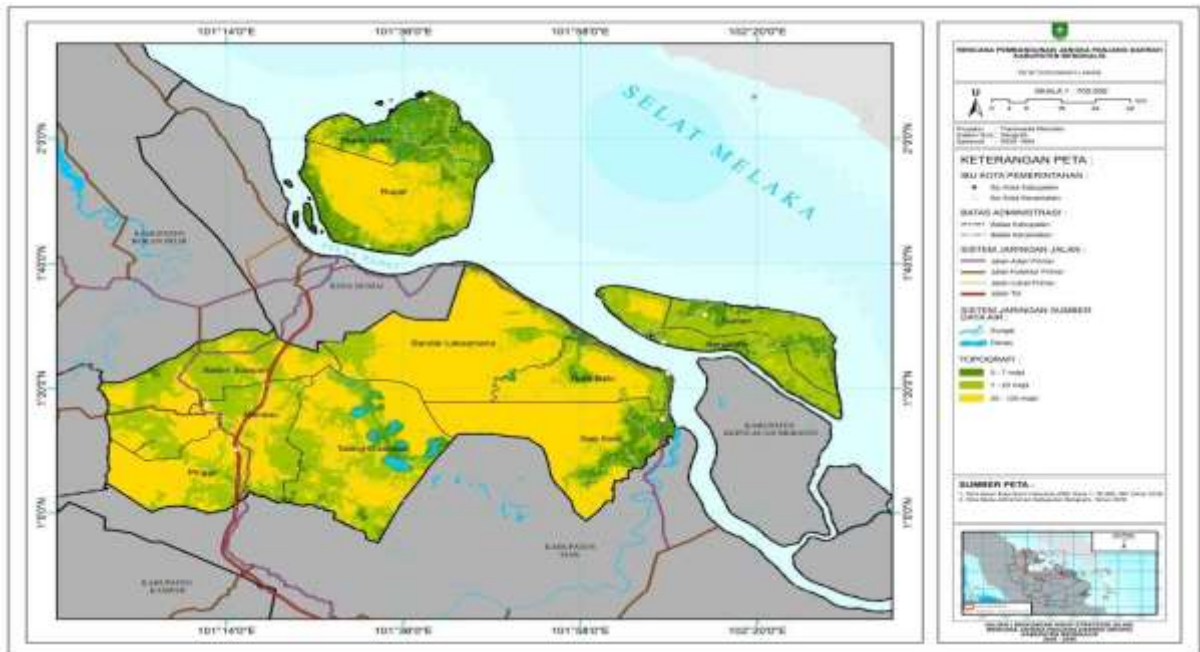
Cekungan Rawa

Daerah ini dijumpai di bagian tengah, berupa cekungan tertutup yang terdiri dari rawa gambut yang berasal dari bahan endapan aluvial. Bentuk wilayah datar sampai cekung (0-3 mdpl) dengan bentukan drainase alam yang jelek. Daerah ini mencakup 71% dari luas kabupaten yang tersebar di Kecamatan Rupat, Rupat Utara, Bengkalis, Bantan, Bukit Batu dan Siak Kecil.

Dataran

Fisiografi ini berasal dari endapan aluvial mencapai 21% dari luas kabupaten. Bentuk wilayah pada unit fisiografi ini adalah bergelombang sampai berombak (3-18 mdpl) dengan bentukan drainase sedang sampai baik. Disamping yang terbentuk dari endapan aluvial, bentuk dataran ini juga berasal dari sabuk meander dan teras laut tua. Bentuk wilayah ini terdapat pada beberapa bagian kecil di Kecamatan Mandau, Pinggir dan sedikit di Kecamatan Bukit Batu.

Uraian di atas menunjukkan wilayah Kabupaten Bengkalis didominasi oleh kelompok kubah gambut dan kelompok marin. Kelompok kubah gambut berkembang dari endapan organik dan semakin tebal jika semakin jauh dari pantai. Gambut yang dipengaruhi oleh air laut mempunyai potensi asam sulfat tinggi. Sedangkan kelompok marin berkembang dari endapan mineral yang dipengaruhi pasang surut air laut dan mempunyai lebar bervariasi antara 0,5-5 km.



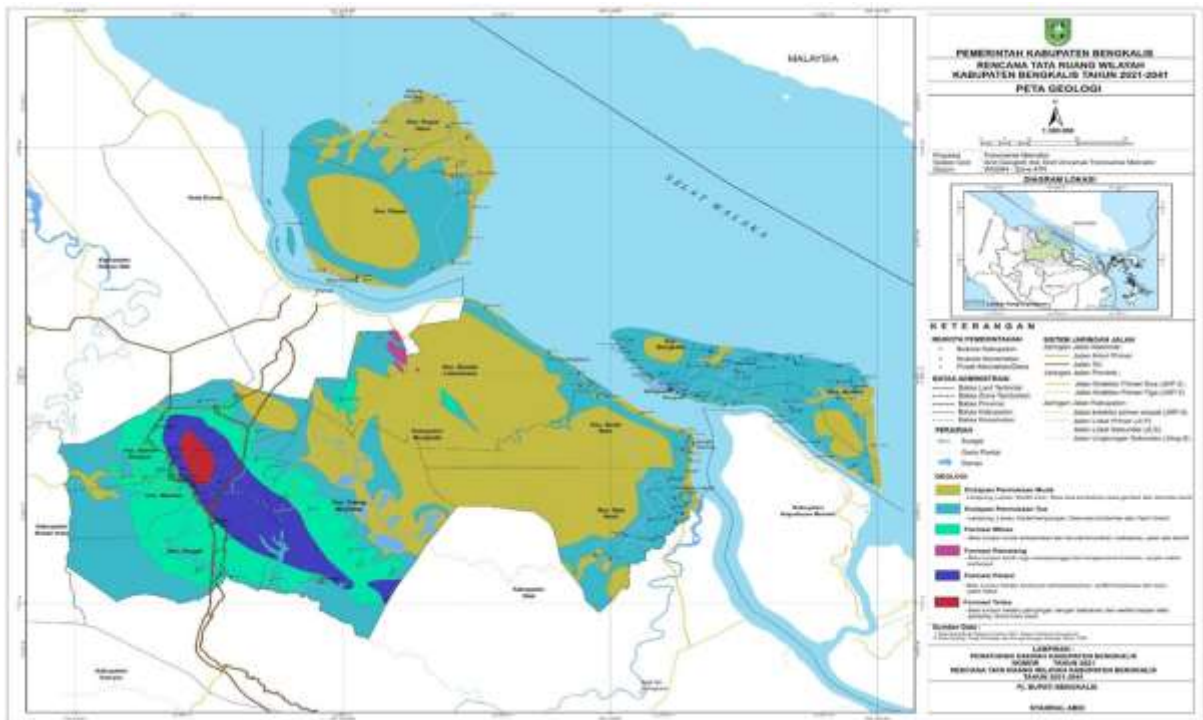
Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Bengkulu 2025-2045

Gambar II-2 Peta Topografi Kabupaten Bengkulu

Geologi

Pembentukan geologi wilayah Kabupaten Bengkulu tidak terlepas dari sejarah pembentukan geologi Pulau Sumatera pada masa ratusan juta tahun yang lalu, dimana sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu yang terdiri dari Kecamatan Mandau, Pinggir, Bukit Batu dan Siak Kecil berada di bagian pesisir timur Pulau Sumatera yang terbentuk dari endapan gambut masa lalu sebagai akibat dari erosi besar pada bagian hulu sungai- sungai besar di Pulau Sumatera dimana semakin ke muara endapan yang terbawa semakin besar mengendap sehingga di beberapa bagian timur pesisir Pulau Sumatera (terutama yang masuk pada bagian cekungan tengah) telah membentuk formasi endapan gambut pulau-pulau besar dan kecil di sekitarnya yang diantaranya membentuk Pulau Bengkulu dan Pulau Rupat.

Secara umum kondisi geologi wilayah Kabupaten Bengkulu terdiri dari tiga formasi yaitu: formasi petani (Tup), formasi telisa (TMT) dan formasi pematang (TLpe). Formasi petani disebut sebagai lapisan palembang tengah dan bawah, sedangkan kuartar terdiri dari formasi minas (Qpmi), endapan permukaan muda (Qh) dan endapan permukaan tua (Qp). Aluvium tua umumnya merupakan bagian kering yang terdapat di Kecamatan Mandau, Pinggir dan Bukit Batu. Sedangkan aluvium muda menempati cekungan atau daerah belakang pantai yang berawa dan alur-alur pasang surut yang terdapat di Kecamatan Rupat, Rupat Utara, Bengkulu, Bantan, Bukit Batu dan Siak Kecil. Khusus Kecamatan Mandau dan Pinggir terletak dalam struktur tersier dan cekungan deposit yang sering disebut sebagai cekungan Sumatera Tengah dimana endapan dan cekungan ini terdiri atas lapisan yang tebal di antara deposit minyak bumi dan batu-batuan. Untuk lebih jelasnya geologi tanah di Kabupaten Bengkulu dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

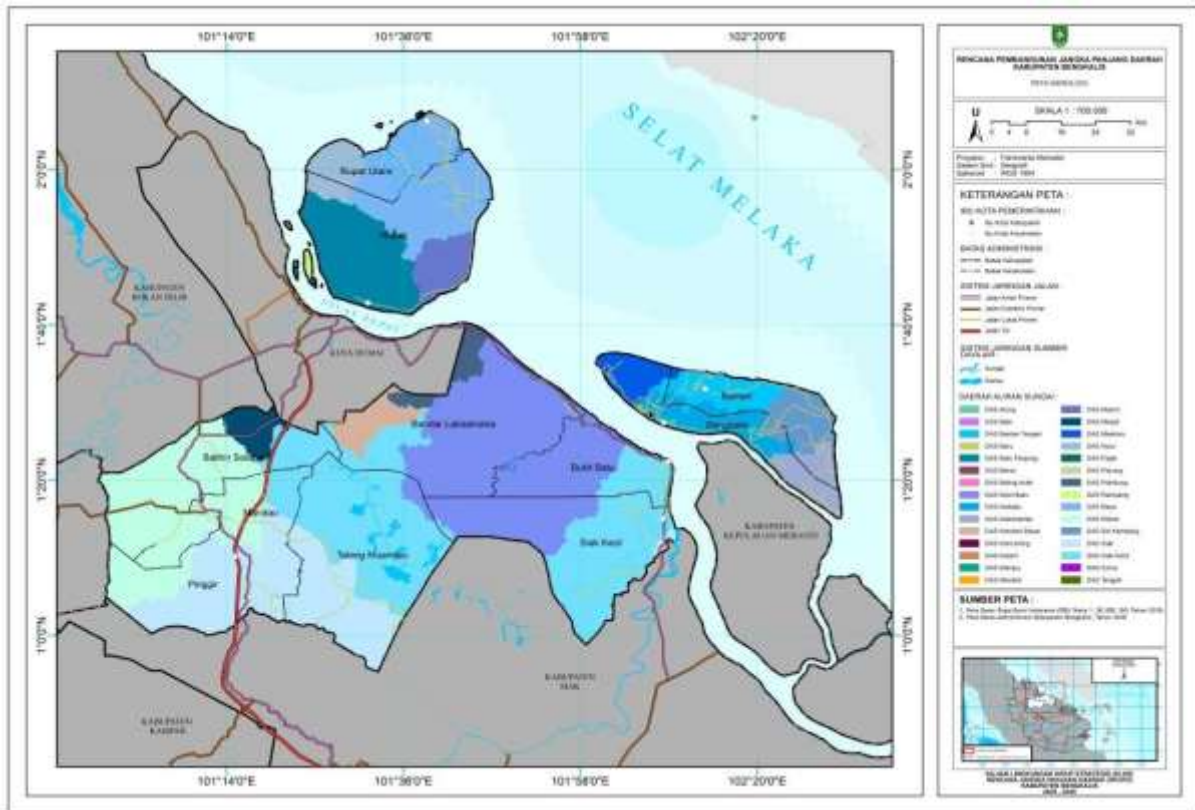
Gambar II-3 Peta Geologi Kabupaten Bengkalis

Hidrologi

Kabupaten Bengkalis memiliki dua belas aliran sungai yang berada di Kecamatan Rukat, Kecamatan Bantan dan Kecamatan Bukit Batu. Kedua belas aliran sungai tersebut adalah: Sungai Siak Kecil, Sungai Pakning, Sungai Bukit Batu, Sungai Senebak, Sungai Raya, Sungai Rempang, Sungai Nyiur, Sungai Sair, Sungai Penonton, Sungai Jangkang, Sungai Bantan Tengah dan Sungai Kembung Luar. Diantara sungai yang ada di Kabupaten Bengkalis yang sangat penting peranannya sebagai prasarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk adalah aliran Sungai Siak dan Siak Kecil dengan panjang \pm 90 Km.

Beberapa sungai yang mencirikan kondisi hidrologi daerah rawa diantaranya adalah Sungai Siak Kecil, Sungai Pakning, Sungai Bukit Batu, Sungai Penebak, Sungai Raya, Sungai Rempang, Sungai Nyiur, Sungai Suir, Sungai Penonton, Sungai Jangkang dan Sungai Bantan Tengah. Sungai-sungai tersebut dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Sehingga intrusi air laut tersebut berpotensi menyebabkan kualitas air tanah di wilayah ini bersifat payau/asin dengan salinitas sedang sampai tinggi.

Keadaan drainase wilayah sebagian besar dicirikan oleh adanya tanah gambut yang tersebar di Kecamatan Bukit Batu, Mandau dan Rukat. Pada beberapa bagian wilayah banyak yang masih mengalami genangan, terjadi di Kecamatan Rukat dan Mandau. Keberadaan lahan gambut yang mendominasi wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan kantong-kantong penyimpanan air yang sangat besar. Pada gambar berikut dapat dilihat Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Bengkalis.



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Bengkulu Tahun 2025-2045

Gambar II-4 Peta Hidrologi Kabupaten Bengkulu

Klimatologi

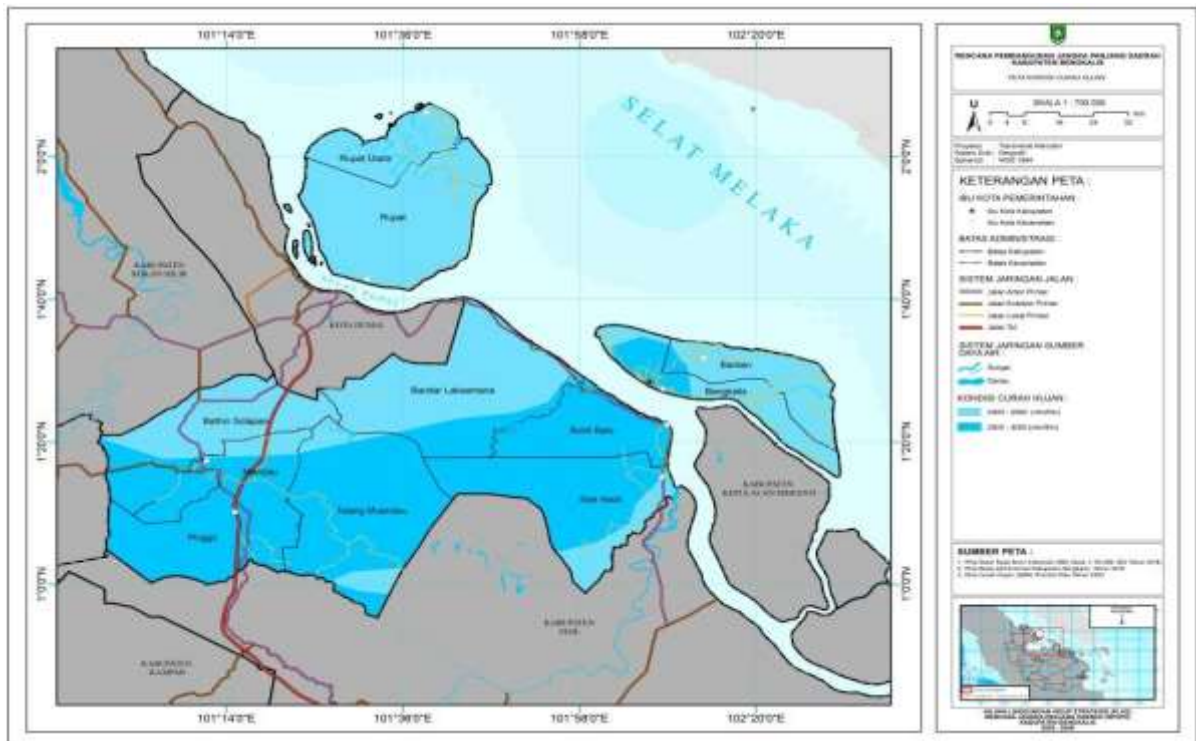
Wilayah Kabupaten Bengkulu secara umum memiliki iklim Tropis yang sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut dan temperatur berkisar 26oC-34oC serta kelembaban rata-rata berkisar antara 75% - 85%. Musim hujan biasa terjadi pada bulan Agustus- Desember. Sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan januari hingga bulan juli. Lebih rinci kondisi iklim Kabupaten Bengkulu disajikan pada tabel berikut:

Tabel II-3 Kondisi Curah Hujan, Kelembaban dan Suhu Kabupaten Bengkulu 2024

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (Hari)	Suhu			Kelembaban		
			Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks
Januari	61	8	22,8	26,5	32,4	62	84	97
Februari	207	16	23,2	26,5	32,4	66	75	98
Maret	190	10	23,3	27,4	33,3	60	82	98
April	200	20	23,5	26,2	33,4	66	83	98
Mei	239	10	23,8	27,7	33,8	62	78	97
Juni	159	17	22,9	26,2	31,8	67	82	97
Juli	123	9	23,3	27,2	33,2	64	85	98
Agustus	180	21	23,2	26,7	31,8	69	79	97
September	108	20	23,3	26,6	32,4	64	82	97
Oktober	360	22	22,4	26,5	32,4	66	83	98
November	175	24	23,7	26,5	30,5	68	80	97
Desember	252	20	23,1	26,5	31,5	67	82	98

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (Hari)	Min	Suhu Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks
Rata-rata	187,83	16,42	23,2	26,71	32,4	65,08	81,21	97,46
Maksimal	239	24	23,8	27,7	33,8	69	84	98
Minimal	61	8	22,4	26,2	31,5	62	75	97

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2025



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2045

Gambar II-5 Peta Klimatologi Kabupaten Bengkalis

Penggunaan Lahan

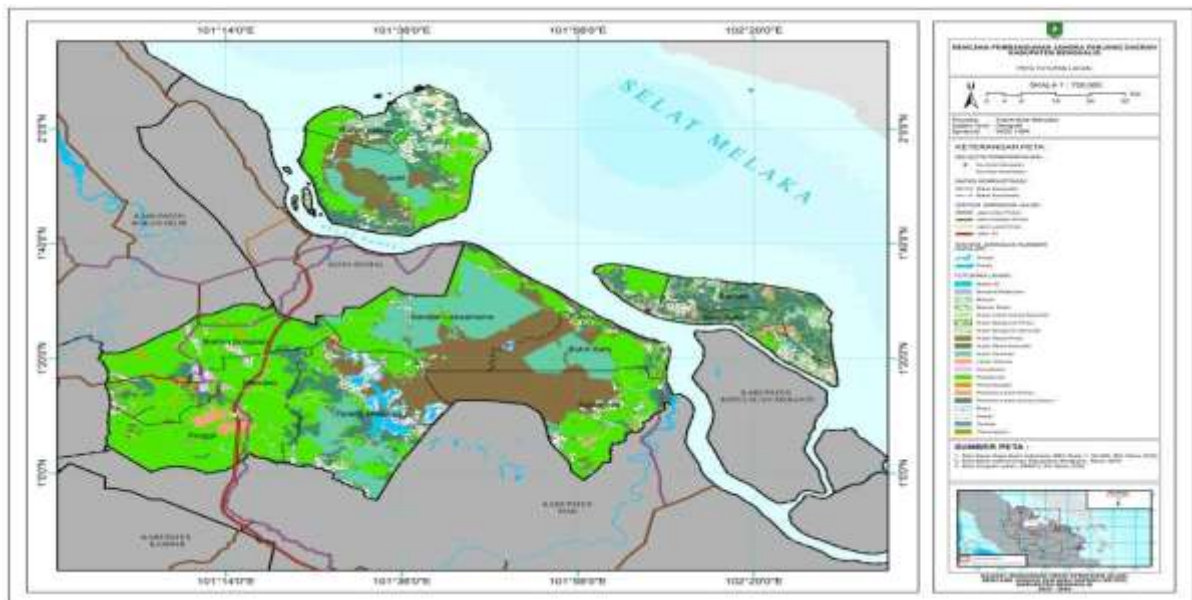
Pola tutupan lahan atau penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Bengkalis dihasilkan dari hasil penafsiran data citra satelit secara manual (digitasi on-screen) menggunakan Landsat 8 OLI & dan Landsat 7 ETM + skala 1:250.000 menggunakan Peta Penutup Lahan Kementerian LHK Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (Dit. IPSDH) tahun 2018.

Tabel II-4 Sebaran Tutupan Lahan Kabupaten Bengkalis

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	397,26	0,05%
2	Hutan mangrove primer	1.936,74	0,22%
3	Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	24.332,01	2,81%
4	Hutan rawa primer	4.157,33	0,48%
5	Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	132.399,51	15,28%
6	Hutan tanaman	111.863,17	12,91%
7	Lahan terbuka	2.272,98	0,26%
8	Perkebunan / Kebun	286.877,08	33,12%

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
9	Permukiman / Lahan terbangun	8.567,53	0,99%
10	Pertambangan	5.609,89	0,65%
11	Pertanian lahan kering	14.876,19	1,72%
12	Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	149.771,37	17,29%
13	Rawa	13.371,44	1,54%
14	Sawah	12.184,14	1,41%
15	Semak belukar	147,48	0,02%
16	Semak belukar rawa	94.504,85	10,91%
17	Tambak	256,63	0,03%
18	Tubuh air	2.692,39	0,31%
Total		866.218,00	100%

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2045



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2045

Gambar II-6 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Bengkalis

2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Karakteristik rawan bencana di Kabupaten Bengkalis menggambarkan jenis-jenis rawan bencana yang berpotensi dan dapat mengancam perkembangan pembangunan daerah ke depan. Mengenali wilayah rawan bencana dan potensi jenis bencana menjadi landasan penting dalam upaya imitagasi bencana di Kabupaten Bengkalis.

Jumlah kejadian bencana pada tahun 2024 menunjukkan jumlah bencana hotspot sebanyak 60, jumlah bencana angin puting beliung sebanyak 1 kejadian dengan 3 rumah yang terdampak. Sedangkan banjir sebanyak 9 kejadian dengan jumlah rumah yang terdampak sebanyak 1.325 rumah. Bencana karhutla sebanyak 46 kejadian dengan luas kebakaran mencapai 145,33 ha. Jumlah abrasi pantai sebanyak 6 kejadian dengan luas abrasi mencapai 1.850 meter. Adapun jumlah kejadian tenggelam sebanyak 1 kejadian

dengan korban jiwa sebanyak 2 orang. Adapun jenis dan wilayah rawan bencana di Kabupaten Bengkalis disajikan pada Tabel II-5.

Tabel II-5 Data Kejadian Bencana di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Hotspot	Angin Puting Beliung		Banjir		Karhutla		Abrasi Pantai / Longsor		Amukan Gajah		Korban Tenggelam Dan Kejadian	
			Kejadian	Jumlah/ Kejadian	Jumlah/ Rumah	Jumlah/ Kejadian	Jumlah/ Rumah	Jumlah/ Kejadian	Luas/ Ha	Jumlah/ Kejadian	Luas/Ha	Jumlah/ Kejadian	Jumlah/ Rumah	Jumlah/ Kejadian
1	Mandau	0					3	7						
2	Pinggir	15					4	17						
3	BathinSolapan	8			2	15	6	22						
4	Talang Muandau	10			1	9	8	43						
5	Bukit Batu	3					2	2,5					1	2
6	Siak Kecil	5			4	1257	3	4,5						
7	Bandar Laksamana	10			1	30	6	32,03	1	20				
8	Rupat	5			1	14	7	9,5	1	350				
9	Rupat Utara	0					1	2	1	1000				
10	Bengkalis	1	1	3			2	2	1	40				
11	Bantan	3					4	3,8	2	440				
	Jumlah	60	1	3	9	1325	46	145,33	6	1850	0	0	1	2

Sumber : BPBD Kabupaten Bengkalis, 2025

1) Rawan abrasi

Abrasi pantai merupakan pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang dan dipengaruhi oleh kondisi fisik pantai dan lingkungannya yang disebabkan oleh rusaknya ekosistem mangrove/tumbuhan pantai dan karakteristik daratan pantai umumnya berupa gambut dan aluvial yang sangat rentan terhadap penggerusan oleh energi gelombang laut, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan bencana yang berdampak pada kehidupan masyarakat di lokasi tersebut.

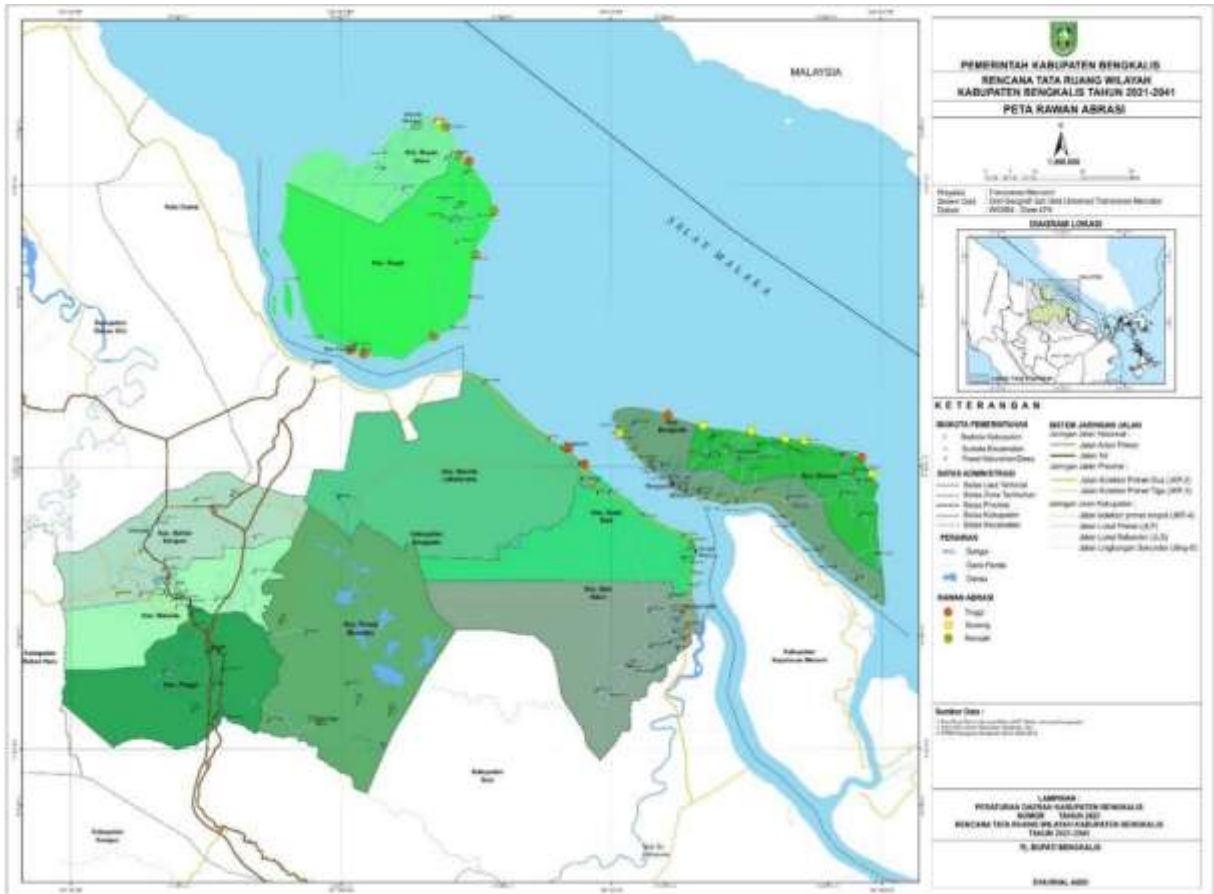
Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Bengkalis tahun 2025, tercatat enam kejadian bencana abrasi di Kabupaten Bengkalis selama tahun 2024 dengan total luas terdampak mencapai 1.850 hektar. Kecamatan yang mengalami abrasi tertinggi adalah Kecamatan Rupert Utara yang terdampak seluas 1.000 hektar. Adapun Kawasan yang memiliki potensi rawan abrasi di Kabupaten Bengkalis berada pada pesisir bagian utara Pulau Rupert yang berhadapan dengan Selat Malaka, Kecamatan Bukit Batu yang berhadapan langsung dengan Selat Bengkalis/Tanjung Jati dan bagian utara Pulau Bengkalis yang berhadapan dengan Selat Bengkalis/Tanjung Jati serta bagian timur Pulau Bengkalis yang berhadapan dengan Selat Malaka.

Tabel II-6 Jumlah Kejadian Bencana Abrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Kejadian	Luas/Ha
1	Mandau	-	-
2	Pinggir	-	-
3	Bathin Solapan	-	-
4	Talang Muandau	-	-
5	Bukit Batu	-	-
6	Siak Kecil	-	-
7	Bandar Laksamana	1	20
8	Rupert	1	350
9	Rupert Utara	1	1000
10	Bengkalis	1	40
11	Bantan	2	440
	Jumlah	6	1850

Sumber : BPBD Kabupaten Bengkalis, 2025

Berdasarkan tingkat kerusakan pantai akibat abrasi pantai di Kabupaten Bengkalis dapat di klasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu pantai terabrasi dengan tingkat kerusakan tinggi, sedang, dan rendah, sebagaimana terdapat pada gambar berikut.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Gambar II-7 Peta Wilayah Rawan Abrasi Kabupaten Bengkulu

Rawan Banjir dan Gelombang Tinggi

Kawasan yang memiliki potensi terjadinya bencana banjir di Kabupaten Bengkulu terjadi di wilayah pesisir pulau baik di Pulau Sumatera seperti di Kecamatan Bukit Batu maupun di Pulau Bengkulu dan Rupat. Intensitas hujan yang tinggi di musim-musim tertentu menaikkan air di sepanjang sungai-sungai. Selain itu, bencana banjir juga dapat disebabkan oleh naiknya air laut pada saat terjadinya pasang sebagai akibat rendahnya permukaan tanah di wilayah pesisir yang dapat menggenangi rumah-rumah penduduk dan jalan raya. Kawasan kerawanan banjir di Kabupaten Bengkulu dapat dilihat pada Gambar II.8.

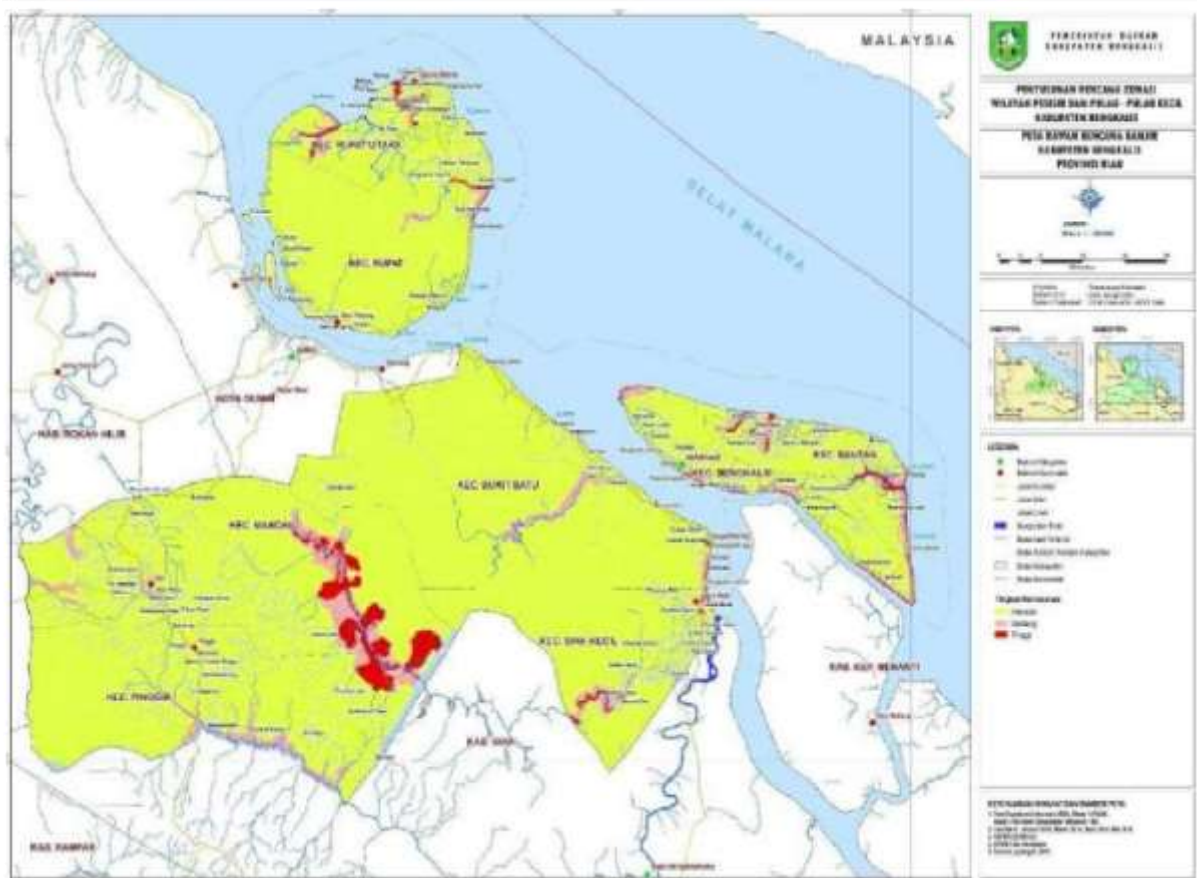
Tabel II-7 Rekapitulasi Penanganan Bencana Banjir Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penanganan	Jumlah/rumah
Mandau		
Pinggir		
Bathin Solapan	2	15
Talang Muandau	1	9
Bukit Batu		
Siak Kecil	4	1.257

Kecamatan	Jumlah Penanganan	Jumlah/rumah
Bandar Laksamana	1	30
Rupat	1	14
Rupat Utara		
Bengkalis		
Bantan		
Total	9	1.325

Sumber : BPBD Kabupaten Bengkalis, 2025

Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Bengkalis tahun 2025, tercatat sembilan upaya penanganan bencana banjir yang tersebar di beberapa kecamatan selama tahun 2024. Kecamatan yang menerima penanganan di antaranya Bathin Solapan dengan dua penanganan yang mencakup 15 rumah, Talang Muandau dengan satu penanganan yang berdampak pada 9 rumah, Siak Kecil dengan empat penanganan yang 1.257 rumah, Bandar Laksamana dengan satu penanganan yang mencakup 30 rumah, serta Rupat dengan satu penanganan yang berdampak pada 14 rumah. Secara keseluruhan, total rumah yang terdampak dan telah mendapatkan penanganan mencapai 1.325 unit.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

Gambar II-8 Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Bengkalis

Selain banjir, terdapat juga potensi gelombang tinggi di Kabupaten Bengkalis. Kawasan yang memiliki potensi rawan gelombang tinggi berlokasi di Desa Tanjung Medang dan Selat Baru sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu kegiatan masyarakat Bengkalis terutama kegiatan pariwisata yang ada di lokasi tersebut. Sehingga pada kawasan tersebut dibutuhkan rambu-rambu yang dapat memberitahukan adanya bahaya gelombang tinggi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati ketika melakukan kegiatan di lokasi tersebut.

Rawan Kebakaran Lahan dan Hutan

Kawasan yang memiliki potensi terjadinya bencana kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Bengkalis secara umum terjadi di wilayah daratan Pulau Sumatera. Kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Bengkalis biasanya diawali dengan pembukaan lahan oleh pemilik lahan pada musim kering dengan intensitas hujan rendah dan frekuensi hujan yang jarang. Pada tahun 2020, jumlah kejadian kebakaran mencapai 100 kejadian dengan total luas kebakaran mencapai 404,4 hektar. Namun, pada tahun 2021, angka kejadian kebakaran kembali meningkat menjadi 132 kasus dengan luas area terbakar sebesar 435,8 hektar. Tahun 2022 mencatat penurunan jumlah kebakaran menjadi 76 kejadian dengan luas terdampak sebesar 159,05 hektar. Kemudian, pada tahun 2023, terjadi lonjakan jumlah kebakaran menjadi 106 kejadian dengan luas lahan yang terbakar mencapai 370,62 hektar. Pada tahun 2024, angka kejadian kebakaran turun menjadi 46 kejadian dengan luas area yang terdampak mencapai 145,33 hektar.

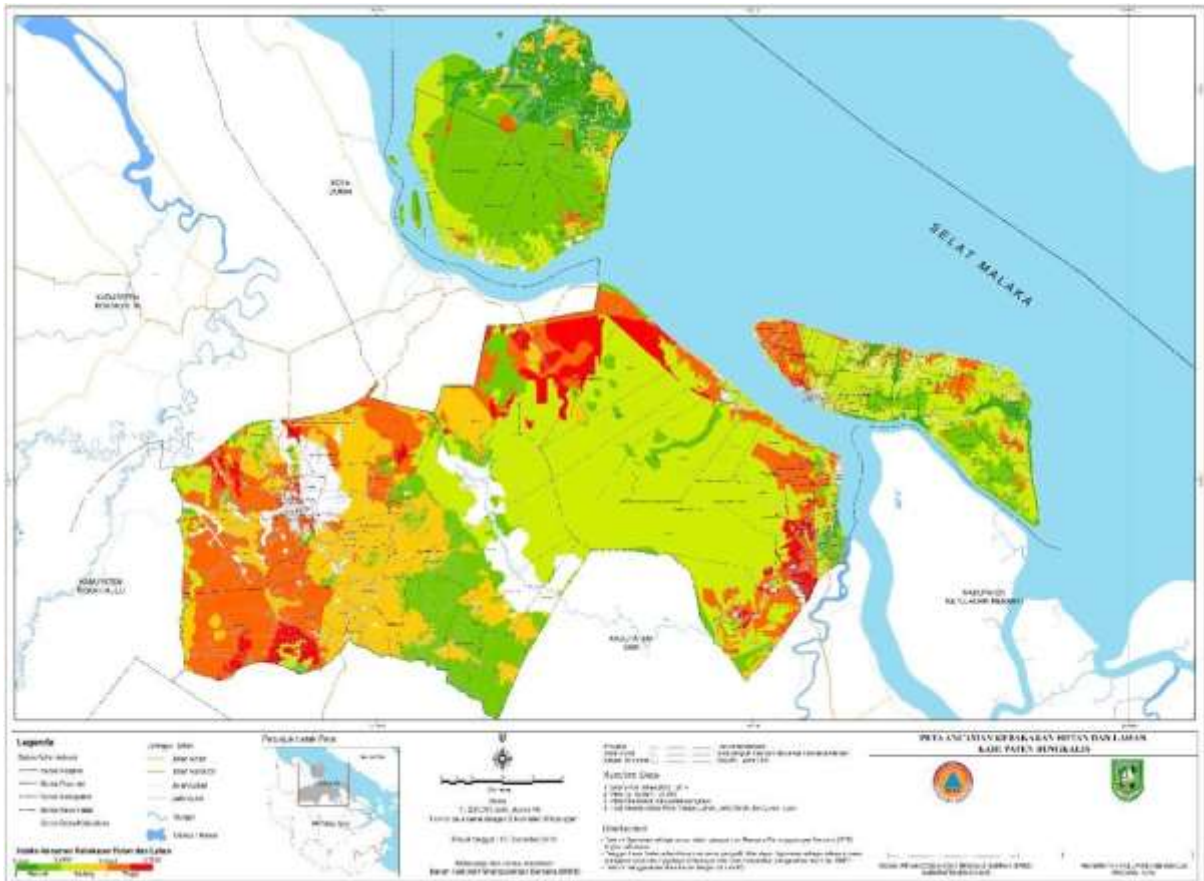
Dalam menanggapi kejadian kebakaran hutan dan lahan ini, pemerintah daerah telah mengencarkan kegiatan sosialisasi pencegahan pembakaran lahan pada masyarakat dan perusahaan. Pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan pengawasan dan memberkan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar aturan pembukaan lahan dengan dibakar. Diharapkan ke depannya masyarakat dan perusahaan akan semakin paham akan bahaya pembakaran lahan sehingga akan terjadi pengurangan kejadian kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Bengkalis.

Tabel II-8 Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	2020		2021		2022		2023		2024	
		Kejadian	Luas/ Ha	Kejadian	Luas/ Ha	Kejadian	Luas/ Ha	Kejadian	Luas/ Ha	Kejadian	Luas/ Ha
1	Bengkalis	5	21	13	132,95	8	9	4	9,75	2	2
2	Bantan	9	8,4	13	62,3	7	14,3	6	69,70	4	3,8
3	Bukit Batu	1	0,5	1	2	1	11	5	4,03	2	2,5
4	Bandar Laksamana	8	13	9	30	0	0	9	62,50	6	32,03
5	Siak Kecil	11	14	2	2	3	7	4	5,00	3	4,5
6	Rupat	18	233	12	40	5	36	11	87,20	7	9,5
7	Rupat Utara	9	27	7	3,8	1	0,5	1	0,50	1	2
8	Mandau	5	12	16	23	18	18	24	19,60	3	7
9	Bathin Solapan	23	34	39	69,25	23	29,8	23	40,65	6	22
10	Pinggir	4	14,5	10	30,5	4	16,5	9	38,20	4	17
11	Talang Muandau	7	27	10	40	6	17	10	33,50	8	43
Total		100	404,4	132	435,8	76	159,05	106	370,62	46	145,33

Sumber: BPBD Kabupaten Bengkalis, 2025

Kecamatan Talang Muandau merupakan Kecamatan dengan kejadian kebakaran hutan terbanyak yaitu yaitu 8 kejadian dengan luas terdampak mencapai 43 Ha pada tahun 2024. Berdasarkan peta kerawanan kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Bengkalis yang ditunjukkan oleh Indeks ancaman kebakaran lahan dan hutan, menunjukkan wilayah dengan potensi kebakaran paling tinggi ditandai dengan warna merah dan oranye. Wilayah-wilayah ini memiliki risiko tinggi hingga sangat tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan, terutama karena kondisi lahan yang didominasi oleh lahan gambut dan vegetasi yang mudah terbakar. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus agar penanganan dan pencegahan kebakaran lahan dan hutan pada wilayah ini lebih diprioritaskan. Lebih lanjut dapat diamati pada gambar berikut.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Gambar II-9 Peta Rawan Kebakaran Lahan dan Hutan di Kabupaten Bengkalis

Dari beberapa kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Bengkalis, dapat dikatakan sudah semuanya ditangani dengan baik. Dengan adanya kerja sama dari berbagai pihak, penanganan bencana di Kabupaten Bengkalis dapat dilakukan dengan maksimal. Berikut ini adalah capaian penanganan bencana di Kabupaten Bengkalis tahun 2024.

Tabel II-9 Jumlah Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penanganan	Luas Area Penanganan (Ha)
1	Mandau	3	7
2	Pinggir	4	17
3	BathinSolapan	6	22
4	Talang Muandau	8	43
5	Bukit Batu	2	2,5
6	Siak Kecil	3	4,5
7	Bandar Laksamana	6	32,03
8	Rupat	7	9,5
9	Rupat Utara	1	2
10	Bengkalis	2	2
11	Bantan	4	3,8
Total		46	145,33

Sumber: BPBD Kabupaten Bengkalis, 2025

2.1.1.3 Kondisi Demografi

1) Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bengkalis tahun 2024 mencapai 79 jiwa per Km². Kabupaten Bengkalis termasuk kategori penduduk sangat jarang di Provinsi Riau. Namun demikian kepadatan penduduk di Kabupaten Bengkalis tiap tahun semakin bertambah dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan penambahan jumlah penduduk akibat berkembangnya kegiatan ekonomi lokal dan regional di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Tabel II-10 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah (Jiwa)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Bengkalis	462,24	93.316	13,89	202
2	Bantan	442,93	46.621	6,94	105
3	Bukit Batu	526,62	23.322	3,47	44
4	Mandau	372,25	170.071	25,32	457
5	Rupat	1.136,31	41.304	6,15	36
6	Rupat Utara	378,68	17.256	2,57	46
7	Siak Kecil	957,95	28.690	4,27	30
8	Pinggir	811,46	79.185	11,79	98
9	Bandar Laksamana	1.237,70	19.425	2,89	16
10	Talang Muandau	1.244,71	33.889	5,05	27
11	Bathin Solapan	855,62	118.646	17,66	139
Kabupaten Bengkalis		842.647	671.725	100	79

Sumber: Disdukcapil Kab. Bengkalis, 2025

Berdasarkan Tabel II.10 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang paling padat terdapat pada Kecamatan Mandau yang merupakan pusat kegiatan perekonomian dan industri di Kabupaten Bengkalis, yaitu sebanyak 457 jiwa/km², dengan jumlah penduduk sebanyak 170.071 jiwa atau sebesar 25,32% dari total penduduk pada Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di

Kecamatan Rupal Utara yaitu sebanyak 17.256 Jiwa atau 2,57% dari total penduduk Kabupaten Bengkalis. Kepadatan penduduk per wilayah akan memberikan pengaruh terhadap permintaan lahan baik untuk penggunaan perumahan maupun untuk sektor pertanian dan industri sehingga akan memicu peningkatan harga lahan dan keterbatasan lahan untuk penyediaan sarana dan prasarana pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Kondisi penduduk yang padat juga akan memicu terjadinya persoalan sosial terutama menyangkut kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan dan antar wilayah, termasuk permasalahan kriminalitas dan persoalan lingkungan hidup.

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin laki-laki di Kabupaten Bengkalis sebesar 343.463 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 328.262 jiwa. Penduduk berdasarkan sex ratio di Kabupaten Bengkalis terlihat masih didominasi oleh penduduk laki-laki, dengan perbandingan 105 dari 100 penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki pada semua Kecamatan lebih banyak dari penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin tertinggi berada di Kecamatan Bandar Laksamana yaitu sebanyak 107 laki-laki per 100 orang wanita. Secara rinci perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel II.11 berikut.

Tabel II-11 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah			Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Bengkalis	47.563	45.753	93.316	104
2	Bantan	23.830	22.791	46.621	105
3	Bukit Batu	11.871	11.451	23.322	104
4	Mandau	86.589	83.482	170.071	104
5	Rupal	21.209	20.095	41.304	106
6	Rupal Utara	8.803	8.453	17.256	104
7	Siak Kecil	14.652	14.038	28.690	104
8	Pinggir	40.511	38.674	79.185	105
9	Bandar Laksamana	10.029	9.396	19.425	107
10	Talang Muandau	17.470	16.419	33.889	106
11	Bathin Solapan	60.936	57.710	118.646	106
Kab. Bengkalis		343.463	328.262	671.725	105

Sumber: Disdukcapil Kab. Bengkalis, 2025

Pertumbuhan Penduduk

Pertambahan penduduk di Kabupaten Bengkalis mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2020-2024. Pada tahun 2020 mencapai 7,12%, turun pada tahun 2021 menjadi 2,15%, kembali naik pada tahun 2022 menjadi 6,69%, namun turun menjadi 1,88% pada tahun 2023 dan sedikit naik pada tahun 2024 menjadi 1,95%. Berikut disajikan perkembangan pertumbuhan penduduk Kabupaten Bengkalis tahun 2020-2024 yaitu:



Sumber: Disdukcapil Kab. Bengkulu, 2025

Gambar II-10 Perkembangan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bengkulu Tahun 2020-2024

Pertumbuhan penduduk pada disebagian besar Kecamatan di Kabupaten Bengkulu tergolong rendah. Laju pertumbuhan penduduk terbesar berada di Kecamatan Bathin Solapan yaitu sebesar 1,33% didorong oleh faktor migrasi, sedangkan penambahan dari faktor kelahiran relatif kecil. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bengkulu menurut Kecamatan disajikan pada gambar dibawah ini, yaitu:



Sumber: Disdukcapil Kab. Bengkulu, 2025

Gambar II-11 Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2024

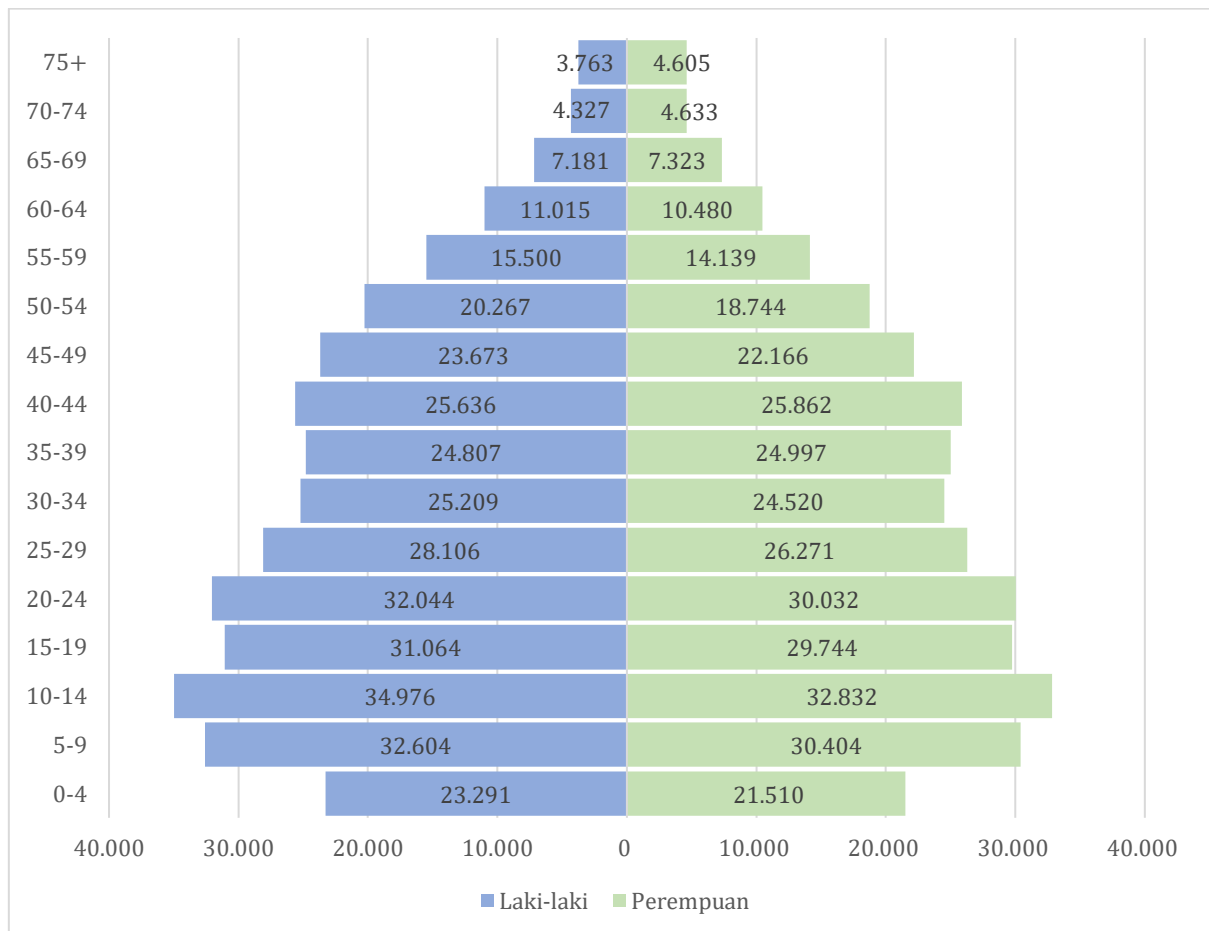
Tingginya pertumbuhan penduduk Kabupaten Bengkulu pada beberapa Kecamatan, dikarenakan tingginya migrasi dari luar Kabupaten yang datang dengan berbagai alasan dan tujuan, antara lain migrasi karena pendidikan hingga mencari pekerjaan. Oleh karena itu, upaya pengendalian jumlah penduduk migrasi masuk perlu menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu dimasa mendatang.

Laju pertumbuhan penduduk tersebut memberikan konsekuensi dan relevansi terhadap berbagai aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik yang memberikan dampak

positif dan negatif bagi daerah. Dampak positif dari penambahan penduduk yang tinggi adalah penambahan angkatan kerja, memperluas potensi pasar, pengembangan potensi sumber daya daerah, menarik investasi baru, dan perkembangan wilayah/kawasan sehingga memungkinkan terjadi pemekaran wilayah baru. Sedangkan dampak negatif penambahan penduduk adalah peningkatan tekanan terhadap kebutuhan lahan, berpotensi mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin dan pengangguran, mendorong degradasi lingkungan hidup dan berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik lainnya jika tidak diantisipasi dengan program penanganan yang tepat dan dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Piramida penduduk Kabupaten Bengkalis termasuk ke dalam kategori piramida penduduk expansive, dimana penduduk usia muda berada pada jumlah paling banyak, sedangkan penduduk tua jumlahnya sangat sedikit. Piramida penduduk ini juga mengindikasikan bahwa Kabupaten Bengkalis memiliki tingkat kelahiran lebih tinggi dibanding tingkat kematian. Penduduk Kabupaten Bengkalis banyak berada pada usia produktif (15-64) yaitu berjumlah 464.276 jiwa pada tahun 2024. Sedangkan penduduk yang berada pada kelompok usia belum produktif (0-14 tahun) sebanyak 175.617 jiwa dan penduduk pada usia tidak produktif (>64 tahun) berjumlah 31.832 jiwa.



Sumber: Disdukcapil Kab. Bengkalis, 2025

Gambar II-12 Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Bengkulu Tahun 2024

Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Penduduk Kabupaten Bengkulu berumur 15 Tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin di kabupaten Bengkulu tahun 2024 didominasi oleh penduduk yang bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai sebanyak 119.101 jiwa dan penduduk yang berusaha sendiri sebanyak 53.153 jiwa.

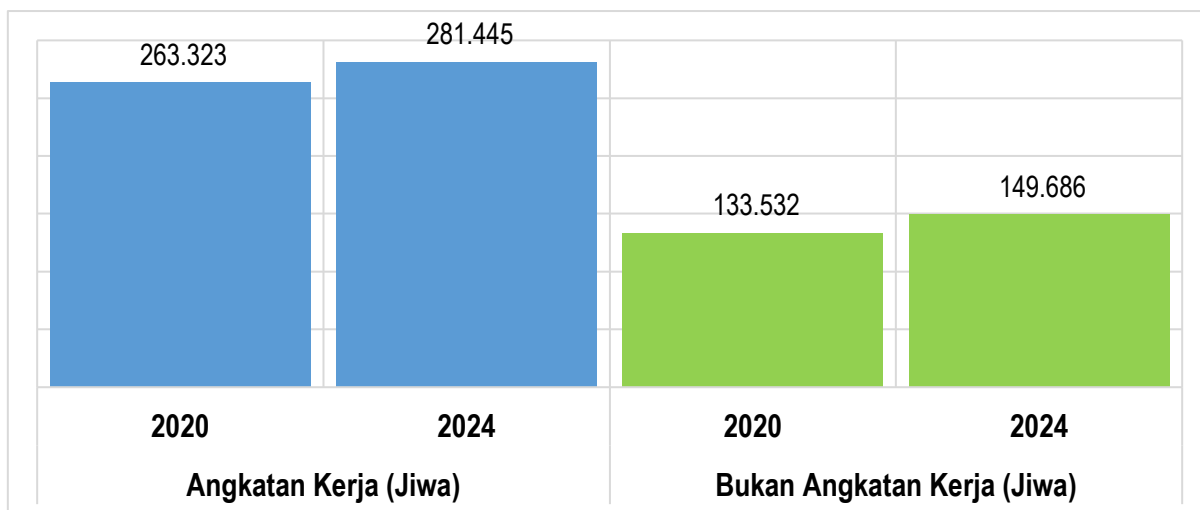
Tabel II-12 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Tahun 2024

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	31.731	21.422	53.153
Berusaha dibantu buruh tidak tetap / buruh tidak dibayar	29.776	7.340	37.116
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	8.140	1.193	9.333
Buruh/Karyawan/Pegawai	80.046	39.055	119.101
Pekerja bebas	18.452	2.171	20.623
Pekerja keluarga /takdibayar	8.854	16.704	25.558
Jumlah	176.999	87.885	264.884

Sumber: BPS Bengkulu Dalam Angka, 2025

2.1.1.4 Ketenagakerjaan

Struktur ketenagakerjaan Kabupaten Bengkulu didominasi oleh angkatan kerja sebanyak 263.323 jiwa pada tahun 2020, meningkat menjadi 281.445 jiwa pada tahun 2024. Adapun jumlah angkatan kerja pada tahun 2020 sebanyak 133.532 jiwa pada tahun 2019, meningkat menjadi 149.686 jiwa pada tahun 2024. Berikut disajikan data struktur ketenagakerjaan Kabupaten Bengkulu Tahun 2020 dan 2024, yaitu:



Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu, 2025

Gambar II-13 Struktur Ketenagakerjaan Kabupaten Bengkulu Tahun 2020 dan 2024

2.1.1.5 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah khususnya wilayah strategis di Kabupaten Bengkalis berpedoman kepada kajian Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Bengkalis tahun 2022 - 2042.

1) Pengembangan Wilayah Strategis Duri

Kawasan strategis Duri berfungsi sebagai pusat niaga skala regional, pusat pemerintahan Kabupaten Bengkalis, khususnya untuk instansi yang melayani kegiatan perkotaan, kawasan permukiman perkotaan, kawasan industri berbasis pertanian/perkebunan dan kawasan pertambangan minyak bumi. Dimana pengembangan kawasan strategis ini perlu diintegrasikan dengan pengembangan kawasan perkotaan Bengkalis, Buruk Bakul dan Sei Pakning dalam satu koridor pengembangan kegiatan ekonomi.

Pengembangan wilayah strategis Sei Pakning-Buruk Bakul dan Bengkalis

Kawasan strategis ini ditetapkan fungsinya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Kegiatan ekonomi yang potensial adalah kegiatan sentra perniagaan Asean (perdagangan dan jasa), kawasan permukiman perkotaan, pemerintahan kabupaten, pusat pendidikan, pusat budaya melayu, kawasan Industri dan kawasan pariwisata yang didukung oleh pelayanan pelabuhan yang memadai.

Pengembangan wilayah strategis Tanjung Medang (PulauRupat)

Pengembangan kawasan strategis Tanjung Medang difungsikan sebagai kawasan pariwisata (Pantai Tanjung Medang), permukiman perkotaan dan sentra perikanan yang dikembangkan secara terpadu dengan pengembangan kawasan pertanian dengan pola Kota Terpadu Mandiri. Namun, upaya pengembangan kawasan strategis ini perlu memperhatikan upaya pelestarian lingkungan, khususnya pengamanan dan pelestarian kawasan hutan bakau (mangrove).

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

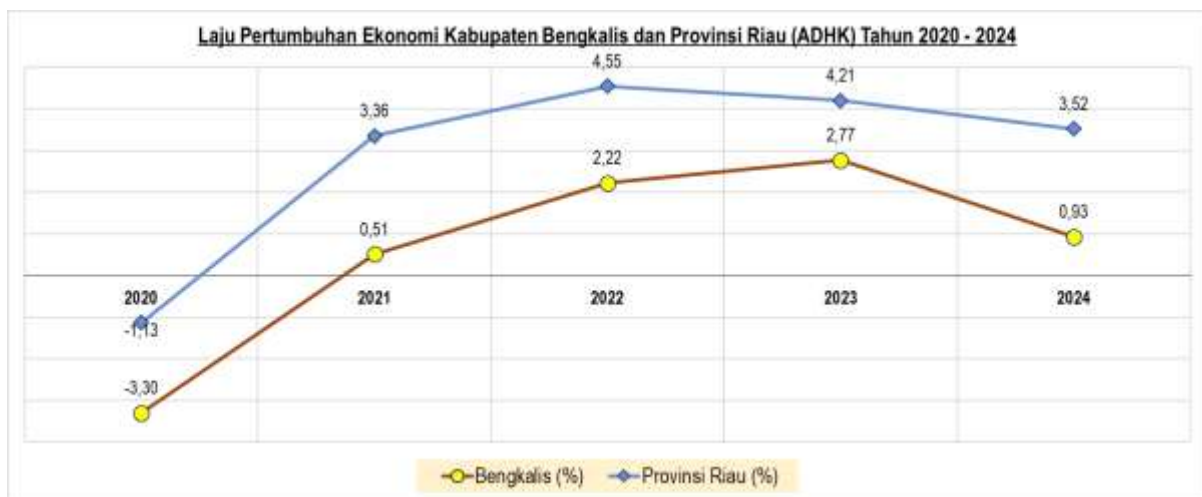
Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari 3 fokus yaitu (i) fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (ii) fokus kesejahteraan sosial dan (iii) fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tinjauan dan analisis terhadap fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi menngambarkan kondisi perkembangan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkalis selama periode 5 tahun terkahir. Indikator-indikator yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi daerah adalah perkembangan produksi daerah, laju pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektor dalam perekonomian daerah, laju inflasi kumulatif, PDRB per kapita, indeks gini dan kemiskinan. Capaian-capaian indikator tersebut mengindikasikan perkembangan perekonomian daerah yang berdampak pada pencapaian kesejahteraan masyarakat di daerah.

2.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran kondisi perekonomian daerah dari waktu ke waktu yang diukur dari tahun 2020-2024. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengukur tingkat dinamika perkembangan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dihitung dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan tahun 2010. PDRB Kabupaten Bengkalis adalah kemampuan produksi barang dan jasa pada seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis sebagai ukuran nilai tambah dari aktivitas ekonomi daerah. Berdasarkan data yang dikumpulkan, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis selama tahun 2020-2023 mengalami perbaikan, yang ditunjukkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi selama periode tersebut, namun pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis turun menjadi 0,93% dari 2,77% pada tahun 2023.



Sumber: BPS Riau, 2025

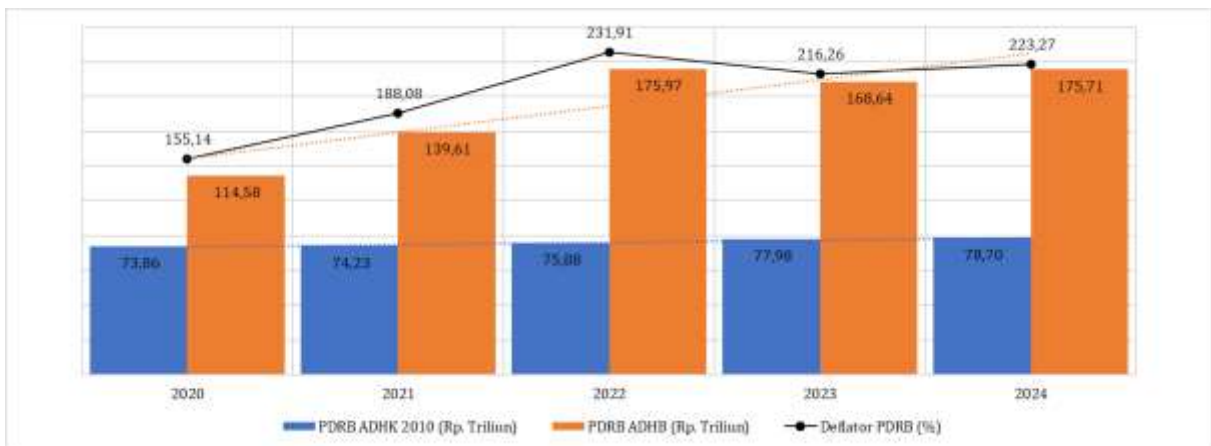
Gambar II-14 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 - 2024

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 mengalami kontraksi secara total dengan pertumbuhan negatif yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, dan kembali membaik pada kurun waktu 2021-2024, hal ini ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis lebih ekspansif dan mencapai pertumbuhan yang positif. Namun, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Kondisi ini disebabkan oleh dominasi sektor pertambangan, khususnya minyak dan gas (migas), yang kinerjanya terus menurun. Penurunan ini berdampak langsung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi secara agregat.

Meskipun sektor migas mengalami penurunan, sektor-sektor di luar migas menunjukkan pertumbuhan positif selama 2018-2023. Pertumbuhan ekonomi tanpa migas yang tetap stabil mencerminkan daya tahan perekonomian Kabupaten Bengkalis terhadap perubahan struktur industri. Meskipun kontribusi sektor-sektor di luar migas masih di bawah 50% terhadap total perekonomian, sektor-sektor ini justru menjadi pendorong utama dalam memperkuat struktur ekonomi Bengkalis, menunjukkan potensi diversifikasi yang lebih berkelanjutan.

2.1.2.1.2 Perkembangan PDRB

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020-2024 menunjukkan adanya peningkatan meskipun masih dalam tren yang relatif lambat. Berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010, tercatat kenaikan dari Rp. 73,86 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp. 78,70 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan proses pemulihan ekonomi pasca kontraksi akibat pandemi Covid-19, meskipun laju pertumbuhannya belum sepenuhnya optimal. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ini adalah menurunnya kinerja sektor migas yang selama ini menjadi sektor dominan dalam struktur ekonomi Kabupaten Bengkalis. Namun, di sisi lain, sektor-sektor di luar migas terus menunjukkan perkembangan positif, berkontribusi terhadap perbaikan kinerja ekonomi secara keseluruhan. Peningkatan nilai PDRB ini juga mengindikasikan adanya upaya diversifikasi ekonomi, yang meskipun bertahap, dapat menjadi pondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan di masa mendatang.



Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2025

Gambar II-15 Nilai PDRB Harga Konstant (2010) dan PDRB Harga Berlaku (Dalam Triliun) Kabupaten Bengkalis tahun 2020-2024

Perkembangan PDRB harga berlaku (ADHB) Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020-2024 menunjukkan tren yang fluktuatif tetapi secara keseluruhan mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, nilai PDRB ADHB tercatat sebesar Rp. 114,58 triliun, kemudian meningkat signifikan menjadi Rp. 139,61 triliun pada 2021 dan kembali mengingkat pada tahun 2022 menjadi Rp. 175,97 triliun. Kenaikan ini mencerminkan proses pemulihan ekonomi pasca-pandemi, di mana aktivitas produksi dan konsumsi mulai meningkat seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi secara nasional dan regional.

Namun, pada tahun 2023, PDRB ADHB mengalami penurunan menjadi Rp. 168,64 triliun, yang mengindikasikan adanya perlambatan ekonomi secara agregat. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penurunan ini adalah masih terbatasnya daya dorong sektor utama, terutama sektor migas yang mengalami tren penurunan produksi. Meskipun demikian, sektor non-migas tetap menunjukkan perkembangan yang relatif baik, sehingga mampu menjadi penopang perekonomian pada sektor non migas. Pada tahun 2024, PDRB

ADHB kembali meningkat menjadi Rp. 175,71 triliun, yang mencerminkan adanya pemulihan dan penguatan kembali aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

Apabila dibandingkan, nilai PDRB harga konstan (ADHK) Kabupaten Bengkalis selama 2020-2024 jauh lebih rendah dibandingkan dengan PDRB ADHB. Hal ini terjadi karena PDRB ADHK mengukur output ekonomi berdasarkan harga tetap tahun dasar 2010, sedangkan PDRB ADHB mencerminkan nilai ekonomi berdasarkan harga aktual tahun berjalan. Gap ini semakin terlihat seiring dengan kenaikan harga barang dan jasa yang tercermin dalam deflator PDRB. Pada tahun 2024, deflator PDRB meningkat menjadi 223,27, menunjukkan bahwa harga barang dan jasa telah meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2010. Kenaikan deflator ini menunjukkan bahwa perkembangan PDRB nominal (ADHB) lebih banyak dipengaruhi oleh inflasi, sedangkan perkembangan PDRB riil (ADHK) masih relatif rendah. Dengan demikian, meskipun PDRB ADHB terus meningkat secara nominal, PDRB riil yang mencerminkan produksi dan daya beli masyarakat tidak mengalami peningkatan yang sama, sehingga perlu adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara PDRB riil dan pengendalian inflasi di Kabupaten Bengkalis.

2.1.2.1.3 Struktur Perekonomian

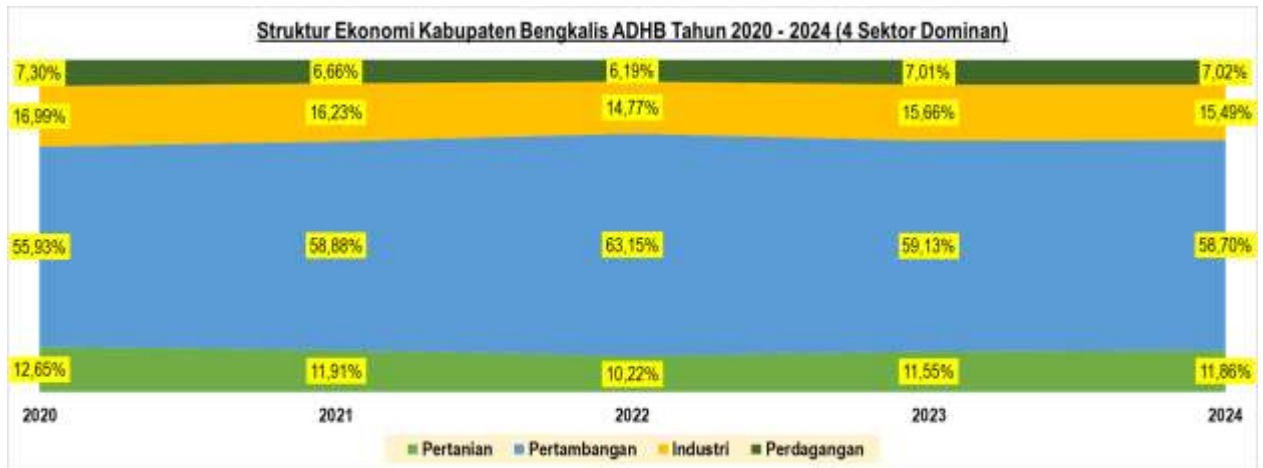
Struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis dalam periode 2020-2024 masih didominasi oleh sektor pertambangan, meskipun kontribusinya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, sektor ini berkontribusi sebesar 55,93% terhadap PDRB ADHB, kemudian meningkat menjadi 63,15% pada tahun 2022, sebelum mengalami penurunan kembali menjadi 58,70% pada tahun 2024. Dominasi ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Bengkalis masih sangat bergantung pada sektor migas, yang rentan terhadap volatilitas harga global serta kebijakan transisi energi yang berpotensi mengurangi kontribusinya dalam jangka panjang.

Sementara itu, sektor pertanian, yang didominasi oleh perkebunan kelapa sawit, memiliki kontribusi yang relatif stabil, berkisar antara 10,22% hingga 12,65% dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa perkebunan sawit dapat menjadi alternatif penopang perekonomian daerah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, sektor industri mengalami sedikit fluktuasi, dengan kontribusi 16,99% pada tahun 2020, turun menjadi 14,77% pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi 15,49% pada tahun 2024. Industri di Kabupaten Bengkalis masih didominasi oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS), yang menunjukkan bahwa aktivitas industri masih berfokus pada pengolahan bahan mentah yang rentan terhadap fluktuasi harga CPO di pasar global serta perubahan kebijakan kelapa sawit baik dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, diversifikasi produk berbasis kelapa sawit dapat menjadi alternatif strategis dalam menopang transformasi ekonomi Kabupaten Bengkalis, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sektor migas dan meningkatkan nilai tambah industri daerah.

Selanjutnya sektor perdagangan berkontribusi sekitar 6-7% terhadap PDRB dalam lima tahun terakhir. Meskipun bukan sektor utama, perdagangan tetap memiliki peran penting dalam mendukung sektor lainnya, terutama dalam pemasaran hasil perkebunan

dan industri. Penguatan infrastruktur logistik, digitalisasi UMKM, serta peningkatan akses pasar dapat menjadi strategi untuk mendorong pertumbuhan sektor ini.

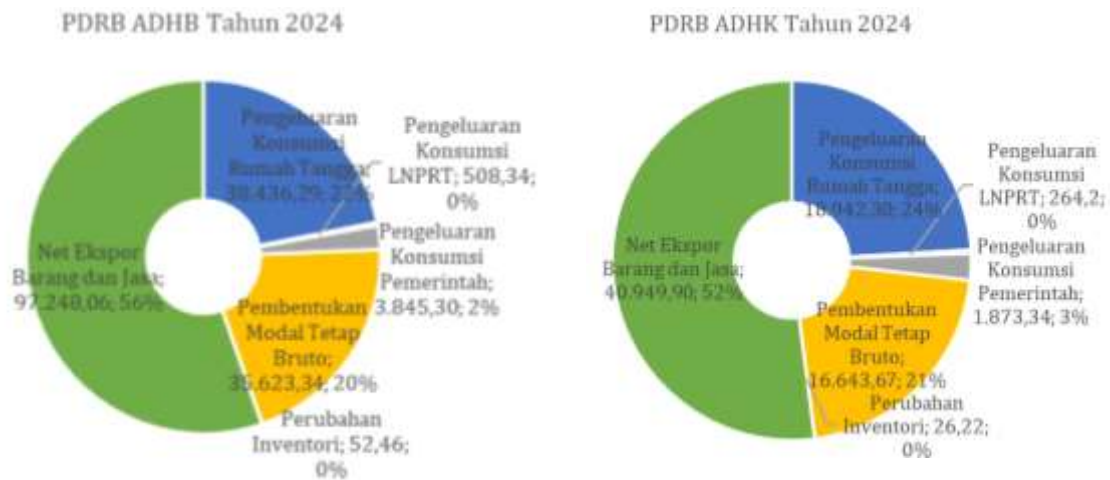


Sumber: BPS Bengkulu, 2025

Gambar II-16 Struktur Perekonomian Kabupaten Bengkulu Tahun 2020-2024

Memperhatikan uraian tentang struktur perekonomian Kabupaten Bengkulu selama periode 2020-2024, maka transformasi struktur ekonomi perlu menjadi pemikiran untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan, khususnya minyak. Oleh sebab itu, kebijakan pembangunan ekonomi harus disusun untuk berfungsi untuk mengatur rumah tangga daerah dalam menciptakan sistem perekonomian yang lebih berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya lokal diluar sektor pertambangan. Upaya integrasi ekonomi sektor hulu (input) dan sektor hilir (output) yang melibatkan pelaku-pelaku ekonomi daerah perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, termasuk pertimbangan dinamika pasar domestik dan pasar internasional.

Perekonomian Kabupaten Bengkulu berdasarkan PDRB pengeluaran didominasi oleh perdagangan luar negeri, dengan kontribusi ekspor dan impor mencapai 56% menurut ADHB dan 52% menurut ADHK. Besarnya kontribusi perdagangan luar negeri terhadap perekonomian Kabupaten Bengkulu berkaitan erat dengan aktivitas sektor pertambangan dan industri besar, terutama minyak dan gas serta minyak nabati. Hal ini mencerminkan bahwa perekonomian Bengkulu bersifat terbuka dan sangat bergantung pada perdagangan luar negeri sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.



Sumber: BPS Riau, 2024

Gambar II-17 Struktur Perekonomian (PDRB) Kabupaten Bengkalis Menurut Pengeluaran Tahun 2024

Selain aktivitas perdagangan, aktivitas pengeluaran yang memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 22% dalam PDRB nominal dan 24% pada PDRB riil (konstan). Kemudian pembentukan modal bruto yang merupakan konsumsi dan investasi sektor dunia usaha dengan kontribusi 20% dalam PDRB nominal dan 21% pada PDRB riil (konstan).

Jika dicermati lebih dalam, maka secara keseluruhan struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis pada sisi lapangan usaha didominasi oleh pertambangan dan sektor industri, yang kemudian menjadi aktivitas ekonomi pada perdagangan luar negeri dan juga pembentukan modal atau investasi dalam sektor tersebut. Maka penopang berikutnya dalam perekonomian Bengkalis adalah konsumsi rumah tangga. Oleh sebab itu, jaminan terhadap daya beli masyarakat perlu menjadi perhatian untuk memperhatikan struktur ekonomi yang kuat, dengan mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi produksi pada tingkat masyarakat dan menjadi masyarakat tetap memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Peredaran jumlah uang yang beredar dalam perekonomian yang distribusi sampai kepada sumber rumah tangga menjadi penting untuk menjaga dinamika perekonomian Bengkalis di masa mendatang.

2.1.2.1.4 Laju Inflasi

Kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum menjadi fenomena ekonomi yang mengakibatkan terjadinya penurunan nilai riil mata uang. Inflasi merupakan gejala ekonomi yang tidak mungkin dihilangkan secara tuntas, namun perlu dikontrol untuk menjaga stabilitas perekonomian. Pengendalian inflasi bertujuan untuk menciptakan dampak positif sekaligus mencegah dampak negatif terhadap perekonomian, tanpa menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi. Inflasi sering kali terjadi secara tiba-tiba, sehingga pengendalian yang cepat dan efektif diperlukan untuk memitigasi dampaknya. Secara umum, tingkat inflasi di Riau, yang juga terjadi di Kabupaten Bengkalis masih pada tingkat inflasi rendah (dibawah 10%). Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga-harga

barang dan jasa secara umum masih dibawah 10%. Inflasi rendah biasanya masih mudah dikendalikan dan tidak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian.

Tabel II-13 Tingkat Inflasi di Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Riau	2,42	1,54	6,81	2,50	2,50
Tembilahan	3,30	1,09	4,82	1,53	2,45
Pekanbaru	2,24	1,55	7,04	2,50	1,89
Dumai	2,88	1,66	6,46	2,78	2,68
Kampar	na	na	na	na	3,25

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2025

Data inflasi yang digunakan berasal dari Kota Dumai, karena perhitungan inflasi di Provinsi Riau hanya mencakup tiga wilayah, yaitu Kota Pekanbaru, Dumai, dan Tembilahan. Namun, pada tahun 2024, cakupan wilayah perhitungan inflasi diperluas dengan penambahan Kabupaten Kampar.

Penggunaan data inflasi Kota Dumai disebabkan karena secara geografis Kota Dumai berdekatan dengan Kabupaten Bengkalis. Selain itu tingkat inflasi di Kabupaten Bengkalis dan banyak kabupaten kota di Riau pada umumnya banyak dipengaruhi oleh tingkat inflasi di Kota Pekanbaru, yang mana Kota Pekanbaru sebagai sentra distribusi barang dan jasa di Provinsi Riau. Sedikit banyak pergerakan harga di Kota Pekanbaru akan berpengaruh langsung terhadap harga-harga barang dan jasa di Kabupaten Bengkalis. Secara umum inflasi Provinsi Riau berdasarkan data BPS cenderung fluktuatif dari tahun 2020-2024. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022, namun kondisi ini masih terkendali.

2.1.2.1.5 PDRB Perkapita

PDRB perkapita penduduk Kabupaten Bengkalis merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk Kabupaten Bengkalis dari keseluruhan perekonomian. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan pada suatu negara atau daerah. Dengan demikian, semakin besar pendapatan per kapita penduduk, maka semakin makmur penduduk di negara atau daerah tersebut.

Tabel II-14 PDRB per Kapita Penduduk Kabupaten Bengkalis tahun 2020 – 2024 (Juta Rupiah)

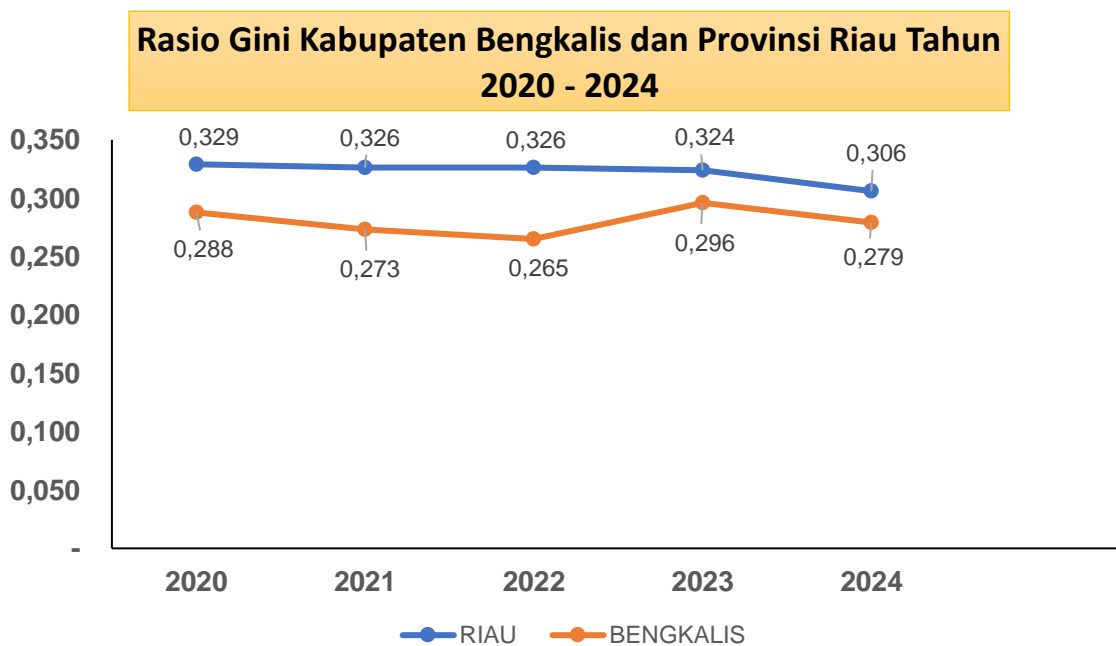
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHK 2010 (Rp. Miliar)	73.856,11	74.229,92	75.878,58	77.977,09	78.699,63
PDRB ADHB (Rp. Miliar)	115.882,67	139.613,49	176.013,38	168.635,85	175.713,79
Jumlah Penduduk (Jiwa)*	593.397	606.179	646.715	658.846	671.725
PDRB ADHK 2010 (Rp. Juta/Kapita)	124,46	122,46	117,33	118,35	117,16
PDRB ADHB (Rp. Juta/Kapita)	195,29	230,32	272,17	255,96	261,59

Ket: *Jumlah penduduk menggunakan data Disdukcapil Kab. Bengkalis
Sumber: Disdukcapil dan BPS Bengkalis, 2025

Berdasarkan data PDRB per kapita Kabupaten Bengkalis, terjadi peningkatan PDRB per kapita ADHB dari Rp195,29 juta pada tahun 2020 menjadi Rp261,59 juta pada tahun 2024. Namun, jika dilihat dari PDRB per kapita ADHK 2010, justru terjadi penurunan dari Rp124,46 juta pada tahun 2020 menjadi Rp117,16 juta pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa secara riil, produksi barang dan jasa masih relatif lambat. Gap antara PDRB per kapita ADHB dan ADHK semakin melebar, mengindikasikan bahwa peningkatan ekonomi lebih dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi dibandingkan pertumbuhan output riil. Dengan demikian, perhatian pada pengendalian inflasi menjadi penting dalam perekonomian Bengkalis menjadi penting dimasa mendatang untuk mengelola tekanan harga yang dapat berdampak terhadap perekonomian.

2.1.2.1.6 Perkembangan Indeks Gini Rasio

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama dalam perekonomian. Koefisien Gini dihitung dengan mengukur jarak antara Garis Lorentz yang menunjukkan distribusi pendapatan dengan garis lurus yang menunjukkan distribusi pendapatan ideal atau setara penuh. Secara umum ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Bengkalis lebih merata dibandingkan dengan ketimpangan pendapatan antar penduduk Provinsi Riau. Hal ini terlihat dari angka gini rasio Kabupaten Bengkalis selalu lebih rendah dibandingkan dengan angka gini rasio Provinsi Riau selama periode 2020-2024.



Sumber: BPS Riau, 2025

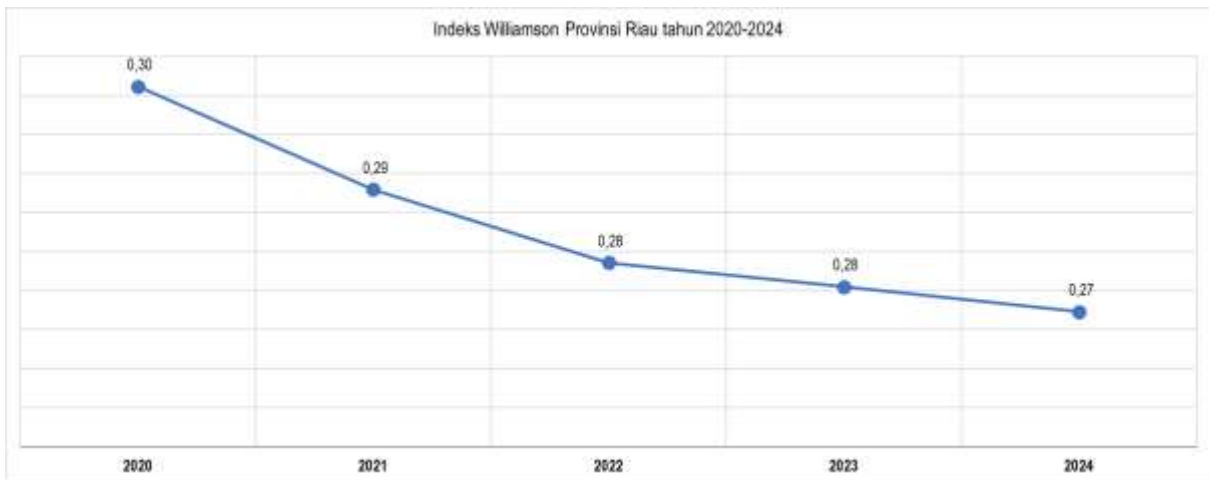
Gambar II-18 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan data di atas, Gini Rasio Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Riau, yang menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Bengkalis relatif lebih merata. Namun, terjadi peningkatan Gini Rasio di Kabupaten Bengkalis dari 0,265 pada tahun 2022 menjadi 0,296 pada tahun 2023 dan sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi 0,279, yang masih masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Sementara itu, Gini Rasio Provinsi Riau berada pada angka 0,324 pada tahun 2023 dan sedikit lebih baik menjadi 0,306 pada tahun 2024, yang termasuk dalam kategori ketimpangan sedang, begitu juga pada Kabupaten Bengkalis yang menjadi lebih baik pada tahun 2024 menjadi 0,279.

Adanya kecenderungan berkurangnya ketimpangan pendapatan di Kabupaten Bengkalis, meskipun masih dalam batas yang relatif terkendali. Hal ini dikarenakan ketimpangan yang tinggi dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang berpotensi memicu berbagai permasalahan sosial. Oleh karena itu, upaya pemerataan pendapatan harus terus menjadi fokus dalam kebijakan pembangunan daerah agar mendorong inklusivitas ekonomi dan pemerataan pembangunan yang nantinya akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.1.7 Indeks Ketimpangan Williamson

Indeks Williamson digunakan untuk mengukur ketimpangan wilayah. Kesenjangan wilayah dan pemerataan pembangunan menjadi permasalahan utama dalam pertumbuhan ekonomi dalam satu wilayah tertentu. Untuk memahami posisi Kabupaten Bengkalis dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Riau dapat dilihat dari perbandingan perkembangan nilai Indeks Williamson antar kabupaten di Provinsi Riau. Pola pembangunan yang tidak merata serta perbedaan karakteristik setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau menjadi masalah yang timbul sehingga menyebabkan pola pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah kabupaten/kota menjadi berbeda-beda. Perbedaan nilai PDRB dalam perekonomian dan perbedaan jumlah penduduk mengakibatkan PDRB per kapita penduduk setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau juga berbeda. Kapasitas produksi daerah dan jumlah penduduk menjadi variabel penting dalam pendistribusian pendapatan kepada masyarakat yang dapat menyebabkan terjadi ketimpangan pembangunan antar daerah. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Williamson, ditemukan bahwa terjadinya penurunan trend ketimpangan williamson di Provinsi Riau pada tahun 2020-2024. Gambar berikut menjelaskan perkembangan Indeks Williamson di Provinsi Riau selama periode 2020-2024.



Sumber: BPS Riau, 2025 (diolah)

Gambar II-19 Ketimpangan Williamson Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024

2.1.2.1.8 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang banyak ditemukan di negara- negara berkembang, termasuk Indonesia. Beberapa program penanggulangan kemiskinan, baik berupa subsidi maupun bantuan keuangan kepada penduduk miskin telah banyak dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin juga telah dilakukan sebagai bagian penting dari program pengentasan kemiskinan sebagai solusi permasalahan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis cenderung menurun baik secara absolut, maupun secara proporsional terhadap total jumlah penduduk.

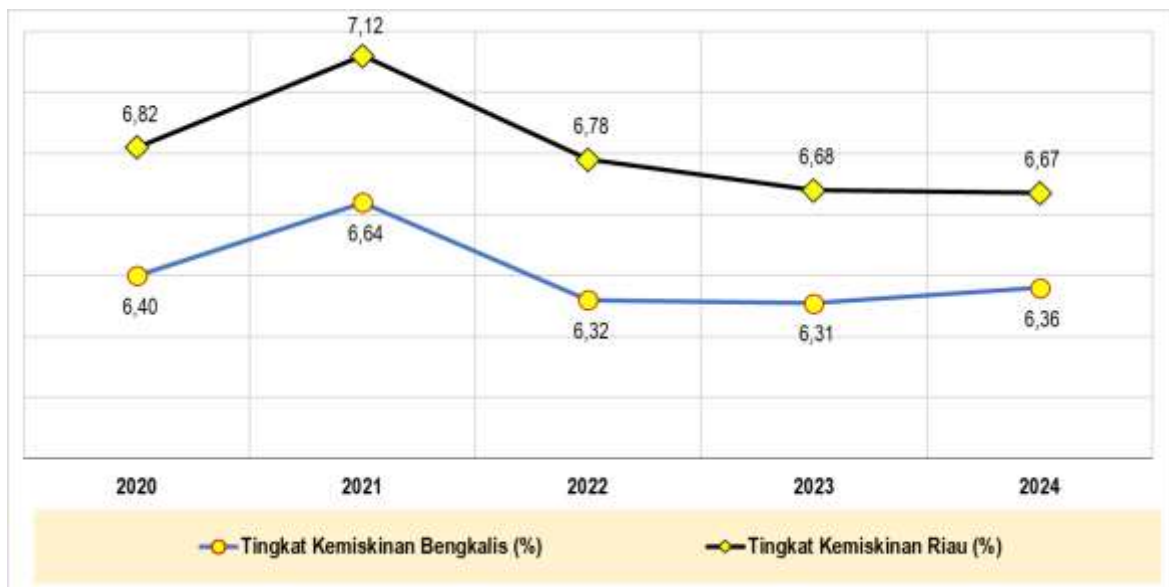
Jika diperhatikan lebih jauh, bahwa salah satu penyebab kemiskinan di Kabupaten Bengkalis adalah efek inflasi, dimana garis kemiskinan terus meningkat dari Rp. 581.416/kapita/bulan pada tahun 2020 menjadi Rp. 755.572/kapita/bulan pada tahun 2024. Dengan pengertian, sebuah rumah tangga dengan empat anggota, di mana hanya kepala keluarga yang berpenghasilan, akan dikategorikan sebagai miskin jika memiliki pendapatan kurang dari Rp3 juta per bulan. Hal ini mengindikasikan bahwa beban hidup penduduk miskin semakin tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non pangan yang disebabkan oleh kenaikan harga-harga. Pengendalian inflasi dan kondisi ekonomi makro menjadi penting dalam upaya menekan tingkat kemiskinan. Pengukuran tingkat kemiskinan dengan menggunakan *headcount ratio* atau jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk, memberikan gambaran tingkat kemiskinan, namun tidak menggambarkan tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. *Headcount index* memenuhi aksioma fokus, namun informasi kemiskinan yang diberikan masih sangat terbatas karena tidak memberikan informasi ‘seberapa miskin’ orang miskin tersebut atau pemenuhan aksioma kesamaan, serta tidak memperhatikan aspek distribusi pendapatan atau pengeluaran diantara penduduk miskin atau disebut dengan aksioma transfer.

Tabel II-15 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 – 2024

Kondisi Kemiskinan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	36,96	37,66	36,03	36,10	36,56
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,40	6,64	6,32	6,31	6,36
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	581.416	604.925	648.933	713.826	755.572
Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,72	0,73	0,81	1,03	0,72
Keparahan Kemiskinan (P2)	0,14	0,13	0,15	0,23	0,12

Sumber: BPS Riau, 2025

Secara umum tingkat kemiskinan di Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan dari 6,40% pada tahun 2020 menjadi 6,31% pada tahun 2023, namun sedikit meningkat pada tahun 2024 menjadi 6,36%. Sedangkan kemiskinan di Riau dari 6,82% pada tahun 2020 menjadi 6,68 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Bengkalis semakin merapat dimana 6,36% untuk Kabupaten Bengkalis dan 6,67 untuk tingkat kemiskinan Provinsi Riau.



Sumber: BPS Riau, 2024

Gambar II-20 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024

Indek kedalaman kemiskinan atau disebut juga dengan *poverty gap* menggambarkan jarak antara rata-rata pendapatan kelompok miskin secara agregat dengan garis kemiskinan (defisit pendapatan). Dengan kata lain, *poverty gap* merupakan selisih antara garis kemiskinan dengan pendapatan rumah tangga miskin. Dengan demikian *poverty gap* disebut sebagai ukuran kedalaman kemiskinan. Sedangkan bagi rumah tangga yang memiliki pendapatan di atas garis kemiskinan dianggap memiliki nilai indeks *poverty gap* sama dengan nol. Perkembangan *poverty gap* di Kabupaten Bengkalis semakin membaik hingga tahun 2022, namun meningkat menjadi 1,03 pada tahun 2023,

dan kembali turun pada tahun 2024 menjadi 0,72 yang berarti tingkat kedalaman kemiskinan di Kabupaten Bengkalis turun pada tahun 2024.

Indeks keparahan kemiskinan menggambarkan ketimpangan pendapatan antar penduduk miskin. Semakin kecil nilai indeks keparahan kemiskinan, maka distribusi pendapatan diantara masyarakat miskin semakin merata. Perkembangan keparahan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 sebesar 0,14 menjadi 0,23 pada tahun 2023, dan kembali turun pada tahun 2024 menjadi 0,12 yang berarti terjadi penurunan keparahan kemiskinan selama periode tersebut.

Kemiskinan di Kabupaten Bengkalis disebabkan oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utama adalah masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bengkalis hanya mencapai 9,74 tahun, setara dengan kelas 1 SMA. Hal ini mencerminkan rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SMA yang hanya sebesar 93,13 dan Angka Partisipasi Murni (APM), yaitu hanya 69,99. Kondisi ini disebabkan oleh masih belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Bengkalis. Di beberapa daerah terpencil, fasilitas pendidikan cukup minim, sehingga berdampak terhadap kemampuan masyarakat dalam melanjutkan studinya.

Selain aspek pendidikan, distribusi sarana dan prasarana kesehatan juga masih menjadi masalah di Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 2024 terdapat sebanyak 22 puskesmas, namun masih terdapat Kecamatan dengan jumlah 1 puskesmas yang meliputi Kecamatan Pinggir, Kecamatan Talang Muandau, dan Kecamatan Bandar Laksamana. Selanjutnya pada tahun 2024, terdapat 479 tenaga medis, namun distribusinya masih belum merata pada beberapa Kecamatan dengan jumlah tenaga medis yang paling kecil terdapat di Kecamatan Rukat Utara yaitu hanya 5 tenaga medis. Selain itu, cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin hanya mencapai 60,08% pada tahun 2023. Kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai dapat berdampak terhadap kualitas hidup masyarakat miskin yang dapat memperparah kondisi kemiskinan.

Infrastruktur jalan yang buruk juga menjadi faktor yang memperparah kemiskinan di Kabupaten Bengkalis. Hanya 41,03% jalan yang berada dalam kondisi baik pada tahun 2024 dan indeks aksesibilitas masuk kategori rendah dengan rasio panjang jalan terhadap luas wilayah hanya sebesar 0,16. Kondisi ini apabila tidak segera diatasi akan dapat memperparah kondisi kemiskinan karena akan berdampak terhadap meningkatnya biaya dalam mengakses layanan dasar dan sumber ekonomi.

Selain itu, kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Bengkalis masuk kategori tahan pangan dengan nilai indeks sebesar 65,75, namun pada dimensi ketersediaan pangan masih relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan daerah terhadap supply pangan dari luar. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini dapat menyebabkan fluktuasi harga pangan yang tinggi.

Secara keseluruhan, kemiskinan di Kabupaten Bengkalis dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural yang saling terkait. Upaya penanggulangannya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, dengan fokus pada peningkatan akses pendidikan,

pemerataan fasilitas kesehatan, perbaikan infrastruktur, serta penguatan ketahanan pangan.

2.1.2.2 Fokus kesejahteraan Sosial

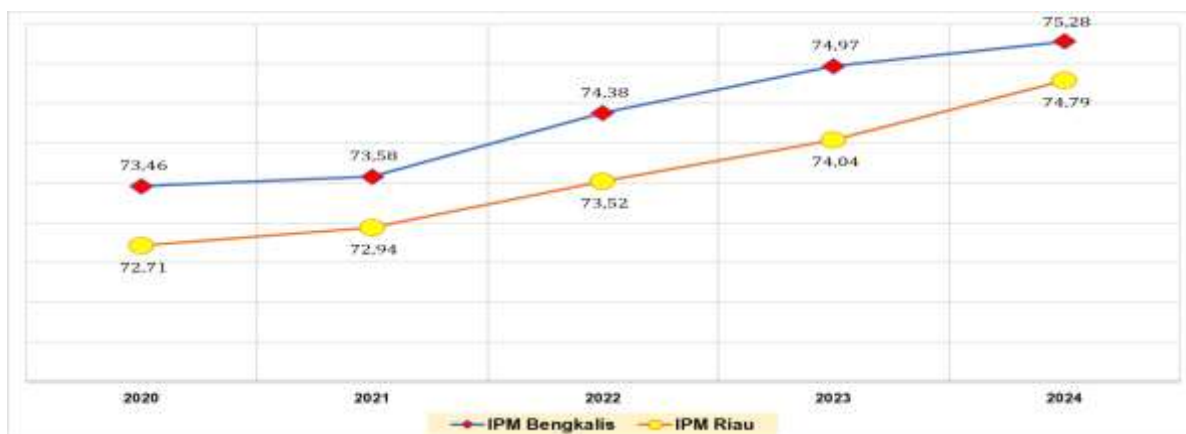
Analisis terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dapat dilihat dari perkembangan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan dan ketenaga kerjaan.

2.1.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Analisis kesejahteraan sosial dapat dilihat dari perkembangan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai akumulasi dari keberhasilan pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup yang diakui oleh semua negara di seluruh dunia.

Nilai IPM dapat diperbandingkan secara nasional dan internasional sebagai ukuran perkembangan pembangunan manusia seutuhnya. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pengukuran IPM akan menggambarkan perkembangan kualitas hidup manusia dari waktu ke waktu seiring dengan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. Hakekat pembangunan pada dasarnya meningkatkan kesejahteraan penduduk, yang dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan non pangan, pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan pembangunan perlu keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan manusia seutuhnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan selama periode 2020-2024, berada diatas capaian IPM Riau dan menempati peringkat keempat tertinggi setelah Kota Pekanbaru, Kota Dumai, dan Kabupaten Siak. Nilai IPM Kabupaten Bengkalis naik dari 73,46 pada tahun 2020 menjadi 75,28 pada tahun 2024, masuk dalam kategori tinggi. Perkembangan IPM menunjukkan bahwa upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah cukup berhasil dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat, sehingga secara umum kualitas hidup penduduk Kabupaten Bengkalis terus membaik selama periode tersebut.



Sumber: BPS Riau, 2025

Gambar II-21 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

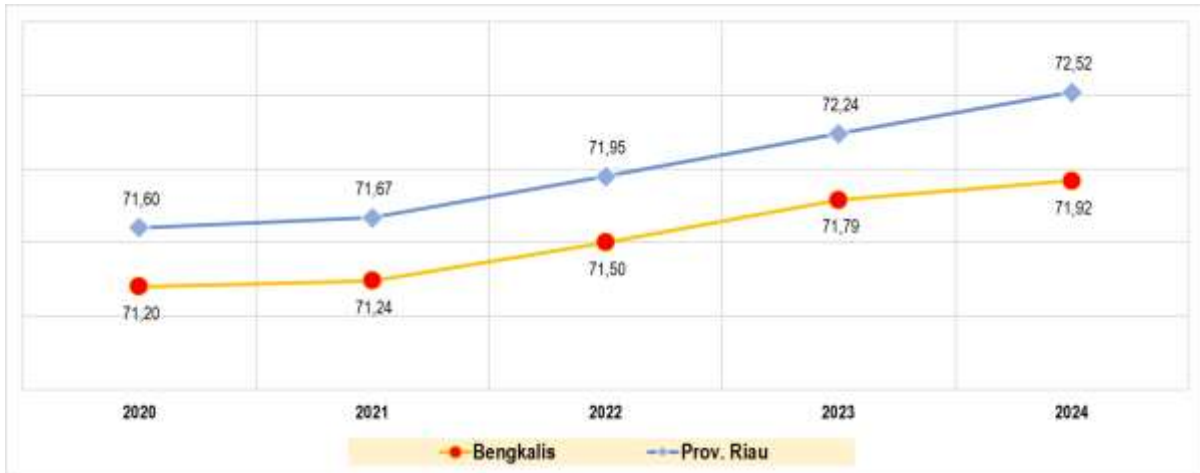
Jika diperhatikan dari komponen pembentuk IPM sebagai indikator kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Bengkalis terlihat bahwa aspek ekonomi dominan dalam pembentuk kualitas pembangunan manusia jika dibandingkan dengan kualitas pembangunan manusia di Provinsi Riau. Selama periode 2020-2024 indeks kesehatan dan indeks pendidikan dalam pembentukan IPM Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Riau. Hal ini ditunjukkan oleh capaian harapan lama sekolah dan umur harapan hidup di Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi Riau.

2.1.2.2.2 Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata estimasi lama tahun yang dapat dilalui oleh seseorang selama hidup. Perhitungan angka harapan hidup dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dilakukan melalui pendekatan tidak langsung (indirect estimation), yaitu dengan menggunakan pendekatan data Angka Lahir Hidup (ALH) dan Angka Masih Hidup (AMH). Umur harapan hidup menggambarkan kondisi kesehatan manusia. Semakin lama harapan angka harapan hidup penduduk maka akan semakin baik kondisi pembangunan kesehatan manusia pada daerah tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan membaiknya angka harapan hidup antara lain sistem pelayanan kesehatan yang baik, respon yang cepat dalam keadaan darurat, ketersediaan tenaga kesehatan dan menjangkau tenaga kesehatan.

Capaian angka harapan hidup penduduk pada suatu daerah dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, kesehatan, kebijakan pemerintah maupun perekonomian masyarakat. Peningkatan angka harapan hidup penduduk pada suatu daerah disebabkan karena hidup yang lebih baik, pencegahan serta perawatan ibu, peningkatan pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan dan pelayanan kesehatan dan peningkatan pendapatan perkapita penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup. Angka harapan hidup penduduk merupakan jumlah rata-rata usia penduduk yang diperkirakan atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah pada masa

mendatang. Angka harapan hidup penduduk menjadi sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya.



Sumber: BPS Riau, 2025

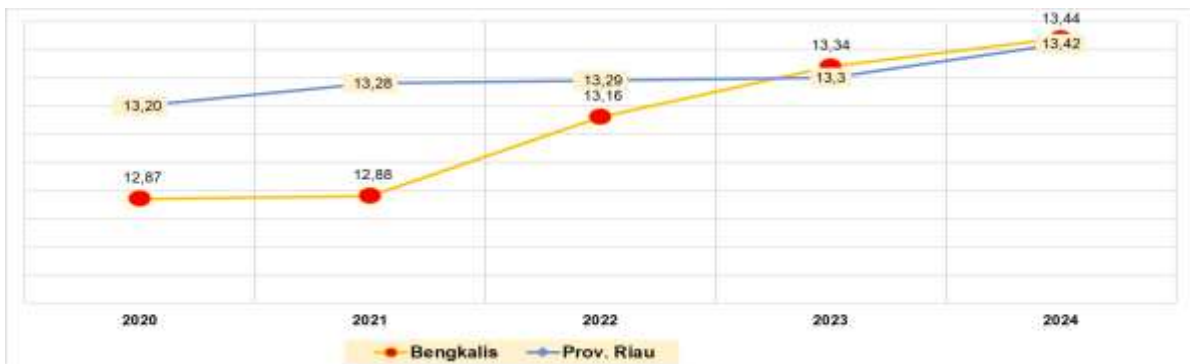
Gambar II-22 Perkembangan Umur Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Umur harapan hidup saat lahir penduduk Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan 0,72 selama periode 2020-2024, yaitu dari umur harapan hidup 71,20 tahun pada tahun 2020 menjadi 71,92 tahun pada tahun 2024. Secara umum angka harapan hidup penduduk Kabupaten Bengkalis masih lebih rendah dari rata-rata angka harapan hidup penduduk Provinsi Riau. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan kesehatan penduduk secara umum di Kabupaten Bengkalis masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Riau umumnya, termasuk respon cepat terhadap keadaan darurat, ketersediaan tenaga kesehatan dan jangkauan tenaga kesehatan. Selain faktor-faktor tersebut, hal-hal lain yang mempengaruhi terhadap perbaikan angka harapan hidup penduduk pada suatu daerah adalah gaya hidup sehat penduduk. Secara umum, keberhasilan pembangunan kesehatan, termasuk pembinaan gaya hidup sehat bagi peningkatan kualitas hidup penduduk di Provinsi Riau masih lebih baik jika dibandingkan dengan di Kabupaten Bengkalis selama periode 2020 - 2024.

2.1.2.2.3 Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah adalah lama sekolah formal (diukur dalam tahun) yang diharapkan penduduk datang. Lama sekolah yang diharapkan dapat disebut angka harapan sekolah yang diperkirakan dapat ditempuh oleh anak. Dengan demikian, lama sekolah akan berkaitan dengan kondisi pembangunan sistem pendidikan yang dilakukan oleh daerah untuk menjamin anak-anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan secara maksimal. Pengukuran angka harapan lama sekolah (*expected years of schooling*) dalam perhitungan IPM merupakan gambaran keberhasilan pembangunan manusia pada dimensi pendidikan, termasuk indikator rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan pada berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Dalam perhitungan angka harapan lama

sekolah, peluang anak pada umur tertentu akan tetap bersekolah diasumsikan sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah pada umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dalam perhitungan IPM dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Secara umum, angka harapan lama sekolah penduduk di Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Riau pada tahun 2020-2022, namun berada diatas Provinsi pada periode 2023-2024, meskipun demikian Kabupaten Bengkalis berada di posisi ketigas pada tahun 2024 setelah Kabupaten Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.



Sumber: BPS Riau, 2025

Gambar II-23 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Pada tahun 2020, angka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Bengkalis adalah 12,87 tahun dan meningkat menjadi 13,44 tahun pada tahun 2024. Sedangkan angka harapan lama sekolah penduduk di Provinsi Riau pada tahun 2020 adalah 13,20 tahun dan meningkat menjadi 13,42 tahun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa harapan lama sekolah di Kabupaten Bengkalis lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Riau pada periode 2023-2024.

Harapan lama sekolah penduduk baru pada tingkat menamatkan jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA) dan tepatnya masuk jenjang pendidikan perguruan tinggi semester satu. Batas nilai harapan lama sekolah adalah minimum 0 dan maksimum 18 tahun. Dengan demikian masih diperlukan peningkatan secara gradual harapan lama sekolah penduduk hingga 4,56 tahun lagi untuk mencapai angka 18 tahun sesuai dengan harapan lama sekolah maksimum dalam pembangunan pendidikan untuk peningkatan kualitas hidup manusia di Kabupaten Bengkalis. Kebijakan pendidikan terkait pemberian kemudahan akses masuk perguruan tinggi dapat dilakukan pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan angka Harapan Lama Sekolah. Salah satu bentuk kebijakan yang tersebut adalah pemberian beasiswa pendidikan bagi penduduk Bengkalis yang ingin melanjutkan pendidikannya pada jenjang perguruan tinggi.

2.1.2.2.4 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dalam pengukuran IPM merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan penduduk usia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenjang pendidikan. Rata-rata lama sekolah menjadi ukuran kualitas pembangunan pendidikan dalam pembangunan kualitas hidup manusia. Rata-rata lama

sekolah merupakan lama tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Dalam kondisi normal, rata-rata lama sekolah diasumsikan tidak akan menurun. Batas maksimum rata-rata lama sekolah dalam perhitungan IPM adalah 15 tahun. Dengan demikian, sampai dengan tahun 2024, masih diperlukan peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk sampai 5,26 tahun lagi untuk mencapai batas maksimal rata-rata lama sekolah yang diharapkan bagi Kabupaten Bengkalis.



Sumber: BPS Riau, 2025

Gambar II-24 Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Capaian rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 adalah 9,74 tahun, lebih tinggi capaian rata-rata lama sekolah Provinsi Riau dan menempati urutan keempat tertinggi di Riau setelah Kota Pekanbaru, Kota Dumai dan Kabupaten Siak. Rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 adalah 9,69 tahun atau rata-rata kelas satu SMA dan meningkat menjadi 9,74 tahun pada tahun 2024. Secara umum, kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup penduduk di Kabupaten Bengkalis lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata keberhasilan pembangunan pendidikan di Provinsi Riau. Meski demikian tentu capaian ini masih perlu ditingkatkan untuk mencapai kualitas pendidikan ideal dalam konteks pembangunan kualitas sumberdaya manusia daerah.

2.1.2.2.5 Pengeluaran Riil per Kapita

Tingkat pengeluaran riil dalam perhitungan IPM merupakan gambaran kondisi tingkat daya beli penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat hidup dengan layak. Pengeluaran perkapita riil dalam perhitungan IPM merupakan rata-rata pengeluaran perkapita konstan atau riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Pengeluaran per kapita riil merupakan besaran biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi makan dan non makanan semua anggota rumah tangga selama sebulan. Pengeluaran per kapita riil akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk dari dimensi ekonomi dalam perhitungan IPM. Standar hidup layak menggambarkan kualitas kehidupan atau tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak dari semakin membaiknya kondisi ekonomi maupun tingkat pemerataannya. Selama periode

2020-2024, pengeluaran per kapita riil penduduk Kabupaten Bengkalis cenderung meningkat dari 11.331 ribu/orang/tahun pada tahun 2020, menjadi 12.321 ribu/orang/tahun pada tahun 2024. Pengeluaran riil per kapita penduduk Kabupaten Bengkalis berada pada peringkat kelima tertinggi di Riau dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengeluaran riil per kapita penduduk Riau selama periode 2020-2024. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk Kabupaten Bengkalis memiliki tingkat kesejahteraan dan tingkat hidup layak yang lebih baik jika dibandingkan dengan penduduk Riau.

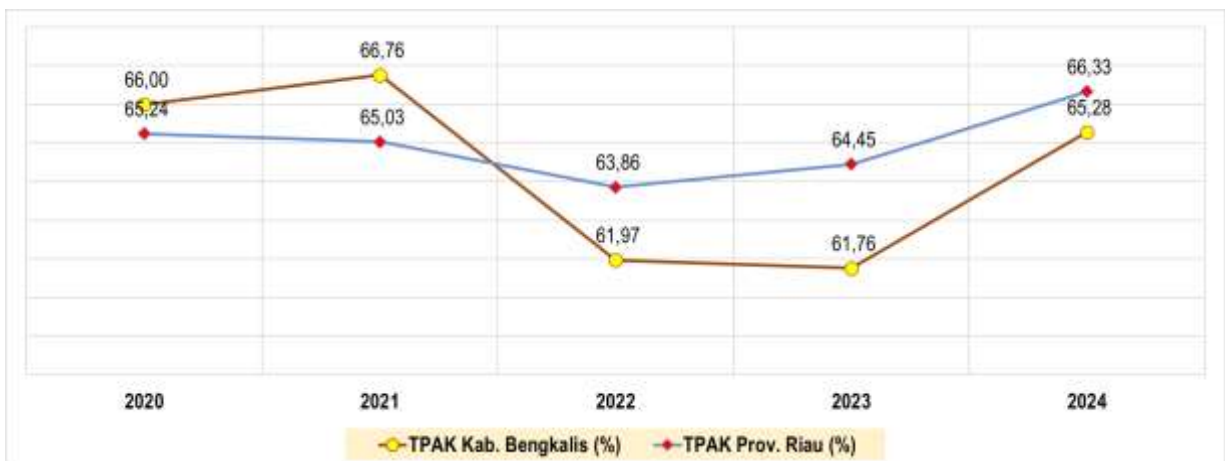


Sumber: BPS Riau, 2025

Gambar II-25 Perkembangan Pengeluaran per Kapita Riil (Rp 000/Orang/Tahun) Kabupaten Bengkalis tahun 2020-2024

2.1.2.2.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang terlibat aktif dalam perekonomian. TPAK Kabupaten Bengkalis digunakan untuk mengukur besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif dalam seluruh aktivitas perekonomian daerah. Tingkat partisipasi angkatan kerja pada suatu daerah merupakan salah satu indikator penting dalam kegiatan perekonomian daerah karena menjadi ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesediaan tenaga kerja pada suatu daerah. TPAK memiliki arti penting bagi keperluan perencanaan pembangunan khususnya dibidang ketenagakerjaan.



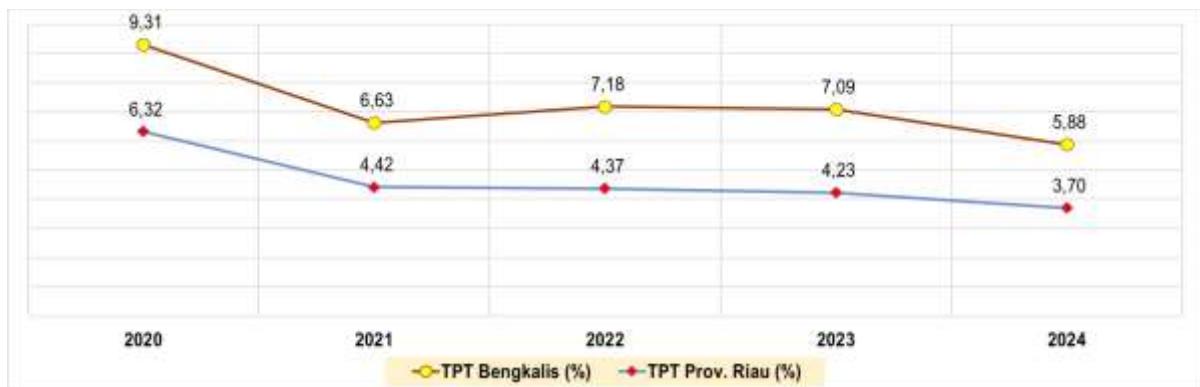
Sumber: BPS Riau, 2025

Gambar II-26 Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 (%)

TPAK digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi pada suatu wilayah tertentu. Tingkat partisipasi tenaga kerja di Kabupaten Bengkalis mengalami perkembangan yang berfluktuasi selama periode 2020-2024. Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Bengkalis mengalami fluktuasi menurun dari 66% pada tahun 2020 menjadi 61,76% pada tahun 2023, namun kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 65,28% dan berada di bawah tingkat partisipasi tenaga kerja Provinsi Riau.

2.1.2.2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah penduduk yang termasuk angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran terbuka terjadi akibat angkatan kerja tersebut belum mendapat pekerjaan, sedang mencari pekerjaan atau malas bekerja. Keberhasilan pembangunan Kabupaten Bengkalis pada sektor ketenagakerjaan, dapat dilihat seberapa besar tingkat pengangguran terbuka yang ada di Kabupaten Bengkalis. Indikator tingkat pengangguran menjadi ukuran terhadap kemampuan perekonomian menyerap angkatan kerja kerja. Secara umum, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan dengan tingkat penangguran terbuka Provinsi Riau selama periode 2020-2024.



Sumber: BPS Riau, 2025

Gambar II-27 Perkembangan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 (%)

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 sebesar 9,31%, kemudian turun menjadi 6,63% pada tahun 2021, kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 7,18% dan turun hingga tahun 2024 menjadi 5,88%. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bengkalis memiliki trend fluktuasi menurun sepanjang 2020-2024.

2.1.2.2.8 Rasio Kesempatan Kerja

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja) adalah perbandingan kesempatan kerja penduduk terhadap total penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Pendekatan yang digunakan untuk menghitung kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja (*supply side*) dengan asumsi

bahwa jumlah penduduk yang bekerja sama dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Kelebihan dari sisi *supply side* dikurangi dengan *demand side* (pengangguran).

Tabel II-16 Perkembangan Kesempatan Kerja Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja	252.047	235.761	244.037	264.884
Penduduk Usia Kerja (15-64)	386.916	393.577	394.726	398.109
Rasio Kesempatan Kerja	65,14%	59,90%	61,82%	66,54%

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2024 (Diolah)

Rasio kesempatan kerja di Kabupaten Bengkalis mengalami fluktuasi, dari 65,14% pada tahun 2021, turun menjadi 59,90% pada tahun 2022, lalu meningkat kembali hingga mencapai 66,54% pada tahun 2024. Untuk meningkatkan kesempatan kerja, diperlukan kebijakan yang mendorong pengembangan usaha guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan penduduk usia kerja. Kesenjangan antara penawaran tenaga kerja (*labour supply*) dan permintaan tenaga kerja (*labour demand*) menjadi salah satu faktor rendahnya daya serap angkatan kerja. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi pencari kerja yang selaras dengan kebutuhan pasar tenaga kerja perlu menjadi prioritas guna menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Bengkalis..

2.1.2.2.9 Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah suatu kondisi yang ditandai dengan berat badan dan tinggi badan balita jauh di bawah rata-rata. Berdasarkan tabel dibawah dapat diketahui bahwa jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 sebanyak 35 balita, turun hingga tahun 2021 menjadi 7 balita dan sedikit naik pada tahun 2023 menjadi 9 balita dan jumlahnya tetap pada tahun 2024.

Tabel II-17 Angka Balita Gizi Buruk Kabupaten Bengkalis 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Balita Gizi Buruk	35	7	7	9	9
Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	0,40%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bengkalis, 2025

Apabila dilihat dari Tabel dibawah menunjukkan kasus balita gizi buruk terbanyak berada di Kecamatan Rupert Utara. Tingkat kemiskinan yang tinggi dan pengetahuan ibu tentang kesehatan dan gizi anak ditenggarai menjadi penyebab utama tingginya kasus gizi buruk di Kecamatan Rupert Utara. Daerah Rupert Utara merupakan daerah terluar dengan aksesibilitas kurang baik, pada daerah ini masih banyak masyarakat yang terisolir dan jauh dari jangkauan tenaga medis, sehingga bisa dipastikan sosialisasi dan pemahaman tentang kebutuhan gizi anak masih kurang baik di daerah ini.

Tabel II-18 Persentase Balita Gizi Buruk Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita	Persentase Balita Gizi Buruk
1	Bengkalis	1	6.224	0,02
2	Bukit Batu	1	1.194	0,08
3	Bantan	0	2.990	0
4	Mandau	1	8.620	0,01
5	Rupat	1	3.183	0,03
6	Rupat Utara	5	1.266	0,39
7	Siak Kecil	1	2.039	0,05
8	Pinggir	2	5.696	0,04
9	Bandar Laksamana	0	1.237	0
10	Talang Muandau	2	2.362	0,08
11	BathinSolapan	0	7.728	0
Jumlah		9	32.807	0,03

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bengkalis, 2025

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Perkembangan seni budaya dan olahraga di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Bengkalis. Pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya bertujuan untuk mempertahankan keaslian, melindungi dan menjaga Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Bengkalis. Hal ini dikarenakan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya ini memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan di Kabupaten Bengkalis.

Tabel II-19 Perkembangan Indikator Kebudayaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	3	5	4	4
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	24	24	24	37	37
Total Benda, situs & Kawasan Cagar Budaya yang dimiliki daerah	26	26	42	77	77
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	100%	100%	48,05%	48,05%	48,05%
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	41	41	46	52	33

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, 2024

Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 sebanyak 37 dan yang belum dilestarikan sebanyak 40. Adapun Benda, Situs dan Kawasan yang dimiliki daerah sebanyak 77. Dengan demikian pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya ini sudah mencakup 48,05% dari total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Tabel II-20 Cakupan Pembinaan Olahraga di Kabupaten Bengkalis 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah cabang olahraga yang dibina	0	3	8	3	13
2	Jumlah seluruh cabang olahraga terdaftar	0	50	56	56	56
3	Cakupan pembinaan olahraga	0	41	190	42	42

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, 2025

Sementara itu dari segi cakupan pembinaan olah raga di Kabupaten Bengkalis sudah cukup baik. Sebanyak 56 cabang olah raga yang ada dan terdaftar, namun hanya sebanyak 13 cabang olah raga yang mendapatkan pembinaan pada tahun 2024. Pembinaan cabang olahraga ini dibutuhkan untuk menciptakan generasi muda Kabupaten Bengkalis yang berprestasi baik di tingkat lokal, maupun nasional dan internasional.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Aspek pelayanan umum terdiri dari fokus urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan serta fungsi penunjang urusan.

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar daerah Kabupaten Bengkalis, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

2.1.3.1.1 Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan menjadi prioritas dalam pembangunan daerah sehingga Pemerintah minimal harus mengalokasikan dana 20% dari APBD untuk pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keberhasilan pendidikan dapat dinilai dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan dan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV.

A. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah ukuran partisipasi penduduk dalam mengenyam pendidikan sesuai jenjang pendidikan ditempuh tanpa melihat batas usia sekolah yang diharuskan. Perkembangan APK pada jenjang pendidikan SD/MI selama periode 2020-2024 sudah sangat baik dengan capaian lebih dari 100%. Namun untuk tingkat pendidikan nilai APK pada jenjang pendidikan SMP masih terdapat anak usia

sekolah SMP yang tidak bersekolah. Hal ini terlihat dari APK SMP/MTs pada tahun 2020 sebesar 97,41, turun pada tahun 2021 menjadi 96,67, kembali meningkat hingga tahun 2023 menjadi 98,22 dan kembali turun pada tahun 2024 menjadi 93,09. Sementara itu, pada jenjang pendidikan SMA sederajat, APK belum mencapai 100%, namun terus meningkat dari 79,38 pada tahun 2020 menjadi 93,13 pada tahun 2024.

Tabel II-21 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

No.	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	APK SD/MI	106,72	107,45	108,09	107,49	103,01
2.	APK SMP/MTs	97,41	96,67	97,03	98,22	93,09
3.	APK SMA/MA/SMK	79,38	77,45	78,69	81,14	93,13

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2025

Beberapa alasan APK SMP/MTs belum mencapai 100% adalah ketersediaan jumlah sekolah yang masih kurang untuk menampung penduduk usia sekolah SMP untuk bersekolah, masih terdapat lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan pendidikan pada tingkat SMP, angka putus sekolah, penyebaran sekolah SMP/MTs yang tidak merata sehingga sebagian anak kesulitan untuk menjangkau sekolah, alasan ekonomi seperti orangtua tidak mampu membiayai sekolah anak atau anak harus berkerja membantu orang tua mencari nafkah. Pada beberapa daerah seperti di Kecamatan Rukat dan Rukat Utara, akses menuju sekolah sangat jauh, memakan waktu yang lama dan juga biaya yang besar. Pengorbanan cukup besar yang dibutuhkan oleh beberapa masyarakat di wilayah pedalaman, membuat angka partisipasi sekolah menjadi kurang dari 100%.

Kondisi geografis Kabupaten Bengkalis yang banyak pulau menjadi kendala dalam pemerataan pendidikan. Penyebaran sarana pendidikan menjadi penting dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin kurang merata penyebarannya di Kabupaten Bengkalis, sehingga anak usia sekolah yang ada di pulau-pulau dan daerah terpencil dihadapkan pada keterbatasan akses pendidikan lanjutan.

Namun demikian, Kabupaten Bengkalis telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan, seperti pemberian dukungan peningkatan akses menuju sekolah, kepastian usia sekolah untuk dapat bersekolah dari pemerintah melalui pemberian bantuan pendidikan/beasiswa serta kebijakan daerah yang menyelenggarakan pendidikan hingga 12 tahun.

Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Nonformal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APM digunakan sebagai indikator yang mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Hal ini karena APM mengindikasikan partisipasi sekolah yang tepat waktu, yaitu jenjang SD/ sederajat (7-12 tahun), SMP/ sederajat (13-15 tahun), dan SM/ sederajat (16-18 tahun). APM menunjukkan

seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.

Oleh karena itu, nilai APM kurang dari atau sama dengan nilai APK karena APK ikut memperhitungkan anak yang berusia di luar rentang pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang sesuai. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar perbedaan nilai antara APK dan APM. Artinya, partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar lebih cenderung tepat waktu dibandingkan jenjang pendidikan menengah.

Tabel II-22 Perkembangan APM Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

No.	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	APM SD/MI	98,06	98,29	97,97	99,15	98,35
2.	APM SMP/MTs	86,5	87,31	87,79	84,75	85,92
3.	APM SMA/MA/SMK	66,97	67,05	67,22	65,28	69,99

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2025

Secara umum, angka partisipasi murni pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Bengkalis mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024. APM pada jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan nilai APM pada tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2024 nilai APM SD/MI turun menjadi 98,35 dibanding tahun 2023 yaitu 99,15. Hal tersebut menunjukkan adanya sedikit penurunan pada persentase penduduk yang bersekolah tepat waktu pada jenjang pendidikan SD/MI.

Sementara itu APM pada jenjang pendidikan SMP/MTs sedikit meningkat dari 84,75 pada tahun 2023 menjadi 85,92 diikuti oleh APM SMA/MA/SMK yang meningkat dari 65,28 pada tahun 2023 menjadi 69,99 pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan pada persentase penduduk yang bersekolah tepat waktu pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024.

Nilai APM yang belum mencapai 100 disebabkan oleh perkembangan pertumbuhan peserta didik pada semua jenjang pendidikan belum sepenuhnya tertampung pada semua jenjang pendidikan pada semua wilayah di Kabupaten Bengkalis, sehingga menyebabkan masih terdapat peserta didik yang terlambat bersekolah. Untuk itu, pemerataan fasilitas pendidikan di semua daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan angka partisipasi murni di Kabupaten Bengkalis. Selain pembangunan di bidang pendidikan, pembangunan transportasi dan ekonomi juga dapat memperlancar akses penduduk usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut untuk 1000 penduduk. Indikator ini juga menggambarkan seberapa besar kesempatan individu memperoleh pendidikan pada suatu wilayah.

**Tabel II-23 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024**

No.	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	APS SD/MI/Paket A	99,66	99,2	98,97	98,05	97,80
2.	APS SMP/MTs/Paket B	94,56	94,91	94,84	96,44	84,01

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

Perkembangan APS pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A mengalami penurunan dari 99,66 pada tahun 2020 menjadi 97,80 pada tahun 2024. Artinya, dari setiap 1.000 penduduk usia 7-12 tahun, sebanyak 978 orang bersekolah di SD/MI/Paket A, atau setara dengan 97,80% dari total penduduk dalam kelompok usia tersebut. Sementara itu APS pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B mengalami fluktuasi menurun dari 94,56 pada tahun 2020 menjadi 84,01 pada tahun 2024. Artinya, dari setiap 1.000 penduduk usia 13-15 tahun, sebanyak 840 orang bersekolah di SMP/MTs/Paket B, atau setara dengan 84,01% dari total penduduk dalam kelompok usia tersebut.

Trend penurunan APS di semua jenjang pendidikan di Kabupaten Bengkalis menunjukkan bahwa faktor ekonomi berperan dalam keputusan peserta didik, terutama pada usia 16-18 tahun, untuk melanjutkan sekolah atau berhenti demi bekerja. Kondisi ini menegaskan bahwa pembangunan pendidikan harus berfokus pada perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan agar setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan keberlanjutan upaya peningkatan kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana pendidikan guna mendukung partisipasi pendidikan yang lebih baik.

Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Pada jenjang pendidikan SD/MI tahun 2021 jumlah Angka Putus Sekolah sebesar 141, turun menjadi 6 pada tahun 2023. Sementara ini angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs pada tahun 2021 sebesar 27, namun sedikit meningkat pada tahun 2023 menjadi 32. Peningkatan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTS dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tekanan ekonomi yang mendorong anak untuk bekerja, keterbatasan akses ke sekolah lanjutan, atau kurangnya motivasi untuk melanjutkan pendidikan. Kendati demikian, angka putus sekolah di Kabupaten Bengkalis masih tergolong rendah. Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi sekolah di semua jenjang pendidikan, antara lain dengan memperluas akses menuju sekolah, memastikan anak usia sekolah dapat bersekolah melalui pemberian bantuan pendidikan atau beasiswa, serta menerapkan kebijakan daerah yang mendukung penyelenggaraan pendidikan hingga 12 tahun.

Tabel II-24 Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

No	Jenjang Pendidikan	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI	141	74	6	228
2	SMP/MTs	27	26	32	152

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten, 2025

Angka Kelulusan

Indikator lain dari urusan pendidikan di Kabupaten Bengkalis adalah perkembangan angka kelulusan di Kabupaten Bengkalis. Indikator ini menggambarkan sejauh mana siswa di Kabupaten Bengkalis dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu.

Tabel II-25 Perkembangan Angka Kelulusan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, 2025

Angka Kelulusan di Kabupaten Bengkalis sudah mencapai 100% untuk semua jenjang pendidikan pada tahun 2020-2024. Hal ini sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai dan juga sesuai dengan standar penilaian minimal Dinas Pendidikan. Secara umum hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Bengkalis sudah baik. Namun demikian tingkat melanjutkan pendidikan perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan tingkat partisipasi sekolah pada setiap jenjang pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan lanjutan, yaitu sekolah menengah atas dan perguruan tinggi.

Angka Melanjutkan Studi

Indikator selanjutnya adalah angka melanjutkan studi yang menggambarkan seberapa banyak siswa pada jenjang pendidikan tertentu bisa melanjutkan pendidikannya menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Secara umum dapat dilihat bahwa tingkat melanjutkan pendidikan di Kabupaten Bengkalis belum mencapai 100%, artinya belum seluruh siswa yang lulus dari pendidikan sekolah dasar sederajat dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat SMP sederajat. Jumlah angka melanjutkan studi di Kabupaten Bengkalis untuk jenjang SMP/MTS terus mengalami penurunan hingga tahun 2023. Namun pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 90,81%.

Tabel II-26 Perkembangan Angka Melanjutkan Studi Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

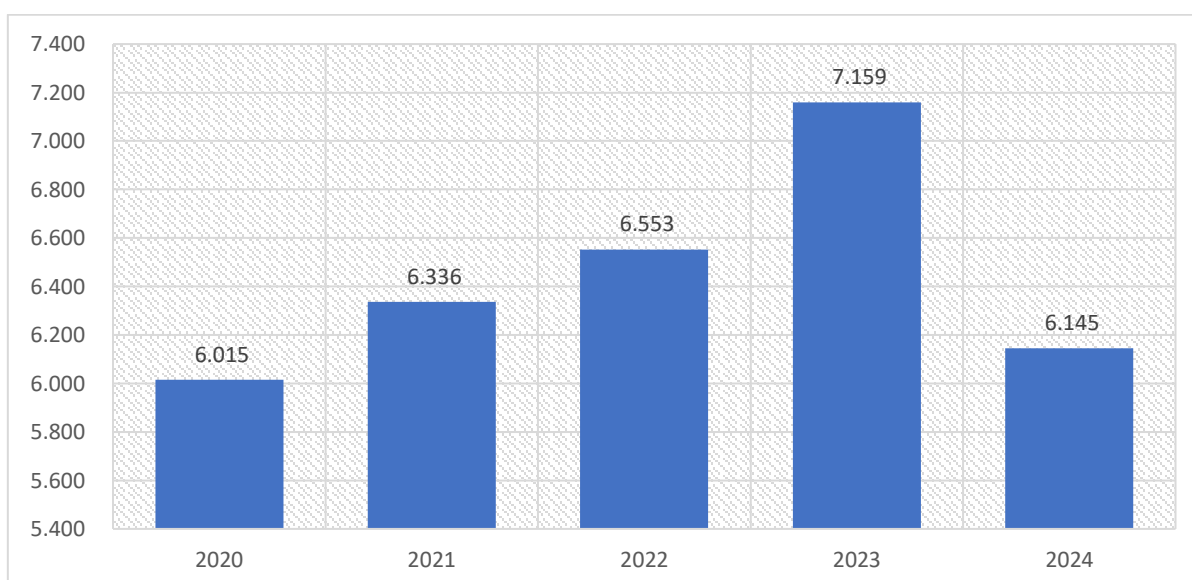
No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Siswa Baru Tingkat I pada Jenjang SMP/MTs	11.598	11.598	11.935	9.357	11.622
2	Jumlah Kelulusan pada Jenjang SD/MI Tahun Ajaran Sebelumnya	12.240	11.964	13.619	12.120	12.798

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3	Angka Melanjutkan Studi SMP/MTs	94,75	96,94	87,63	77,20	90,81

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, 2025

Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Kualitas guru saat ini dipandang sesuatu hal yang sangat penting karena seorang guru memiliki tanggung jawab yang besar, tidak hanya sebagai pendidik guru juga turut serta dalam menghasilkan lulusan peserta didik yang berkualitas dan bermutu. Sehingga guru diharuskan memiliki sertifikasi pendidikan minimal S1/D-IV, adapun perkembangan guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebagai berikut:



Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Bengkalis, 2025

Gambar II-28 Perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Gambar diatas menunjukkan bahwa kualitas pendidikan S1/D-IV yang dimiliki guru cenderung meningkat setiap tahunnya, dimana peningkatan paling tinggi jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV terjadi peningkatan dari 6.015 pada tahun 2020, menjadi 7.159 pada tahun 2023, namun kembali turun pada tahun 2024 menjadi 6.145.

Rasio Guru/Murid Sekolah

Rasio guru dan murid sekolah menggambarkan bagaimana beban kerja guru dalam mengajar, melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio ini maka semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid di kelas.

Tabel II-27 Rasio Guru-Murid Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Murid SD/MI	81.090	79.359	79.346	74.741	73.975
2	Jumlah Guru	5.432	5.274	5.393	4.973	4.727
3	Rasio per 10.000	670	665	680	665	639
4	Jumlah Murid SMP/MTS	35.864	35.487	35.124	35.241	28.350

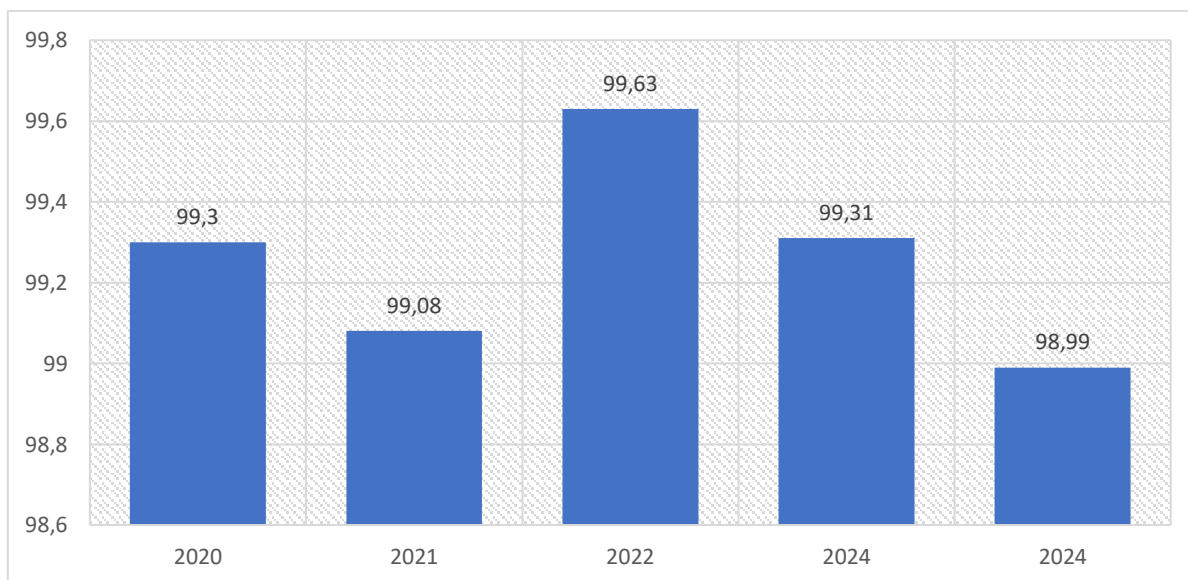
No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
5	Jumlah Guru SMP/MTS	2.941	2.870	3.015	3.043	2.052
6	Rasio per 10.000	820	809	858	863	724
7	Jumlah Murid SMA/SMK/MA	35.569	32.197	31.340	27.825	29.510
8	Jumlah Guru SMA/SMK/MA	2.748	2.636	2.815	2.115	2.185
9	Rasio per 10.000	773	819	898	760	740

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, 2025 (Diolah)

Perkembangan rasio-guru murid pada jenjang pendidikan SD/MI menunjukkan trend fluktuasi menurun dari 670 pada tahun 2020 menjadi 639 pada tahun 2024. Sama halnya dengan rasio Guru/Murid pada jenjang pendidikan SMP/MTS juga menunjukkan trend fluktuasi menurun dari 820 pada tahun 2020 menjadi 724 pada tahun 2024. Hal yang sama juga terjadi pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK dari 773 pada tahun 2020 menjadi 740 pada tahun 2024. Kondisi ini disebabkan terjadinya penurunan jumlah peserta didik pada seluruh jenjang pendidikan yang menyebabkan berkurangnya beban guru di Kabupaten Bengkalis.

Melek Huruf Penduduk Usia 15 tahun ke Atas

Penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan penduduk dalam fase usia produktif dan diharapkan mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah. Salah satu faktor penting yang harus dimiliki penduduk pada fase ini adalah kemampuan membaca atau melek huruf.



Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2025

Gambar II-29 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Angka melek huruf penduduk 15 tahun pada tahun 2020 sebesar 99,3, turun menjadi 99,08 pada tahun 2021 dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 99,63, namun kembali turun hingga tahun 2024 menjadi 98,99. Penduduk yang tidak melek huruf ini kebanyakan adalah penduduk lanjut usia dan penduduk yang tinggal di pedesaan. Faktor usia dan kondisi pedesaan menjadi faktor penghambat penduduk usia lanjut

sebagian masih belum melek huruf. Hal ini pula yang menyebabkan capaian angka melek huruf >15 belum mampu mencapai 100%.

2.1.3.1.1.1 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan

Amanat Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Selanjutnya Pasal 298 menyebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Selaras SPM Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, maka Pemerintah daerah Kabupaten Kabupaten Bengkalis dalam penerapan SPM memprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar. Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Penerapan SPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dimaksudkan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar pendidikan.

Tabel II-28 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase (%) Pendidikan Dasar Usia Dini	100%	94,22%
2	Pendidikan Dasar	Persentase (%) Pendidikan Dasar	100%	96,79%
3	Pendidikan Kesetaraan	Persentase (%) Pendidikan Kesetaraan	100%	94,97%
Capaian SPM Urusan Pendidikan				95,33%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, 2025

Untuk capaian indikator pada tahun 2024, tercapai 95,33% dan atau kategori indeks pencapaian SPM nya TUNTAS UTAMA. Rinciannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk Pendidikan Anak Usia Dini capaian indikator sebesar 94,22%.
- b. Untuk Pendidikan Dasar capaian indikator sebesar 96,79%.
- c. Untuk Pendidikan Kesetaraan capaian indikator sebesar 94,97%.

2.1.3.1.2 Urusan Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh dalam pembangunan manusia. Derajat kesehatan masyarakat yang baik akan merefleksikan kinerja yang baik pula pada masyarakatnya. Oleh karena itu, keberadaan fasilitas kesehatan juga sangat memegang peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin mudah masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia, maka diharapkan semakin berkurang pula tingkat kesakitannya.

Perkembangan indikator urusan kesehatan di Kabupaten Bengkalis selama periode 2020-2024 mengalami dinamika yang cukup beragam. Secara umum, perkembangan indikator urusan kesehatan cukup baik, namun masih terdapat beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan kedepannya.

Salah satu indikator yang perlu mendapatkan perhatian adalah Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup, yang mengalami peningkatan dari 4 pada tahun 2020 menjadi 6,93 pada tahun 2024. Hal ini sejalan dengan bertambahnya jumlah kasus kematian bayi, dari 42 kasus pada tahun 2020 menjadi 69 kasus pada tahun 2024. Indikator lainnya yang perlu mendapatkan perhatian adalah Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup, yang naik dari 3,6 pada tahun 2020 menjadi 6,53 pada tahun 2024. Selain itu, cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi mengalami sedikit fluktuasi, dengan persentase yang menurun dari 80,50% pada tahun 2020 menjadi 78,12% pada tahun 2024. Persentase anak usia 1 tahun yang menerima imunisasi campak juga menunjukkan penurunan, dari 100% pada tahun 2020 menjadi 65% pada tahun 2024. Sementara itu, cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) menunjukkan peningkatan selama periode 2020-2023, namun sedikit turun pada tahun 2024 menjadi 65%. Selain itu, tingkat prevalensi TBC per 100.000 penduduk mengalami kenaikan dari 100 pada tahun 2022 menjadi 208 pada tahun 2024.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dan terpadu dari seluruh stakeholders terkait untuk mengatasi permasalahan urusan kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bengkalis. Berikut adalah perkembangan indikator kinerja kesehatan Kabupaten Bengkalis tahun 2020-2024, yaitu:

Tabel II-29 Perkembangan Indikator Kinerja Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	4	4,6	6	6,14	6,93
2	Jumlah Kematian bayi	42	51	60	60	69
3	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	201	189	102	102,38	50,23
4	Jumlah Kematian Ibu	21	20	10	10	5
5	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	77%	97,70%	83,75%	88,85%	83%
6	Cakupan Pelayanan Nifas	75%	86,50%	75,00%	75,03%	82%
7	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	14%	11,16%	3,50%	3%	100%
8	Angka Kelangsungan Hidup	1-4,0	1-4,0	1-4,0	1-4,0	1-0,4

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
9	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	4,1	5,1	6,1	5,4	0
10	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	3,6	4,7	5,7	5,7	6,53
11	Rasio Posyandu Per 100 Balita	1,1	0,89	0,89	0,89	0
12	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	0,16	0,17	0,16	0,16	0,16
13	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
14	Rasiodokter per 1000 penduduk	66,8	0,51	0,5	0,53	0,53
15	Rasio Tenaga Medis Per 1000 Penduduk	66,8	3,74	3,68	0,492	0,492
16	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	61,30%	71,4%	73,01%	73,01%	60,00%
17	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	79%	92,40%	82,20%	79,10%	81%
18	Persentase Persalinan di fasilitas kesehatan	76,1	90,10%	80,4	82,81%	80%
19	Persentase bayi mendapatkan pelayanan kesehatan	49%	96%	98%	92,50%	119,44
20	Persentase Imunisasi dasar lengkap pada bayi	80,50%	82%	81,78%	85,43%	78,12
21	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	69%	78%	80,65	80,65	67,74
22	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100%	100%	100%	100%	100%
23	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang di Imunisasi Campak	100%	81,50%	82,80%	85,43%	65%
24	Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk	0	0	0	0	0
25	Cakupan Balita Pneumonia yang di Tangani	100%	100%	100%	100%	100%
26	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	28%	40,40%	61,18%	68%	71,40%
27	Tingkat Prevalensi TBC per 100.000 penduduk	121	115	100	191	208
28	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	2	2,7	3,3	2,9	2,2
29	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS	47,80%	40,40%	61,18%	68%	96,40%
30	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang diobati dan Sembuh dalam Program DOTS	12%	90,08%	90,03%	68,055	0
31	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100%	100%	100%	100%	100
32	Penderita Diare yang di Tangani	10%	88,60%	12,69%	12,69%	64,84
33	Jumlah Kejadian Malaria	11	0	3	4	8
34	Tingkat Kematian Akibat Malaria	0	0	0	0	0
35	Proporsi Anak Balita dengan Demam yang diobati dengan Obat Anti Malaria yang Tepat	100%	100%	100%	100%	100%
36	Prevalensi HIV/AIDS (%) dari Total Populasi	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01
37	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	60%	14,38%	0,17%	11,76%	11,76%
38	Cakupan Kunjungan Bayi	81,60%	97%	87%	81,60%	84%
39	Cakupan Puskesmas	164%	173%	173%	173%	173%
40	Cakupan Pembantu Puskesmas	36%	39%	39%	39%	39%
41	Cakupan Pelayanan Anak Balita	23%	51%	81%	77%	13,30%
42	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin	5%	5%	5%	5%	5%
43	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	40%	134,53	134,53	134,53	134,53

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
44	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	60%	50,87%	31,87%	60%	0,6
45	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I yang harus diberikan sarana Kesehatan (RS)	100%	100%	100%	100%	100%
46	Cakupan Desa Siaga Aktif	92,86%	87%	87%	87,01%	87,01%
47	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	100%	100%	0	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2025

Kasus kematian bayi di Kabupaten Bengkalis tahun 2024 sebanyak 69, meningkat sebanyak 9 kasus kematian bayi dari tahun 2023. Kasus kematian bayi berumur kurang 1 tahun paling banyak ditemukan di Kecamatan Mandau sebanyak 20 kematian bayi dan Kecamatan Mandau sebanyak 14 kasus kematian bayi. Adapun Kecamatan lainnya tidak memiliki kasus kematian bayi adalah Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rupert Utara.

Tabel II-30 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2024

No	Kecamatan	2023	2024
1	Bengkalis	13	9
2	Bantan	5	4
3	Bukit Batu	0	0
4	Bandar Laksmana	2	3
5	Siak Kecil	2	3
6	Bathin Solapan	8	10
7	Mandau	15	20
8	Pinggir	8	14
9	Talang Muandau	5	1
10	Rupert	1	5
11	Rupert Utara	1	0
Jumlah		60	69
AKB Per 1000 Kelahiran Hidup		6,14	6,93

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2025

Secara total Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup sebesar 6,93 pada tahun 2024 meningkat dari tahun 2023 yang berjumlah 6,14, hal ini berarti ada sekitar 6,93 (7 kasus kematian bayi) kematian tiap 1000 bayi lahir hidup di Kabupaten Bengkalis. Jumlah terus diupayakan oleh Pemerintahan Kabupaten Bengkalis agar terus berkurang hingga mencapai 0 dalam tahun-tahun ke depan.

Tabel II-31 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu	Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka Kelangsungan Hidup Bayi
1	Bengkalis	1	1.388	0,7	1-0,7
2	Bukit Batu	1	273	3,7	1-3,7

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu	Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka Kelangsungan Hidup Bayi
3	Bantan	0	592	0	1-0,0
4	Mandau	1	2.743	0,4	1-0,4
5	Rupat	0	565	0	1-0,0
6	Rupat Utara	0	201	0	1-0,0
7	Siak Kecil	1	303	3,3	1-3,3
8	Pinggir	0	1.568	0	1-0,0
9	Bandar Laksamana	0	292	0	1-0,0
10	Talang Muandau	0	402	0	1-0,0
11	Bathin Solapan	0	1.628	0	1-0,0
	Kabupaten Bengkalis	4	9.955	0,4	1-0,4

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2025

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis tahun 2025, angka kelangsungan hidup bayi di berbagai kecamatan menunjukkan kondisi yang relatif baik. Sebagian besar kecamatan mencatat angka kelangsungan hidup bayi mendekati 1, yang berarti hampir semua bayi yang lahir dalam periode tersebut dapat bertahan hidup hingga usia satu tahun. Beberapa kecamatan seperti Bantan, Rupat, Rupat Utara, Pinggir, Bandar Laksamana, Talang Muandau, dan Bathin Solapan memiliki angka kelangsungan hidup bayi sebesar 1-0,0, yang menunjukkan tidak adanya kasus kematian bayi dalam periode tersebut.

Namun, terdapat beberapa kecamatan yang mencatat angka kelangsungan hidup bayi sedikit lebih rendah, seperti Bukit Batu (1-3,7) dan Siak Kecil (1-3,3), yang berarti terdapat beberapa kasus kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Secara keseluruhan, di tingkat Kabupaten Bengkalis, angka kelangsungan hidup bayi berada pada 1-0,4, yang masih menunjukkan tingkat kelangsungan hidup bayi yang cukup tinggi.

Meskipun secara umum angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Bengkalis berada dalam kondisi baik, tetap diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan layanan kesehatan ibu dan bayi. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, imunisasi, serta edukasi bagi ibu hamil dan keluarga menjadi langkah penting untuk memastikan kesehatan bayi tetap optimal di seluruh kecamatan.

Tabel II-32 Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Kecamatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2024

No	Kecamatan	2023	2024
1	Bengkalis	13	0
2	Bantan	5	0
3	Bukit Batu	2	0
4	Bandar Laksamana	1	0
5	Siak Kecil	0	0

No	Kecamatan	2023	2024
6	Bathin Solapan	11	0
7	Mandau	8	0
8	Pinggir	5	0
9	Talang Muandau	3	0
10	Rupat	6	0
11	Rupat Utara	1	0
Jumlah		55	0
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup		5,4	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2025

Pada tahun 2023 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Bengkalis tercatat sebesar 5,4. Artinya terdapat sebanyak 5,4 balita yang meninggal setiap 1000 kelahiran hidup. Adapun Kecamatan dengan angka kematian balita tertinggi adalah Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bathin Solapan.

Tabel II-33 Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Kecamatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2024

No	Kecamatan	2023	2024
1	Bengkalis	12	8
2	Bantan	3	3
3	Bukit Batu	0	0
4	Bandar Laksmana	2	2
5	Siak Kecil	2	3
6	BathinSolapan	8	10
7	Mandau	15	19
8	Pinggir	8	14
9	Talang Muandau	5	1
10	Rupat	1	5
11	Rupat Utara	0	0
Jumlah		56	65
Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup		5,57	6,53

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2025

Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 berjumlah 6,53, yang berarti setiap 1000 kelahiran hidup, terdapat 6,53 bayi yang berumur kurang dari 1 bulan meninggal dunia. Kematian bayi neonatal paling banyak ditemukan di Kecamatan Mandau sebanyak 19 kematian dan Kecamatan Pinggir sebanyak 14 kematian. Untuk itu, pelayanan kesehatan dan peningkatan kesadaran Ibu hamil dalam pemeriksaan kehamilan dan perilaku hidup sehat menjadi penting dalam pembangunan kesehatan bayi di Kabupaten Bengkalis.

Tabel II-34 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran hidup dalam kecamatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2024

No	Kecamatan	2023		2024
		Kelahiran Hidup	Kematian Ibu	
1	Bengkalis	1381	3	0
2	Bantan	606	0	1
3	Bukit Batu	278	0	0
4	Bandar Laksmana	300	0	0
5	Siak Kecil	475	0	0
6	BathinSolapan	1648	2	0
7	Mandau	2393	1	1
8	Pinggir	1274	3	1
9	Talang Muandau	523	0	0
10	Rupat	615	1	1
11	Rupat Utara	274	0	1
Jumlah		9767	10	5
AKI Per 100.000 Kelahiran Hidup			102,38	50,23

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2025

Jumlah kematian ibu di Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan dari 10 kasus pada tahun 2023 menjadi 5 kasus pada tahun 2024, yang tersebar di Kecamatan Bantan, Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Rupat, dan Kecamatan Rupat Utara. Sementara itu, angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024 tercatat sebesar 50,23, yang berarti terdapat sekitar 50 kasus kematian ibu dalam setiap 100.000 kelahiran hidup.

Tabel II-35 Rasio Posyandu per 1000 Balita Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Posyandu
1	Bengkalis	78
2	Bantan	46
3	Bukit Batu	25
4	Bandar Laksmana	18
5	Siak Kecil	35
6	BathinSolapan	67
7	Mandau	82
8	Pinggir	63
9	Talang Muandau	31
10	Rupat	63
11	Rupat Utara	20
Jumlah		528
Rasio Posyandu per 100.000 Balita		12,4

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2024

Jumlah posyandu di Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, rasio posyandu per 1000 balita tercatat sebesar 12,4 yang berarti setiap 1000 balita terdapat setidaknya satu posyandu yang beroperasi. Kecamatan Mandau memiliki jumlah posyandu terbanyak, yaitu 82 posyandu, diikuti oleh Kecamatan Bengkalis dengan 78 posyandu pada tahun yang sama.

Tabel II-36 Rasio Tenaga Medis per 1000 Penduduk Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

Kecamatan	Tenaga Medis	Jumlah Penduduk	Rasio Tenaga Medis per 1000 Penduduk
Mandau	240	170.071	1,411
Pinggir	25	79.185	0,316
Bathin Solapan	25	118.646	0,211
Talang Muandau	9	33.889	0,266
Bukit Batu	8	23.322	0,343
Siak Kecil	13	28.690	0,453
Bandar Laksamana	13	19.425	0,669
Rupat	14	41.304	0,339
Rupat Utara	5	17.256	0,290
Bengkalis	101	93.316	1,082
Bantan	26	46.621	0,558
Kabupaten Bengkalis	479	671.725	0,713

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2025

Jumlah tenaga medis di suatu daerah berperan penting dalam mendukung kinerja pelayanan kesehatan. Di Kabupaten Bengkalis, terdapat 479 tenaga medis pada tahun 2024. Namun, distribusinya di setiap kecamatan masih belum merata. Kecamatan Mandau memiliki jumlah tenaga medis tertinggi, yaitu 240 tenaga medis, sementara Kecamatan Rupat Utara tercatat memiliki 5 tenaga medis. Perbedaan ini dapat memengaruhi akses dan kualitas pelayanan kesehatan di beberapa wilayah. Oleh karena itu, pemerataan distribusi tenaga medis perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Tabel II-37 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Bumil dengan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	Jumlah Komplikasi Kebidanan
1	Bengkalis	283	332
2	Bantan	162	174
3	Bukit Batu	98	99
4	Bandar Laksmana	50	52
5	Siak Kecil	114	119
6	BathinSolapan	143	288
7	Mandau	207	270
8	Pinggir	25	63
9	Talang Muandau	249	249
10	Rupat	184	230
11	Rupat Utara	53	103
Jumlah		1.568	1.979
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani			59,9

Sumber: Diolah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2025

Pada tahun 2024, cakupan penanganan komplikasi kebidanan di Kabupaten Bengkalis mencapai 59,9% dari total kasus yang terjadi, menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Rupert Utara, masih memiliki cakupan penanganan yang relatif rendah. Padahal, penanganan komplikasi kebidanan yang optimal berperan penting dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Oleh karena itu, upaya peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak perlu terus diperkuat.

Tabel II-38 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Per Kecamatan Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
1	Bengkalis	1.399	1.746	80,1
2	Bukit Batu	270	434	62,2
3	Bantan	592	874	67,7
4	Mandau	2.746	3.162	86,8
5	Rupat	557	769	72,4
6	Rupat Utara	169	322	52,5
7	Siak Kecil	306	536	57,1
8	Pinggir	1.566	1.466	106,8
9	Bandar Laksamana	294	360	81,7
10	Talang Muandau	398	628	63,4
11	Bathin Solapan	1.643	2.190	75
Kabupaten Bengkalis		9.940	12.487	79,6

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2025

Pada tahun 2024, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan di Kabupaten Bengkalis mencapai 79,6%. Capaian ini tergolong baik, namun masih terdapat beberapa kecamatan dengan cakupan yang relatif rendah, seperti Kecamatan Rupert Utara dan Kecamatan Siak Kecil. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan di Kabupaten Bengkalis secara umum sudah cukup baik, tetapi belum merata di beberapa wilayah. Sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus mendorong program "Satu Desa, Satu Bidan" yang diharapkan dapat memperluas akses dan memperbaiki layanan kesehatan ibu dan bayi di seluruh daerah.

Tabel II-39 Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)* Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan UCI	Cakupan Desa/Kelurahan UCI
1	Bengkalis	31	22	70,97

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan UCI	Cakupan Desa/Kelurahan UCI
2	Bantan	23	14	60,87
3	Bukit Batu	10	6	60,00
4	Bandar Laksmana	7	4	57,14
5	Siak Kecil	17	15	88,24
6	BathinSolapan	13	8	61,54
7	Mandau	11	9	81,82
8	Pinggir	10	6	60,00
9	Talang Muandau	9	5	55,56
10	Rupat	16	10	62,50
11	Rupat Utara	8	6	75,00
Jumlah		155	105	67,74

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2025

Pada tahun 2024, cakupan desa/kelurahan yang telah mencapai *Universal Child Immunization* (UCI) di Kabupaten Bengkalis mencapai 67,74%. Dari total 155 desa/kelurahan, sebanyak 105 di antaranya telah memenuhi status UCI. Hal ini menunjukkan masih belum optimalnya desa/kelurahan mencapai imunisasi dasar lengkap pada bayi. Selain itu, beberapa kecamatan masih memiliki cakupan UCI di bawah 65%, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan akses dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi dasar bagi bayi.

Tabel II-40 Penderita Diare yang Ditangani di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penderita Diare yang di Tangani	10%	88,60%	12,69%	12,69%	64,84

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2024

Pada tahun 2023, jumlah penderita diare yang mendapatkan penanganan di Kabupaten Bengkalis masih tergolong rendah, yaitu sebesar 12,69%. Dari total target penemuan kasus diare sebanyak 17.461, baru 2.216 penderita yang telah menerima layanan kesehatan. Namun kembali meningkat menjadi 64,84% pada tahun 2024, kondisi ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan akses dan cakupan penanganan diare di seluruh kecamatan. Dengan kolaborasi berbagai pihak, diharapkan layanan kesehatan bagi penderita diare dapat semakin optimal dan merata.

Tabel II-41 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	≤ 4 Tahun	0	0	0
2	5 - 14 Tahun	2	0	2
3	15 - 19 Tahun	1	0	1
4	20 - 24 Tahun	9	1	10

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
5	25 - 49 Tahun	34	12	46
6	≥ 50 Tahun	1	2	3
Jumlah Kasus HIV		47	15	62
Jumlah Penduduk		343.463	328.262	671.725
Prevalensi HIV/AIDS		0,0137	0,0046	0,0092

Sumber: Diolah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2025

Pada tahun 2024, prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Bengkalis tercatat sangat rendah, yakni sebesar 0,0092% dari total penduduk. Berdasarkan data, kasus HIV/AIDS paling banyak ditemukan pada kelompok usia 25–49 tahun, dengan mayoritas penderita berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 34 jiwa.

Tabel II-42 Cakupan Kunjungan Bayi per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Kunjungan Bayi Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Seluruh Bayi Lahir Hidup	Cakupan Kunjungan Bayi
1	Bengkalis	1.366	1.388	98,40
2	Bukit Batu	379	273	138,80
3	Bantan	1.246	592	210,50
4	Mandau	2.376	2.743	86,60
5	Rupat	839	565	148,50
6	Rupat Utara	344	201	171,10
7	Siak Kecil	962	303	317,50
8	Pinggir	4.095	1.568	261,20
9	Bandar Laksamana	362	292	124,00
10	Talang Muandau	852	402	211,90
11	Bathin Solapan	1.383	1.628	85,00
Kabupaten Bengkalis		14.204	9.955	142,70

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2025

Pada tahun 2024, cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Bengkalis mencapai 142,70% dari total bayi yang lahir hidup. Secara keseluruhan, distribusi cakupan kunjungan bayi di setiap kecamatan sudah menunjukkan pemerataan yang baik. Tingginya cakupan kunjungan ini berperan penting dalam meningkatkan kesehatan bayi serta membantu mengurangi risiko gangguan kesehatan yang mungkin terjadi.

Tabel II-43 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Ibu Hamil Yang Memperoleh Pelayanan Antenatal K4	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (%)
1	Bengkalis	1.605	87,75
2	Bantan	588	64,19
3	Bukit Batu	290	63,74
4	Bandar Laksmana	307	81,22
5	Siak Kecil	361	64,35
6	BathinSolapan	1.647	71,80
7	Mandau	3.103	93,69
8	Pinggir	1.709	111,26
9	Talang Muandau	345	52,43
10	Rupat	595	73,91
11	Rupat Utara	120	35,50
Jumlah		10.380	81,57

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2025

Indikator cakupan K4 memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Indikator ini juga dapat memberikan gambaran persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang berkompeten. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 mencapai 81,57%. Capaian ini sudah cukup baik dan merata di Kabupaten Bengkalis. Hal ini mencerminkan meningkatnya kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya kepada tenaga kesehatan yang berkompeten, sehingga diharapkan dapat mendukung kehamilan yang sehat dan persalinan yang aman. Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan terus berupaya meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak guna mewujudkan generasi yang lebih sehat.

Tabel II-44 Cakupan Puskesmas per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Puskesmas	Jumlah Seluruh Kecamatan	Cakupan Puskesmas
Mandau	2	2	100,00%
Pinggir	1	1	100,00%
BathinSolapan	3	3	100,00%
Talang Muandau	1	1	100,00%
Bukit Batu	1	1	100,00%
Siak Kecil	2	2	100,00%
Bandar Laksamana	1	1	100,00%
Rupat	2	3	66,67%
Rupat Utara	1	3	33,33%
Bengkalis	3	2	150,00%
Bantan	2	3	66,67%
Kabupaten Bengkalis	19	22	86,36%

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2025

Indikator pelayanan kesehatan berupa cakupan puskesmas di Kabupaten Bengkalis sudah cukup baik, yaitu mencapai 86,36% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata terdapat lebih satu Puskesmas pada setiap kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Setidaknya setiap kecamatan terdapat satu puskesmas yang melayani kesehatan masyarakat, bahkan terdapat 6 (enam) kecamatan yang memiliki Puskesmas lebih dari satu unit, khususnya pada kecamatan yang memiliki jumlah penduduk lebih padat dan daerah perkotaan. Selain tersedianya Puskesmas sebagai pelayanan kesehatan dasar masyarakat atau disebut juga fasilitas pelayanan kesehatan primer, juga tersedia Puskesmas Pembantu yang tersebar pada setiap kecamatan. Puskesmas Pembantu merupakan jaringan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang membantu dan menunjang memperluas jangkauan pelayanan kesehatan primas kepada masyarakat yang melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan seperti halnya Puskesmas.

Tabel II-45 Cakupan Puskesmas Pembantu per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

Kecamatan	Puskesmas Pembantu	Jumlah Seluruh Desa/Kel	Cakupan Puskesmas Pembantu
Mandau	8	11	73%
Pinggir	3	10	30%
BathinSolapan	5	13	38%
Talang Muandau	2	9	22%
Bukit Batu	4	10	40%
Siak Kecil	4	17	24%
Bandar Laksamana	6	7	86%
Rupat	3	16	19%
Rupat Utara	7	8	88%
Bengkalis	5	31	16%
Bantan	8	23	35%
KabupatenBengkalis	55	155	35%

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2025

Indikator pelayanan kesehatan melalui cakupan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Bengkalis saat ini mencapai 35% dari total kelurahan/desa yang ada. Hingga tahun 2024, terdapat 55 Puskesmas Pembantu yang tersebar di berbagai kecamatan. Kecamatan Mandau memiliki jumlah Puskesmas Pembantu terbanyak, yaitu sebanyak 8 unit. Secara keseluruhan, rata-rata setiap kecamatan di Kabupaten Bengkalis memiliki setidaknya 3 unit Puskesmas Pembantu. Dengan ketersediaan ini, pelayanan kesehatan primer bagi masyarakat dapat dikatakan cukup memadai, meskipun upaya peningkatan akses dan pemerataan fasilitas kesehatan tetap menjadi prioritas dalam mendukung pelayanan yang lebih optimal kedepannya.

Tabel II-46 Cakupan Pelayanan Nifas per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Peserta Ibu Nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar	Seluruh Ibu Nifas	Cakupan Pelayanan Nifas
1	Bengkalis	1.463	1.746	83,8
2	Bantan	661	434	152,3
3	Bukit Batu	287	874	32,8
4	Bandar Laksmana	321	3162	10,2
5	Siak Kecil	328	769	42,7
6	Bathin Solapan	1.668	322	518
7	Mandau	2.950	536	550,4
8	Pinggir	1.378	1.466	94
9	Talang Muandau	437	360	121,4
10	Rupat	460	628	73,2
11	Rupat Utara	206	2.190	9,4
Jumlah		10.159	12.487	81,4

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2025

Pada tahun 2024, cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Bengkalis mencapai 81,4% dari total ibu nifas yang ada. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar ibu nifas telah mendapatkan layanan kesehatan pascapersalinan. Namun, masih terdapat beberapa kecamatan dengan cakupan pelayanan yang relatif rendah, seperti Kecamatan Rupat Utara dengan 9,4% dan Kecamatan Bandar Laksamana dengan 10,2%. Pemerataan akses layanan kesehatan bagi ibu nifas tetap menjadi prioritas pemerintah dan akan terus dilakukan guna memastikan kesehatan ibu pascapersalinan tetap terjaga.

Tabel II-47 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin Per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin Yang Mendapat MP-ASI	Jumlah Seluruh Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin
1	Bengkalis	302	2.021	14,9
2	Bukit Batu	59	386	15,3
3	Bantan	179	847	21,1
4	Mandau	214	2.327	9,2
5	Rupat	179	917	19,5
6	Rupat Utara	58	197	29,4
7	Siak Kecil	194	699	27,8
8	Pinggir	219	1.829	12
9	Bandar Laksamana	88	434	20,3
10	Talang Muandau	91	890	10,2

No	Kecamatan	Jumlah Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin Yang Mendapat MP-ASI	Jumlah Seluruh Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin
11	Bathin Solapan	195	2.829	6,9
Kabupaten Bengkalis		1.778	13.376	13,3

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2025

Pada tahun 2024, cakupan pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) bagi anak usia 6–24 bulan dari keluarga miskin di Kabupaten Bengkalis baru mencapai 13,3%. Meskipun mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, angka ini masih tergolong rendah. Dari total 13.376 anak dalam kategori tersebut, baru 1.778 anak yang telah mendapatkan MP-ASI. Capaian ini perlu terus ditingkatkan, mengingat MP-ASI berperan penting dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk terus memperkuat upaya pemenuhan gizi bagi anak, terutama anak dari keluarga kurang mampu, guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Tabel II-48 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Peserta Didik SD	Jumlah Peserta Didik SD mendapat Pelayanan Kesehatan	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
1	Bengkalis	1.657	1.628	98
2	Bantan	689	680	99
3	Bukit Batu	448	389	87
4	Bandar Laksmana	433	398	92
5	Siak Kecil	477	477	100
6	BathinSolapan	2.762	2.642	96
7	Mandau	3.078	2.999	97
8	Pinggir	1491	1.452	97
9	Talang Muandau	1413	1129	80
10	Rupat	897	878	98
11	Rupat Utara	326	326	100
Jumlah		13.671	12.998	95

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2025

Pada tahun 2024, cakupan penjaringan kesehatan bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan setingkat di Kabupaten Bengkalis mencapai 95%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari upaya pemantauan dan pencegahan dini masalah kesehatan anak usia sekolah. Kecamatan Siak Kecil dan Rupat Utara tercatat sebagai wilayah dengan cakupan penjaringan kesehatan tertinggi. Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan terus berupaya

meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi siswa guna mendukung tumbuh kembang siswa secara optimal.

Tabel II-49 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin per Kecamatan di Kabupaten bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Kunjungan Pasien Miskin di Sarkes Strata 1	Jumlah Seluruh Masyarakat Miskin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
1	Bengkalis	49.969	38.462	76,97
2	Bukit Batu	21.313	9.907	46,48
3	Bantan	39.371	23.499	59,69
4	Mandau	124.355	32.749	26,34
5	Rupat	26.439	22.126	83,69
6	Rupat Utara	6.133	7.895	128,73
7	Siak Kecil	15.826	9.881	62,44
8	Pinggir	16.048	15.848	98,75
9	Bandar Laksamana	4.467	5.649	126,46
10	Talang Muandau	4.175	6.844	163,93
11	BathinSolapan	47.561	22.987	48,33
Kebupaten Bengkalis		355.657	195.847	55,07

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2025

Pada tahun 2024, cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bengkalis mencapai 55,07% dari total 195.847 jiwa yang terdata. Namun, di beberapa kecamatan, angka cakupan ini masih di bawah 50%. Salah satu di antaranya adalah Kecamatan Muandau, di mana cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat kurang mampu baru mencapai 26,34%. Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus berupaya meningkatkan akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu, agar pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan dapat terus ditingkatkan.

2.1.3.1.2.1 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Bengkalis

Realisasi pencapaian SPM pada Urusan Kesehatan mengacu penyusunan Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dengan realisasi sebagai tabel berikut :

Tabel II-50 Pencapaian SPM Urusan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase (%) Pendidikan Dasar Usia Dini	100%	88,85%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase (%) Pendidikan Dasar	100%	82,82%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase (%) Pendidikan Kesetaraan	100%	85,17%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase (%) Pelayanan Kesehatan Balita	100%	76,98%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase (%) Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	104,77%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase (%) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	84,90%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase (%) Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%	111,58%
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Persentase (%) Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100%	76,18%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	Persentase (%) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	100%	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase (%) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	68,84%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase (%) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	122,33%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Persentase (%) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	100%	100,59%
Jumlah			100%	91,92%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2025

Untuk capaian indikator pada Tahun 2024, tercapai secara keseluruhan 91,92% dan atau kategori indeks pencapaian SPM nya TUNTAS UTAMA. Rinciannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil capaian indikator sebesar 88,85%
- b. Untuk Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin capain indikator sebesar 82,82%.
- c. Untuk Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir capain indikator sebesar 85,17%.
- d. Untuk Pelayanan Kesehatan Balita capain indikator sebesar 76,98%.
- e. Untuk Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar capaian indikator 104,77%.
- f. Untuk Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif capaian indikator sebesar 84,90%.
- g. Untuk Pelayanan Kesehatan Pada Usia capaian indikator 100%.
- h. Untuk Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi capain indikator sebesar 111,58%.
- i. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi capain indikator sebesar 76,18%.
- j. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus capain indikator sebesar 100%.
- k. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat capain indikator sebesar 68,84%.

- l. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis capain indikator sebesar 122,33%.
- m. Pelayanan Kesehatan Orang dengan ResikoTerinfeksi HIV capain indikator sebesar 100,59%.

2.1.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Keberhasilan pelayanan dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Bengkalis dapat diukur melalui berbagai indikator pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selama periode 2020–2024, sejumlah indikator menunjukkan perbaikan, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Salah satu indikator yang mengala

mi perkembangan adalah pembangunan infrastruktur jalan. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2020 tercatat sebesar 37,87% dari total panjang jalan. Angka ini mengalami peningkatan hingga mencapai 49,63% pada tahun 2022, meskipun sempat menurun menjadi 39,81% pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, angka tersebut kembali mengalami kenaikan menjadi 41,03%.

Sementara itu, rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 masih tergolong rendah, yakni sebesar 0,0022 atau dalam rasio 1:444. Artinya, setiap satu kilometer jalan digunakan oleh setidaknya 444 penduduk. Dalam lima tahun terakhir, pembangunan jalan di Kabupaten Bengkalis telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Namun, upaya peningkatan infrastruktur jalan masih perlu terus dilakukan, mengingat pertumbuhan jumlah penduduk belum sepenuhnya diimbangi dengan pembangunan jalan yang memadai. Peningkatan jaringan jalan yang berkelanjutan sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat.

Beberapa hal yang menyebabkan persoalan penurunan kualitas jalan di Kabupaten Bengkalis antara lain adalah (1) Dinas PUPR lebih memprioritaskan pembangunan ruas jalan strategis dengan anggaran yang tersedia dan lebih besar dibandingkan dengan pemeliharaan jalan serta dampak rasionalisasi APBD Kabupaten Bengkalis yang dialihkan untuk pemeliharaan jalan, sehingga target kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik saat ini belum bisa dicapai. (2) Ruas jalan sepanjang 37,04 Km kewenangannya diambil oleh Pemerintah Provinsi Riau dan terdapat ruas sepanjang 191,64 Km yang tumpang tindih dan masuk dalam status jalan lingkungan. (3) Skala prioritas Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk ruas jalan strategis yang membutuhkan anggaran besar sehingga anggaran untuk pemeliharaan ruas jalan agar berkondisi baik mengalami penurunan dari sisi penganggarnya.

Tabel II-51 Perkembangan Indikator Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (Km)	476,116	527,030	623,867	522,416	538,269

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	37,87	41,92	49,63	39,82	41,03
3	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	0,0022	0,0029	0,0022	0,0022	na
4	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	1:450	1:456	1:464	1:444	na
5	Persentase bangunan gedung yang memiliki IMB	78,87	79,25	79,36	79,78	na
6	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	89,67	na	na	na	na
7	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	93,73	na	na	na	na
8	Ketaatan Terhadap RTRW	na	90	90	90	90
9	Persentase pengamanan tebing/pantai dalam kondisi baik	31,6	36,6	29,5	29,5	29,6
10	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	68,96	69,18	71,04	73,41	75,77
11	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	100	100	100	100	100
12	Panjang garis pantai rawan abrasi yang terlindungi infrastruktur	31,6	36,6	29,5	29,5	29,6
13	Panjang infrastruktur pengaman daerah istansi isd rawan longsor	na	4,44	4,44	4,44	4,44
14	Jumlah unit air baku dalam kondisi baik	5	5	5	6	6
15	Persentase luas kawasan bebas banjir	na	77,1	89,94	89,94	89,94
16	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	na	60,76	61,08	61,23	93,92
17	Persentase RT akses air bersih	na	58,03	60,53	71,35	71,35

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis, 2025

Indikator lainnya menunjukkan persentase bangunan yang memiliki IMB tetap stabil di kisaran 78-79%, mencerminkan tingkat kepatuhan masyarakat yang cukup baik terhadap regulasi bangunan di Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya indikator cakupan pengamanan tebing dan pantai dalam kondisi baik masih stagnan di angka 29,6% pada tahun 2024, hal yang sama terjadi pada indikator cakupan garis pantai rawan abrasi yang terlindungi

infrastruktur yaitu 29,6%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan wilayah pesisir masih memerlukan peningkatan.

Sementara itu, perkembangan indikator persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik terus meningkat hingga mencapai 75,77% pada tahun 2024, kondisi akan berdampak terhadap kinerja sektor pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Bengkalis. Sistem drainase juga sudah dalam kondisi optimal dengan capaian 100% dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, jumlah unit air baku dalam kondisi baik meningkat dari lima unit pada tahun 2020 menjadi enam unit pada tahun 2023 dan 2024, yang mencerminkan peningkatan kapasitas sumber daya air. Kemajuan signifikan juga terlihat dalam pengelolaan limbah domestik, di mana cakupan rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan limbah meningkat drastis dari 60,76% pada tahun 2021 menjadi 93,92% pada tahun 2024. Akses rumah tangga terhadap air bersih juga mengalami peningkatan dari 58,03% pada tahun 2020 menjadi 71,35% pada tahun 2024, menunjukkan adanya perbaikan dalam penyediaan layanan air bersih bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, pelayanan dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Bengkalis mengalami kemajuan yang cukup baik di beberapa sektor utama, khususnya dalam peningkatan jalan, irigasi, dan pengolahan limbah. Namun, masih terdapat tantangan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, terutama dalam pemerataan akses jalan, peningkatan rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk, serta perlindungan wilayah pesisir dari abrasi. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan masih menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Bengkalis guna memastikan pembangunan infrastruktur yang lebih merata, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis.

2.1.3.1.3.1 Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

Dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dijelaskan bahwa SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum terdiri dari 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang terdiri atas 4 indikator dengan batas waktu pencapaian setiap tahun. Untuk Realisasi capaian SPM urusan Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-52 Realisasi Capaian SPM Urusan pekerjaan Umum 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase (%) penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	86,45%
2	Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	Persentase (%) Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestic	100%	76,20%

Capaian SPM	81,33%
--------------------	---------------

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis, 2025

Untuk capaian indikator pada Tahun 2024, tercapai secara keseluruhan 81,33% dan atau kategori indeks pencapaian SPM nya TUNTAS MADYA.

Rinciannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan capaian SPM sebesar 86,45%.
- b. Untuk penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik dengan capaian SPM sebesar 76,20%.

2.1.3.1.4 Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Keberhasilan pelayanan dalam bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan di Kabupaten Bengkalis diantaranya adalah rasio rumah layak huni di Kabupaten Bengkalis hingga tahun 2023 telah mencapai lebih dari 100,73%, namun sedikit turun menjadi 99,96% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah di Kabupaten Bengkalis telah memenuhi standar kelayakan huni. Selain itu, rasio permukiman layak huni juga mengalami peningkatan dari 98,16% pada tahun 2022 menjadi 99,4% pada tahun 2024.

Di sisi lain, kondisi lingkungan permukiman kumuh menunjukkan tren penurunan yang cukup baik, dari 4,4% pada tahun 2020 menjadi hanya 1,28% pada tahun 2024. Sementara itu, persentase lingkungan kumuh di wilayah perkotaan yang sempat berkurang hingga 2,27% pada tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan menjadi 6,12% pada tahun 2024. Hal ini masih menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mengoptimalkan program penataan kawasan permukiman, terutama di wilayah perkotaan, agar tetap terkendali dan tidak mengalami peningkatan kawasan kumuh kedepannya. Sehingga diharapkan kualitas hunian dan lingkungan di Kabupaten Bengkalis semakin baik dan layak bagi seluruh masyarakat.

Tabel II-53 Perkembangan Indikator Perumahan rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio rumah layak huni	97,79	97,85	99,51	100,73	99,96
2	Rasio pemukiman layak huni	na	na	98,16	98,25	99,4
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	0,75	na	0,23	0,38	na
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	na	na	11,85	18,18	na
5	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	4,4	16,72	3,67	3,38	1,28
6	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	na	na	16,72	2,27	6,12
7	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	46,45	32,26	49,68	65,98	54
8	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	na	na	20%	20%	20%

Sumber: Dinas PERKIMTAN Kabupaten Bengkalis, 2025

Cakupan lingkungan sehat dan aman, serta didukung oleh PSU adalah indikator yang menggambarkan kualitas lingkungan di suatu daerah. Suatu daerah dapat dikatakan lebih maju jika lingkungannya aman dan sehat serta didukung oleh PSU yang memadai. Pada tahun 2020 capaian lingkungan sehat dan aman yang didukung oleh PSU yang memadai sebesar 46,45%, meningkat hingga tahun 2023, namun sedikit turun pada tahun 2024 menjadi 54%. Meskipun menunjukkan tren peningkatan, namun masih terdapat kawasan perumahan dan permukiman yang belum sepenuhnya memiliki fasilitas pendukung yang optimal. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bengkalis terus berupaya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui pembangunan dan peningkatan prasarana, sarana, serta utilitas umum guna menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat.

Di sisi lain, penyelesaian sengketa tanah garapan melalui mekanisme mediasi masih tergolong rendah, dengan capaian hanya 20%. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar kasus sengketa tanah garapan belum dapat diselesaikan secara efektif melalui jalur mediasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa tanah agar permasalahan terkait kepemilikan lahan dapat diselesaikan secara adil dan berkelanjutan. Dengan perencanaan yang matang serta koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan, diharapkan kualitas lingkungan serta tata kelola pertanahan di Kabupaten Bengkalis dapat terus membaik dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

2.1.3.1.4.1 SPM Urusan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis berupaya secara maksimal melaksanakan seluruh Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal, Namun ada beberapa kendala dimasa transisi penerapan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dimana transisi pada Penerapan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008. Untuk realisasi SPM pada urusan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-54 Capaian SPM Perumahan Rakyat 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Negara korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	15%
2	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak Huni	100%	92,31%
Capaian SPM				53,65%

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis, 2024

Untuk capaian indikator pada Tahun 2024, hanya tercapai sebesar 53,65 % dan atau kategori indeks pencapaian SPM nya BELUM TUNTAS. Rinciannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten dengan capaian 100%.
- b. Untuk fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota sebesar 0%.

Indikator selanjutnya pada urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat adalah Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten. Untuk indikator ini pada tahun 2024 telah terdapat 87,63% rumah tangga yang diberikan layanan akses air minum SPAM perpipaan. Ini berarti sudah sebagian besar masyarakat Bengkulu menikmati layanan air minum bersih dan layak dari akses SPAM. Peningkatan layanan ini ke depannya akan difokuskan untuk wilayah pedalaman dan kepuulauan yang belum memiliki akses terhadap air minum SPAM perpipaan. Lebih lanjut dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel II-55 Capaian SPM Akses Air Minum Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024

Tahun	Jumlah Rumah tangga Terlayani (Unit)	Proyeksi jumlah rumah tangga di Kabupaten/ Kota pada akhir tahun pencapaian SPM (Unit)	PENCAPAIAN SPM Air Minum RUMUS ($\frac{\Sigma (2)}{\Sigma(3)} \times 100 \%$) (%)	Sumber Data
2021	138.071	161.850	85,31%	PERUMDA Air Minum Bengkulu, PAMSIMAS Bengkulu, Konversi data Dinas Kesehatan
2022	139.175	161.850	85,99%	PERUMDA Air Minum Bengkulu, PAMSIMAS Bengkulu, Survei
2023	140.428	161.850	86,76%	
2024	141.832	161.850	87,63%	
2025	143.392	161.850	88,60%	
2026	145.113	161.850	89,66%	

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu, 2025

Indikator selanjutnya dalam SPM urusan perumahan rakyat adalah penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. SPALD Setempat (SPALD-S) adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air

limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil oalahan diangkut dengan sarana pengangkutan ke sub sistem pengolahan lumpur tinja. Sementara itu SPALD Terpusat (SPALD-T) adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.

Data tahun 2024 menunjukkan bahwa rumah yang memiliki akses terhadap pengolahan limbah domestik sudah mencapai 76,44%. Ke depannya pemerintah daerah akan fokus untuk meningkatkan pelayanan pengembangan pengolahan air limbah domestik pada daerah-daerah pedalaman yang belum memiliki akses terhadap pengolahan limbah domestik mandiri. Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat agar akses pengolahan limbah dapat meningkat sehingga akan menjaga kebersihan lingkungan permukiman di Kabupaten Bengkalis.

Tabel II-56 Capaian SPM Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2024

Tahun	Σ Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tangkai septik (unit)	Σ Rumah di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/Ha (unit)	PENCAPAIAN SPM Penyediaan SPALD-S akses dasar RUMUS $(\Sigma (2)/\Sigma(3) \times 100 \%)$	Sumber data
2021	92.358	123.006	75,08%	Konversi Data Dinas Kesehatan
2022	92.765	123.006	75,41%	Survei
2023	93.321	123.006	75,87%	Survei
2024	94.021	123.006	76,44%	Survei
2025	94.867	123.006	77,12%	Survei
2026	95.911	123.006	77,97%	Survei

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis, 2025

SPM selanjutnya adalah Pelayanan SPALD-S Akses Aman Kabupaten Bengkalis. Capaian SPM ini melihat sejauh mana limbah tinja rumah tangga telah diolah ole IPLT di Kabupaten Bengkalis. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa masih belum ada rumah yang lumpur tinjanya diolah di IPLT. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-57 Capaian SPM Pelayanan SPALD S Akses Aman Tahun 2024

TAHUN	Σ Rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	Σ Rumah di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 jiwa/Ha	PENCAPAIAN SPM Penyediaan SPALD-S akses Aman RUMUS $(\Sigma (2)/\Sigma (3) \times 100 \%)$	Sumber Data
2021	0	38.844	0,00%	Konversi Data Dinas Kesehatan
2022	0	38.844	0,00%	Survei
2023	400	38.844	1,03%	Survei

TAHUN	Σ Rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	Σ Rumah di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 jiwa/Ha	PENCAPAIAN SPM Penyediaan SPALD-S akses Aman RUMUS ($\Sigma (2)/\Sigma (3) \times 100\%$)	Sumber Data
2024	550	38.844	1,42%	Survei
2025	750	38.844	1,93%	Survei
2026	1000	38.844	2,57%	Survei

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis, 2025

2.1.3.1.5 Urusan Ketetraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketetraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat diukur melalui beberapa indikator. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) dari tahun 2020 hingga 2021 stabil di angka 1.859 orang, namun turun menjadi 1.521 orang pada tahun 2022, tetap pada tahun 2023 dan kembali naik pada tahun 2024 menjadi 1678 orang. Sementara itu penegakan Peraturan Daerah (PERDA) sudah mencapai 100% dari tahun 2021-2024. Selanjutnya persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) yang dapat diselesaikan juga sudah mencapai mencapai 100% dari tahun 2021 hingga 2024.

Tabel II-58 Perkembangan Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 (%)

No	Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1.859 Orang	1.859 Orang	1521 Orang	1521 Orang	1678 Orang
2	Persentase Penegakan PERDA	80%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	80%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	73	73	73	73	100
5	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	98	68	91	85,26	96,88
6	Indeks Resiko Bencana	156,4	140,37	128,86	134,65	137.73
7	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit /Wabah Zoonosis Prioritas	100%	94%	100%	100%	na
8	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana	2555 Jiwa / 100%	2575 Jiwa/102%	400 Jiwa/ 100%	1000 Jiwa/ 100%	1000 Jiwa/ 90%
9	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	2000 Jiwa /100%	2100 Jiwa/ 83,23%	109 Jiwa/ 100%	355 Jiwa/ 100%	100%
10	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	115 KK/ 100%	116 KK/ 99,91 %	139 Jiwa/ 100%	200 Jiwa/ 100 %	96%

Sumber: Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis, 2025

Cakupan pelayanan kebakaran di Kabupaten Bengkalis mencapai 73% pada periode 2021-2024. Sejalan dengan itu, tingkat waktu tanggap (*response time rate*) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) mengalami fluktuasi, dengan capaian 98 pada tahun 2020, menurun menjadi 68 pada tahun 2021, kemudian meningkat kembali menjadi 91 pada tahun 2022, dan sedikit menurun menjadi 85,26 pada tahun 2023.

Di sisi lain, upaya peningkatan layanan informasi bencana menunjukkan hasil yang baik, dengan cakupan 100% warga negara yang memperoleh layanan tersebut selama periode 2020-2023. Hal ini sejalan dengan peningkatan akses terhadap informasi kebencanaan yang dapat membantu masyarakat lebih siap dalam menghadapi potensi bencana. Sementara itu, layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana juga sudah mencapai 100% pada tahun 2020, turun menjadi 83,23% pada tahun 2021, namun kembali meningkat menjadi 100% pada tahun 2022 dan 2023. Lebih lanjut, Indeks Risiko Bencana menunjukkan tren penurunan yang positif dari 156,4 pada tahun 2020 menjadi 128,86 pada tahun 2022, meskipun sedikit meningkat ke angka 134,65 pada tahun 2023.

2.1.3.1.5.1 Capaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum

Penyusunan Laporan Pencapaian SPM Tahun 2018 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota.

Tahun 2024 Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan seluruh Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal. Untuk data penerima layanan bersumber dari laporan dan pengaduan masyarakat serta temuan kasus dari relawan sosial di lapangan. adapun hasil capaian SPM Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II-59 Realisasi Capaian SPM Urusan Ketentraman dan ketertiban Umum Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase (%) warga negara yang memperoleh pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100%	93,56%
Capaian SPM				97,02 %

Sumber: Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis, 2025

Untuk capaian indikator pada Tahun 2024, tercapai secara keseluruhan 97,02% dan atau kategori indeks pencapaian SPM nya TUNTAS UTAMA. Terdapat jumlah total yang harus dilayani sebanyak 41 orang dan jumlah total yang terlayani sebanyak 40 orang.

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Berdasarkan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 bidang Pemerintahan Dalam Negeri terdiri dari Satu Pelayanan Dasar yang berada dalam Urusan Badan Penanggulangan Bencana, yakni adalah jenis Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum sub Urusan Bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bengkalis bertanggung Jawab akan Pelayanan Dasar Kententraman dan Ketertiban Umum dengan 3 (tiga) Indikator, adapun hasil capaian SPM Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel II-60 Capaian SPM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase (%) warga negara yang memperoleh Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	90%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase (%) warga negara yang memperoleh Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	100%
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase (%) warga negara yang memperoleh Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	96%
Capaian SPM				95,33%

Sumber: BPBD Kabupaten Bengkalis, 2025

Untuk capaian indikator pada Tahun 2024, tercapai secara keseluruhan 95,33% dan atau kategori indeks pencapaian SPM nya TUNTAS UTAMA. Rinciannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk Pelayanan informasi rawan bencana (kebencanaan) terdapat jumlah total yang harus dilayani sebanyak 1.000 orang dan jumlah total yang terlayani sebanyak 1.000 orang dengan capaian indikator 100 %. Untuk jumlah mutu barang/jasa/SDM sebesar 100%.
- b. Untuk pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (kebencanaan) terdapat jumlah yang harus dilayani sebanyak 355 orang dan jumlah total yang terlayani sebanyak 355 orang dengan capaian indikator 100%.
- c. Untuk pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (kebencanaan) terdapat jumlah yang harus terlayani sebanyak 200 orang dan jumlah total yang terlayani sebanyak 200 orang dengan capaian indikator 96%.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis khususnya sejak tahun 2017 telah memiliki Organisasi Perangkat Daerah mandiri yang menangani sub urusan kebakaran, yaitu Dinas Pemadam Kebakaran. Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis No. 41 tahun 2016 tentang Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis.

Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan

Minimal. Jenis Pelayanan dasar sub urusan pemadaman kebakaran adalah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, wajib diterima oleh seluruh warga negara yang menjadi korban dan/atau terdampak kebakaran, dalam waktu tanggap (response time) 15 (lima belas) menit. Ketentuan teknis ini telah menjadi satu faktor untuk penghitungan Indeks Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sub urusan dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

Tabel II-61 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemadaman Kebakaran Kabupaten Bengkalis Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum 2024

No	Indikator	Target	Capaian
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Damkar)	100%	98,02%
Capaian SPM			98,02%

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis, 2025

Untuk capaian indikator pada tahun 2024, tercapai secara keseluruhan 98,02% dan atau kategori indeks pencapaian SPM nya TUNTAS UTAMA. Terdapat jumlah total yang harus dilayani sebanyak 171 orang dan jumlah total yang terlayani sebanyak 171 orang.

2.1.3.1.6 Urusan Sosial

Urusan Sosial dapat diukur melalui indikator jumlah fakir miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan, jumlah penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang diberikan rehabilitasi sosial, persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial, persentase PPKS yang tertangani dan persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Tabel II-62 Perkembangan Indikator Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 (%)

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia telah menerima jaminan sosial	75%	100%	100%	100%	na
3	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial	80,60%	61,00%	81,80%	86,80%	83,46%
4	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	100%	100%	100%	100%	79%

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
5	Persentase PPKS Skala yang memperoleh bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar	77%	61,00%	81,80%	80%	83,46%
6	Jumlah Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan	603 KK	711 KK	144 KK	288 KK	326 KK
7	Jumlah penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang diberikan rehabilitasi sosial (Orang)	108 Orang	264 Orang	596 Orang	317 Orang	253 KK

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, 2025

Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat sudah tercapai sebesar 100% dari tahun 2020-2024. Adapun jumlah Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan mengalami fluktuasi, dari 603 KK pada 2020 meningkat menjadi 711 KK pada 2021, kemudian kembali turun menjadi 144 KK pada 2022, dan kembali naik hingga tahun 2024 menjadi 326 KK.

Selanjutnya jumlah penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang diberikan rehabilitasi sosial juga menunjukkan peningkatan signifikan dari 108 orang pada 2020 menjadi 596 orang pada 2022, meskipun kembali turun hingga tahun 2024 menjadi 253 orang. Penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang diberikan rehabilitasi sosial dalam bentuk pemberian bantuan usaha ekonomi produktif, diberikan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja dan diberikan beberapa pelatihan di dalam dan di luar provinsi. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keberdayaan dan kemandirian para penyandang disabilitas agar dapat bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengurangi ketergantungan dengan orang lain, sehingga tidak menjadi permasalahan sosial baru. Selain itu Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 sudah mencapai 100%.

Sedangkan persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia telah menerima jaminan sosial meningkat dari 75% pada 2020 menjadi 100% pada tahun 2021 hingga 2023. Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial mengalami penurunan dari 80,6% pada 2020 menjadi 61% pada 2021, lalu meningkat menjadi 86,8% hingga tahun 2023, namun sedikit turun pada tahun 2024 menjad 83,46%. Sejalan dengan itu, persentase PPKS yang tertangani sudah tercapai 100% dari tahun 2020-2023. Namun, persentase PPKS Skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar turun dari 77% pada 2020 menjadi 61% pada 2021, kemudian naik kembali menjadi 81,8% pada 2022 dan sedikit menurun ke 80% pada 2023. Berikut adalah persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024, yaitu:

Tabel II-63 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Bantuan Sosial per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah PPKS yang Diberikan Bantuan	Jumlah PPKS yang Seharusnya Menerima Bantuan	Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
1	Bengkalis	31.231	38.462	81,20%
2	Bukit Batu	8.436	23.499	35,90%
3	Bantan	21.937	9.907	221,43%
4	Mandau	24.856	32.749	75,90%
5	Rupat	20.626	22.126	93,22%
6	Rupat Utara	7.597	7.895	96,23%
7	Siak Kecil	9.046	9.881	91,55%
8	Pinggir	12.152	15.848	76,68%
9	Bandar Laksamana	4.702	5.649	83,24%
10	Talang Muandau	5.902	6.844	86,24%
11	Bathin Solapan	16.965	22.987	73,80%
Kabupaten Bengkalis		163.450	195.847	83,46%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, 2025

Data PPKS penerima bantuan Sosial merupakan data Penerima Bantuan Sosial yang bersumber dari dana APBN dan APBD. Data yang seharusnya menerima bantuan bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dimana berdasarkan data ini, pada tahun 2024 terdapat 195.847 orang yang terdaftar di DTKS, dan sudah sebanyak 163.450 penduduk Kabupaten Bengkalis mendapatkan bantuan sosial yang berasal dari dana APBD dan APBN.

Jumlah PPKS terbanyak berdasarkan DTKS berada di Kecamatan Bengkalis sebanyak 31.231 orang dan pada Kecamatan Mandau dengan jumlah sebanyak 24.856 orang. Sedangkan jumlah PPKS paling sedikit berada di Kecamatan Bandar Laksamana dengan jumlah 4.702 orang.

Tabel II-64 Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Pemerintahan untuk Kebutuhan Dasar Per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah PPKS yang Diberikan Bantuan	Jumlah PPKS yang Seharusnya Menerima Bantuan	Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
1	Bengkalis	31.231	38.462	81,20%
2	Bukit Batu	8.436	23.499	35,90%
3	Bantan	21.937	9.907	221,43%
4	Mandau	24.856	32.749	75,90%
5	Rupat	20.626	22.126	93,22%
6	Rupat Utara	7.597	7.895	96,23%
7	Siak Kecil	9.046	9.881	91,55%
8	Pinggir	12.152	15.848	76,68%
9	Bandar Laksamana	4.702	5.649	83,24%
10	Talang Muandau	5.902	6.844	86,24%
11	Bathin Solapan	16.965	22.987	73,80%

No	Kecamatan	Jumlah PPKS yang Diberikan Bantuan	Jumlah PPKS yang Seharusnya Menerima Bantuan	Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
	Kabupaten Bengkalis	163.450	195.847	83,46%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, 2025

Data PPKS penerima bantuan merupakan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pusat dan Otonom. Data yang seharusnya menerima bantuan bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dimana pada tahun 2024 terdapat sebanyak 195.847 penduduk yang berhak menerima bantuan berdasarkan data DTKS, dan sudah sebanyak 83,46% diantaranya diberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pemberian bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar di Kabupaten Bengkalis secara keseluruhan telah menunjukkan capaian yang cukup baik dan merata. Namun, di Kecamatan Bukit Batu, capaian masih sekitar 35,90% dari total PPKS yang seharusnya menerima bantuan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih agar distribusi bantuan semakin optimal dan merata. Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus berupaya meningkatkan koordinasi dan memastikan bahwa seluruh PPKS disemua wilayah mendapatka distribusi bantuan sosial yang adil dan merata.

Tabel II-65 Persentase PPKS yang tertangani Per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah PPKS yang Tertangani	Jumlah PPKS yang Ada	Persentase PPKS yang Tertangani
1	Bengkalis	775	848	91%
2	Bukit Batu	177	210	84%
3	Bantan	405	474	85%
4	Mandau	318	639	50%
5	Rupat	354	393	90%
6	Rupat Utara	115	128	90%
7	Siak Kecil	259	269	96%
8	Pinggir	198	333	59%
9	Bandar Laksamana	94	110	85%
10	Talang Muandau	66	86	77%
11	BathinSolapan	343	439	78%
	Kabupaten Bengkalis	3.104	3.926	79%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, 2024

Data PPKS yang tertangani merupakan data PPKS yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Dimana pada tahun 2023 terdapat sebanyak 3.104 PPKS yang tertangani dan menerima layanan rehabilitasi sosial. Capaian ini sebesar 79% dari total 3.926 PPKS yang ada. Secara keseluruhan, penanganan PPKS sudah berjalan dengan baik dan relatif merata di berbagai kecamatan. Namun, terdapat beberapa kecamatan yang masih perlu mendapatkan perhatian, seperti Kecamatan Mandau dengan capaian 50% Kecamatan Pinggir dengan capaian 59%.

Kabupaten Bengkalis akan terus mengupayakan langkah-langkah strategis agar layanan rehabilitasi sosial dapat menjangkau lebih banyak PPKS di wilayah-wilayah tersebut.

2.1.3.1.6.1 Capaian SPM Urusan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah membuat dan menyusun Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan urusan wajib yang merupakan kewenangannya. Ruang lingkup pelaporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial adalah informasi tentang kondisi aktual perkembangan penerapan SPM terutama dalam hal pelaksanaan dan penerapan SPM di daerah dalam menerapkan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel II-66 Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi
1	Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Persentase (%) penyandangdisabilitasterlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%
2	Rehabilitasi social dasar anak terlantar di luar panti	Persentase (%) anakterlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%
3	Rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase (%) lanjutusiaterlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%
4	Rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminansosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Persentase (%) korban bencanaalam dan sosial yang terpenuhikebutuhan dasarnya pada saat dan setelah darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%
Capaian SPM UrusanSosial				100%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, 2025

Untuk capaian indikator pada tahun 2023, tercapai secara keseluruhan 100% dan atau kategori indeks pencapaian SPM nya TUNTAS PARIPURNA. Rinciannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti dengan capaian indikator 100%.
- b. Untuk rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti dengan capaian indikator 100%.
- c. Untuk rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti dengan capaian indikator 100%.

- d. Untuk rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti dengan capaian indikator 100%.
- e. Untuk perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota dengan capaian indikator 100%.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Analisis terhadap capaian peningkatan pelayanan dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator pembangunan daerah pada urusan-urusan yang dikelompokkan pada layanan urusan wajib non pelayanan pemerintah daerah diantaranya yaitu Tenaga Kerja; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.

2.1.3.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Perkembangan indikator kinerja urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkalis menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa indikator yang perlu mendapatkan perhatian kedepan, salah satunya adalah rasio lulusan S1/S2/S3. Karena data rasio lulusan S1/S2/S3 tidak tersedia di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, maka digunakan indikator proksi yang mendekati indikator utama yaitu persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan ijazah S1/S2/S3, yang diperoleh dari publikasi BPS Provinsi Riau.

Pada tahun 2020, persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan ijazah S1/S2/S3 tercatat sebesar 9,35%, sedikit menurun tahun 2021 menjadi 8,29%, selanjutnya meningkat hingga tahun 2023 menjadi 11,72% dan sedikit turun pada tahun 2024 menjadi 10,05%. Data tahun 2023 dan 2024 merupakan persentase kumulatif dari seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah perguruan tinggi, termasuk di dalamnya data penduduk dengan ijazah diploma. Hal ini disebabkan oleh perubahan dalam publikasi dokumen BPS Riau Dalam Angka tahun 2024 dan 2025, yang tidak lagi memisahkan data penduduk dengan ijazah diploma dan ijazah S1/S2/S3, seperti yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel II-67 Perkembangan Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Lulusan S1/S2/S3	48,38	42,57	14,58	2,95	0,89
2	Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Ijazah S1/S2/S3	9,35	8,29	9,49	11,72	10,05
3	Persentase Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100%	100%	14,58%	0,03%	28%

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
4	Persentase Besar tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	100%	100%	13,40%	4,06	3,21%
5	Persentase Besar tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	100%	100%	4,92	100%	0,76%
6	Penyelesaian Sengketa Pengusaha- Pekerja (%)	21,88%	57,14%	47,36%	8,33%	44%
7	Angka sengketa pengusaha-pekerja (kasus)	31	14	19	24	11
8	Persentase Besar kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	22%	50%	47,30%	54,17%	45,45%
9	Persentase Besar pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	93,20%	24,88%	21,25%	70%	19,35%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, 2025

Selanjutnya persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun 2020-2021 telah mencapai 100%, namun turun hingga tahun 2023 menjadi 0,03%. Hal yang sama juga terjadi pada indikator persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat pada tahun 2020-2021 telah mencapai 100%, namun turun pada tahun 2022 menjadi 13,40% dan pada tahun 2023 menjadi 40 peserta. Adapun persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan pada tahun 2020-2021 telah mencapai 100%, namun turun signifikan pada tahun 2022 menjadi 4,92% dan naik kembali menjadi 100% pada tahun 2023.

Sedangkan persentase penyelesaian sengketa antara pengusaha pada tahun 2020 tercatat sebesar 31,88%, meningkat menjadi 57,14% pada tahun 2021, namun turun hingga tahun 2023 menjadi 8,33% dan kembali naik pada tahun 2024 menjadi 44%. Angka sengketa pengusaha-pekerja juga menunjukkan kecenderungan menurun, dari 31 kasus pada 2020 menjadi 11 kasus pada 2024. Selain itu, persentase besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) pada tahun 2020 tercatat sebesar 22%, meningkat pada tahun 2021 menjadi 50%, sedikit turun pada tahun 2022 menjadi 47,30%, kembali naik pada tahun 2023 menjadi 54,17% dan sedikit turun pada tahun 2024 menjadi 45,45%. Selain itu, persentase pekerja atau buruh yang menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) tercatat sebesar 93,20% pada tahun 2020, namun turun hingga tahun 2022 menjadi 21,25% dan naik kembali pada tahun 2023 menjadi 70%.

Tabel II-68 Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	766	1.391	55	103	1.148
2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	1.363	1.195	1.612	1.505	1.264

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	56,20%	116,40%	3,41%	6,84%	90,82%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis, 2025

Perkembangan persentase besaran penempatan pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2020 sebesar 56,20%, meningkat menjadi 116,40% pada tahun 2021, turun signifikan pada tahun 2022 menjadi 3,41% dan kembali naik hingga tahun 2024 menjadi 90,82%. Peningkatan ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mengoptimalkan program ketenagakerjaan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Salah satu indikator yang mencerminkan upaya tersebut adalah peningkatan Persentase Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, yang pada tahun 2024 mencapai 28%, naik signifikan dibandingkan tahun 2023 yang hanya sebesar 0,03%. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja agar lebih siap bersaing di dunia kerja.

Selanjutnya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal. Pada tahun 2023 tercatat hanya 28 penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal, dengan TPAK sebesar 4,88%. Sebagian besar penyandang disabilitas bekerja di sektor informal, yaitu sebanyak 556 orang, sementara 282 orang lainnya masih berstatus pelajar atau mahasiswa. Dari total 886 penyandang disabilitas, 574 orang berada dalam usia angkatan kerja (15-64 tahun). Meskipun ada partisipasi di sektor formal, jumlahnya masih rendah. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan akses dan dukungan untuk penyandang disabilitas agar dapat lebih berpartisipasi di sektor formal.

Tabel II-69 Jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penyandang Disabilitas di Sektor Formal Kabupaten Bengkalis Tahun 2023

No	Keterangan	Jumlah
1	Pekerja Formal	28
2	Pekerja Informal	556
3	Pelajar/Mahasiswa	282
Total		886
Angkatan Kerja (15-64)		574
TPAK di Sektor Formal		4,88%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencacatan Sipil Provinsi Riau, 2024 (diolah)

2.1.3.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Keberhasilan pembangunan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Bengkalis dapat diukur melalui beberapa indikator penting selama periode 2020-2024. Salah satu indikator utama adalah proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR, yang menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD meningkat dari 8,89% pada tahun 2020, menjadi 15,55% pada tahun 2023. Indikator ini

mencerminkan terjadinya peningkatan keterwakilan perempuan di ranah politik, meskipun masih perlu peningkatan untuk mencapai paritas gender yang lebih baik.

Partisipasi perempuan dalam dunia kerja juga menjadi salah satu indikator penting. Pada tahun 2020, partisipasi perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi tercatat sebesar 52,17%, meningkat menjadi 54,56% pada tahun 2021, namun kemudian menurun menjadi 50,10% pada tahun 2022 dan sedikit membaik pada tahun 2023 menjadi 50,41%.

Tabel II-70 Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR	8,89	8,89	8,99	8,99	15,55
2	Rasio KDRT	0,002	0,001	0,45	0,000068	0,000107
3	Partisipasi Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	52,17	54,56	50,1	50,41	
4	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100	100	100	100	100
5	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A danPPT/PKT di rumah sakit	100	100	100	100	100
6	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	100	100	100	100	100
7	Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	100	100	100	100	0
8	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	100	100	0	0	0
9	Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SD	90,28	90,22	88,61	88,09	107,49
10	Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SMP	54,78	55,75	59,07	56,16	98,22
11	Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SMA	115,03	55,88	55,65	56,71	81,14

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis, 2025

Perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga menunjukkan perbaikan signifikan. Rasio KDRT pada tahun 2020 tercatat sangat rendah, yaitu sebesar 0,002, mengalami fluktuasi menurun hingga tahun 2024 menjadi

0,000107. Hal ini sejalan dengan optimalnya kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam upaya pencegahan dan penanganan KDRT, yang didukung oleh cakupan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang mencapai 100% selama periode 2020-2024. Hal serupa juga terlihat pada beberapa indikator lainnya, seperti Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit, Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum, serta Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum. Ketiga indikator ini menunjukkan capaian yang sangat baik dengan tingkat kinerja mencapai 100% pada periode 2020-2024, mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.

Selain itu, penilaian terhadap kesetaraan gender melalui rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki di berbagai jenjang pendidikan menunjukkan hasil yang beragam. Di tingkat SD, rasio APM perempuan/laki-laki mengalami mengalami fluktuasi meningkat dari 90,28 pada tahun 2020, menjadi 107,49. Di tingkat SMP, rasio ini juga mengalami fluktuasi meningkat dari 54,78 pada tahun 2020 menjadi 98,22 pada tahun 2022. Namun rasio pada tingkat SMA menurun dari 115,03 pada tahun 2020, menjadi 55,88 pada tahun 2021 dan kembali mengalami perbaikan hingga tahun 2024 menjadi 81,14.

Sementara itu untuk indikator kinerja yang menjadi standar pelayanan minimal di Kabupaten Bengkalis untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sudah mencapai 54,01 dan untuk indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) sudah mencapai 91,34 pada tahun 2023. Selain itu Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten dan persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum mencapai 100% pada tahun 2024. lebih rinci dapat disaksikan pada tabel berikut:

Tabel II-71 Perkembangan Indikator Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2024

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerjapembangunan Daerah	Satuan	2023	2024
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	54,01	belum rilis
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,34	belum rilis
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	100
Persentase layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	0
Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis, 2025

2.1.3.2.3 Urusan Pangan

Peningkatan ketahanan pangan daerah dapat diukur dari ketersediaan pangan utama yang diperoleh dari data produk beras dan data pasokan dari luar kabupaten. Ketersediaan pangan utama menjadi penting untuk menjamin kebutuhan asupan energi dan protein bagi semua penduduk, karena pemenuhan pangan bagi penduduk merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak azasi manusia. Selain itu, aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian dalam urusan pangan untuk menciptakan masyarakat yang sehat.

Tabel II-72 Indikator Urusan Pangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks ketahanan Pangan	65,95	61,15	61,15	61,68	65,75
Persentase desa bebas dari status rawan pangan	75,5	81,9	60	89	98,7
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	87,9	88,4	92,3	91,7	91,1
Ketersediaan pangan utama (Kg/kap/thn)	113,55	119,98	116,89	104,41	792
Ketersediaan Energi (kkl/kap/hari)	2.545	2.117	2.177	2.205	3.978
Ketersediaan Protein (gram/kap/hari)	66,01	59,18	59,18	71,74	38,98
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan(%)	100	100	85,71	83,9	90,5

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis, 2025

Perkembangan indeks ketahanan pangan pada tahun 2020 tercatat mencapai 65,95, turun hingga tahun 2023 menjadi 61,15 dan kembali meningkat hingga tahun 2024 menjadi 65,75. Selanjutnya pada jumlah ketersediaan pangan utama dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi meningkat. Pada tahun 2020 jumlah ketersediaan pangan utama sebesar 113,55 kg/kapita/hari, mengalami fluktuasi meningkat hingga tahun 2024 menjadi 792 kg/kapita/hari. Ketersediaan energi pada periode 2020-2024 mengalami fluktuasi dari 2.545 pada tahun 2020, menjadi 3.978 kkl/kap/hari pada tahun 2024. Ketersediaan energi pada tahun 2020 dan 2024 di Kabupaten Bengkalis telah melebihi standar yang ditetapkan, dimana dalam Widyakarya Pangan dan Gizi standar yang dianjurkan untuk ketersediaan pangan adalah 2.400 kalori/kapita/hari.

Begitu juga halnya dengan ketersediaan protein pada tahun 2020-2024 yang sudah sangat baik. Selama periode 2020-2024 ketersediaan protein di Kabupaten Bengkalis telah melebihi standar yang ditetapkan oleh Widyakarya Pangan dan Gizi standar yang dianjurkan untuk ketersediaan protein adalah 63 gram/kapita/hari. Akan tetapi pada tahun 2021 ketersediaan protein mengalami penurunan menjadi 59,18 gram/kapita/tahun dan naik pada tahun 2023 menjadi 71,74 gram/kapita/hari, namun mengalami penurunan menjadi 38,98 pada tahun 2024.

Adapun skor pola pangan harapan (PPH) pada tahun 2020 mencapai 87,9, meningkat hingga tahun 2022 menjadi 92,2 namun turun menjadi 91,7 pada tahun 2023. Sedangkan persentase desa dari rawan pangan pada tahun 2020 mencapai 75,5,

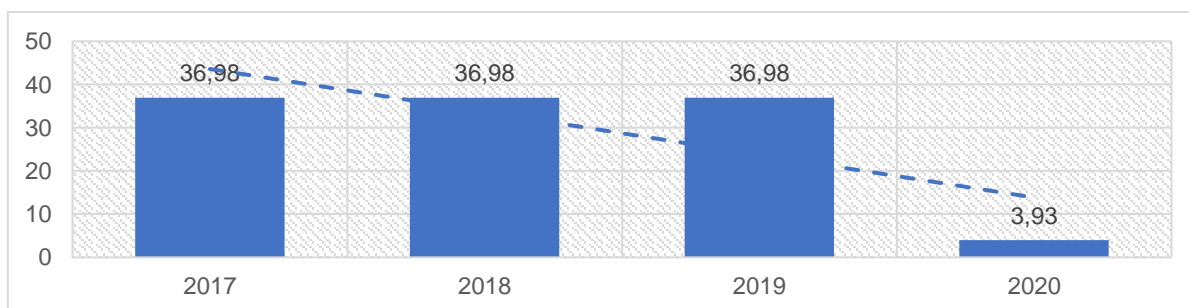
meningkat pada tahun 2021 menjadi 81,9, turun kembali pada tahun 2022 menjadi 60 dan meningkat menjadi 89 pada tahun 2023.

Perhatian pada aspek daya beli dan pemerataan penyebaran atau distribusi bahan pangan agar dapat diakses dengan mudah dan murah sampai pada tingkat rumah tangga masih sangat diperlukan, terutama pada beberapa wilayah terluar seperti pulau Rupat. Jaminan ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh aspek ketersediaan, tetapi juga aspek distribusi dan konsumsi. Kemampuan konsumsi akan ditentukan oleh daya beli dan pengetahuan pangan dan gizi sampai tingkat rumah tangga. Oleh sebab itu, urusan pangan tidak hanya mengurus ketersediaan tetapi juga advokasi dan pembinaan pengetahuan pangan dan gizi bagi masyarakat.

2.1.3.2.4 Urusan Pertanahan

Kinerja urusan Pertanahan di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari persentase luas lahan bersertifikat. Pemerintah Kabupaten Bengkalis cukup peduli dalam memfasilitasi masyarakat guna memiliki lahan yang memiliki kekuatan hukum. Sejak tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah melaksanakan program pemberian sertifikat gratis bagi masyarakat yang tidak mampu.

Keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam mendata aset Pemerintah berupa penerbitan sertifikat tanah melalui pendanaan secara komprehensif adalah langkah konkrit didalam menertibkan aset. Ketersediaan anggaran yang mencukupi sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan program dan kegiatan. Sehingga perlu dilakukan langkah konkrit dengan pelaksanaan kegiatan secara bertahap. Dimana pada tahun 2017 persentase luas lahan bersertifikat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sebesar 36,98%, jumlah ini tidak banyak mengalami perubahan (cederung stagnan) hingga tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan kinerja yang sangat signifikan. Dimana, Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Bengkalis hanya sebesar 3,93%. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya luas lahan bersertifikat di Kabupaten Bengkalis dapat ditingkatkan, agar tidak terjadi berbagai masalah seperti konflik pertanahan.



Sumber: Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis, 2022

Gambar II-30 Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2020

2.1.3.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

Pengukuran terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik terhadap capaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam melakukan perumusan dan pengambilan kebijakan yang berkaitan lingkungan hidup.

Pada tahun 2024, didapatkan IKLH Kabupaten Bengkalis sebesar 68,57 dengan capaian 93,96% dari target 70,61. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 70,47 maka capaian IKLH mengalami penurunan. Hal tersebut karena adanya penurunan indeks kualitas air akibat pencemaran, ketersediaan dan fluktuasi debit air, penggunaan air, dan tingkat erosi dan sedimentasi.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya mengalami peningkatan Kategori Baik dari tahun 2020-2023, namun turun menjadi cukup baik. Nilai IKLH Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 adalah 68,57, turun dari tahun 2020 yang mencapai 70,67. Penurunan ini disebabkan terjadinya penurunan pada Indeks Kualitas Udara (IKU) dari 50,95 pada tahun 2020, menjadi 91,37 pada tahun 2024. Selanjutnya diikuti oleh fluktuasi menurun pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari 56,73 pada tahun 2020, menjadi 56,38 pada tahun 2024.

Tabel II-73 Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Tahun	IKA	IKU	IKL	IKLH	Kategori
2020	50,95	96,51	56,73	70,67	Baik
2021	51,67	96,91	54,25	70,55	Baik
2022	50,83	96,26	56,5	70,47	Baik
2023	50,56	97,36	56,38	70,89	Baik
2024	51,11	91,37	56,38	68,57	Cukup Baik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis 2025

Selanjutnya perkembangan Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024 yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti beban pencemaran, ketersediaan dan fluktuasi debit air, penggunaan air, dan tingkat erosi serta sedimentasi. Namun, hasil identifikasi menunjukkan bahwa beberapa parameter pengukuran melebihi baku mutu, yang menandakan adanya pencemaran akibat aktifitas *nonpoint source* seperti limbah pertanian, peternakan, dan limbah domestik dari aktifitas masyarakat sepanjang aliran sungai. Selain itu, kondisi sungai cenderung mengalami penurunan status mutu air. Hal ini disebabkan kualitas sungai yang menjadi titik pantau mengalami pencemaran air limbah dari proses produksi pabrik pengolahan kelapa sawit.

Alternatif solusi atau rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam menjaga kualitas air adalah:

- a. Melakukan pemantauan kualitas air secara terus-menerus atau periodik pada badan air atau aliran sungai dan menambah jumlah sungai yang menjadi titik pantau dengan mengutamakan sungai yang belum padat aktivitas dan belum tercemar. Penambahan

jumlah sungai yang menjadi titik pantau IKA agar dapat disesuaikan dengan jumlah sungai yang ada di Kabupaten Bengkalis.

- b. Meningkatkan intensifikasi pengawasan dan pembinaan terhadap aktifitas atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan.
- c. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pemantauan dan pengukuran kualitas air.
- d. Memperkuat peran laboratorium lingkungan dalam mendukung kegiatan pemantauan dan penegakan pelaku usaha dan/ atau kegiatan
- e. Meningkatkan sinergitas dengan stakeholder terkait dalam upaya penurunan beban pencemar serta pemulihan kualitas badan air melalui penyediaan SPALD-S (Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat) pada wilayah sepanjang bantaran sungai yang padat aktifitas domestik dan sungainya telah tercemar dan menyediakan SPALD-T (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat) secara bertahap pada masing-masing kecamatan. Hal ini bisa mengurangi beban pencemar air limbah yang masuk ke sungai. Cara ini bisa meningkatkan nilai IKA dan mengurangi faktor sumber pencemar yang berasal dari nonpoint sources. Hal ini sesuai dengan rekomendasi yang tertuang dalam raport hasil penilaian IKLH yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui aplikasi IKLH, yaitu pembangunan sarana dan prasarana pengolahan air limbah terutama IPAL domestik dan USK.
- f. Perbaiki kualitas air sungai melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang peduli terhadap sungai seperti program prokasih (programkali bersih) dan perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat terkait sumber-sumber pencemar, serta pembentukan kelompok masyarakat peduli sungai.
- g. Sedangkan Indek Kualitas Udara (IKU) dipengaruhi oleh faktor alam seperti kondisi cuaca (arah angin, kecepatan angin, suhu, curah hujan, bentang alam, bencana lingkungan dan potensi kebakaran. Selain itu capaian luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terutama kebun raya dan taman kehati di Kabupaten Bengkalis belum terpenuhi. Saat ini luas RTH di Kabupaten Bengkalis masih sangat kecil yaitu sebesar 6,94 hektar atau belum mencapai 1 % dari target seharusnya berdasarkan amanat Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2022, bahwa RTH Publik yang harus dipenuhi sebesar 20% dari total luas wilayah kota atau Kawasan perkotaan.

Alternatif solusi atau rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam menjaga kualitas udara adalah:

- a. Membuat aturan yang lebih kuat untuk mengontrol polusi udara, dan menegakkan hukum lingkungan.
- b. Penerapan pelaksanaan pengendalian sumber emisi terutama pada sektor industri dan pemerintah yang dapat mempengaruhi kualitas udara.
- c. Menanam lebih banyak pohon di kota dan di sepanjang jalan-jalan besar dan menambah luasan RTH di setiap kecamatan, desa, RT dan RW.
- d. Memberikan informasi yang akurat tentang kualitas udara kepada masyarakat untuk membantu mengurangi polusi.
- e. Memasang alat untuk memantau kualitas udara di kota (AQMS).

- f. Mengajak orang-orang dan organisasi untuk membantu meningkatkan kualitas udara di kota.

Adapun Indeks Kualitas Lahan (IKL) dipengaruhi oleh kurangnya koordinasi dan kolaborasi yang mampu menciptakan sistem dan jaringan kerja untuk mengkompilasi capaian kinerja kegiatan terkait peningkatan luasan lahan yang dilakukan para pihak, baik antar perangkat daerah, sektor swasta, mitra pembangunan dan kelompok peduli lingkungan yang melakukan kegiatannya di wilayah Kabupaten Bengkalis. Selain itu dukungan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan luasan tutupan lahan meliputi kegiatan restorasi ekosistem mangrove, penyediaan RTH dan pemulihan lahan kritis di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis belum proporsional.

Bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas tutupan lahan dengan meningkatkan luas tutupan lahan secara intensif melalui penanaman pohon dengan sasaran pada hutan, lahan kritis, sempadan sungai, jalur selatan, kawasan mangrove, penghijauan sempadan jalan, lahan pekarangan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penambahan luasan RTH sebaiknya dilakukan pada tiap kecamatan, desa, RT dan RW dalam rangka pengayaan dan pemeliharaan tutupan lahan, serta penyediaan Kebun Raya dan Taman Kehati di Kabupaten Bengkalis melalui penetapan Keputusan Bupati.

2.1.3.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat diukur melalui beberapa indikator seperti jumlah penduduk yang memiliki KTP, rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk, rasio bayi berakte kelahiran, rasio pasangan berakte nikah dan Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).

Tabel II-74 Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Penerapan KTP Nasional Bebas NIK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Jumlah penduduk yang memiliki KTP	419.275	10.629	423.191	440.546	468.762
4	Rasio Penduduk ber KTP per satuan	99%	99,93%	99,98%	97,66%	99,45%
5	Rasio pasangan berakte nikah	60	55.94	62,02	70,7	80,62

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, 2025

Secara umum capaian indikator administrasi dan catatan sipil di Kabupaten Bengkalis sudah cukup baik. Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten yang konsisten tersedia sepanjang periode 2020-2024. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan data kependudukan yang akurat dan *up-to-date*. Ini merupakan langkah fundamental dalam upaya perbaikan administrasi kependudukan,

karena database yang komprehensif dan terkelola dengan baik memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan, pengambilan keputusan, dan pemberian layanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) juga telah dilaksanakan secara konsisten sepanjang periode tersebut. Keberadaan KTP Nasional berbasis NIK adalah indikator penting dari kemajuan dalam sistem identitas nasional, yang memastikan setiap warga negara memiliki identitas resmi yang diakui secara nasional. Hal ini tidak hanya mempermudah proses administrasi dan pelayanan publik, tetapi juga memperkuat upaya pemerintah dalam pencegahan pemalsuan identitas dan penipuan.

Selanjutnya indikator jumlah penduduk yang memiliki KTP pada tahun 2020, mencapai 419.275 orang, dan terus meningkat hingga pada tahun 2024 menjadi 468.762 orang. Hal ini diikuti oleh Rasio Penduduk ber KTP per satuan selama periode 2020-2024 menunjukkan capaian yang tinggi yaitu berada diatas 99%.

Selain itu perkembangan pada indikator rasio pasangan berakte nikah pada tahun 2020 mencapai 60%, meningkat hingga tahun 2024 menjadi 80,62%. Peningkatan kepemilikan akta nikah juga berkontribusi terhadap naiknya persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Pada tahun 2020, angka kepemilikan KIA masih berada di angka 21,09%, namun secara bertahap meningkat hingga mencapai 62,25% pada tahun 2023. Meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 58,14%, upaya peningkatan cakupan kepemilikan identitas bagi anak tetap menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah akan terus melakukan perbaikan layanan administrasi kependudukan serta mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan guna memastikan hak-hak warga negara, terutama anak-anak, dapat terpenuhi dengan baik.

Tabel II-75 Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis tahun 2020-2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bengkalis	35,14%	44,76%	53,74%	72,48%	70,83%
2	Bantan	48,42%	58,44%	73,48%	78,09%	81,79%
3	Bukit Batu	43,15%	61,92%	59,94%	70,01%	87,31%
4	Mandau	8,26%	35,35%	54,06%	66,01%	79,13%
5	Rupat	36,70%	56,48%	41,61%	57,98%	73,20%
6	Rupat Utara	52,39%	61,85%	59,75%	68,38%	69,47%
7	Siak Kecil	38,27%	66,38%	63,66%	72,34%	80,06%
8	Pinggir	5,87%	22,53%	35,61%	49,02%	79,90%
9	Bandar Laksamana	31,80%	53,37%	60,33%	69,18%	58,44%
10	Talang Muandau	17,64%	34,41%	38,37%	58,14%	74,27%
11	Bathin Solapan	8,65%	29,48%	37,37%	50,05%	67,63%
Kabupaten Bengkalis		21,09%	40,26%	49,28%	62,25%	58,14%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, 2025

Sementara itu persentase kepemilikan KIA terbanyak berada di Kecamatan Bukit Batu mencapai 87,31% dan Kecamatan Bantan mencapai 81,79%. KIA yang merupakan bukti identitas resmi untuk anak di bawah 17 tahun yang berlaku selayaknya KTP untuk

orang dewasa pada umumnya merupakan salah satu program baru yang menjadi wewenang pemerintah daerah untuk menerbitkannya melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Karena itu proses penerbitan KIA ini masih dalam tahap pengembangan menuju penyempurnaan sistem penerbitan, sehingga masih banyak penduduk dibawah usia 17 tahun yang belum memilikinya. Kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya KIA dapat menjadi salah satu solusi dalam mendorong kesadaran masyarakat untuk membuat KIA bagi anak berusia 17 tahun kebawah.

2.1.3.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Perkembangan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Bengkalis menunjukkan perkembangan yang sangat baik, terutama dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Sepanjang tahun 2020-2024, jumlah BUMDesa aktif tercatat sebanyak 136, yang didukung dengan adanya keorganisasian yang aktif dan adanya penyertaan modal ke BUMDesa aktif. Selain itu, faktor lain yang turut mendukung keaktifan BUMDesa adalah kondisi sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang tergolong cukup baik. Dari total 136 desa yang ada di Kabupaten Bengkalis, seluruhnya telah memiliki fasilitas perkantoran yang memadai. Hal ini menjadi aspek penting dalam mendukung efektivitas pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat. Dengan kondisi ini, diharapkan desa-desa di Kabupaten Bengkalis semakin mandiri dalam mengembangkan potensi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel II-76 Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

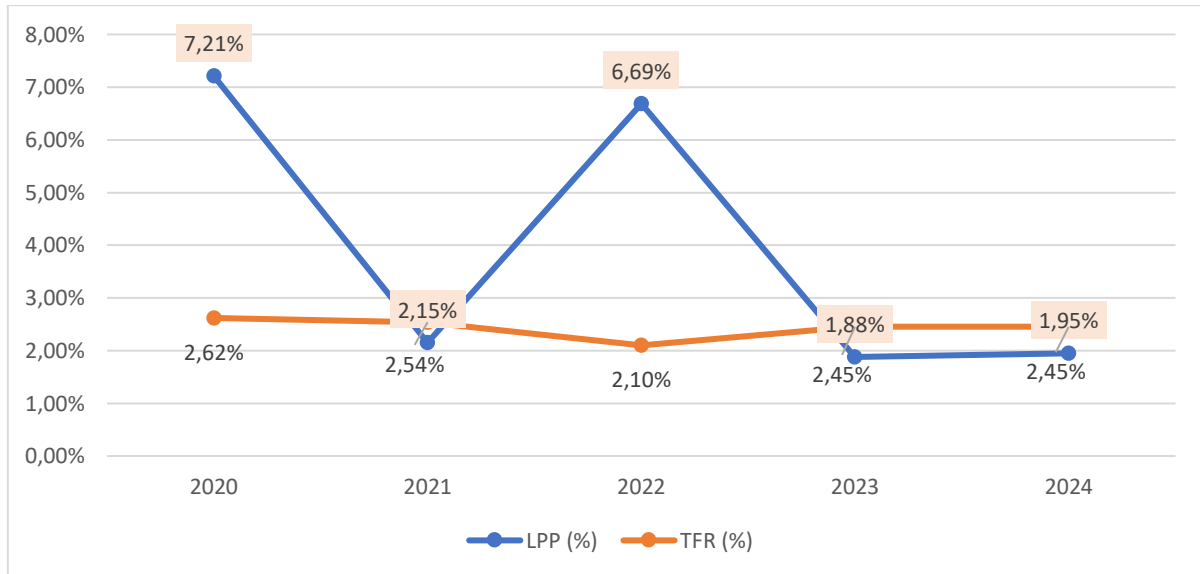
No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	BUM Desa Aktif	136	136	136	136	136
2	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	136	136	136	136	136
3	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	155	155	155	155	155
4	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	7	7	11	11	11
5	Persentase LPM Aktif	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase PKK Aktif	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase PosyanduAktif	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, 2025

Indikator urusan pemberdayaan masyarakat desa lainnya adalah persentase LPM dan PKK aktif di Kabupaten Bengkalis. Dalam lima tahun terakhir jumlah LPM di Kabupaten Bengkalis sebanyak 155 dan sudah aktif 100%. Diikuti oleh perkembangan rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK dari 7 pada tahun 2020 menjadi 11 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa LPM dan PKK di Kabupaten Bengkalis sudah berperan aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, terutama dalam penggerak kesejahteraan keluarga. Sementara itu persentase posyandu aktif telah mencapai 100% selama periode 2020-2024.

2.1.3.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelayanan pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana diukur dari Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan Total Fertility Rate (TFR). Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) menunjukkan fluktuasi menurun dari 2,10% pada tahun 2020 menjadi 1,95% pada tahun 2024. Sementara itu, TFR, yang menggambarkan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan hingga akhir masa reproduksinya berdasarkan pola fertilitas saat perhitungan dilakukan, tercatat sebesar 2,62% pada tahun 2020. Angka ini menurun hingga 2,10% pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 2,45% pada tahun 2023, dan tetap berada di angka yang sama pada tahun 2024..



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis, 2025

Gambar II-31 Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Secara umum, indikator pengendalian penduduk dan keluarga berencana menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk, yang mengalami penurunan dari 4 pada tahun 2023 menjadi 1 kebijakan pada tahun 2024. Selain itu, Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) menunjukkan penurunan dari 21,5 pada tahun 2020 menjadi 14,7. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*Unmet Need*) juga mengalami penurunan, dari 19,50% pada tahun 2020 menjadi 6,61% pada tahun 2024. Selanjutnya Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih tergolong rendah, yaitu 11,50% pada tahun 2024. Sementara itu, Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB mengalami penurunan dari 48,80% pada tahun 2020 menjadi 36,97% pada tahun 2024, dan Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB juga sedikit menurun, dari 7,10% pada tahun 2020 menjadi 6,25% pada tahun 2024.

Berikut adalah perkembangan Indikator pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024, yaitu:

Tabel II-77 Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

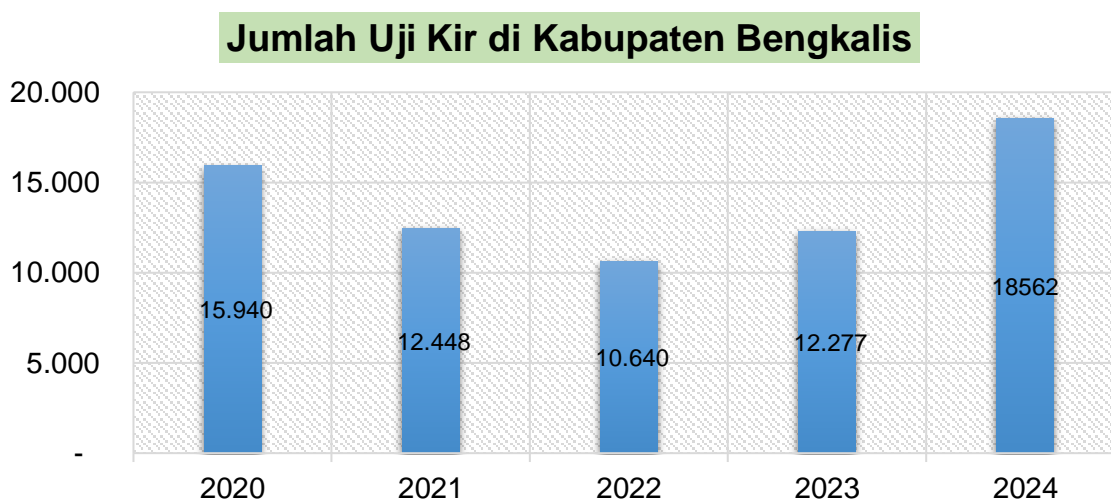
Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	28,8	100%	100%	100%	100%
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	12,50%	25%	50%	50%	100%
Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk	1	1	3	4	1
Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan	8	8	8	8	8
Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	1	1	1	1	1
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 – 3
Rasio Akseptor KB	45,30%	47,40%	42,90%	63,45%	72,75%
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49	62,00%	62,40%	62,60%	64,10%	60,67%
Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15- 19 tahun (ASFR 15-19)	21,5	25,3	17,5	14,7	14,7
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 Tahun	19,80%	21,44%	21,65%	21,66%	21,66%
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	19,50%	20,01%	20,65%	12,70%	6,61%
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	10,40%	14,20%	8,33%	10,44%	11,54%
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	68,25%	76,50%	78,30%	81,30%	72,75%

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	55,29%	54,20%	56,30%	54,12%	55,88%
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB	48,80%	48,70%	51,30%	36,90%	36,97%
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB	7,10%	7,20%	7,00%	7,60%	6,25%

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis, 2025

2.1.3.2.9 Urusan Perhubungan

Pelayanan pada urusan perhubungan diukur salah satunya melalui indikator jumlah uji kir angkutan umum. Uji KIR angkutan umum merupakan pengujian terhadap setiap angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Jumlah uji kir angkutan umum dari tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 telah dilakukan uji kir sebanyak 15.940 kali, namun hingga tahun 2022 uji kir mengalami penurunan menjadi 10.640 kali dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 18.562 kali uji kir.



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, 2025

Gambar II-32 Perkembangan Jumlah Uji Kir di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Selain melakukan uji kir angkutan umum, masih terdapat beberapa indikator lain yang menjadi ukuran kinerja dinas perhubungan Kabupaten Bengkalis. Untuk mengetahui perkembangan indikator Perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-78 Perkembangan Indikator Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	2.850	2.984	2.740	3.726	Na
Rasio Izin Trayek	0,00040%	0,00060%	0,00080%	0,00050%	0,000500%
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	4.167	3.528	3.675	4.203	18.562

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/Terminal Bis	6	6	6	6	6
Persentase Layanan Angkutan Darat	0,089%	0,094%	0,079%	0,098%	Na
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	26,14 %	28,34 %	34,54 %	34,23 %	Na
Pemasangan Rambu-rambu	5.684	5.799	6.040	6.040	Na
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	Na	na	na	na	Na
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	4.845	6.334	6.435	6.707	Na
Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Pertahun	27.618	41.557	148.523	174.853	na

Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, 2025

Jumlah arus penumpang angkutan umum mengalami peningkatan, dari 2.850 pada tahun 2020 menjadi 3.726 pada tahun 2023. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum juga menunjukkan tren yang sama, meningkat dari 4.845 pada tahun 2020 menjadi 6.707 pada tahun 2023. Sementara itu, Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun mengalami peningkatan signifikan, dari 27.618 pada tahun 2020 menjadi 174.853 pada tahun 2023. Rasio izin trayek juga mengalami peningkatan, dari 0,00040% pada tahun 2020 menjadi 0,000500% pada tahun 2024.

Dari sisi kepemilikan kendaraan, persentase kepemilikan KIR angkutan umum meningkat dari 26,14% pada tahun 2020 menjadi 34,23% pada tahun 2023. Sementara itu, jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus hingga tahun 2024 masih tetap berjumlah 6. Pada aspek layanan angkutan menunjukkan perkembangan persentase layanan angkutan darat mengalami fluktuasi, dari 0,89% pada tahun 2020 meningkat menjadi 0,094% pada tahun 2021, namun mengalami penurunan menjadi 0,079% pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi 0,098% pada tahun 2023. Selain itu, pemasangan rambu-rambu juga mengalami peningkatan, dari 5.684 pada tahun 2020 menjadi 6.040 pada tahun 2023.

2.1.3.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

Perkembangan komunikasi dan informatika di Kabupaten Bengkalis menunjukkan tren yang cukup positif dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Cakupan Layanan Telekomunikasi Desa/Kelurahan tetap stabil pada angka 96,32% sejak tahun 2020 hingga 2024, mencerminkan akses telekomunikasi yang sudah merata di wilayah Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi antar Perangkat Daerah pada tahun 2020 telah mencapai 100%, namun turun menjadi 21,41% pada tahun 2021, kemudian kembali meningkat secara bertahap hingga mencapai 96% pada tahun 2024.

Tabel II-79 Perkembangan Indikator Komunikasi dan Informastika di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	29,96%	29,96%	84,04%	84,04%	84,04%

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Layanan Telekomunikasi Desa/Kelurahan	96,32%	96,32%	96,32%	96,32%	96,32%
Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi antar Perangkat Daerah	100%	21.41%	23%	89,36%	96%
Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke atas yang Menggunakan HP/Mengakses Internet	23,25	86,89	87,68	87,59	86,1
Persentase/Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	29,96	29,96	84,04	84,04	84,04
Persentase/Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi	21,43	19,33	19,08	17,5	18,89
Persentase/Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Telepon	1,41	0,93	0,42	1,2	1,2
Persentase/Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Seluler	64,66	64,66	84,69	84,69	84,69

Sumber: BPS dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis, 2025

Selain itu, Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke atas yang Menggunakan HP/Mengakses Internet menunjukkan peningkatan yang cukup baik, dari 23,25% pada tahun 2020 menjadi 86,1% pada tahun 2024. Diikuti oleh perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet juga mengalami peningkatan signifikan, dari 29,96% pada tahun 2020 menjadi 84,04% pada tahun 2022, dan angka ini tetap stabil hingga tahun 2024. Namun, Persentase/Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi mengalami sedikit penurunan, dari 21,43% pada tahun 2020 menjadi 18,89% pada tahun 2024. Sementara itu, Persentase/Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Telepon mengalami fluktuasi, dengan angka 1,41% pada tahun 2020, sempat turun hingga 0,42% pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi 1,2% pada tahun 2023 dan 2024.

Adapun indikator lain dalam urusan komunikasi dan informatika adalah Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan, yaitu pada tahun 2024 sudah mencapai 445 KIM per kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Kecamatan dengan jumlah Kim terbanyak adalah Kecamatan Rupert dengan 114 KIM. Sedangkan kecamatan Tualang Muandau sama sekali belum memiliki Kelompok Informasi Masyarakat.

Tabel II-80 Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat pada Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Kecamatan	Jumlah KIM	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM
1.	Bengkalis	1	34	34
2.	Bantan	1	8	8
3.	Siak Kecil	1	16	16
4.	Pinggir	1	19	19
5.	Mandau	1	17	17
6.	Bukit Batu	1	13	13
7.	Rupert	1	114	114

No	Kecamatan	Jumlah Kecamatan	Jumlah KIM	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM
8.	Rupat Utara	1	87	87
9.	Bandar Laksemana	1	56	56
10.	BathinSolapan	1	81	81
11.	Talang Muandau	1	-	-
	KabupatenBengkalis	12	445	37

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis, 2025

Pada tahun 2020-2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis juga berhasil mendapatkan beberapa penghargaan terkait dengan pengelolaan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintahan. Beberapa prestasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-81 Prestasi PPID Utama Kabupaten Bengkalis 2020-2024

No	Jenis Prestasi	Tahun
1	Juara II Kualifikasi Menuju Kabupaten Kota Se Provinsi Riau	2020
2	Juara II Kualifikasi Informatif Kategori Kabupaten Kota Se Provinsi Riau	2021
3	Terbaik I Informatif Katagori Pemerintah Kabupaten/ Kota Se Provinsi Riau	2022
4	Juaralll Peringkat Informatif Katagori Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau	2023
5	Peringkat VII - Informatif Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau	2024

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis, 2025

Penghargaan terkait dengan pengelolaan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintahan selaras dengan capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu Tahun 2020 : 1,8, Tahun 2021 : 1,8, Tahun 2022 : 2,21, Tahun 2023 : 2,7, Tahun 2024 : 2,79.

Selain beberapa indikator di atas, terdapat pula salah satu indikator yang menjadi ukuran pemerataan jaringan komunikasi antar wilayah pedesaan/keluarahan di Kabupaten Bengkalis. Data Wilayah (Kelurahan/Desa) yang belum tercover mobile broadband 4G di Kabupaten Bengkalis semakin membaik dari tahun sebelumnya. Meskipun cakupan jaringan semakin luas, namun masih terdapat cukup banyak desa yang belum terjangkau layanan mobile broadband 4G. Berikut adalah data wilayah (kelurahan/desa) yang belum tercover mobile broadband 4G di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024.

Tabel II-82 Data Wilayah (Kelurahan/Desa) yang Belum Tervercover Mobile Broadband 4G di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

Kelurahan/Desa	Kecamatan	Listrik	Akses Jalan	Tahun Diusulkan	Kondisi 2024
Pematang Pudu	Mandau	Ada	Ada	2020	Sudah Terealisasi
Harapan Baru	Mandau	Ada	Ada	2020	Sudah Terealisasi

Kelurahan/Desa	Kecamatan	Listrik	Akses Jalan	Tahun Diusulkan	Kondisi 2024
Batin Betuah	Mandau	Ada	Ada	2020	Sudah Terealisasi
Resam Lapis	Bantan	Ada	Ada	2020	Sudah Terealisasi
Bantan Timur	Bantan	Ada	Ada	2020	Belum Terealisasi
Muntai	Bantan	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Ulu Pulau	Bantan	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Kembung Baru	Bantan	Ada	Ada	2021	Belum Terealisasi
Bantan Tengah	Bantan	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Kuala Alam	Bengkalis	Ada	Ada	2020	Sudah Terealisasi
Teluk Latak	Bengkalis	Ada	Ada	2020	Sudah Terealisasi
Penampi	Bengkalis	Ada	Ada	2020	Belum Terealisasi
Penampi	Bengkalis	Ada	Ada	2020	Belum Terealisasi
Penampi	Bengkalis	Ada	Ada	2020	Belum Terealisasi
Pangkalan Jambi	Bukit Batu	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Bukit Batu	Bukit Batu	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Tanjung Leban	Bandar Laksamana	Ada	Ada	2020	Sudah Terealisasi
Tanjung Leban	Bandar Laksamana	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Parit I Api-api	Bandar Laksamana	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Temiang	Bandar Laksamana	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Api-api	Bandar Laksamana	Ada	Ada	2021	Belum Terealisasi
Tenggayun	Bandar Laksamana	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Sepahat	Bandar Laksamana	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Bukit Kerikil	Bandar Laksamana	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Melibur	Talang Muandau	Ada	Ada	2020	Belum Terealisasi
Beringin	Talang Muandau	Ada	Ada	2021	Belum Terealisasi
Koto Pait Beringin	Talang Muandau	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Kuala Penaso	Talang Muandau	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Melibur	Talang Muandau	Ada	Ada	2021	Belum Terealisasi

Kelurahan/Desa	Kecamatan	Listrik	Akses Jalan	Tahun Diusulkan	Kondisi 2024
Tasik Tebing Serai	Talang Muandau	Ada	Ada	2021	Belum Terealisasi
Tasik Serai Timur	Talang Muandau	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Serai Wangi	Talang Muandau	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Tasik Serai	Talang Muandau	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Tasik Serai Barat	Talang Muandau	Ada	Ada	2021	Belum Terealisasi
Lubuk Muda	Siak Kecil	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Tanjung Datuk	Siak Kecil	Ada	Ada	2021	Belum Terealisasi
Tanjung Belit	Siak Kecil	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Liang Banir	Siak Kecil	Ada	Ada	2021	Belum Terealisasi
Sungai Siput	Siak Kecil	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Koto Raja	Siak Kecil	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Lubuk Garam	Siak Kecil	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Sumber Jaya	Siak Kecil	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Lubuk Gaung	Siak Kecil	Ada	Ada	2021	Belum Terealisasi
Tanjung Damai	Siak Kecil	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Sepotong	Siak Kecil	Ada	Ada	2021	Belum Terealisasi
Langkat	Siak Kecil	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Sungai Nibung	Siak Kecil	Ada	Ada	2021	Belum Terealisasi
Sadar Jaya	Siak Kecil	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Sungai Linau	Siak Kecil	Ada	Ada	2021	Belum Terealisasi
Muara Dua	Siak Kecil	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Bandar Jaya	Siak Kecil	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Pinggir	Pinggir	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Semunai	Pinggir	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Muara Basung	Pinggir	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Tengganau	Pinggir	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Buluh apo	Pinggir	Ada	Ada	2021	Belum Terealisasi

Kelurahan/Desa	Kecamatan	Listrik	Akses Jalan	Tahun Diusulkan	Kondisi 2024
Pangkalan Libut	Pinggir	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Sungai Meranti	Pinggir	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Balai Raja	Pinggir	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi
Titian Antui	Pinggir	Ada	Ada	2021	Sudah Terealisasi

Sumber: Dinas Komuniaksi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu, 2025

2.1.3.2.11 Urusan Koperasi Usaha kecil Menengah

Perkembangan Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Bengkulu pada tahun 2020 mencapai 43,70% dan mengalami peningkatan hingga 97,56% pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, angka ini mengalami penurunan menjadi 67,00%. Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkulu, mengingat koperasi merupakan salah satu pilar ekonomi rakyat yang, jika dikelola dengan baik, dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, UKM Non BPR/LKM Aktif menunjukkan capaian yang sangat baik. Hingga akhir tahun 2020, sebanyak 99,36% UKM Non BPR/LKM di Kabupaten Bengkulu tetap aktif. Selanjutnya, Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Bengkulu mengalami perkembangan yang cukup baik. Pada tahun 2020, angkanya tercatat sebesar 99,38%, meningkat menjadi 135% pada tahun 2023, meskipun mengalami sedikit penurunan menjadi 115% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa usaha mikro dan kecil masih menjadi sektor ekonomi utama bagi masyarakat serta menjadi salah satu sumber mata pencaharian yang penting di Kabupaten Bengkulu. Secara lengkap indikator urusan koperasi dan usaha kecil menengah di Kabupaten Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-83 Perkembangan Indikator Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Koperasi Aktif	43,70%	75,15%	94,05%	97,56%	67,00%
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	99,38%	116%	135%	135%	115%

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkulu, 2025

2.1.3.2.12 Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Bengkulu diukur melalui empat indikator utama, yaitu Jumlah Investor Berskala Nasional, Nilai Realisasi Investasi, Rasio Daya Serap Tenaga Kerja, serta Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN. Selama periode 2020–2024, Jumlah Investor Berskala Nasional menunjukkan tren peningkatan. Hingga tahun 2024, jumlahnya telah mencapai 1.315 investor, mencerminkan minat investor yang semakin tinggi terhadap peluang investasi di Kabupaten Bengkulu.

Dari sisi Nilai Realisasi Investasi, terjadi fluktuasi meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, nilai investasi berskala nasional tercatat sebesar

Rp5.264.557,60 juta, kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2022 menjadi Rp4.091.448,12 juta. Namun, pada tahun 2024, nilai investasi kembali meningkat signifikan menjadi Rp8.917.507,62 juta.

Sementara itu, Rasio Daya Serap Tenaga Kerja dari PMA/PMDN juga menunjukkan capaian yang cukup baik. Pada tahun 2024, rasio ini telah mencapai 13,50% dimana daya serap tenaga kerja pada Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar 2.515 dari jumlah angka pengangguran sebanyak 18.620 tenaga kerja, yang mencerminkan kontribusi investasi terhadap peningkatan kesempatan kerja di Kabupaten Bengkalis.

Secara keseluruhan, indikator-indikator penanaman modal di Kabupaten Bengkalis menunjukkan perkembangan yang positif, dengan meningkatnya jumlah investor, pertumbuhan kembali nilai investasi, serta peningkatan daya serap tenaga kerja, yang diharapkan dapat terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel II-84 Perkembangan Indikator Penanaman Modal di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 - 2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	161	612	464	1.356	1.315
Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp. Jutaan)	5.264.557,60	5.760.941,10	4.091.448,12	5.599.344,02	8.917.507,62
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	20,58	7,18	na	na	13,50
Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Rp. Jutaan)	5.208.743,20	5.319.269,20	2.542.549,30	5.296.219,30	3.617.507,62

Sumber: DPMTSP Kabupaten Bengkalis, 2025

2.1.3.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat melalui indikator cakupan pembinaan olahraga, cakupan pelatih yang bersertifikasi, cakupan pembinaan atlet muda, jumlah atlet berprestasi dan persentase Wirausaha Muda. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-85 Perkembangan Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Bengkalis tahun 2020-2024

Keterangan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Sarana Olahraga Per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis	Jumah	67	67	67	72	95

Keterangan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pemuda Berprestasi atau Pelopor	Angka	3	4	2	3	3
Jumlah Prestasi Olahraga	Cabang	12	14	26	24	10
Persentase Wirausaha Muda	Persen	0,17	0,17	0,04	0,04	0,04
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	39	75	122	96	103

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, kepemilikan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, 2025

Jumlah Sarana Olahraga per Kecamatan mengalami peningkatan hingga mencapai 95 unit pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang memadai bagi masyarakat.

Sementara itu, Jumlah Pemuda Berprestasi mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, terdapat 3 pemuda berprestasi, meningkat menjadi 4 orang pada tahun 2021. Namun, jumlah ini menurun menjadi 2 orang pada tahun 2022, kemudian kembali meningkat menjadi 3 orang pada tahun 2023 dan bertahan pada angka yang sama hingga tahun 2024.

Selanjutnya Jumlah Prestasi Olahraga menunjukkan hingga tahun 2023, terdapat 24 cabang olahraga yang mencatatkan prestasi, namun pada tahun 2024 jumlah ini mengalami penurunan menjadi 10 cabang. Meskipun demikian, Jumlah Atlet Berprestasi justru mengalami peningkatan, dari 96 atlet pada tahun 2023 menjadi 103 atlet pada tahun 2024, menunjukkan adanya peningkatan kualitas dalam pembinaan atlet di Kabupaten Bengkalis.

Sedangkan Persentase Wirausaha Muda mengalami penurunan dari 0,17 pada tahun 2020 menjadi 0,04 pada tahun 2024, yang dapat menjadi perhatian dalam pengembangan ekosistem kewirausahaan di kalangan pemuda. Sementara itu, Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif menunjukkan angka yang cukup stabil, dengan capaian sebesar 0,86% selama periode 2020–2024.

2.1.3.2.14 Urusan Statistik

Penyelenggaraan urusan statistik di Kabupaten Bengkalis dapat diukur oleh indikator ketersediaan Buku "kabupaten dalam angka" dan Buku "PDRB". Buku Kabupaten Bengkalis Dalam Angka telah tersedia setiap tahunnya, adapun yang telah dirilis sampai dengan tahun 2024. Begitu pula dengan buku PDRB Kabupaten Bengkalis, dimana pada tahun 2024 juga telah tersedia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

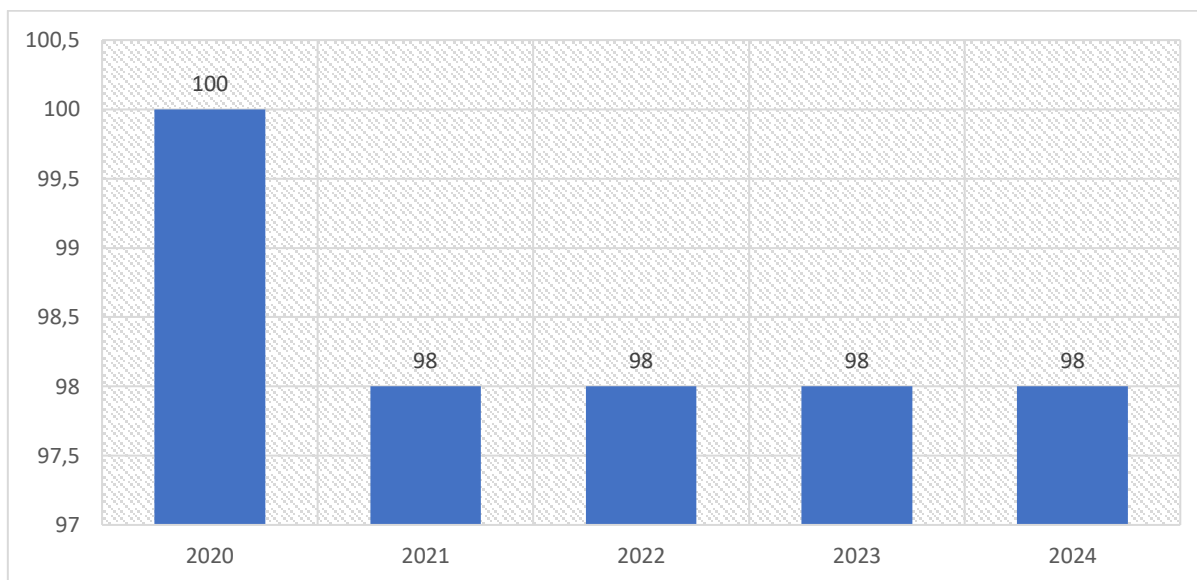
Tabel II-86 Perkembangan Indikator Statistik Kabupaten Bengkalis tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Persentase Satu Data Kabupaten Bengkalis	65%	84,21%	96%	100%	100%

Sumber: Dinas Komuniaksi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis, 2025

2.1.3.2.15 Urusan Persandian

Kabupaten Bengkulu telah menggunakan persandian dalam mengelola informasi penting daerah. Pada tahun 2020 persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi sudah mencapai 100%, namun turun menjadi 98% selama periode 2021-2024. Berikut adalah persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020-2024.



Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu, 2025
Gambar II-33 Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020-2024

Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah memiliki email senapati dan sertifikat elektronik di Kabupaten Bengkulu menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2024. Hampir seluruh OPD di Kabupaten Bengkulu telah memiliki sertifikat elektronik, namun masih terdapat dua OPD yang belum memiliki sertifikat elektronik. Lebih rinci dapat diamati pada tabel berikut.

Gambar II-34 Organisasi Perangkat Daerah yang Telah Memiliki Email Senapati dan Sertifikat Elektronik di Kabupaten Bengkulu Tahun 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Jenis Persandian	
		Email Senapati	Sertifikat Elektronik
1	Sekretariat Daerah	√	√
2	Sekretariat DPRD	√	√
3	Inspektorat	√	√
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	√	√
5	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	√	√
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	√	√

No	Nama Perangkat Daerah	Jenis Persandian	
		Email Senapati	Sertifikat Eletronik
7	Badan Penelitian dan Pengembangan	√	√
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	√	√
9	Badan Pendapatan Daerah	√	√
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	√	√
11	Dinas Ketahanan Pangan	√	√
12	Dinas Pendidikan	√	√
13	Dinas Kesehatan	√	√
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	√	√
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	√	√
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	√	√
17	Dinas Lingkungan Hidup	√	√
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	√	√
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	√	√
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	√	√
21	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	√	√
22	Dinas Perhubungan	√	√
23	Dinas Sosial	√	√
24	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	√	-
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	√	√
26	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	√	√
27	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	√	√
28	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	√	√
29	Dinas Perikanan	√	√
30	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perternakan	√	√
31	Dinas Pemadam Kebakaran	√	-
32	Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi	√	√
33	Dinas Perkebunan	-	√
34	Satuan Polisi Pamong Praja	√	√
35	RSUD Bengkalis	√	√
36	RSUD Mandau	√	√

No	Nama Perangkat Daerah	Jenis Persandian	
		Email Senapati	Sertifikat Eletronik
37	Kecamatan Bengkalis	√	√
38	Kecamatan Bantan	√	√
39	Kecamatan Bukit Batu	√	√
40	Kecamatan Siak Kecil	√	√
41	Kecamatan Bandar Laksamana	√	√
42	Kecamatan Bathin Solapan	√	√
43	Kecamatan Mandau	√	√
44	Kecamatan Pinggir	√	√
45	Kecamatan Talang Muandau	√	√
46	Kecamatan Rупat	√	√
47	Kecamatan Rупat Utara	√	√

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, 2025

2.1.3.2.16 Urusan Kebudayaan

Ukuran keberhasilan pelayanan pada urusan kebudayaan ditentukan oleh beberapa indikator yaitu penyelenggaraan festival seni dan budaya; benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, serta jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu. Pada tahun 2020, penyelenggaraan festival seni dan budaya hanya berlangsung satu kali. Hal ini disebabkan oleh pandemi yang berdampak pada pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga berbagai perencanaan yang telah disusun tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Seiring dengan pelonggaran aktivitas dan adaptasi kebiasaan baru, jumlah festival seni dan budaya yang diselenggarakan meningkat menjadi tiga kegiatan pada tahun 2021 dan bertambah menjadi lima kegiatan pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, jumlah festival seni dan budaya mengalami sedikit penurunan, masing-masing menjadi empat kegiatan.

Sementara itu, jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Bengkalis menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020 dan 2021, jumlahnya tercatat sebanyak 24 situs. Kemudian, pada tahun 2023 dan 2024, jumlah tersebut meningkat menjadi 37 situs. Peningkatan ini mencerminkan semakin baiknya upaya identifikasi, pemeliharaan, serta pengelolaan benda, situs, dan kawasan cagar budaya oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya kepemilikan benda dan situs budaya, jumlahnya juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 dan 2021, total benda dan situs yang dimiliki daerah tercatat sebanyak 26, kemudian meningkat menjadi 42 pada tahun 2022. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2023 dan 2024 dengan total 77 benda dan situs yang dimiliki. Adapun secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-87 Perkembangan Indikator Kebudayaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	3	5	4	4

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	24	24	24	37	37
Total Benda, situs & dimiliki daerah	26	26	42	77	77
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	100%	100%	48,05%	48,05%	48,05%
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	41	41	46	52	33

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, 2025

Jika dilihat dari persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, pada tahun 2020 dan 2021 capaian mencapai 100%. Namun, pada tahun 2022 hingga 2024, persentase ini mengalami penyesuaian menjadi 48,05%. Selain itu jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu, pada tahun 2020 dan 2021 jumlahnya tercatat sebanyak 41, kemudian mengalami peningkatan menjadi 46 pada tahun 2022 dan mencapai angka tertinggi sebesar 52 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu mengalami penyesuaian menjadi 33. Meskipun demikian, hal ini tetap mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola dan menjaga kelestarian cagar budaya agar tetap dapat dimanfaatkan dengan optimal bagi kepentingan masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan.

2.1.3.2.17 Urusan Perpustakaan

Kinerja pelayanan pada urusan perpustakaan di Kabupaten Bengkalis diukur melalui indikator jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun. Pada tahun 2020, jumlah kunjungan tercatat sebanyak 260.846 orang. Namun, angka ini mengalami tren penurunan hingga mencapai 32.929 pengunjung pada tahun 2024. Penurunan jumlah kunjungan ini sejalan dengan perubahan pola akses literasi di masyarakat, yang semakin banyak beralih ke sumber informasi digital. Selain itu, indeks pembangunan literasi masyarakat pada tahun 2022 mencapai 63,04, namun mengalami penurunan menjadi 38,62 pada tahun 2024. Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pemerataan pelayanan perpustakaan, ketercukupan koleksi bacaan, ketersediaan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari, keberadaan perpustakaan yang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP), serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan peningkatan jumlah anggota perpustakaan.

Dalam mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus berupaya mengembangkan inovasi dalam layanan perpustakaan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Penguatan program literasi digital, peningkatan akses terhadap koleksi bacaan berbasis teknologi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi langkah strategis yang diambil untuk meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat secara berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Lebih rinci dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel II-88 Jumlah Pengunjung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabuapten Bengkalis Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	260.846	31.459	37.297	38.371	32.929
Jumlah orang populasi yang dilayani	260.846	31.459	37.297	38.372	32.929
Pembangunan Literasi Masyarakat	0	0	63,04	53,86	38,62

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, 2025

Selain persentase kunjungan perpustakaan, terdapat indikator lain dalam urusan perpustakaan, yaitu rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Indikator ini dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel II-89 Koleksi Buku yang Tersedia di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	6.700	154.045	155.723	643	1.646

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, 2025

Untuk jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 sebanyak 6.700 koleksi judul buku, meningkat signifikan hingga mencapai 155.723 koleksi buku pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 koleksi buku turun menjadi 643 dan kembali meningkat menjadi 1.646 pada tahun 2024.

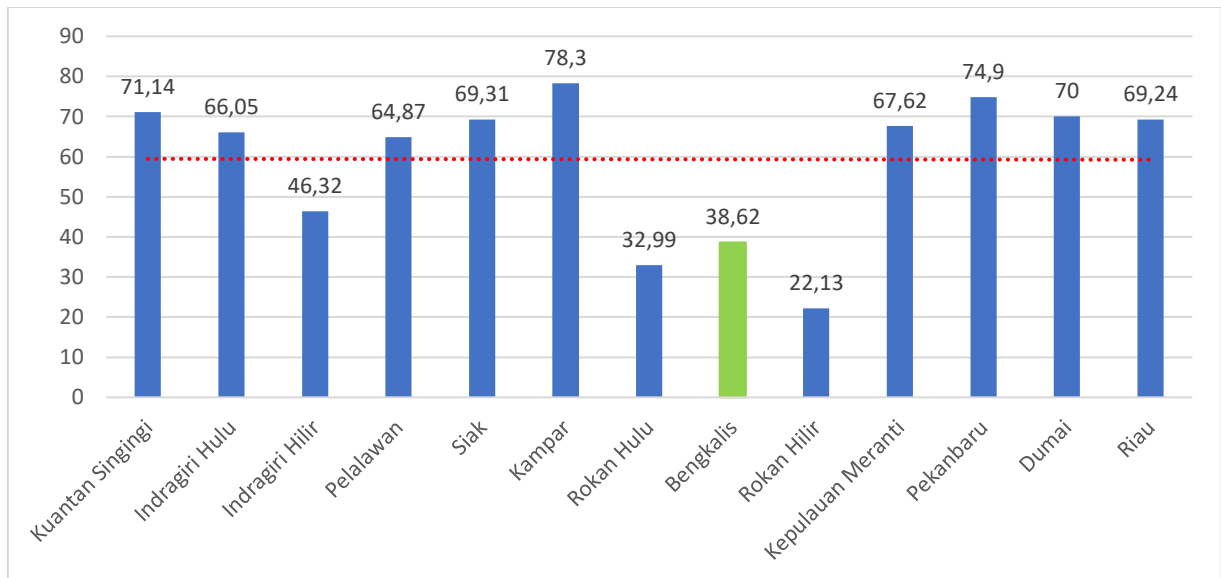
Tabel II-90 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perpustakaan	295	295	460	465	465
2	Jumlah penduduk	565.569	573.504	582.970	658.846	671.725
	Rasio perpustakaan Dengan jumlah penduduk	0,052	0,051	0,079	0,070	0,069

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, 2025

Jumlah perpustakaan di Kabupaten Bengkalis meningkat dari 295 unit perpustakaan pada tahun 2020, meningkat pada tahun 2024 menjadi 465 unit. Adapun rasio perpustakaan dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 mencapai 0,052, meningkat hingga tahun 2022 menjadi 0,079 dan sedikit turun hingga tahun 2024 menjadi 0,069.

Selain itu, pencapaian nilai IPLM Kabupaten Bengkalis sebesar 38,62, berada pada peringkat ke tiga terendah setelah Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir. Kondisi ini disebabkan masih lemahnya dimensi pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan sehingga membuat capaian IPLM Kabupaten Bengkalis masih dibawah 9 Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Riau.



Sumber: BPS Riau, 2025

Gambar II-35 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

Gambaran Capaian IPLM Kabupaten Bengkalis Tahun 2022

Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 63,04. Dengan nilai masing-masing unsur pembentuk:

1. UPLM 1 (Pemerataan Layanan Perpustakaan) : 0,0012
2. UPLM 2 (Pemerataan Koleksi Perpustakaan) : 0,9373
3. UPLM 3 (Pemerataan Tenaga Perpustakaan) : 0,0005
4. UPLM 4 (Tingkat Kunjungan Pemustaka) : 0,5873
5. UPLM 5 (Perpustakaan Ber-SNP) : 1,9998
6. UPLM 6 (Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan) : 0,2783
7. UPLM 7 (Jumlah Pemustaka) : 0,6085

Gambaran Capaian IPLM Kabupaten Bengkalis Tahun 2023

Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 53,86. Dengan nilai masing-masing unsur pembentuk:

1. UPLM 1 (Pemerataan Layanan Perpustakaan): 0,2976
2. UPLM 2 (Pemerataan Koleksi Perpustakaan): 0,1213
3. UPLM 3 (Pemerataan Tenaga Perpustakaan): 0,3045
4. UPLM 4 (Tingkat Kunjungan Pemustaka): 0,0467
5. UPLM 5 (Perpustakaan Ber-SNP): 1,0000
6. UPLM 6 (Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan) : 1,0000
7. UPLM 7 (Jumlah Pemustaka): 1,0000

Gambaran Capaian IPLM Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 38,62. Dengan nilai masing-masing unsur pembentuk:

1. UPLM 1 (Pemerataan Layanan Perpustakaan): 0,3137
2. UPLM 2 (Pemerataan Koleksi Perpustakaan): 0,0181
3. UPLM 3 (Pemerataan Tenaga Perpustakaan): 0,3248
4. UPLM 4 (Tingkat Kunjungan Pemustaka) : 0,0244

5. UPLM 5 (Perpustakaan Ber-SNP): 1,0000
6. UPLM 6 (Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan) : 0,0227
7. UPLM 7 (Jumlah Pemustaka): 1,0000

Dari Gambaran Capaian IPLM dalam 3 (tiga) tahun terakhir, dapat disimpulkan harus ada peningkatan semua unsur terutama: UPLM 2 (Pemerataan Koleksi Perpustakaan); UPLM 4 (Tingkat Kunjungan Pemustaka); UPLM 5 (Perpustakaan Ber-SNP); dan UPLM 6 (Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan).

2.1.3.2.18 Urusan Kearsipan

Kinerja pelayanan pada urusan kearsipan dapat dilihat melalui indikator persentase pengelolaan arsip secara baku. Pada tabel berikut dapat dilihat perkembangan jumlah pengunjung perpustakaan. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa persentase pengelolaan arsip secara baku baru pada tahun 2020-2022 telah mencapai 80%, meningkat pada tahun 2023-2024 menjadi 96%. Hal ini menunjukkan pada tahun 2024 sudah 44 dari total 46 perangkat daerah Kabupaten Bengkalis melakukan pengelolaan arsip secara baku.

Tabel II-91 Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pengelolaan arsip secara baku	80%	80%	80%	96%	96%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, 2025

Nilai pengawasan kearsipan adalah hasil penilaian kinerja pengelolaan kearsipan suatu lembaga terhadap standar dan prinsip kearsipan yang berlaku, yang dihitung dari akumulasi nilai pengawasan kearsipan internal (bobot 40%) dan eksternal (bobot 60%). Nilai ini menunjukkan tingkat kepatuhan lembaga dalam mengelola arsip, yang terdiri dari aspek pengelolaan arsip dinamis (penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan) serta sumber daya kearsipan (SDM dan sarana prasarana). Pengawasan Kearsipan Internal yaitu Penilaian yang dilakukan oleh unit kearsipan internal suatu lembaga terhadap kinerja pengelolaan arsipnya sendiri.

Pengawasan Kearsipan Eksternal yaitu Penilaian yang dilakukan oleh badan kearsipan nasional (ANRI) terhadap lembaga pemerintah.

1. Nilai Pengawasan Kearsipan Tahun 2022 : 65,12 kategori "B"
2. Nilai Pengawasan Kearsipan Tahun 2023 : 65,59 Kategori "B"
3. Nilai Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 : 55,59 Kategori "C"

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

Analisis terhadap capaian peningkatan pelayanan dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator pembangunan daerah pada urusan-urusan yang dikelompokkan pada urusan pilihan pemerintah daerah diantaranya yaitu pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, serta kelautan dan perikanan.

2.1.3.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Keberhasilan pelayanan pada urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat indikator produksi perikanan, konsumsi ikan, cakupan bina kelompok nelayan, produksi perikanan kelompok nelayan dan pendapatan rata-rata nelayan (juta rupiah/tahun). Perkembangan produksi perikanan di Kabupaten Bengkalis mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, produksi perikanan tercatat sebesar 7.013,87 ton dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 8.000,04 ton. Tren kenaikan berlanjut pada tahun 2022 dengan capaian tertinggi sebesar 11.513,62 ton. Namun, pada tahun 2023 produksi mengalami penurunan menjadi 6.033,59 ton dan kembali meningkat menjadi 8.848,8 ton pada tahun 2024. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi cuaca yang berdampak terhadap tidak menentunya hasil tangkapan nelayan Kabupaten Bengkalis sebagai penghasil utama perikanan di Kabupaten Bengkalis.

Produksi perikanan kelompok nelayan mengalami perkembangan yang serupa. Pada tahun 2020, produksi mencapai 5.947,97 ton, sedikit turun pada tahun 2021 menjadi 5.896,15 ton. Pada tahun 2022, produksi kembali meningkat menjadi 6.069,51 ton. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan hingga 2.767,83 ton, sebelum meningkat kembali menjadi 5.532,68 ton pada tahun 2024.

Selanjutnya cakupan bina kelompok nelayan mencapai 67 kelompok pada tahun 2020, turun hingga tahun 2022 menjadi 40 dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 80. Indikator lainnya adalah perkembangan konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 tercatat sebesar 40,89%, mengalami peningkatan menjadi 41,39% pada tahun 2021, namun sedikit turun menjadi 39,59% dan kembali meningkat hingga tahun 2024 mencapai 42,15%.

Pendapatan rata-rata nelayan tercatat sebesar Rp37,20 juta pada tahun 2020, naik menjadi Rp. 44,64 juta pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan menjadi Rp. 41,19 juta dan kembali meningkat hingga tahun 2024 menjadi Rp. 43,5 juta. Kendati demikian, pendapatan rata-rata nelayan masih tergolong rendah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus berupaya mendorong kesejahteraan nelayan melalui berbagai program pemberdayaan dan penguatan ekonomi nelayan di Kabupaten Bengkalis.

Tabel II-92 Persentase Capaian Indikator Perikanan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi perikanan	7.013,87	8.000,04	11.513,62	6.033,59	8.848,8
Konsumsi ikan (%)	40.89	41,39	39,59	42,15	42,15*
Cakupan bina kelompok nelayan	67	50	40	80	
Produksi Perikanan kelompok nelayan	5.947,97	5.896,15	6.069,51	2.767,83	5532,68
Pendapatan Rata-rata Nelayan (Juta Rupiah/tahun)	37.20	44.64	41,19	43,5	43,5**

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, 2025

Catatan/Notes: Keadaan/Condition November 2024

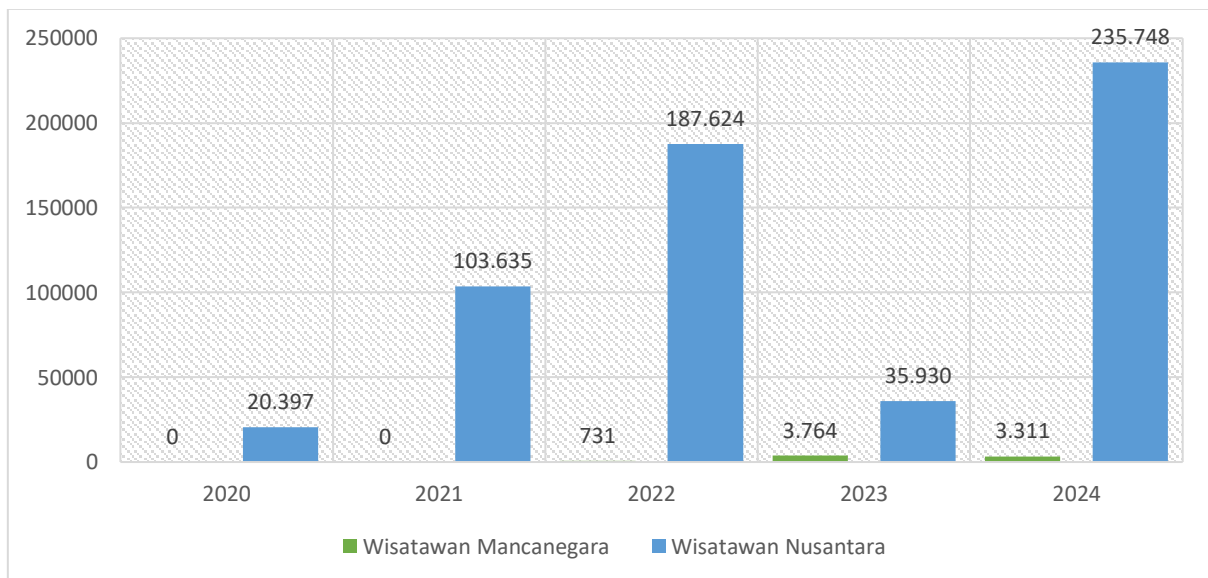
*: masih dalam perhitungan menunggu hasil dari SUSENAS

** : masih dalam perhitungan

2.1.3.3.2 Urusan Pariwisata

Ukuran keberhasilan pelayanan pada urusan pariwisata dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya adalah jumlah kunjungan wisatawan. Di Kabupaten Bengkalis, jumlah kunjungan wisatawan masih didominasi oleh wisatawan nusantara, yang tercatat sebanyak 235.746 jiwa pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah wisatawan mancanegara masih relatif kecil, yaitu 3.311 jiwa pada tahun yang sama.

Data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkalis memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata ke depan. Namun, masih terdapat tantangan, terutama dalam hal aksesibilitas wilayah dan optimalisasi promosi kepada wisatawan mancanegara. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bengkalis terus berupaya meningkatkan infrastruktur serta memperluas promosi pariwisata guna menarik lebih banyak wisatawan



Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, 2025

Gambar II-36 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Selanjutnya pada indikator rata-rata lama kunjungan wisatawan di Kabupaten Bengkalis tercatat stabil, yaitu selama tiga hari. Durasi kunjungan ini berpengaruh terhadap tingkat pengeluaran wisatawan selama berada di Kabupaten Bengkalis, yang berkontribusi pada perekonomian daerah. Namun tingkat hunian mengalami penurunan dari 18,85% pada tahun 2020, menjadi 13,25% pada tahun 2024. Sementara itu indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata menunjukkan tren peningkatan dari Rp 4.020,39 juta pada tahun 2020, menjadi Rp. 22.710,85 juta pada tahun 2023 dan sedikit turun menjadi Rp. 21.407,16 juta pada tahun 2024. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata masih belum menggambarkan potensi yang sebenarnya, karena sebagian pengeluaran wisatawan dilakukan langsung kepada masyarakat sehingga sulit untuk dihitung secara akurat.

Sementara itu, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bengkalis juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, jumlah wisatawan domestik mencapai 235.748 jiwa, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan 35.930 jiwa. Adapun jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung pada tahun 2024 mencapai 3.764 jiwa, menunjukkan adanya potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata di masa mendatang.

Meskipun terjadi peningkatan jumlah wisatawan dan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Tantangan tersebut meliputi aspek aksesibilitas wilayah serta optimalisasi promosi wisata, khususnya untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus berupaya dalam meningkatkan infrastruktur serta efektivitas promosi guna mendukung pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Bengkalis ke depannya.

Tabel II-93 Perkembangan Indikator Pariwisata Kabupaten Bengkalis 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Lama kunjungan Wisata	2,32	2,35	2,42	2,64	3,04
PAD sektor pariwisata (Juta)	4.020,39	14.513,56	20.552,16	22.710,85	21.407,16
Jumlah Wisatawan Mancanegara	covid-19	covid-19	731	3.764	3.311
Jumlah Wisatawan Nusantara	20.397	103.635	187.624	35.930	235.748
Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Nusantara	20,68	39,71	45,37	45,02	56,54
Tingkat Hunian Akomodasi	18,85	19,71	13,25	13,25	13,25
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku	97,86	84,49	88,76	88,76	88,76
Kontribusi Sektor Terhadap PAD Pariwisata	20.397	103.635	187.624	35.930	235.748

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis, 2025

Untuk kuantitas SDM di Bidang kepariwisataan secara kenyataan memang masih rendah. Meskipun jumlah SDM pariwisata masih terbatas, namun kualitas dan latar belakang pendidikan yang dimiliki menjadi kekuatan tersendiri. Saat ini terdapat satu ASN lulusan Sekolah Tinggi Pariwisata dan satu tenaga honorer lulusan S1 Pariwisata yang memiliki keilmuan langsung di bidangnya

2.1.3.3.3 Urusan Pertanian

Kinerja pelayanan pada urusan pertanian dapat dilihat melalui indikator produksi sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Bengkalis. Selain itu dapat pula dilihat melalui cakupan bina kelompok petani. Produksi Sektor pertanian di kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 mencapai 21.966,30 ton, menurun hingga tahun 2024 menjadi 14.353,48 ton. Sementara itu produksi sektor perkebunan pada tahun 2020 sebesar 289.790,70 ton, naik menjadi 675.053,95 ton pada tahun 2024. Kondisi fluktuasi sektor perkebunan di Kabupaten Bengkalis erat kaitannya dengan fluktuasi harga pupuk dan harga TBS pada level petani. Adapun cakupan bina kelompok tani telah mencapai 100 pada tahun 2020-2024.

Tabel II-94 Perkembangan Indikator Pertanian Kabupaten Bengkulu Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Sektor Pertanian (ton)	21.966,30	18.954,32	18.752,73	17.352,42	14.353,48
Produksi Sektor Perkebunan (ton)	289.790,70	268.038,36	266.190,88	586.005,36	675.053,95
Cakupan bina kelompok petani	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu, 2025

Indikator lain yang mencerminkan kinerja urusan sektor pertanian di Kabupaten Bengkulu dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu. Tabel berikut menyajikan gambaran umum mengenai peran sektor pertanian dalam struktur PDRB daerah, yang mencerminkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Kabupaten Bengkulu.

Tabel II-95 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB ADHK Kabupaten Bengkulu Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ADHK (Miliar)	14.662,02	16.630,17	17.996,85	19.482,73	20.832,37
2	PDRB ADHK (Miliar)	115.882,67	139.613,49	176.013,38	168.635,85	175.713,79
3	Share Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ADHK	12,65%	11,91%	10,22%	11,55%	11,86%

Sumber: Kabupaten Bengkulu dalam Angka, 2025

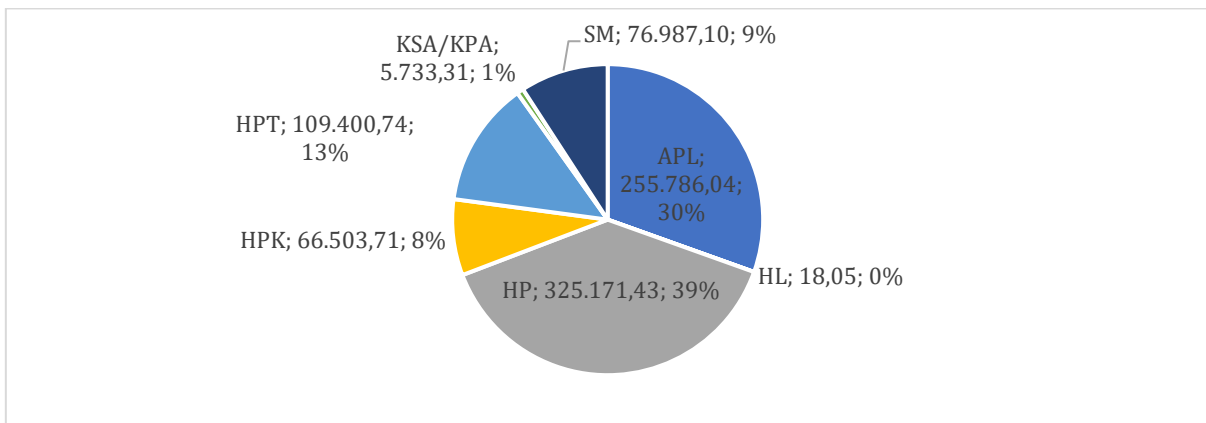
Sektor pertanian dan perkebunan masih menjadi salah satu faktor pendorong perekonomian di Kabupaten Bengkulu setelah pertambangan. Selain menyerap banyak tenaga kerja, pertanian juga terbukti memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap PDRB daerah. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 12,65%, namun mengalami penurunan hingga tahun 2022 menjadi 10,22% dan kembali meningkat menjadi 11,86% pada tahun 2024.

2.1.3.3.4 Urusan Kehutanan

Pengelolaan hutan pasca penetapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pemerintah memiliki kewenangan atas kawasan hutan, mulai dari perencanaan, perizinan, dan implementasi pengelolaan hutan dan pengawasan. Pemerintah mempunyai kewenangan mengontrol proses perencanaan dan pemantauan sumber daya hutan termasuk pengukuhan kawasan hutan yang secara implementasi berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah provinsi. Kewenangan pengurusan kehutan oleh provinsi meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi huta, dan perlindungan hutan dan

konservasi alam. Kewenangan kabupaten dalam pengelolaan kawasan hutan meliputi pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala kabupaten/kota. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten/kota.

Menjaga fungsi lingkungan dengan mempertahankan hutan menjadi sangat penting dalam pelestarian sumberdaya alam melalui pemeliharaan, pengendalian, pemuliaan, serta pengembangan pemanfaatan kawasa hutan untuk keseimbangan ekosistem. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2020 Provinsi Riau, ditemukan luasan terbesar berupa hutan produksi 38,73% dan luasan terkecil berupa Hutan Lindung 0,002%. Pemanfaatan hutan mangrove untuk pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi dengan tetap memperhatikan konservasi menjadai potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Kabupaten Bengkalis.



Sumber: Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

Gambar II-37 Kawasan Hutan di Kabupaten Bengkalis

2.1.3.3.5 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Jenis pelanggan dari kategori rumah tangga merupakan pengguna utama listrik di Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 2024, jumlah pelanggan rumah tangga tercatat sebanyak 223.276 dengan daya terpasang mencapai 342.359.383 KWH. Meskipun jumlah pelanggan rumah tangga mendominasi, konsumsi listrik terbesar justru berasal dari sektor industri. Dengan jumlah pelanggan sebanyak 223, sektor industri mampu mengonsumsi listrik hingga 1.252.801.883 KWH. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan listrik industri jauh lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, PLN Kabupaten Bengkalis terus berupaya menyediakan pasokan listrik yang cukup untuk seluruh pelanggan.

Tabel II-96 Banyaknya Produksi Tenaga Listrik Dirinci Menurut Golongan Tarif di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Penggunaan (KWH)
1	Tarif Sosial	5.503	26.273.487
2	Tarif Rumah Tangga	223.276	342.359.383
3	Tarif Bisnis	23.094	119.027.040
4	Tarif Industri	223	1.252.801.883
5	Tarif Penerangan	1.435	26.737.870
6	Tarif Lain-lain	41	1.205.605.552
Jumlah		253.572	253.572

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis, 2025

2.1.3.3.6 Urusan Perdagangan

Keberhasilan pelayanan urusan perdagangan dapat dilihat dari indikator ekspor bersih. Pada tahun 2020, net ekspor barang dan jasa tercatat sebesar 57.283,93 miliar dan mengalami peningkatan hingga mencapai 107.313,21 miliar pada tahun 2022. Meskipun sempat mengalami penyesuaian menjadi 94.511,17 miliar pada tahun 2023, angka ini kembali meningkat menjadi 97.248,06 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh perluasan objek ekspor serta semakin terbukanya kerja sama Kabupaten Bengkalis dengan berbagai institusi di luar negeri.

Surplus neraca perdagangan di Kabupaten Bengkalis sangat dipengaruhi oleh kontribusi ekspor migas yang signifikan. Oleh karena itu, perkembangan produksi minyak masih menjadi faktor utama dalam pencapaian neraca perdagangan yang positif. Sementara itu, kontribusi net ekspor terhadap PDRB ADHB terus meningkat, dari 49,99% pada tahun 2020 menjadi 55,34% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis masih bergantung pada sektor migas. Ke depan, penguatan struktur perekonomian dapat diarahkan pada pengembangan sektor nonmigas yang berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel II-97 Perkembangan Ekspor Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

No	Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Net Ekspor Barang dan Jasa (Miliar)	57.283,93	78.451,97	107.313,21	94.511,17	97.248,06
2	PDRB ADHB (Miliar)	114.583,99	139.613,50	175.972,46	168.635,85	175.713,79
3	Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa (%)	49,99%	56,19%	60,98%	56,04%	55,34%

Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis, 2025

Indikator urusan perdagangan lainnya pada tahun 2024 adalah persentase alat - alat ukur, takar, tumbang dan perlengkapan bertanda tera sah yang berlaku mencapai 495%, meningkat dari tahun 2023 yaitu 151%. Adapun persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUTM/IUTS/SIUP Toko swalayan) mencapai 90% dan persentase pengaduan konsumen yang terselesaikan mencapai 78% pada tahun 2023.

Tabel II-98 Capaian Indikator Perdagangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2024

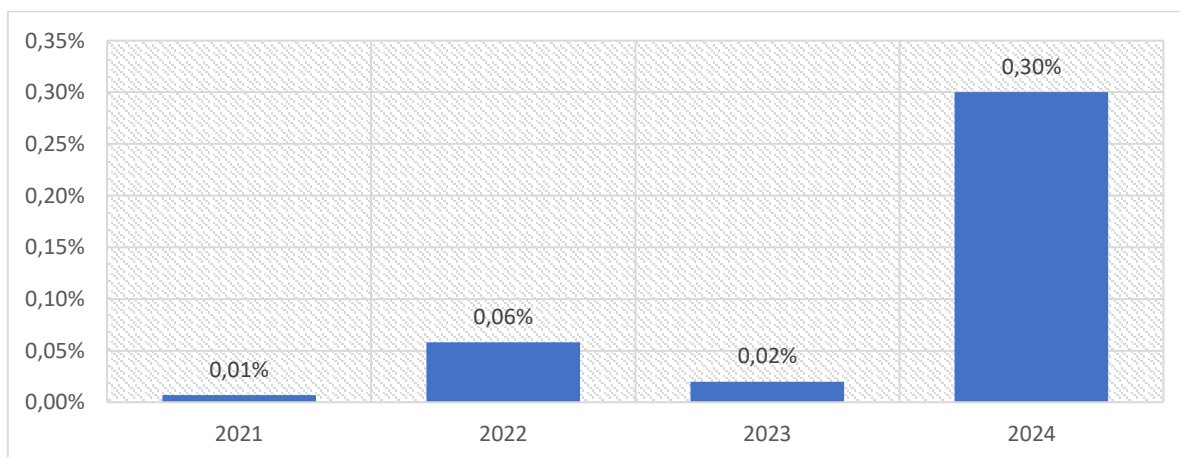
Indikator	2023	2024
Persentase Alat – alat ukur, takar, tumbang dan perlengkapan (UTTP) bertanda terasah yang Berlaku	151	495

Indikator	2023	2024
Presentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUTM/IUTS/SIUP Toko swalayan)	90	
Presentase pengaduan konsumen yang terselesaikan	78	

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis, 2025

2.1.3.3.7 Urusan Perindustrian

Perkembangan kinerja sektor perindustrian dapat diukur melalui indikator cakupan bina kelompok pengrajin. Pembinaan pengrajin memiliki arti penting bagi perkembangan industri kreatif di Kabupaten Bengkalis. Selain menyerap tenaga kerja, kelak juga akan memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah apabila pengrajin dibina dengan baik.



Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis, 2025

Gambar II-38 Perkembangan Cakupan Kelompok Pengrajin di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa cakupan bina kelompok pengrajin masih tergolong kecil, yang mana jumlah perkembangan cakupan kelompok pengrajin di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021 tercatat sebesar 0,01%, meningkat menjadi 0,06% pada tahun 2022, namun kembali turun menjadi 0,02% pada tahun 2023 dan kembali meningkat menjadi 0,30% pada tahun 2024.

Tabel II-99 Capaian indikator Perindustrian Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2024

Indikator	2023	2024
Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	1,51	43
Presentase Pelaku Usaha IKM yang di fasilitasi izin produknya	7,81	20
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB harga berlaku	14,77	

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis, 2025

Indikator urusan perindustrian lainnya pada tahun 2024 adalah pertumbuhan jumlah IKM mencapai 43%. Adapun presentase pelaku usaha IKM yang di fasilitasi izin produknya mencapai 20% dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB harga berlaku mencapai 14,77%.

2.1.3.4 Fokus Penunjang Urusan

Analisis terhadap capaian peningkatan pelayanan dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator pembangunan daerah pada urusan-urusan yang dikelompokkan pada urusan pilihan pemerintah daerah diantaranya yaitu perencanaan; keuangan; kepegawaian serta pendidikan dan pelatih; dan pengawasan.

2.1.3.4.1 Urusan Perencanaan

Keberhasilan pelayanan pada urusan perencanaan dapat dilihat pada indikator tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA, dan persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD.

Tabel II-100 Perkembangan Indikator Perencanaan Kabupaten Bengkulu Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	88,78%	96%	98,62%	95,23%	100%
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	88,06%	100%	100%	100%	100%
Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi target program Pembangunan daerah	94,83	91,9	100	89,21%	na

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu, 2025

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu telah memiliki dokumen RPJPD sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 05 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkulu 2025-2045.

Untuk indikator tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tahun 2025-2029.

Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Bengkulu juga setiap tahunnya menyusun dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA. Demikian juga

halnya dengan dokumen RTRW yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2042.

Untuk persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD dalam lima tahun terakhir sudah sangat baik, dengan persentase kesesuaian mencapai 100% pada tahun 2024. Sementara itu penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD juga menunjukkan capaian yang sangat baik, yaitu mencapai 100% pada tahun 2024.

2.1.3.4.2 Urusan Keuangan

Kinerja pelayanan pada urusan keuangan dapat diukur melalui opini BPK terhadap laporan keuangan, persentase SILPA, persentase belanja pendidikan (20%), persentase belanja kesehatan (10%) dan Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-101 Perkembangan Indikator Keuangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020–2024

KEUANGAN	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Persentase Temuan Inspektorat / BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%	96.55%	86.36%	71,76
Persentase SILPA	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase SILPA terhadap APBD	5,50%	5,86%	6,48%	1,81%	3,89%
Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksanakan	na	na	na	na	na
Persentase belanja pendidikan (20%)	21,29	23,95	21,00	22,26	22,79
Persentase belanja kesehatan (10%)	12,46	16,04	15,50	16,59	15,32%
Persentase penatausahaan aset yang tertib dan terukur	40%	45%	50%	55%	63%
Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Na	Na	0,21	0,25	0%
Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkalis, 2025

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan pada tahun 2020-2024 mendapat predikat WTP, ini artinya adanya pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang telah transparan dan akuntabel. Untuk persentase SILPA terhadap APBD tercatat sebesar 5,50% pada tahun 2020, mengalami fluktuasi menjadi 3,89% pada tahun 2024.

Sementara itu, persentase belanja pendidikan sedikit lebih tinggi dari batas minimum belanja pendidikan yaitu 20% dari total APBD yang tercatat sebesar 21,29% pada tahun 2020, mengalami fluktuasi menjadi 22,79% pada tahun 2024.

Secara umum belanja kesehatan juga lebih tinggi dari batas minim belanja kesehatan pada APBD. Persentase belanja kesehatan (10%) pada tahun 2020 sebesar

12,46%, mengalami fluktuasi menjadi 15,32% pada tahun 2024. Peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis.

2.1.3.4.3 Urusan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Salah satu indikator dalam Urusan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Bengkalis adalah Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Indeks Profesionalitas ASN dapat digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai Pegawai ASN. Selain itu, Indeks Profesionalitas ASN dapat digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional. Indeks Profesionalitas ASN dapat juga digunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Dari tahun 2020-2024 Indeks Profesionalitas ASN masih belum berada pada kategori nilai yang cukup baik. Pada tahun 2020 dengan nilai Indeks Profesionalitas ASN sebesar 62,57 atau berada pada kategori rendah. Selanjutnya turun hingga tahun 2022 menjadi 41,22 atau dengan kategori sangat rendah. Pada tahun 2023 tingkat profesionalitas ASN di Kabupaten Bengkalis kembali naik menjadi 76,66 atau dengan kategori sedang.

Tabel II-102 Perkembangan Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 – 2024

Tahun	Jumlah PNS	Dimensi				Nilai Indeks Kategori Profesionalitas ASN	Kategori
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin		
2020	6032	12,31	20,44	24,82	5	62,57	Rendah
2021	6444	12,46	8,76	24,74	4,99	50,95	Sangat rendah
2022	6381	21,23	8,39	8,80	5	41,22	Sangat rendah
2023	6203	20,99	26,1	24,57	5	76,66	Sedang
2024	8324	20,71	28,38	25,48	5,00	79,56	Sedang

Sumber: BKPP Kabupaten Bengkalis, 2025

Beberapa indikator yang menggambarkan perkembangan keberhasilan kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan adalah persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada tahun 2020 sebesar 2,01%, namun turun menjadi 0,52% pada tahun 2022, dan kembali meningkat hingga tahun 2024 menjadi 4,84%.

Selanjutnya, persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural pada tahun 2020 sebesar 0,52%, meningkat menjadi 12,4% pada tahun 2024. Adapun jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah sebanyak 32 pada tahun 2020, namun turun menjadi 29 pada tahun 2021 dan kembali meningkat pada tahun

2022 menjadi 34. Pada tahun 2023 kembali turun menjadi 31 dan pada tahun 2024 meningkat kembali pada tahun 2024.

Tabel II-103 Perkembangan Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	2,01%	1,56%	0,52%	4,37%	4,84%
Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	0,52%	0,00%	1,40%	12,12%	12,4%
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	32	29	34	31	34
Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	2.585	2.894	2.485	2.384	2.324
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	109	105	438	414	332
Rasio PNS berpendidikan Tinggi (PT)	1,74%	1,05%	0,29%	3,6%	-2,76
Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Na	Na	5,71%	6,67%	10,67
Peningkatan Kinerja Pelayanan Kepegawaian	Na	82,49%	87,72%	91%	98,07%

Sumber: BKPP Kabupaten Bengkalis, 2025

Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah mengalami peningkatan dari 2.585 jabatan pada tahun 2020 menjadi 2.894 jabatan, kemudian mengalami penurunan secara bertahap hingga mencapai 2.324 jabatan pada tahun 2024. Penurunan ini selaras dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi dan transformasi jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional. Hal tersebut diperkuat oleh tren peningkatan jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu. Tercatat sebanyak 109 orang pada tahun 2020, menurun menjadi 105 pada tahun 2021, kemudian meningkat signifikan menjadi 438 pada tahun 2022, sebelum akhirnya menurun kembali menjadi 332 orang pada tahun 2024. Meskipun terdapat penurunan pada tahun 2024, jumlah ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020.

Rasio ASN dengan latar belakang pendidikan tinggi juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, rasio tersebut sebesar 1,74%, menurun menjadi 0,29% pada tahun 2022, namun meningkat kembali menjadi 3,6% pada tahun 2023 dan sedikit menurun menjadi 2,79% pada tahun 2024.

Indikator lainnya adalah rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), yang menunjukkan peningkatan dari 5,71% pada tahun 2022 menjadi 10,67% pada tahun 2024.

Secara umum, capaian kinerja pelayanan kepegawaian juga menunjukkan tren positif. Pada tahun 2021, kinerja ini berada pada angka 82,49%, dan meningkat secara konsisten hingga mencapai 98,07% pada tahun 2024. Hal ini merupakan indikator agregat

yang mencerminkan perbaikan menyeluruh dalam tata kelola kepegawaian di Kabupaten Bengkulu.

2.1.3.4.4 Urusan Penelitian dan Pengembangan

Implementasi rencana kelitbangan baru mencapai 20% pada tahun 2023 dari keseluruhan rencana yang sudah diimplementasikan. Begitu pula dengan pemanfaatan hasil kelitbangan turun dari tahun 2022 sebesar 67%, menjadi 36,36% pada tahun 2023. Meski begitu Balitbang Kabupaten Bengkulu sudah berusaha dengan baik untuk menerapkan inovasi-inovasi baru di daerah. Dimana kebijakan inovasi yang sudah diterapkan di daerah sudah mencapai 70% pada tahun 2023. Namun indeks inovasi daerah Kabupaten Bengkulu turun dari 45 pada tahun 2021, menjadi 37,78 pada tahun 2024.

Tabel II-104 Perkembangan Indikator Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu 2020-2024

No	Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	4	5	10	20	
2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	70%	55%	67%	36,36%	
3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	42%	55%	88,34%	28,26%	
4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	60%	65%	65%	70%	
5.	Indeks Inovasi Daerah		45	44,17	42,59	37,78

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkulu, 2025

2.1.3.4.5 Urusan Pengawasan

Kinerja pelayanan pada urusan pengawasan di Kabupaten Bengkulu menunjukkan perkembangan cukup baik selama periode 2020-2024. Persentase tindak lanjut temuan pada tahun 2020 sebesar 58,2%, meningkat menjadi 71,79% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen dari Inspektorat Kabupaten Bengkulu dalam menindaklanjuti temuan-temuan yang didapat.

Selanjutnya jumlah temuan BPK pada tahun 2020 sebesar 580, meningkat menjadi 683 pada tahun 2024. Namun turun signifikan pada tahun 2024. Persentase pelanggaran ASN menunjukkan penurunan dari 0,30% pada tahun 2020 menjadi 0,08% pada tahun 2023. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-105 Perkembangan Indikator Pengawasan Kabupaten Bengkulu Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Tindak Lanjut Temuan	58,2	61,2	62	68	71,76
Jumlah Temuan BPK	580	602	603	683	95
Persentase Pelanggaran Pegawai (ASN)	0,30%	0,12%	0,06%	0,08%	na

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber: Inspektorat Kabupaten Bengkalis, 2025

Perkembangan indikator Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Bengkalis telah mencapai level tiga selama periode 2022-2024. Ini menunjukkan tingkat kematangan SPIP dalam pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, berada dalam tahap berkembang. Ke depannya, pemerintah daerah akan terus berupaya melakukan pengawasan dan pengendalian internal untuk memperbaiki tata kelola SPIP menjadi lebih baik.

2.1.3.4.6 Sekretariat Dewan

Berikut ini adalah perkembangan indikator untuk urusan penunjang atau pendukung daerah di Kabupaten Bengkalis. Perkembangan indikator Sekretariat Dewan Kabupaten Bengkalis menunjukkan capaian yang sangat baik, dimana seluruh indikator tercapai. Hanya saja pada indikator tingkat kepuasan DPRD terhadap kinerja pelayanan Setwan turun pada tahun 2024 menjadi 90,15. Untuk lebih lengkap disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel II-106 Perkembangan indikator Sekretariat Dewan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Terintegrasi Program- program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Integrasi dan sinkronisasi program kerja DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dalam dokumen perencanaan (Pemda/PD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
(Rencana Kerja Tahunan Alat Kelengkapan Dewan)					
Tingkat kesesuaian perencanaan dan penganggaran Setwan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tingkat kesesuaian target dan realisasi anggaran	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tingkat kepuasan DPRD terhadap kinerja pelayanan Setwan	100	97,8	94,44	100	90,15

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis, 2025

2.1.3.4.7 Sekretariat Daerah

Urusan penunjang untuk sekretariat daerah dalam beberapa tahun terakhir sudah terlaksana dengan baik pada tahun 2024. Hal ini terlihat dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 tercatat sebesar 102,22, meningkat dari tahun 2023 yaitu 86,9. Selanjutnya adalah persentase produk hukum daerah yang lulus uji harmonisasi prediket LPPD sebesar 133,34% pada tahun 2024, meningkat dari tahun 2023 yaitu 100%. Adapun Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 33,34, lebih rendah dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 55. Indikator lainnya adalah persentase pengelolaan wilayah perbatasan pada tahun 2023 mencapai 73,31, lebih rendah dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100%. Lebih rinci dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel II-107 Perkembangan indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	2024
1	IKM	Persen	88,17	85	86,9	102,22
2	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	0	70	75	
3	Indeks Kelembagaan	Persen	0	60	65,44	
4	Persentase produk hukum daerah yang lulus uji harmonisasi Prediket LPPD	Persen	75	75	100	133,34
6	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten (LAKIP)	Predikat	0	B	BB	
7	Indek Reformasi Birokrasi	Nilai	52,43	55	33,34	
8	Persentase pengelolaan wilayah perbatasan	Persen	100	100	73,31	

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, 2025

Adapun perkembangan IKM menurut Kecamatan secara umum menunjukkan peningkatan selama periode 2021 sampai 2024. Kecamatan dengan IKM tertinggi adalah Kecamatan Bengkalis sebesar 99,02, Kecamatan Rupid sebesar 98,35, Kecamatan Rupid Utara sebesar 98,18 dan Kecamatan Pinggir sebesar 95,99. Lebih rinci dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel II-108 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bengkalis Menurut Kecamatan Tahun 2021-2024

Indeks Capaian Kinerja Utama Kecamatan	2021	2022	2023	2024
Bengkalis	87,08	87,08	89,12	99,02
Bantan	89,02	90,00	90,80	92,36
Bukit Batu	82,01	82,40	87	90
Mandau	93,05	93,85	93,01	
Rupat	88,54	92,09	95,36	98,35
Rupat Utara	80,05	81,53	87,13	98,18
Siak Kecil	87,90	80,57	87,17	90,89
Pinggir	93,7	81,53	90,96	95,99
Bandar Laksamana	89,59	86,33	87	90
Talang Muandau	79,67	81,12	90,85	91,78
Bathin Solapan	83,33	80,54	95,45	90,81

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, 2025

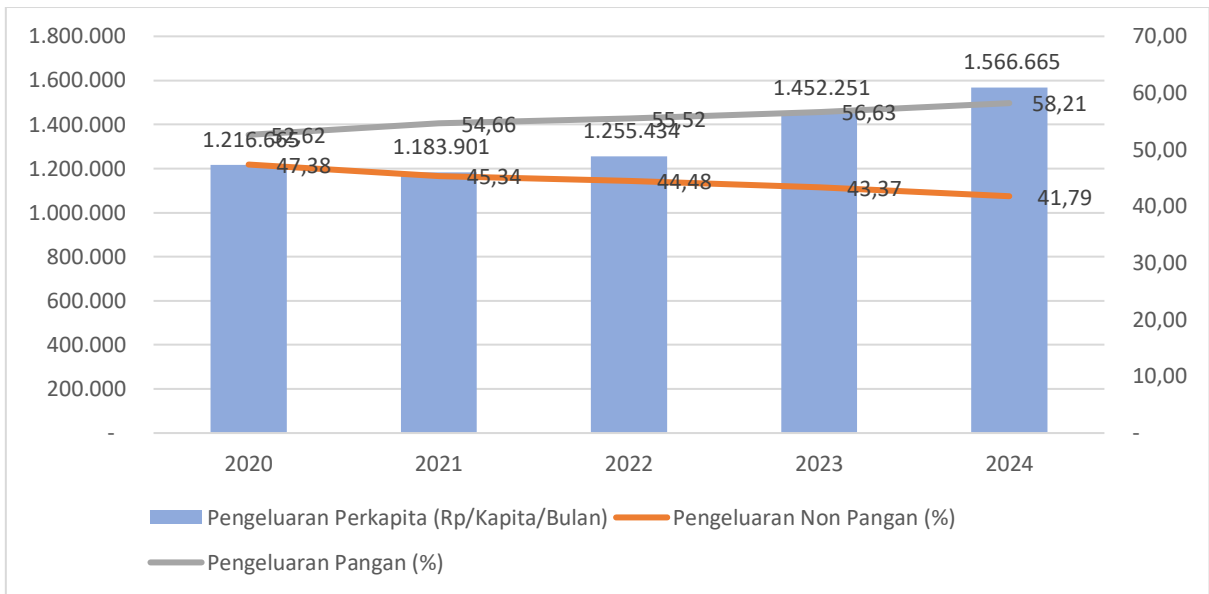
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan gambaran daya beli penduduk terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*). Pengeluaran konsumsi rumah tangga (*household consumption*) merupakan pengeluaran akhir rumah tangga untuk membeli barang dan jasa, meliputi kelompok makanan dan bukan makanan. Konsumsi rumah tangga menjadi indikator penting dalam perekonomian yang diperlukan untuk menggambarkan kondisi permintaan dalam perekonomian, termasuk dalam perekonomian daerah. Rumah tangga merupakan pelaku ekonomi yang memiliki peran sebagai konsumen dan penyedia faktor-faktor produksi dalam perekonomian. Sebagai konsumen, rumah tangga membutuhkan beragam barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Secara umum, jumlah pengeluaran penduduk Kabupaten Bengkalis menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita per bulan tercatat sebesar Rp 1.216.665 kapita/bulan, meningkat hingga tahun 2024 menjadi Rp. 1.566.665 kapita/bulan.

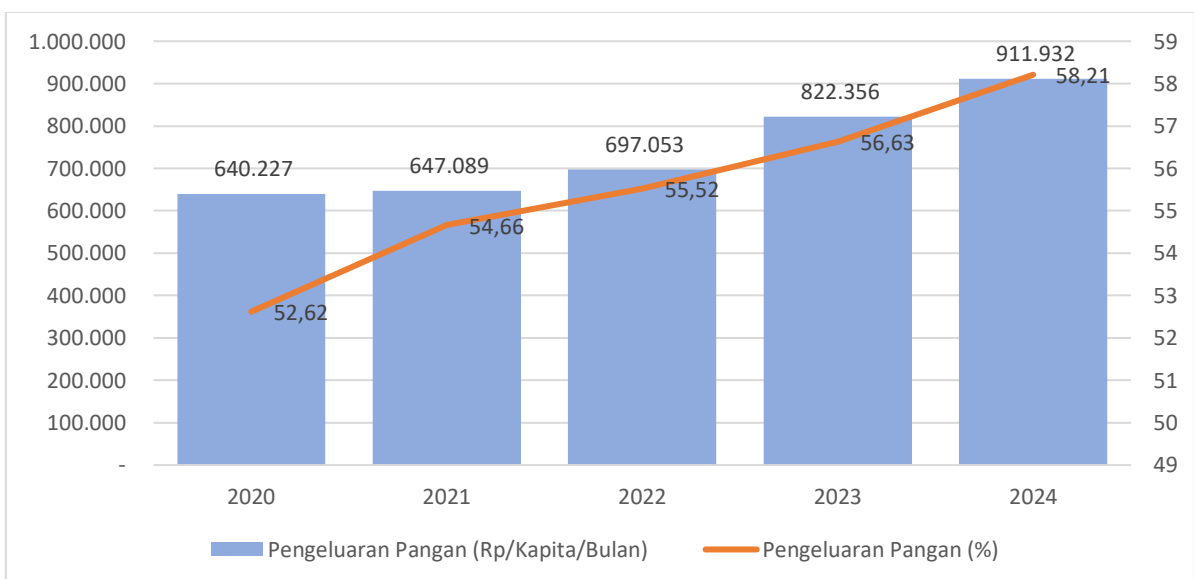
Tren peningkatan pengeluaran ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat serta kemungkinan efek dari inflasi dan kenaikan harga barang dan jasa. Proporsi pengeluaran perkapita rumah tangga terbesar adalah pengeluaran pangan sebesar 58,21% yang terus meningkat selama 5 tahun terakhir, sementara proporsi pengeluaran non pangan hanya sebesar 41.79%. Peningkatan pengeluaran pada kelompok makanan khususnya dapat disebabkan oleh efek kenaikan harga atau inflasi pada sekelompok komoditi pangan. Data ini mencerminkan kondisi ekonomi daerah yang terus berkembang dan menuntut perhatian dalam perencanaan kebijakan ekonomi daerah ke depannya.



Sumber: BPS Bengkalis, 2025

Gambar II-39 Perkembangan Pengeluaran Rumah Tangga Perkapita Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Pengeluaran pangan per kapita rumah tangga di Kabupaten Bengkalis mengalami tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, pengeluaran pangan tercatat sebesar Rp 640.227 per kapita per bulan dan terus meningkat hingga mencapai Rp 911.932 pada tahun 2024. Proporsi pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran rumah tangga juga menunjukkan kecenderungan kenaikan, yang mencerminkan bahwa pengeluaran pangan menjadi semakin dominan dalam struktur pengeluaran rumah tangga. Kenaikan ini dapat diartikan sebagai respons terhadap peningkatan harga pangan atau perubahan dalam pola konsumsi masyarakat, yang mempengaruhi besaran alokasi pengeluaran rumah tangga untuk sektor pangan.

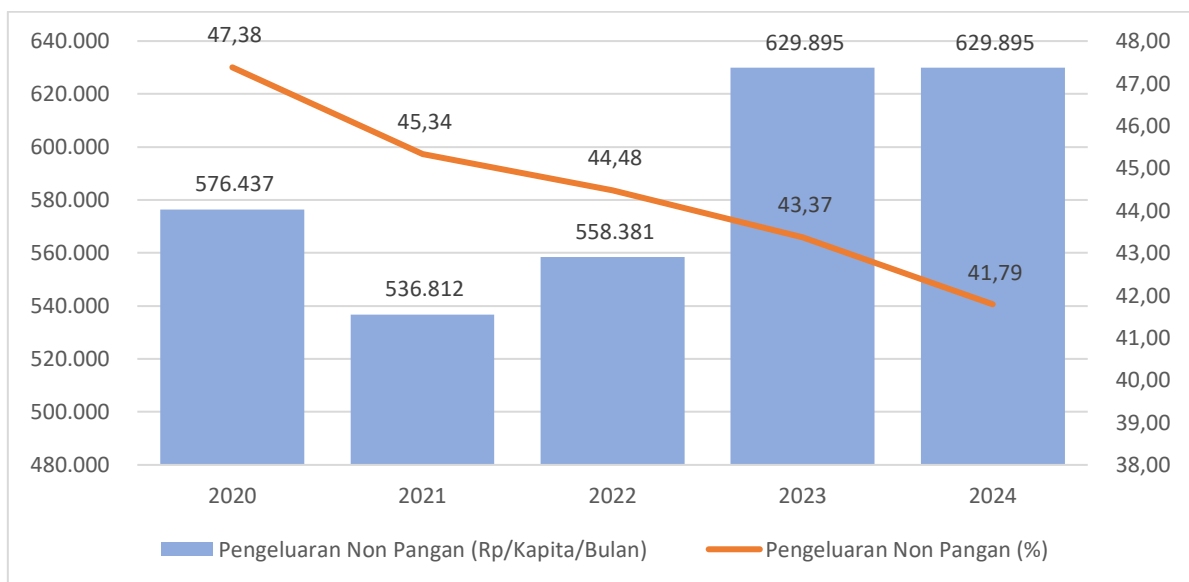


Sumber: BPS Bengkalis, 2025

Gambar II-40 Perkembangan Tingkat Pengeluaran Pangan dan Proporsi Pengeluaran Pangan terhadap Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

2.1.4.1.2 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Pengeluaran non pangan penduduk kabupaten Bengkalis selama periode 2020-2024 memiliki trend fluktuasi meningkat secara nominal, yaitu sebesar Rp. 576.437 kapita/bulan pada tahun 2020, turun menjadi Rp. 536.812 kapita/bulan, kembali meningkat hingga tahun 2023 menjadi Rp. 629.895 kapita/bulan dan tetap pada tahun 2024. Namun secara proporsional pengeluaran non pangan mengalami trend penurunan dari 46,97% pada tahun 2020, menjadi 41,79% pada tahun 2024. Secara umum, komponen konsumsi non pangan terbesar dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga, serta pemenuhan kebutuhan aneka komoditas dan jasa.



Sumber: BPS Riau, 2025

Gambar II-41 Perkembangan Tingkat Pengeluaran Non Pangan dan Proporsi Pengeluaran Non Pangan terhadap Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

2.1.4.1.3 Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani (NTP) merupakan indikator penting dalam pembangunan, karena menggambarkan tingkat daya tukar atau daya beli petani terhadap produk yang dibeli atau bayar baik untuk pemenuhan konsumsi sehari-hari maupun untuk pemenuhan input produksi untuk menghasilkan barang-barang pertanian. Dengan demikian, nilai tukar petani yang semakin tinggi menggambarkan daya beli petani produk konsumsi dan input produksi pertanian semakin baik. Nilai tukar petani yang semakin tinggi mengindikasikan kesejahteraan petani yang lebih sejahtera secara relatif. Nilai tukar pada tingkat 100 mengindikasikan bahwa nilai produksi yang dihasilkan baru mencukupi untuk membeli kebutuhan konsumsi rumah tangga petani dan membeli kebutuhan produksi yang diperlukan petani dalam berusaha tani. Perkembangan nilai tukar petani Kabupaten

Bengkalis diukur dari nilai tukar petani Provinsi Riau, hal ini disebabkan ketersediaan data nilai tukar petani pada tingkat kabupaten tidak di publikasikan oleh BPS Kabupaten. Secara umum, nilai tukar petani di Provinsi Riau menunjukkan trend yang meningkat, mulai dari 118,77 pada tahun 2020 menjadi 173,22 pada tahun 2024.

Nilai Tukar Petani di Provinsi Riau dan Bengkalis dipengaruhi oleh kondisi perkembangan perekonomian global. Hal ini dikarenakan karakteristik sektor pertanian Provinsi Riau dan juga Kabupaten Bengkalis yang dominan pada perkebunan dan industri kelapa sawit. Sehingga apabila terjadi perubahan pada harga CPO dan produk turunan kelapasawit pada pasar global maka akan berpengaruh terhadap harga harga Tandan Buah Segar (TBS) pada tingkat petani. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Riau dan Kabupaten Bengkalis, penting untuk menjaga stabilitas harga komoditas pertanian, khususnya kelapa sawit. Sehingga pengembangan industri pengolahan yang terintegrasi antara petani dan industri besar di daerah dapat memperkuat struktur perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan petani. Jaminan stabilitas harga komoditi sampai pada tingkat petani dan kontrol terhadap kenaikan harga-harga kebutuhan petani menjadi hal penting dalam pembangunan daerah.

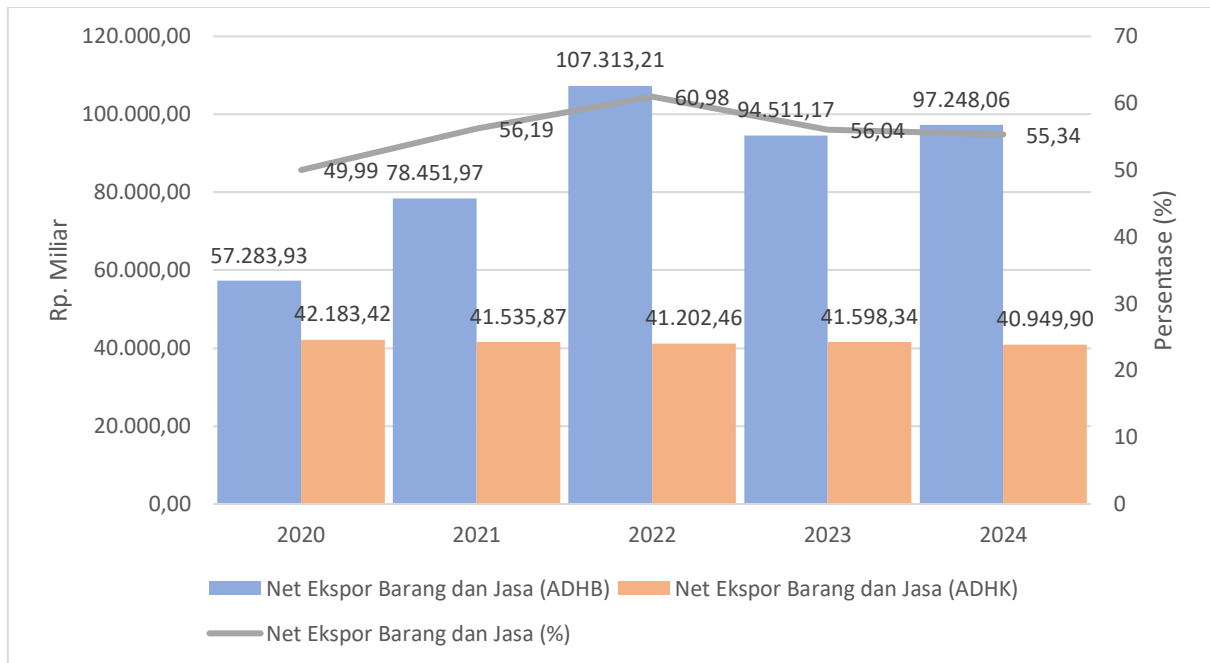


Sumber: BPS Riau, 2025

Gambar II-42 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Riau Tahun 2020-2024

2.1.4.1.4 Rasio Perdagangan Terhadap PDRB

Rasio perdagangan terhadap PDRB merupakan indikator pengaruh relatif perdagangan internasional dalam ekonomi suatu negara atau daerah. Rasio perdagangan terhadap PDRB dengan membagi nilai agregat ekspor dan impor tahun 2020-2024 dengan produk domestik bruto pada waktu yang sama. Nilai rasio ini merupakan gambaran keterbukaan perekonomian daerah terhadap perdagangan internasional. Berdasarkan nilai rasio perdagangan dan PDRB Kabupaten Bengkalis terlihat bahwa perekonomian Bengkalis sangat terbuka dengan kondisi perekonomian dunia.



Sumber: BPS Bengkalis, 2025

Gambar II-43 Perkembangan Rasio Perdagangan terhadap PDRB ADHK Tahun 2020-2024

Perkembangan net ekspor barang dan jasa menurut harga berlaku pada tahun 2020 tercatat sebesar 57.283,93 miliar, meningkat menjadi 107.313,21 miliar pada tahun 2022, namun kembali turun pada tahun 2023 menjadi 94.511,17 miliar dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 97.248,06 miliar. Adapun perkembangan net ekspor barang dan jasa menurut harga konstan pada tahun 2020 sebesar 42.183,42 miliar, turun hingga tahun 2022 menjadi 41.202,46 miliar dan kembali meningkat menjadi 41.598,34 miliar, namun sedikit turun pada tahun 2024 menjadi 40.949,90 miliar. Adapun perkembangan perkembangan rasio net ekspor barang dan jasa terhadap PDRB menurut harga berlaku pada tahun 2020 sebesar 49,99%, meningkat hingga tahun 2022 menjadi 60,98% dan kembali turun hingga tahun 2024 menjadi 55,34%. Besarnya kontribusi net ekspor terhadap PDRB pengeluaran menunjukkan Kabupaten Bengkalis memiliki struktur ekonomi yang terbuka dan sangat bergantung pada perdagangan luar negeri, yang menjadikan sektor ekspor sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah.

2.1.4.1.5 Dana Masyarakat di Perbankan

Jumlah dana masyarakat pada bank di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 sebagian besar adalah dalam bentuk tabungan yang berjumlah Rp. 6.495.483 juta. Sementara dalam bentuk deposito sebesar Rp. 1.961.725 juta dan dalam bentuk giro sebesar Rp. 903.884 juta. Jumlah dana masyarakat pada bank di Kabupaten Bengkalis merupakan jumlah terbanyak kedua di Provinsi Riau setelah Kota Pekanbaru.

Tabel II-109 Dana Masyarakat pada Perbankan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 (Rp. Juta)

Jenis Simpanan	2020	2021	2022	2023	2024
Giro	574.750	1.742.426	1.656.197	973.528	903.884
Tabungan	5.007.418	6.439.476	6.382.289	6.529.199	6.495.483
Deposito	2.223.029	2.391.161	2.187.538	2.237.249	1.961.725
Jumlah/Total	7.805.198	10.573.063	10.226.024	9.739.976	9.361.093

Sumber: BPS Bengkalis, 2025

2.1.4.1.6 Sektor Unggulan

Sektor dominan dalam perekonomian Kabupaten Bengkalis adalah sektor pertambangan, sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Namun, sektor pertanian berkontribusi sebesar 11,55% terhadap total PDRB Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023. Subsektor dominan pada sektor pertanian subsektor perkebunan yang didominasi oleh perkebunan kelapa sawit dengan luas lahan sebesar 283.033,88 ha pada tahun 2024. Tercatat pada tahun 2021 produksi kelapa sawit di Kabupaten Bengkalis mencapai 238.664,29 ribu ton, namun turun pada tahun 2022 menjadi 238.507,59 ton dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 558.101,49ton dan meningkat juga pada tahun 2024 menjadi 647.058,25 ton. Sementara luas lahan dan produksi karet dan kelapa masih relatif kecil jika dibandingkan dengan komoditi kelapa sawit di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021-2024.

Tabel II-110 Jumlah Produksi dan Luas Areal Komoditas Utama Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024

KOMODITAS UNGGULAN	2021		2022		2023		2024	
	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)
Kelapa sawit	238.664,29	130.547,70	238.507,59	130.657,70	558.101,49	283.881,24	647.058,25	283.033,88
Karet	20.807,51	32.038,70	20.822,82	32.084,20	21.014,31	32.075,20	21.002,00	32.065,20
Kelapa	4.180,47	6.080,45	3.277,11	6.080,45	3.306,85	6.096,55	3.363,76	6.091,55

Sumber: Dinas Perkebunan Kab. Bengkalis, 2025

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Bengkalis dari tahun 2021 hingga 2024 telah mencapai 90%. Meskipun angka ini menunjukkan perkembangan yang signifikan, pengembangan wilayah di Kabupaten Bengkalis masih memerlukan pengawasan ketat dan perizinan penggunaan lahan yang lebih baik. Saat ini, masih terdapat beberapa pembangunan wilayah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan berbagai ancaman terhadap kelangsungan hidup lingkungan, seperti deforestasi, banjir, dan kebakaran lahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa setiap pembangunan dilakukan sesuai dengan RTRW guna menjaga keseimbangan lingkungan dan mencegah terjadinya bencana yang merugikan daerah.

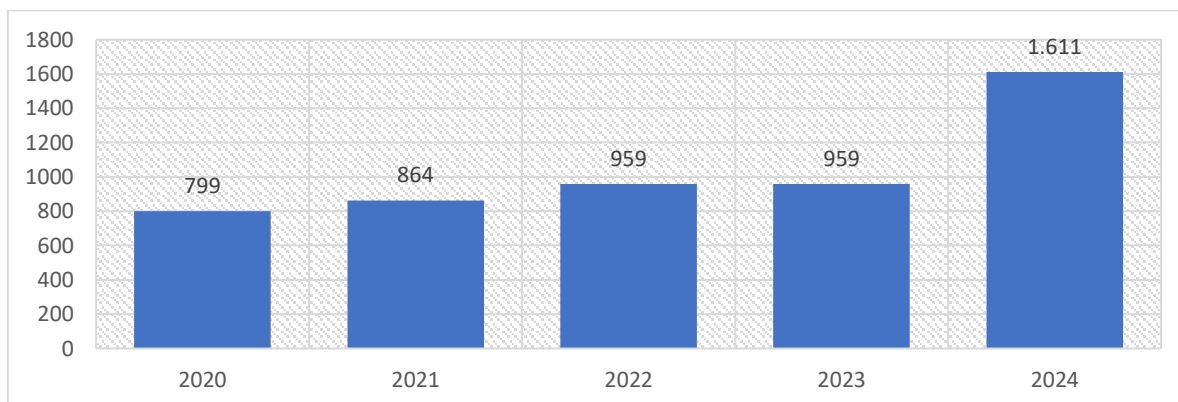
Tabel II-111 Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Ketaatan Terhadap RTRW	90	90	90	90

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis, 2025

2.1.4.3 Fokus Daya Saing Iklim Investasi

Secara umum, fungsi angka kriminalitas ini adalah untuk memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Berikut ini adalah angka kriminalitas yang ditangani oleh Polres Bengkalis dari kurun waktu 2020-2024.



Sumber: BPS Riau, 2025

Gambar II-44 Angka Kriminalitas yang Tercatat di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir trend kasus kriminalitas yang dilaporkan ke Polres Bengkalis meningkat. Pada tahun 2020 sebanyak 799 kasus kejahatan yang dilaporkan, terus meningkat hingga tahun 2024 menjadi 1.611 kasus kejahatan yang dilaporkan.

Tabel II-112 Rasio Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kabupaten Bengkalis 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan	799	864	959	959	1.611
Jumlah Penduduk	593.397	606.179	646.715	658.846	671.725
Rasio Kriminalitas Per 10.000 penduduk	13,46	14,25	14,83	14,56	23,98

Sumber: Bengkalis dalam Angka, 2025

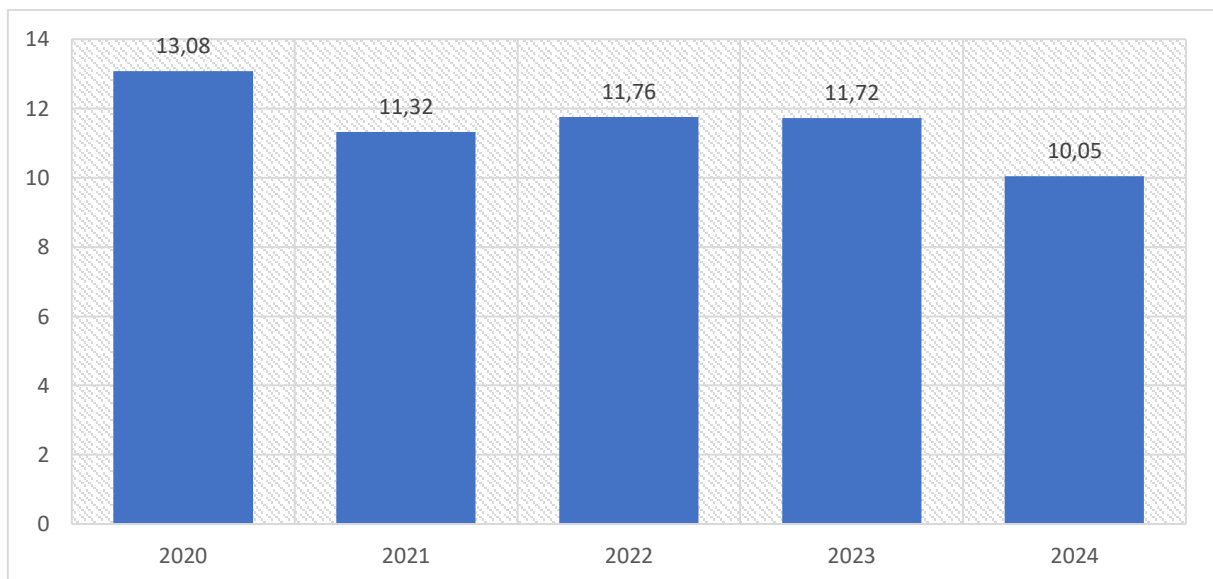
Secara rasio, tindak kriminalitas di Kabupaten Bengkalis tampak mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir. Rasio kriminalitas pada tahun 2020 sebesar 13,56 kasus kejahatan per 10.000 penduduk, naik menjadi 14,83 pada tahun 2022, sedikit turun pada tahun 2023 menjadi 14,56 dan kembali naik pada tahun 2024 menjadi 23,98 kasus kejahatan per 10.000 penduduk. Trend peningkatan rasio kriminalitas sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Adanya kecenderungan peningkatan kasus kriminal, jika tidak segera ditangani, berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan wilayah serta dapat menghambat kelancaran proses pembangunan daerah di Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu, Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk meningkatkan upaya preventif dan penegakan peraturan daerah guna

menjaga stabilitas dan mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pembangunan.

2.1.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia

2.1.4.4.1 Kualitas Tenaga kerja

Kualitas tenaga kerja dapat diukur melalui persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah S1/S2/S3, yang mencerminkan sejauh mana perkembangan pendidikan tinggi di Kabupaten Bengkalis. Pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan memenuhi tuntutan pasar tenaga kerja. Tenaga kerja yang berpendidikan akan memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan daerah. Berdasarkan data yang ada, persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan ijazah S1/S2/S3 di Kabupaten Bengkalis menunjukkan perkembangan fluktuasi yang menurun dari periode 2020-2024. Pada tahun 2020, persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan ijazah S1/S2/S3 berada pada angka 13,08%, turun menjadi 11,32% pada tahun 2021, kembali meningkat menjadi 11,76% pada tahun 2022 dan kembali turun menjadi 10,05%.



Sumber: BPS Bengkalis dan Riau, 2025

Gambar II-45 Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Ijazah S1/S2/S3 Tahun 2020-2024

Sebagai langkah strategis dalam mengatasi tren penurunan persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan ijazah S1/S2/S3 selama periode 2020-2024, Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus berupaya memperkuat kebijakan pendidikan agar mampu mendorong peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan menyediakan berbagai program beasiswa dan dukungan finansial bagi mahasiswa, serta memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi. Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan fasilitas pendidikan dan pelatihan yang melibatkan stakeholders yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja daerah.

2.1.4.4.2 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan, semakin besar beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan yang sudah tidak produktif lagi. Sebaliknya, semakin rendah persentase rasio ketergantungan, semakin ringan beban yang ditanggung penduduk produktif. Seiring waktu, rasio ketergantungan di Kabupaten Bengkalis terus berkurang. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah penduduk yang memasuki usia produktif, yakni kelompok usia 15-64 tahun. Kondisi ini tentu merupakan hal positif, karena semakin rendahnya rasio ketergantungan menandakan bahwa kesejahteraan penduduk meningkat dan beban perekonomian berkurang. Penduduk yang berada pada usia produktif (15-64 tahun) biasanya menanggung beban perekonomian dan kebutuhan penduduk yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun.

Tabel II-113 Rasio Ketergantungan Kabupaten Bengkalis 2020-2024

Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024
0-14	166.372	162.377	163.140	183.388	175617
15-64	375.974	386.916	393.577	446.565	464.276
>64	22.343	24.211	26.247	28.893	31.832
Jumlah Penduduk	564.689	573.504	582.973	658.846	671.725
Rasio Ketergantungan	50,19%	48,22%	48,12	47,54%	44,68

Sumber: Kabupaten Bengkalis Dalam Angka, 2024

Penurunan rasio ketergantungan dari 50,19% pada tahun 2020 menjadi 44,68% pada tahun 2024 menunjukkan perbaikan struktur demografi di Kabupaten Bengkalis. Rasio ini mengindikasikan bahwa beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tidak produktif (anak-anak dan lanjut usia) semakin ringan. Dengan kata lain, pada tahun 2024 setiap 100 penduduk usia produktif hanya menanggung 44,68 orang penduduk tidak produktif, dibandingkan dengan 50,19 orang pada tahun 2020. Kondisi ini memberikan sinyal positif bagi pembangunan ekonomi daerah karena meningkatnya proporsi penduduk yang dapat bekerja dan berkontribusi terhadap perekonomian. Momentum ini dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memperkuat sektor ketenagakerjaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui optimalisasi bonus demografi yang tengah berlangsung.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis Sampai Tahun 2024.

Secara umum, hingga akhir tahun 2024, tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Kabupaten Bengkalis berada pada kategori sedang. Capaian kinerja RKPD tercatat sebesar 75,42%, sementara realisasi anggaran mencapai 67,55%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat ruang untuk terus dioptimalkan kedepannya

agar dapat memberikan dampak yang lebih luas untuk pembangunan daerah. Berikut adalah rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bengkulu tahun 2024:

Tabel II-114 Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH (%)	
		Capaian Kinerja	Capaian Anggaran
1	Dinas Pendidikan	97,03	88,47
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Tinggi	Tinggi
2	Dinas Kesehatan	71,69	86,28
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sedang	Tinggi
3	RSUD Bengkulu	91,39	97,71
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4	RSUD Kecamatan Mandau	100,00	68,39
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Tinggi	Sedang
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	88,20	88,76
	<i>Predikat Kinerja</i>	Tinggi	Tinggi
6	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	79,70	55,54
	<i>Predikat Kinerja</i>	Tinggi	Rendah
7	Dinas Pemadam Kebakaran	81,80	59,95
	<i>Predikat Kinerja</i>	Tinggi	Rendah
8	Satuan Polisi Pamong Praja	74,40	70,75
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sedang	Sedang
9	Dinas Sosial	58,87	57,01
	<i>Predikat Kinerja</i>	Rendah	Rendah

NO	PERANGKAT DAERAH	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH (%)	
		Capaian Kinerja	Capaian Anggaran
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	92,54	74,27
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Tinggi	Sedang
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	79,33	53,31
	<i>Predikat Kinerja</i>	Tinggi	Rendah
12	Dinas Ketahanan Pangan	66,62	50,62
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sedang	Sangat Rendah
13	Dinas Lingkungan Hidup	98,67	90,80
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Tinggi	Tinggi
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	47,80	26,83
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	97,26	71,48
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Tinggi	Sedang
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	66,17	54,29
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sedang	Rendah
17	Dinas Perhubungan	99,01	55,13
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Tinggi	Rendah
18	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	72,21	49,08
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sedang	Sangat Rendah
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20,43	44,20
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah

NO	PERANGKAT DAERAH	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH (%)	
		Capaian Kinerja	Capaian Anggaran
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	75,89	52,81
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sedang	Rendah
21	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	61,07	47,08
	<i>Predikat Kinerja</i>	Rendah	Sangat Rendah
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	85,83	89,74
	<i>Predikat Kinerja</i>	Tinggi	Tinggi
23	Dinas Perikanan	88,27	69,18
	<i>Predikat Kinerja</i>	Tinggi	Sedang
24	Dinas Perkebunan	77,47	54,00
	<i>Predikat Kinerja</i>	Tinggi	Rendah
25	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perternakan	95,85	63,01
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Tinggi	Rendah
26	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	50,04	31,86
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
27	Inspektorat	75,65	54,55
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sedang	Rendah
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	89,45	70,27
	<i>Predikat Kinerja</i>	Tinggi	Sedang
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	73,17	66,56
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sedang	Sedang

NO	PERANGKAT DAERAH	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH (%)	
		Capaian Kinerja	Capaian Anggaran
30	Badan Pendapatan Daerah	72,17	70,98
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sedang	Sedang
31	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	99,55	58,55
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Tinggi	Rendah
32	Badan Riset dan Inovasi Daerah	67,23	42,97
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sedang	Sangat Rendah
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	69,38	48,16
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sedang	Sangat Rendah
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	51,46	27,98
	<i>Predikat Kinerja</i>	Rendah	Sangat Rendah
35	Sekretariat DPRD	98,00	82,75
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Tinggi	Tinggi
36	Sekretariat Daerah (Bag, Perenc dan keuangan)	81,23	58,99
	<i>Predikat Kinerja</i>	Tinggi	Rendah
37	Kecamatan Bengkalis	79,35	83,99
	<i>Predikat Kinerja</i>	Tinggi	Tinggi
38	Kecamatan Bukit Batu	68,76	67,31
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sedang	Sedang
39	Kecamatan Mandau	97,28	99,82
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

NO	PERANGKAT DAERAH	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH (%)	
		Capaian Kinerja	Capaian Anggaran
40	Kecamatan Bantan	55,47	50,95
	<i>Predikat Kinerja</i>	Rendah	Sangat Rendah
41	Kecamatan Pinggir	84,74	81,38
	<i>Predikat Kinerja</i>	Tinggi	Tinggi
42	Kecamatan Siak Kecil	60,61	53,98
	<i>Predikat Kinerja</i>	Rendah	Rendah
43	Kecamatan Rupert	89,44	89,49
	<i>Predikat Kinerja</i>	Tinggi	Tinggi
44	Kecamatan Rupert Utara	98,67	94,16
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
45	Kecamatan Bandar Laksamana	64,48	60,01
	<i>Predikat Kinerja</i>	Rendah	Rendah
46	Kecamatan Bathin Solapan	91,07	77,34
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Tinggi	Tinggi
47	Kecamatan Talang Muandau	80,99	77,12
	<i>Predikat Kinerja</i>	Tinggi	Tinggi
KABUPATEN BENGKALIS		75,42	67,55

Capaian kinerja Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan sudah mencapai 79,70% dengan predikat kinerja sedang. Namun tingkat capaian anggaran hanya sebesar 55,54% atau dengan predikat rendah. Rendahnya serapan anggaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, adanya tunda bayar Dana Bagi Hasil (DBH) yang berdampak pada tidak terlaksananya pembayaran atas pekerjaan pada beberapa program strategis, seperti Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada sub kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan dengan luas di bawah 10 hektar, serta Program

Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada sub kegiatan penyediaan PSU di perumahan untuk menunjang fungsi hunian. Kedua, pada Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, sub kegiatan mediasi penyelesaian sengketa tidak dapat direalisasikan karena tidak terdapat pengaduan dari masyarakat, kelurahan, maupun kecamatan selama tahun berjalan.

Capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten telah mencapai 81,80% dan termasuk dalam kategori kinerja tinggi. Namun demikian, tingkat realisasi anggaran hanya sebesar 59,95%, yang tergolong rendah. Rendahnya realisasi anggaran ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pada Program Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Non Kebakaran, beberapa sub kegiatan tidak terlaksana karena dana kegiatan tidak cair hingga akhir tahun anggaran. Sub kegiatan yang terdampak di antaranya adalah pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran serta pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran. Kedua, pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, realisasi keuangan juga rendah akibat adanya tunda bayar terhadap beberapa sub kegiatan penting, seperti penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pengamanan barang milik daerah SKPD, penyediaan jasa pelayanan umum kantor, serta pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya. Ketiga, Program Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran juga mengalami kendala realisasi anggaran karena tunda bayar pada sub kegiatan pemadaman dan pengendalian kebakaran serta pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan alat pelindung diri. Kondisi ini mencerminkan perlunya perbaikan dalam manajemen keuangan dan pencairan anggaran untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program.

Capaian kinerja Dinas Sosial sudah mencapai 58,87% dengan predikat kinerja sangat rendah. Namun tingkat capaian anggaran hanya sebesar 57,01% atau dengan predikat rendah. Rendahnya capaian ini disebabkan oleh defisit anggaran yang berdampak pada tunda bayar di hampir seluruh program, termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Program Penanganan Bencana. Adapun Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan tidak terlaksana karena tidak terdapat kasus yang ditangani.

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah mencapai 79,33% dengan predikat kinerja tinggi. Namun tingkat capaian anggaran hanya sebesar 53,31% atau dengan predikat rendah. Rendahnya serapan anggaran disebabkan oleh beberapa faktor. Pada Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, terjadi keterlambatan pencairan anggaran dan rasionalisasi kegiatan. Program Perlindungan Perempuan mengalami penundaan pelaksanaan kegiatan karena menjaga netralitas ASN selama pelaksanaan Pilkada serentak bulan November 2024. Pada Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), beberapa kegiatan belum terlaksana seperti rapat evaluasi kegiatan akhir tahun dan pembinaan Forum Anak yang hanya dilakukan di dua kecamatan. Sementara pada Program Perlindungan Khusus Anak, pelaksanaan kegiatan terkendala seleksi narasumber, keterbatasan waktu, dan prioritas anggaran yang difokuskan pada penanganan kasus anak.

Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sudah mencapai 66,62% dengan predikat kinerja sedang. Namun tingkat capaian anggaran hanya sebesar 50,62% atau dengan predikat sangat rendah. Rendahnya serapan anggaran terutama terjadi pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Pengelolaan Sumber Daya

Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, serta Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Beberapa sub kegiatan tidak dapat direalisasikan secara optimal karena anggaran lebih difokuskan pada kegiatan penanganan dan pencegahan, pembatasan kegiatan yang berpotensi mengumpulkan massa menjelang pemilu, serta adanya perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan.

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai 47,80% dengan predikat kinerja sangat rendah dan tingkat capaian anggaran hanya sebesar 26,83% atau dengan predikat sangat rendah. Permasalahan utama yang dihadapi antara lain belum optimalnya penyusunan indikator dan target dalam Renstra, serta kurangnya pemetaan target kinerja per triwulan yang menyebabkan beban kinerja tidak terdistribusi merata. Selain itu, keterlambatan ketersediaan anggaran turut menghambat pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga berdampak langsung terhadap rendahnya capaian kinerja perangkat daerah.

Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah mencapai 66,17% dengan predikat kinerja sedang. Namun tingkat capaian anggaran hanya sebesar 54,29% atau dengan predikat rendah. Rendahnya serapan anggaran disebabkan oleh keterbatasan alokasi anggaran yang tersedia, perubahan dinamika kondisi ekonomi, serta belum optimalnya kelengkapan sumber daya pendukung seperti waktu pelaksanaan, personel pelaksana, dan kesiapan teknis lainnya. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.

Capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sudah mencapai 72,21% dengan predikat kinerja sedang. Namun tingkat capaian anggaran hanya sebesar 49,08% atau dengan predikat sangat rendah. Rendahnya serapan anggaran disebabkan oleh Kondisi pembiayaan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran kas yang telah disusun, adanya rasionalisasi pada beberapa sub kegiatan, serta kurang optimalnya pemanfaatan anggaran dan waktu oleh masing-masing pengelola kegiatan dan sub kegiatan dalam proses pelaksanaan.

Capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah hanya mencapai 20,43% dengan predikat kinerja sangat rendah dan tingkat capaian anggaran hanya sebesar 44,20% atau dengan predikat sangat rendah. Rendahnya capaian ini disebabkan oleh tidak tersedianya anggaran pada dua program utama, yaitu Program Pemberdayaan UMKM yang tidak terlaksana (capaian 0%) dan Program Pelayanan Izin Usaha Pinjam yang hanya mencapai 18%. Faktor penghambat utama adalah keterbatasan alokasi anggaran yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja.

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah mencapai 75,89% dengan predikat kinerja sedang. Namun tingkat capaian anggaran hanya sebesar 52,81% atau dengan predikat rendah. Rendahnya serapan anggaran disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perubahan kebijakan yang menyebabkan rasionalisasi anggaran, keterlambatan pelaksanaan program hingga Triwulan IV, serta kendala teknis dalam penyusunan regulasi dan pelaksanaan promosi. Selain itu, efisiensi anggaran dan keterbatasan dukungan dari perangkat daerah teknis serta stakeholder turut menghambat pelaksanaan program secara optimal.

Capaian kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga hanya mencapai 61,07% dengan predikat kinerja rendah. Namun tingkat capaian anggaran hanya sebesar 47,08% atau dengan predikat sangat rendah. Hambatan utama berasal dari belum

tersedianya transfer dana dari pemerintah pusat hingga akhir tahun anggaran, yang berdampak pada seluruh sub kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, termasuk kegiatan perencanaan, evaluasi, penatausahaan, pengadaan logistik, dukungan SPBE, hingga pemeliharaan aset. Selain itu, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan juga tidak berjalan karena belum adanya transfer dana, sehingga realisasi keuangan mencapai 0%. Kondisi ini menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat yang berimplikasi langsung pada rendahnya serapan anggaran dan pencapaian kinerja.

Capaian kinerja Dinas Perkebunan sudah mencapai 77,47% dengan predikat kinerja tinggi. Namun tingkat capaian anggaran hanya sebesar 54,00% atau dengan predikat rendah. Rendahnya serapan anggaran disebabkan pada Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, realisasi anggaran sangat rendah (48,25%) disebabkan oleh distribusi dana GU yang tidak proporsional terhadap kebutuhan pagu, keterlambatan pencairan dana GU, serta tidak terealisasinya Nota Pencairan Dana (NPD) untuk beberapa item penting seperti pengadaan pestisida dan honorarium petugas POPT maupun Brigade Karlabun. Hal serupa terjadi pada Program Perizinan Usaha Pertanian yang realisasi anggarannya hanya 47,05%, di mana beberapa kegiatan telah dilaksanakan namun tidak dapat dibayarkan karena dana tidak tersedia hingga akhir tahun. Sementara itu, Program Penyuluhan Pertanian juga menghadapi kendala serupa dengan realisasi anggaran hanya 51,37%, akibat rasionalisasi anggaran dan ketidaksesuaian waktu pelaksanaan dengan kondisi kas daerah.

Capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian hanya mencapai 50,04% dengan predikat kinerja sangat rendah dan tingkat capaian anggaran hanya sebesar 31,86% atau dengan predikat sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh seluruh program mengalami kendala yang sama, yaitu minimnya pencairan dana sehingga realisasi fisik dan keuangan tidak optimal. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, serta Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting tidak dapat terealisasi secara maksimal akibat keterbatasan dukungan anggaran sepanjang tahun berjalan.

Capaian kinerja Inspektorat sudah mencapai 75,65% dengan predikat kinerja sedang. Namun tingkat capaian anggaran hanya sebesar 54,55% atau dengan predikat rendah. Hal ini disebabkan oleh pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, beberapa sub kegiatan seperti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, serta Pengadaan Kendaraan Dinas dan Operasional tidak dapat dilaksanakan akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan selama tahun berjalan.

Capaian kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sudah mencapai 99,55% dengan predikat kinerja sangat tinggi. Namun tingkat capaian anggaran hanya sebesar 58,55% atau dengan predikat rendah. Rendahnya realisasi anggaran disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perubahan struktur penganggaran dari usulan awal Renja yang mengalami pengurangan sesuai pagu yang ditetapkan oleh Tim TAPD Kabupaten, serta adanya kegiatan yang telah dilaksanakan namun ditunda pembayarannya hingga tahun 2025. Selain itu, terdapat selisih antara harga satuan dalam DPA dengan harga pasar, serta beberapa kegiatan pada Program Kepegawaian Daerah dan Program

Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak dapat direalisasikan akibat keterbatasan anggaran hingga akhir tahun.

Capaian kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah sudah mencapai 67,23% dengan predikat kinerja sedang. Namun tingkat capaian anggaran hanya sebesar 42,97% atau dengan predikat sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, meskipun capaian kinerja cukup baik sebesar 76,04%, realisasi keuangan terkendala oleh keterbatasan anggaran sehingga beberapa kegiatan mengalami tunda bayar. Sementara itu, Program Penelitian dan Pengembangan Daerah menunjukkan capaian yang sangat rendah akibat keterbatasan anggaran yang menyebabkan hanya kegiatan prioritas yang dapat dilaksanakan. Secara umum, keterbatasan anggaran menjadi faktor utama penghambat pencapaian kinerja dan realisasi program.

Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah mencapai 69,38% dengan predikat kinerja sedang. Namun tingkat capaian anggaran hanya sebesar 48,16% atau dengan predikat sangat rendah. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan belum optimalnya dukungan produk hukum, yang berdampak pada implementasi rencana kerja. Selain itu, keterbatasan anggaran, kekurangan alat, sarana dan prasarana, serta mobilitas yang terbatas turut menjadi hambatan signifikan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja BPBD.

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hanya mencapai 51,46% dengan predikat kinerja rendah dan tingkat capaian anggaran hanya sebesar 27,98% atau dengan predikat sangat rendah. Permasalahan utama yang dihadapi adalah terjadinya pergeseran anggaran pada beberapa sub kegiatan serta tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang telah dijadwalkan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah yang belum mendukung, sehingga pelaksanaan kegiatan mengalami penundaan dan mengakibatkan capaian kinerja belum optimal sesuai target yang direncanakan.

Capaian kinerja Sekretariat Daerah (Bag, Perenc dan keuangan) sudah mencapai 81,23% dengan predikat kinerja tinggi. Namun tingkat capaian anggaran hanya sebesar 58,99% atau dengan predikat rendah. Hal ini disebabkan oleh Pada Program Pengelolaan Perbatasan, sub kegiatan penjagaan dan pemeliharaan tanda batas daerah terhambat akibat keterbatasan anggaran, yang menyebabkan tim penegasan batas tidak dapat melaksanakan pengambilan titik koordinat di lapangan. Sub kegiatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kawasan perbatasan juga mengalami realisasi anggaran 0% karena kendala keuangan daerah. Kondisi serupa terjadi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Program Perekonomian dan Pembangunan, di mana realisasi anggaran rendah akibat tunda bayar yang akan dibebankan pada tahun anggaran 2025.

Capaian kinerja Kecamatan Bantan hanya mencapai 55,47% dengan predikat kinerja rendah dan tingkat capaian anggaran hanya sebesar 50,95% atau dengan predikat sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, realisasi fisik dan keuangan hanya sebesar 49,71% yang disebabkan oleh adanya pekerjaan fisik yang telah selesai namun belum dibayarkan karena tunda bayar. Selain itu, Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum juga menunjukkan realisasi yang sangat

rendah akibat keterbatasan kas daerah, sehingga beberapa kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan.

Capaian kinerja Kecamatan Siak Kecil hanya mencapai 60,61% dengan predikat kinerja rendah dan tingkat capaian anggaran hanya sebesar 53,98% atau dengan predikat rendah. Rendahnya realisasi pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik disebabkan oleh minimnya kejadian KARLAHUT di Kecamatan Siak Kecil pada tahun 2024, sehingga anggaran pada sub kegiatan terkait tidak diajukan untuk pencairan. Pada Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, anggaran yang diajukan tidak dapat dibayarkan secara penuh sesuai dengan pengajuan, menghambat pelaksanaan kegiatan harmonisasi dengan tokoh masyarakat dan agama. Demikian pula, pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, keterbatasan pencairan anggaran menyebabkan kegiatan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa tidak dapat direalisasikan. Faktor utama penghambat pencapaian kinerja adalah keterbatasan ketersediaan anggaran dan proses pencairan dana yang tidak optimal.

Capaian kinerja Kecamatan Bandar Laksamana hanya mencapai 64,48% dengan predikat kinerja rendah dan tingkat capaian anggaran hanya sebesar 60,01% atau dengan predikat rendah. Hal ini disebabkan oleh pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, rendahnya pencapaian disebabkan oleh minimnya kejadian KARLAHUT di wilayah tersebut pada tahun 2024, sehingga sub kegiatan terkait tidak diajukan untuk pencairan. Pada Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, keterbatasan anggaran menyebabkan dana yang diajukan tidak dapat dibayarkan secara penuh. Begitu pula pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, anggaran yang diajukan tidak dapat dicairkan sehingga pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa menjadi tidak optimal. Faktor penghambat utama adalah terbatasnya realisasi anggaran yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas kecamatan.

Salanjutnya adalah rata-rata capaian program unggulan daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2024 hingga akhir tahun sudah cukup baik dengan tingkat realisasi capaian kinerja program unggulan Kabupaten Bengkalis mencapai 75,01% atau dengan predikat kinerja sedang. Namun, capaian anggaran program hanya sebesar 59,71% dengan predikat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja program unggulan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis belum optimal. Berikut adalah rata-rata capaian kinerja program unggulan pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2024:

Tabel II-115 Rata-Rata Capaian Program Unggulan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH (%)	
		Capaian Kinerja	Capaian Anggaran
1	Dinas Pendidikan	100,00	43,22
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
2	Dinas Kesehatan	99,69	85,39
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Tinggi	Tinggi
3	Dinas Sosial	93,06	94,03
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

NO	PERANGKAT DAERAH	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH (%)	
		Capaian Kinerja	Capaian Anggaran
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	80,92	87,66
	<i>Predikat Kinerja</i>	Tinggi	Tinggi
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	60,05	46,37
	<i>Predikat Kinerja</i>	Rendah	Sangat Rendah
6	Dinas Ketahanan Pangan	20,00	31,24
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100,00	85,38
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Tinggi	Tinggi
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100,00	89,15
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Tinggi	Tinggi
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	40,84	30,52
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
10	Dinas Perhubungan	100,00	44,15
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	45,98	47,02
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
12	Dinas Perikanan	100,00	53,76
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Tinggi	Rendah
13	Dinas Perkebunan	41,68	44,27
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
14	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perternakan	100,00	64,19
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Tinggi	Rendah
15	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	100,00	69,75
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Tinggi	Sedang
16	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100,00	80,00
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Tinggi	Tinggi
17	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	100,00	54,04
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Tinggi	Rendah
18	Sekretariat Daerah (Bag. Perenc dan keuangan)	52,35	8,99
	<i>Predikat Kinerja</i>	Rendah	Sangat Rendah
19	Kecamatan Bengkalis	71,43	50,16
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sedang	Sangat Rendah
20	Kecamatan Bukit Batu	78,95	54,40
	<i>Predikat Kinerja</i>	Tinggi	Rendah

NO	PERANGKAT DAERAH	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH (%)	
		Capaian Kinerja	Capaian Anggaran
21	Kecamatan Mandau	53,57	12,99
	<i>Predikat Kinerja</i>	Rendah	Sangat Rendah
22	Kecamatan Bantan	20,58	35,62
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
23	Kecamatan Pinggir	88,79	85,63
	<i>Predikat Kinerja</i>	Tinggi	Tinggi
24	Kecamatan Siak Kecil	8,70	21,91
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
25	Kecamatan Rupert	68,32	70,05
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
26	Kecamatan Rupert Utara	100,00	99,97
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
27	Kecamatan Bandar Laksamana	75,00	81,12
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sedang	Tinggi
28	Kecamatan Bathin Solapan	100,00	99,92
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
29	Kecamatan Talang Muandau	75,47	60,61
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sedang	Rendah
PROGRAM UNGGULAN		75,01	59,71
<i>Predikat Kinerja</i>		Sedang	Rendah

- 1) Capaian kinerja program unggulan Dinas Pendidikan sudah mencapai 100% dengan predikat kinerja sangat tinggi. Namun tingkat capaian kinerja anggaran masih sebesar 43,22% atau dengan predikat kinerja sangat rendah. Hal ini terjadi karena seluruh kegiatan program telah selesai dilaksanakan, tetapi proses pembayaran masih mengalami kendala akibat keterlambatan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Adapun bentuk tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan adalah melakukan pengajuan dana pembayaran di tahun 2025.
- 2) Capaian kinerja program unggulan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan capaian kinerja 60,05% atau predikat kinerja rendah dan capaian anggaran 46,47% atau predikat kinerja sangat rendah. Hal ini disebabkan pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mengalami penyesuaian sehubungan dengan pelaksanaan Pilkada serentak pada bulan November 2024. Untuk menjaga netralitas ASN, seluruh kegiatan yang melibatkan pengumpulan massa, baik sebelum maupun sesudah pemilihan, ditunda pelaksanaannya. Selanjutnya Program Perlindungan Khusus Anak disebabkan pelaksanaan kegiatan yang bersifat bimbingan teknis harus dilakukan secara lebih selektif. Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah keterbatasan waktu, karena diperlukan proses seleksi yang ketat untuk mendapatkan narasumber yang benar-benar kompeten dan sesuai dengan kebutuhan program.
- 3) Capaian kinerja program unggulan Dinas Ketahanan Pangan dengan capaian kinerja 20% atau predikat kinerja sangat rendah dan capaian anggaran 31,24% atau predikat kinerja sangat rendah. Hal ini disebabkan pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber

Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan belum berjalan secara optimal karena kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis difokuskan pada kegiatan yang lebih prioritas, khususnya untuk penanganan dan pencegahan permasalahan di masyarakat. Selanjutnya pelaksanaan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat kurang optimal sehubungan dengan pelaksanaan Pilkada serentak pada bulan November 2024. Untuk menjaga netralitas ASN, seluruh kegiatan yang melibatkan pengumpulan massa, baik sebelum maupun sesudah pemilihan, ditunda pelaksanaannya.

- 4) Capaian kinerja program unggulan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan capaian kinerja 40,84% atau predikat kinerja sangat rendah dan capaian anggaran 30,52% atau predikat kinerja sangat rendah. Hal ini disebabkan kondisi keuangan daerah Kabupaten Bengkalis yang mengalami defisit menyebabkan pelaksanaan program kegiatan menjadi kurang optimal.
- 5) Capaian kinerja program unggulan Dinas Perhubungan dengan capaian kinerja 100% atau predikat kinerja sangat tinggi. Namun capaian anggaran hanya mencapai 44,15% atau predikat kinerja sangat rendah. Hal ini terjadi karena seluruh kegiatan program telah selesai dilaksanakan, tetapi proses pembayaran masih mengalami kendala akibat keterlambatan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.
- 6) Capaian kinerja program unggulan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan capaian kinerja 45,98% atau predikat kinerja sangat rendah dan capaian anggaran 47,02% atau predikat kinerja sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh tidak dapat dilaksanakannya Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) akibat ketidaktersediaan dana, serta adanya penghapusan beberapa kegiatan sebagai dampak dari rasionalisasi anggaran.
- 7) Capaian kinerja program unggulan Dinas Perikanan sudah mencapai 100% dengan predikat kinerja sangat tinggi. Namun tingkat capaian kinerja anggaran masih sebesar 53,76% atau dengan predikat kinerja rendah. Hal ini terjadi karena kondisi ketersediaan anggaran daerah yang mengalami defisit.
- 8) Capaian kinerja program unggulan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sudah mencapai 100% dengan predikat kinerja sangat tinggi. Namun tingkat capaian kinerja anggaran masih sebesar 64,19% atau dengan predikat kinerja rendah. Hal ini terjadi karena banyak program kegiatan mengalami tunda bayar akibat kondisi ketersediaan anggaran daerah yang mengalami defisit.
- 9) Capaian kinerja program unggulan Dinas Perkebunan dengan capaian kinerja 41,68% atau predikat kinerja sangat rendah dan capaian anggaran 44,27% atau predikat kinerja sangat rendah.
 - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian: Kegiatan program telah dilaksanakan, termasuk bimbingan teknis, pengimputan usulan peremajaan kelapa sawit, dan pendampingan bantuan APBN. Namun, penundaan pengesahan rencana kenaikan bantuan peremajaan menyebabkan kelompok tani menunda pelaksanaan, sehingga serapan dana menjadi rendah. Selain itu, rasionalisasi pagu anggaran pada APBD 2024 mengakibatkan pengadaan bibit/benih tidak terealisasi sesuai target.

- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian :Rendahnya capaian realisasi keuangan pada sub kegiatan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, penganggaran kegiatan pendataan perkebunan sawit rakyat baru masuk pada pergeseran ke-II pada Mei 2024. Kedua, belum adanya kesepakatan antara provinsi dan kabupaten mengenai pelaksanaan kegiatan, yang baru efektif dilaksanakan pada Oktober 2024. Ketiga, penganggaran kegiatan masih dalam bentuk gelondongan dan dilakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaannya. Meskipun kegiatan telah terlaksana 100%, distribusi dana GU yang terbatas dan keterlambatan pencairan dana menyebabkan serapan anggaran hanya mencapai 30,69%. Keterlambatan pembayaran ini disebabkan oleh defisit anggaran kas daerah, yang mengakibatkan dana yang diajukan untuk pembayaran tidak terbit SP2D-nya dan menjadi utang pihak ketiga. Sebagian paket pekerjaan juga dirasionalisasi atau ditunda bayar ke 2023.
 - Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian: Distribusi dana GU yang terbatas menyebabkan prioritas diberikan pada sub kegiatan yang dianggap lebih penting. Pencairan dana GU juga tidak selalu terealisasi setiap bulan. Usulan Nota Pencairan Dana (NPD) TU untuk pengadaan pestisida dan honorarium petugas POPT pada November 2024 tidak terealisasi, begitu pula dengan penginapan pada perjalanan dinas yang hanya terealisasi 30%. Keterlambatan ini berdampak pada rendahnya realisasi anggaran. Selain itu capaian kinerja yang melebihi target dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: cuaca yang tidak dapat diprediksi, pemeliharaan kebun yang kurang optimal oleh pekebun, serta keterlambatan pengendalian serangan hama yang disebabkan oleh keterbatasan pestisida, lokasi yang jauh, dan tenaga kerja yang terbatas. Selain itu, tinggi laporan serangan pada 2024 disebabkan oleh meningkatnya sosialisasi program Dinas Perkebunan. Rasionalisasi dilakukan untuk menutupi kegiatan lain yang lebih prioritas mengingat defisit APBD. Beberapa kegiatan yang dirasionalisasi termasuk Honorarium petugas Brigade Karlabun dan pembelian suku cadang alat pemadam kebakaran, serta penginapan pada perjalanan dinas.
- 10) Capaian kinerja program unggulan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sudah mencapai 100% dengan predikat kinerja sangat tinggi. Namun tingkat capaian kinerja anggaran masih sebesar 54,04% atau dengan predikat kinerja rendah. Hal ini terjadi karena proses pembayaran bantuan tugas belajar mengalami tunda bayar. Adapun bentuk tindak lanjut yang dilakukan adalah melakukan pengajuan dana pembayaran bantuan tugas belajar di tahun 2025.
- 11) Capaian kinerja program unggulan Sekretariat Daerah mencapai 52,35% dengan predikat kinerja rendah dan capaian anggaran hanya 8,99%, yang termasuk dalam kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh tidak terealisasinya penganggaran pada program unggulan pemerintah Kabupaten Bengkalis di bagian Kesra, karena anggaran yang diajukan tidak tersedia. Akibatnya, penyediaan beasiswa khusus tahfidz Al-Qur'an Kabupaten Bengkalis hanya dibayar pada triwulan ketiga,

sementara kegiatan penyuluhan agama (Da'i) di desa/kelurahan dan koordinator kecamatan hanya dibayar selama 9 bulan di tahun 2024.

- 12) Capaian kinerja program unggulan pada sebagian besar Kecamatan masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan dalam terealisasinya anggaran, yang menghambat pelaksanaan kegiatan secara maksimal. Selain itu, kurang bayar DBH tahun 2023 dan penyesuaian DBH tahun 2024 yang disalurkan dalam bentuk non tunai (TDF) menyebabkan pembayaran atas pekerjaan tidak dapat dilakukan. Beberapa kegiatan juga tertunda akibat belum terlaksananya pencairan dana, yang mengarah pada tunda bayar.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan digambarkan oleh kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan. Perumusan permasalahan pembangunan daerah bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja pembangunan. Cakupan identifikasi permasalahan pembangunan meliputi permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan juga meliputi permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkalis menunjukkan terjadinya peningkatan IPM pada tahun 2024 mencapai 75,28, meningkat dari tahun 2020 yaitu 73,46. Nilai IPM di Kabupaten Bengkalis lebih tinggi dari IPM Provinsi Riau yaitu hanya sebesar 74,79. Kendati demikian, masih banyak terdapat permasalahan yang harus dituntaskan, yaitu meliputi:

- a. Distribusi sekolah, dan tenaga pengajar yang belum merata di daerah pedesaan dan perkotaan.
- b. Akses terhadap sekolah sangat sulit di beberapa desa di Rupat Utara sehingga banyak anak usia wajib sekolah yang tidak bisa bersekolah.
- c. Masih rendahnya Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Ijazah S1/S2/S3 yaitu tercatat masih sebesar 10,05% pada tahun 2024 dari total penduduk usia 15 tahun di Kabupaten Bengkalis.
- d. Kemampuan ekonomi masyarakat rendah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, terutama pada wilayah pedalaman seperti Rupat dan Rupat Utara.

- e. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup yang meningkat serta. Selanjutnya imunisasi lengkap masih belum optimal terutama didaerah pedesaan dan pedalaman.
 - f. Prevalensi Balita Gizi Buruk masih tinggi.
 - g. Cakupan puskesmas, rumah sakit dan fasilitas medis lainnya belum menunjukkan perkembangan signifikan beberapa tahun terakhir.
 - h. Angka kematian bayi yang cukup tinggi di wilayah Kecamatan Mandau, Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Bengkalis perlu menjadi perhatian serius.
2. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital serta perbaikan kapasitas fiskal daerah;

A. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis digital

Indeks SPBE Kabupaten Bengkalis tercatat sebesar 2,70 pada tahun 2023, meningkat dari tahun 2022 yaitu 2,21 poin. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan pada tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital di Kabupaten Bengkalis. Meskipun kenaikan ini membawa Kabupaten Bengkalis dengan predikat baik, namun masih ada tantangan besar yang harus dihadapi untuk mencapai predikat memuaskan, yaitu membutuhkan peningkatan sebesar 2,30 poin lagi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu terus memperbaiki dan memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara dalam pemanfaatan teknologi informasi, serta memperluas akses dan kualitas layanan digital kepada masyarakat. Tantangan ini mencerminkan perlunya komitmen yang konsisten dan langkah-langkah strategis dalam mengimplementasikan kebijakan dan program digitalisasi, sehingga kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Bengkalis dapat lebih optimal dan efisien.

B. Kemandirian keuangan daerah

Jumlah APBD Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 sebesar Rp. 3.525.740.871.817,72 dengan nilai PAD sebesar Rp. 404.020.796.658,72 dan nilai pendapatan transfer sebesar Rp. 3.121.720.075.159,00. Apabila dilihat dari sisi kontribusi, APBD Kabupaten Bengkalis sebagian besar berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat dengan nilai Rp. 2.992.706.803.607,00 atau setara 84,88% dari total APBD tahun 2024. Sementara itu PAD hanya menyumbang sebesar 13,50%. Hal ini disebabkan oleh:

- Pertumbuhan PAD masih tergolong rendah
- Kontribusi PAD masih tergolong kecil
- Belum tergalinya potensi PAD

3. Penyediaan infrastruktur yang mantap dan pengembangan wilayah strategis

A. Kondisi infrastruktur dasar

Data dari PUPR Kabupaten Bengkalis menunjukkan panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2020 sebesar 37,87% dari total panjang jalan, tidak terlalu banyak

meningkat hingga tahun 2024 menjadi 41,03%. Sementara itu, untuk rasio panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkalis masih rendah, yaitu berada pada angka 0.0022 atau dalam rasio 1:444 pada tahun 2023. Hal ini berarti tiap satu km jalan berbading setidaknya 444 penduduk. Dalam lima tahun terakhir pembangunan jalan di Kabupaten Bengkalis relatif stagnan, hanya sedikit menunjukkan peningkatan dan belum menunjukkan perubahan berarti.

Akses jalan dalam kondisi baik dan sedang sudah cukup baik selama lima tahun terakhir, namun masih terdapat daerah dengan kondisi jalan yang kurang baik terutama pada wilayah Pulau Rupat. Kondisi ini berdampak terhadap stabilitas harga-harga bahan pokok dan biaya produksi. Akses jalan yang kurang baik di Pulau Rupat juga menyebabkan kunjungan wisata lebih rendah dari potensi sebenarnya.

Adapun Panjang garis pantai rawan abrasi yang terlindungi infrastruktur masih tergolong rendah sehingga tingkat abrasi masih tinggi setiap tahunnya. Selain itu, akses terhadap air minum dan air bersih masih rendah. Banyak penduduk di wilayah pesisir dan kepulauan kesulitan sumber air bersih dan menyebabkan mahalnya air bersih. Selanjutnya masih rendahnya persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik sehingga berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan di Kabupaten Bengkalis.

B. Konektivitas wilayah

- Antrian panjang penyeberangan Ro-Ro Sei Pakning-Bengkalis.
- Pelayanan penyeberangan Dumai-Rupat yang masih rendah kualitasnya.
- Masih diperlukan angkutan darat yang terpadu mengingat baru 0,098% persentase layanan angkutan darat.
- Masih rendahnya kepemilikan KIR pada angkutan umum yaitu hanya mencapai 34,23% pada tahun 2023.
- Masih rendahnya rasio izin trayek yaitu baru mencapai 0,00050% pada tahun 2024.
- Jumlah pelabuhan laut/ udara/terminal BIS baru mencapai 6 unit selama periode 2020-2024.

4. Peningkatan daya saing ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Industri kreatif

A. Produktivitas hasil pertanian

Produksi Sektor pertanian di kabupaten Bengkalis mengalami fluktuasi pada lima tahun terakhir yang disebabkan oleh:

- Masih rendahnya nilai tambah hasil pertanian
- Terjadi penurunan luas panen padi yang berdampak terhadap penurunan indeks persediaan pangan
- Alih fungsi lahan pertanian padi menjadi tanaman perkebunan (kelapa sawit dan karet) dan penurunan minat generasi muda dalam pertanian.

- Perubahan iklim menyebabkan serangan hama penyakit pada tanaman.
- Produktivitas padi masih rendah akibat kendala penggunaan benih dan teknologi budidaya.
- Masih banyak potensi sektor pertanian yang belum digali sehingga produktivitas hasil pertanian sangat rendah.

B. Produksi perikanan

Nelayan yang mengandalkan hasil tangkap ikan dari laut dan sumber alam lainnya mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2020 sebanyak 7.013,87 ton ikan dihasilkan kelompok nelayan, mengalami fluktuasi hingga tahun 2024 menjadi 8.848,8 ton pada tahun 2024 yang disebabkan oleh:

- Teknologi perikanan tangkap yang masih tradisional.
- Perubahan musim.
- Rendahnya pendapatan dan kualitas hidup nelayan.
- Produksi perikanan budidaya belum optimal karena belum didukung dengan sarana dan prasarana.

C. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD

Jumlah kunjungan wisatawan mengalami trend fluktuasi meningkat pada periode 2020-2024. Peningkatan tertinggi terjadi tahun 2024 dengan jumlah wisatawan mancanegara sebesar 3.311 jiwa dan wisatawan nusantara sebesar 235.748. Disisi lain, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD masih tergolong rendah.

D. Kontribusi pedagang dan industri terhadap perekonomian

Perkebunan Industri Pengolahan merupakan penggerak ekonomi utama Bengkalis dengan komoditas utama CPO (*Crude Palm Oil*). Sektor industri berkontribusi terhadap PDRB sebesar 15,49% pada tahun 2024. Perekonomian Bengkalis termasuk yang terbuka dalam perdagangan (*openness economic*) yang ditunjukkan oleh Net Ekspor memberikan kontribusi 55,34% dalam PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada tahun 2024. Aktivitas perdagangan luar negeri di Kabupaten Bengkalis masih didominasi oleh bahan baku setengah jadi yaitu migas dan CPO sehingga *multiplier effect* terhadap perekonomian masih tergolong kurang.

E. Iklim investasi daerah

Selama lima tahun terakhir nilai investasi (PMA dan PMDN) di Kabupaten Bengkalis mengalami fluktuasi pada kurun waktu 2020-2024 yang dibabkan oleh:

- Pemasalahan utama dalam penanaman modal di Kabupaten Bengkalis adalah masih Kepastian dalam berinvestasi terkait dengan aturan dan regulasi daerah yang berubah sesuai dengan peraturan perundangan dari pemerintah pusat.
- Permasalahan lain adalah investasi hanya berfokus pada sektor migas dan perkebunan besar.

- Pemerintah daerah belum bisa menggaet investor untuk sektor wisata yang sangat potensial.
- Perizinan investasi di sektor perikanan masih menghadapi masalah terkait dampak lingkungan hidup.

F. Daya saing UMKM dan persentase jumlah koperasi aktif

Data dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 menunjukkan persentase koperasi aktif sebesar 67,00%, turun dari tahun 2023 yaitu 43,70% pada tahun 2020.

Selain itu, masih rendahnya peran UKM terhadap ekspor di Kabupaten Bengkalis. Hal ini disebabkan oleh:

- Rendahnya daya saing produk hal ini disebabkan oleh rendahnya inovasi dan pengembangan produk dan belum efektifnya pembinaan dan pemberdayaan UKM.
- Rendahnya akses terhadap permodalan, terutama terhadap lembaga keuangan bank.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah merupakan permasalahan pembangunan yang diidentifikasi dari capaian target kinerja pada setiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi setiap perangkat daerah. Identifikasi permasalahan berdasarkan gambaran umum setiap pelaksanaan urusan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Berikut disajikan permasalahan pembangunan terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Tabel II-116 Perumusan Permasalahan Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah

No.	Urusan	Kriteria/Aspek	Permasalahan	
A.	Layanan Urusan Wajib Dasar			
1.	Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	1 APK pada pada jenjang SMP mengalami penurunan. Sedangkan APK SMA meningkat, namun masih dibawah 100 persen	
		Angka Partisipasi Murni (APM)	2 APM pada pada jenjang SD dan SMP masih dibawah 100 persen. Sedangkan APM jenjang pendidikan SMA tergolong rendah.	
		Angka Melek Huruf	3 Turunnya angka melek huruf pada tahun 2024	
		Angka Putus Sekolah	4 Masih tingginya angka putus sekolah siswa SMP/MTs	
		Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	5 Masih kurangnya jumlah guru yang berkualifikasi ijazah S1/D-IV	
		PAUD sebagai bagian wajib belajar 13 tahun	6	Sosialisasi wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah) di lingkungan sekolah, org tua dan masyarakat
			7	Pembinaan dn penguatan PAUD Holistik Integratif (HI)

No.	Urusan	Kriteria/Aspek	Permasalahan
			8 Pengembangan karir pendidikan dan tenaga kependidikan PAUD
2.	Kesehatan	Angka Kematian Bayi (AKB)	1 AKB meningkat dari 4 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2020 menjadi 6,93 pada tahun 2024. Jumlah kasus kematian bayi naik dari 42 kasus tahun 2020 menjadi 69 kasus tahun 2024
		Angka Kematian Ibu	2 Masih terdapatnya angka kematian ibu
		Angka Kematian Balita	3 Trend peningkatan pada angka kematian balita pada 5 tahun terakhir
		Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	4 Angka kematian neonatal naik dari 3,6 per 1.000 kelahiran hidup (2020) menjadi 6,53 pada tahun 2024
		Persentase Imunisasi dasar lengkap pada bayi	5 Persentase Imunisasi dasar lengkap pada bayi menurun dari 80,50% tahun 2020 menjadi 78,12% tahun 2024
		Persentase Anak Usia 1 Tahun yang di Imunisasi Campak	6 Penurunan Imunisasi Campak pada Anak Usia 1 Tahun dari 100% tahun 2020 menjadi hanya 65% pada tahun 2024.
		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	7 Penurunan Cakupan Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Immunization) pada tahun 2024
		Tingkat Prevalensi TBC per 100.000 penduduk	8 Prevalensi TBC naik dari 100 kasus per 100.000 penduduk tahun 2022 menjadi 208 kasus pada tahun 2024.
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase pengamanan tebing/pantai dalam kondisi baik	1 Belum optimalnya pembangunan/ pemeliharaan pengamanan tebing/ pantai
		Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	2 Masih terdapatnya jaringan irigasi dalam kondisi rusak
		Persentase bangunan gedung yang memiliki IMB	3 Masih kurang pedulinya masyarakat terhadap IMB
		Panjang garis pantairawan abrasi yang terlindungi infrastruktur	4 Turunnya panjang garis pantai rawan abrasi yang terlindungi infrastruktur
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	5 Masih banyak terdapat rumah tangga yang belum memperoleh pelayanan pengolahan air limbah domestik
		Persentase RT akses air bersih	6 Masih banyak rumah tangga yang belum mendapatkan akses air bersih
		4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	2 Masih terdapatnya beberapa kawasan permukiman kumuh yang belum tertata		

No.	Urusan	Kriteria/Aspek	Permasalahan	
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1	Pada tahun 2020 cakupan petugas Linmas sebesar 1.859 Orang, menjadi 1678 Orang pada tahun 2024.
			2	Keterbatasan penyediaan kesejahteraan bagi anggota linmas yang menyebabkan kurang berminatnya masyarakat menjadi anggota linmas
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	3	Masih belum optimalnya penyelesaian pelanggaran K3
6.	Sosial	Jumlah Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan	1	Kondisi KAT sulit dijangkau. Masih Ada KAT yang belum terdata dengan baik
			2	Belum optimalnya perlindungan sosial bagi fakir miskin
		Jumlah penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang diberikan rehabilitasi sosial	3	Meningkatnya jumlah penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang dapat direhabilitasi kehidupan sosialnya
		Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	4	Belum optimalnya cakupan bantuan sosial terhadap jumlah PPKS
B.	Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar			
7.	Tenaga Kerja	Persentase penyelesaian sengketa pengusaha- pekerja pertahun	1	Masih adanya perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi hak-hak para Pekerja
			2	Belum optimalnya kinerja Pengupahan Daerah Dewan
			3	Belum optimalnya kebijakan tripartit dan bipartite
			4	Kurangnya kesadaran pemberi kerja dan tenaga kerja terhadap K3
			5	Belum optimalnya koordinasi antara Perusahaan dengan Disnakertrans terkait masalah jaminan keselamatan kerja
		Persentase Besar tenagakerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	6	Masih rendahnya persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
		Persentase Besar pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	7	Turunnya Persentase Besar pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
		Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Ijazah S1/S2/S3	8	Masih tergolong kecilnya Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Ijazah S1/S2/S3
		Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	9	Rendahnya persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio KDRT	1	Masih terdapat kasus KDRT
		Partisipasi Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	2	Partisipasi perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi mengalami penurunan

No.	Urusan	Kriteria/Aspek	Permasalahan	
9.	Pangan	Persentase desa bebas dari status rawan pangan	1	Masih terdapat desa dengan status rawan pangan
			2	Terjadi penurunan luas panen padi yang berdampak terhadap penurunan indeks persediaan pangan
10.	Pertanahan	Persentase luas lahan bersertifikat	1	Minimnya SDM pertanahan Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan penataan lahan
			2	Rendahnya kesadaran dokumentasi pertanahan sehingga belum optimalnya penataan asset tanah pemerintah
			3	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap prosedur pengurusan tanah dalam mengurus hak atas tanah
11.	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) turun pada tahun 2024 yang disebabkan oleh turunnya Indeks Kualitas Udara (IKU)
		Persentase penanganan sampah	2	Proses pengelolaan sampah masih menggunakan pengolahan manual, belum berbasis teknologi
			3	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemilahan dan pengelolaan sampah
12.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)	1	Masih rendahnya kesadaran sebagian penduduk untuk mengurangi jumlah kelahiran
			2	Belum optimalnya penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang bagi keluarga yang telah memiliki lebih dari dua anak
13.	Perhubungan	Jumlah uji KIR angkutan umum	1	Masih rendahnya pemilik angkutan umum dan perusahaan angkutan umum untuk melakukan uji kir tepat pada waktunya
		Persentase Layanan Angkutan Daerah	2	Belum optimalnya pelayanan uji KIR
			3	Persentase layanan angkutan daerah masih tergolong rendah yaitu 0,098%
14.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase koperasi aktif	1	Masih rendahnya kualitas pengelolaan koperasi
			2	Belum ada kebijakan khusus daerah terhadap perkoperasian
15.	Penanaman Modal	Jumlah investor berskala Nasional	1	Masih belum stabilnya peningkatan jumlah investor yang menanamkan investasinya di Kabupaten Bengkalis
		Nilai realisasi investasi	2	Fasilitas dan kemudahan investasi yang masih belum terpenuhi
			3	Kesadaran investor dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) masih rendah
			4	Belum optimalnya peningkatan investasi disektor pariwisata
			5	Perizinan investasi di sektor perikanan masih menghadapi masalah terkait dampak lingkungan hidup.

No.	Urusan	Kriteria/Aspek	Permasalahan	
16.	Kepemudaan dan Olahraga	Cakupan pembinaan olahraga	1	Belum optimalnya pembinaan terhadap cabang olah raga yang ada di Kabupaten Bengkalis
			2	Belum optimalnya pembinaan terhadap atlit dan pelatih
			3	Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga
		Pemuda berprestasi atau pelopor	1	Kesulitan dalam pemilihan dan seleksi yang tepat terhadap pemuda yang potensial
			2	Kurangnya Dukungan dan Pembinaan Terpadu
			3	Kurangnya dukungan infrastruktur dan program terpadu
			4	kurangnya minat pemuda dalam pemilihan dan seleksi pemuda berprestasi atau pelopor
17.	Kebudayaan	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	1	Belum optimalnya identifikasi dan penetapan benda, situs dan kawasan cagar budaya
			2	Belum optimalnya pemeliharaan terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya
			3	Belum optimalnya pengelolaan museum dan pengelolaan barang-barang bersejarah
18.	Kearsipan dan Perpustakaan	Persentase pengelolaan arsip secara baku	1	Masih kurangnya tenaga arsip
			2	Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan arsip belum optimal
			3	Sarana dan prasarana kearsipan yang belum memadai
		Perpustakaan	1	Perpustakaan Tuan Guru Haji Ahmad Kabupaten Bengkalis memiliki Masa nilai akreditasi perpustakaan sudah berakhir sejak 11 November 2024 sesuai sertifikat akreditasi yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional RI pada tanggal 10 November 2020.
C. Layanan Urusan Pilihan				
19.	Perikanan	Pendapatan Rata-rata Nelayan (Juta Rupiah/tahun)	1	Faktor musim yang tak menentu
			2	Besarnya biaya modal awal nelayan menyebabkan nelayan terpaksa meminjam uang ketengkulak dan menjual hasil tangkapan dengan harga yang tergolong rendah
		Produksi Perikanan	3	Belum optimalnya pemanfaatan lahan budidaya perikanan
			4	Kurang maksimalnya tenaga pendamping perikanan yang dilapangan dalam melakukan pembinaan kepada pembudidaya ikan
20.	Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	1	Masih terbatasnya infrastruktur, sarana dan prasarana dikawasan objek wisata
			2	Kuantitas SDM dibidang kepariwisataan yang masih rendah.

No.	Urusan	Kriteria/Aspek	Permasalahan
			3 Belum optimalnya promosi pariwisata daerah
21.	Pertanian	Produktivitas tanaman pangan (Ton/Ha)	1 Kerusakan jaringan irigasi dan tidak ada penambahan jaringan irigasi pertanian di sejumlah lokus pertanian tanaman pangan
			2 Belum tersedianya daerah tangkapan air yang dapat didayagunakan untuk aktifitas pertanian tanaman pangan
			3 Alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan kelahan perkebunan dan penggunaan lain semakin tinggi
			4 Belum optimalnya kebijakan daerah untuk pengembangan Sektor Pertanian, khususnya pertanian berbasis masyarakat, lemah nya akses pasar produk pertanian dan rendahnya dukungan pembiayaan pada sektor pertanian
			5 Belum optimalnya usaha budidaya hortikultura khususnya untuk komoditas utama yang menundukung ketahanan pangan
			6 Kurangnya dukungan pada penyediaan infrastruktur pertanian, khususnya jalan usaha tani dan penyediaan teknologi pertanian
			7 Kurangnya dukungan Pengembangan subsistem pendukung pada pertanian, khususnya penyediaan benih dan bibit serta dukungan sarana produksi pertanian dan perlindungan harga komoditi pertanian
22	Perkebunan	Produktivitas sektor perkebunan (Ton/Ha)	1 Fluktuasi harga komoditi yang tidak stabil
			2 Kenaikan harga pupuk dan pencabutan kebijakan pencabutan subsidi pupuk
23.	Perdagangan	Ekspor Bersih Perdagangan	1 Sebagian besar komoditi ekspor adalah komoditi migas dan minyak nabati.
			2 Belum optimalnya dukungan pada pengembangan industri lokal berbasis sumber daya lokal dan masih lemahnya integrasi hulu hilir dalam pengembangan industri
			3 Belum optimalnya dukungan sertifikasi produk lokal dan masih rendahnya daya saing produk local berkualitas ekspor
24.	Perindustrian	Cakupan bina kelompok pengrajin	1 Pengembangan industry pertanian masih terkonsentrasi pada komoditi perkebunan dan masih belum optimalnya dukungan pada pengembangan pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan perikanan berbasis masyarakat

No.	Urusan	Kriteria/Aspek	Permasalahan	
			2	Belum optimalnya peningkatan kuantitas dan kualitas pengrajin
			3	Belum optimalnya penyediaan pasar terhadap produk-produk kerajinan lokal
D.	Penunjang Urusan			
25.	Perencanaan	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	1	Keterbatasan data yang dimiliki oleh Perangkat Daerah dalam menunjang proses perencanaan
26.	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Persentase peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur	1	Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan daerah
		Persentase jabatan struktural yang terisi	2	Belum meratanya cakupan ASN yang memiliki kepangkatan yang cukup untuk memenuhi jabatan struktural
26.	Pengawasan	Jumlah Temuan BPK	1	Terdapat temuan-temuan yang sulit ditindaklanjuti karena rendahnya kesadaran pendokumentasian arsip-arsip kegiatan
			2	Masih belum meratanya pengetahuan sumberdaya aparatur untuk memahami peraturan-peraturan terkait pelaksanaan kegiatan
			3	Belum optimalnya pembinaan oleh pengawas internal terhadap pelaksanaan kegiatan daerah

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah merupakan landasan konseptual dan strategis dalam memahami, merancang, serta mengarahkan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Kerangka ini mencerminkan karakteristik utama perekonomian daerah, potensi unggulan, tantangan struktural, serta arah kebijakan yang ditempuh untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional, daerah memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena masing-masing daerah memiliki sumber daya alam, potensi industri, infrastruktur, yang berbeda satu dengan lainnya. Oleh karena itu, pemetaan terhadap struktur ekonomi daerah menjadi langkah awal dalam membangun strategi pengembangan yang tepat.

Struktur ekonomi daerah meliputi berbagai sektor utama, seperti pertanian, industri, perdagangan, jasa, serta sektor pariwisata yang menjadi keunggulan kompetitif di berbagai wilayah. Dalam mendukung sektor-sektor tersebut, investasi dan pengembangan infrastruktur menjadi faktor krusial. Infrastruktur yang memadai, seperti jaringan transportasi, akses energi, serta sistem komunikasi yang modern, akan meningkatkan daya saing daerah serta menarik lebih banyak investor.

Selain itu, kebijakan ekonomi daerah menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal dan moneter yang tepat dapat menciptakan stabilitas ekonomi dan memberikan stimulus bagi dunia usaha. Regulasi yang mendukung kemudahan berinvestasi, insentif bagi pelaku usaha, serta penguatan sektor UMKM juga menjadi bagian dari strategi dalam membangun ekonomi daerah yang mandiri dan kompetitif.

Tidak kalah pentingnya, sumber daya manusia yang berkualitas juga menjadi motor penggerak dalam ekosistem ekonomi daerah. Oleh karena itu, investasi dalam bidang pendidikan, pelatihan tenaga kerja, dan peningkatan keterampilan menjadi langkah strategis guna menciptakan masyarakat yang produktif dan inovatif.

Dalam menghadapi dinamika global dan nasional, konektivitas ekonomi daerah dengan pasar domestik maupun internasional menjadi peluang besar untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Dengan adanya keterbukaan ekonomi dan integrasi pasar, produk unggulan daerah dapat diperkenalkan lebih luas, meningkatkan nilai tambah, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan perencanaan yang matang serta sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, ekonomi daerah dapat berkembang secara inklusif dan berkelanjutan. Kerangka ekonomi daerah yang kuat akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan yang merata, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di setiap wilayah.

Kerangka ekonomi daerah mencakup kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan keuangan daerah mencakup semua aspek keuangan yang terkait dengan pemerintahan daerah, termasuk penerimaan dan pengeluaran. Disamping itu keuangan daerah juga mencakup pembangunan infrastruktur dan investasi dalam proyek-proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah perlu menetapkan arah kebijakan ekonomi yang strategis, berbasis pada potensi lokal, serta sejalan dengan kebijakan nasional dan tantangan global.

Arah kebijakan ekonomi daerah difokuskan pada penguatan sektor-sektor unggulan yang memiliki daya saing tinggi, seperti pertanian, industri kreatif, pariwisata, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui pengembangan sektor-sektor ini, diharapkan tercipta lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.

Selain itu, peningkatan investasi menjadi prioritas utama dalam kebijakan ekonomi daerah. Pemerintah daerah terus mendorong iklim investasi yang kondusif dengan menyederhanakan regulasi, memberikan insentif bagi investor, serta membangun infrastruktur yang mendukung konektivitas dan kelancaran arus barang dan jasa. Dengan adanya investasi yang kuat, maka peluang ekonomi daerah akan semakin berkembang dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Di sisi lain, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu pilar utama dalam kebijakan ekonomi daerah. Melalui program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan kualitas tenaga kerja, diharapkan masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam pembangunan ekonomi serta memiliki daya saing di era digital dan globalisasi.

Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran dan kebijakan fiskal yang berpihak pada pembangunan ekonomi. Dengan optimalisasi pendapatan daerah, alokasi belanja yang tepat sasaran, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan, kebijakan ekonomi dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.

Selaras dengan prinsip keberlanjutan, kebijakan ekonomi daerah juga diarahkan pada pembangunan yang ramah lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam yang bijak, pengembangan energi terbarukan, serta inovasi dalam ekonomi hijau menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Dengan arah kebijakan yang jelas, terencana, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, diharapkan ekonomi daerah dapat tumbuh secara berkelanjutan, inklusif, dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Melalui sinergi antara pemerintah,

pelaku usaha, dan masyarakat, pembangunan ekonomi daerah akan semakin kuat dan berkontribusi dalam memperkuat perekonomian nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pembangunan daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan prinsip desentralisasi dalam pemerintahan yang menyerahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di tingkat lokal.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, pelaksanaan pembangunan daerah harus diarahkan pada upaya untuk mencapai target-target pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Hal ini karena tujuan utama dari pembangunan daerah adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata pada pembangunan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu pemerintah daerah dalam menetapkan rencana pembangunan daerah harus memperhatikan rencana pembangunan nasional untuk mencapai target-target pembangunan nasional. Pemerintah Daerah juga harus memastikan bahwa rencana pembangunan daerah disesuaikan dengan kondisi lokal dan memperkuat sektor-sektor unggulan yang dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 telah ditetapkan tema yaitu Kedaulatan Pangan, Energi serta Ekonomi Produktif dan inklusif dengan strategi, dan langkah mempercepat pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ialah dengan peningkatan produktivitas industrialisasi (hilirisasi) berorientasi ekspor dan program padat karya, peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, lalu swasembada energi melalui ekonomi hijau. Kemudian juga peningkatan inovasi teknologi melalui transformasi digital, serta peningkatan investasi produktif terutama Foreign Direct Investment/Penanaman Modal Asing berorientasi ekspor dan investasi non-Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Sementara itu yang menjadi sasaran dalam pembangunan nasional pada tahun 2026 antara lain adalah: pertumbuhan ekonomi 5,8 persen hingga 6,3 persen, Gross National Income (GNI) per kapita 5.870 dolar Amerika Serikat (AS), penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) 37,14 persen, indeks kualitas lingkungan hidup 76,67 persen, tingkat kemiskinan turun menjadi 6,5-7,5 persen, rasio gini 0,377-0,380, serta indeks modal manusia 0,57.

Sementara itu Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2026 menetapkan tema pembangunan daerah yaitu: "Riau Maju dan Berkelanjutan Berlandaskan Budaya Melayu yang Agamis". Untuk mewujudkan Riau berdaya saing, Pemerintah Provinsi Riau menetapkan empat prioritas antara lain: Pertama, "Transformasi sosial yang mencakup penguatan di sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, agama, dan budaya," Kedua, transformasi ekonomi yang fokus utamanya adalah peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, yaitu dengan mendorong inovasi dan penciptaan nilai tambah. Ketiga, transformasi tata kelola pemerintahan, dengan memperkuat kapasitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), sekaligus memperluas implementasi sistem tata kelola dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan Keempat, peningkatan

infrastruktur, yang mencakup pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan kawasan ekonomi, serta penguatan kawasan strategis.

Sehubungan dengan tema dan prioritas Pemerintahan Pusat dan Provinsi Riau tersebut untuk menselaraskan arah kebijakan ekonomi antara tingkatan pemerintahan maka Kabupaten Bengkalis menetapkan tema RKPD 2026 adalah “Peningkatan Produktivitas Melalui Transformasi dan Inovasi untuk Swasembada Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif”

Adapun yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2026 adalah:

- 1) Produktivitas
- 2) Transformasi dan Inovasi
- 3) Swasembada Pangan
- 4) Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2025

a. Pertumbuhan Ekonomi.

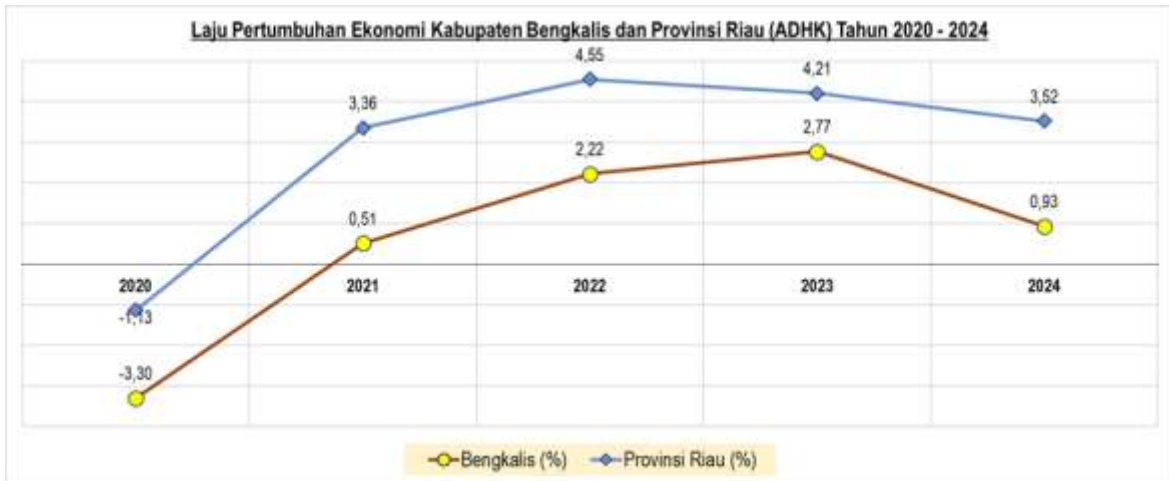
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kemajuan dan kesejahteraan suatu negara atau daerah. Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian dari waktu ke waktu. Pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan menjadi fondasi penting bagi peningkatan pendapatan per kapita, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi karena adanya peningkatan dalam kuantitas dan kualitas sumber daya yang digunakan dalam proses produksi. Beberapa faktor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi, tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja, teknologi, kebijakan pemerintah yang mendukung, sumberdaya alam, perdagangan dan keterbukaan ekonomi.

Kabupaten Bengkalis, sebagai salah satu daerah strategis di Provinsi Riau, memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir timur Sumatera. Letaknya yang berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka menjadikan Bengkalis sebagai kawasan yang memiliki potensi besar dalam perdagangan, jasa pelabuhan, dan konektivitas antarwilayah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis didukung oleh sejumlah sektor unggulan yang terus dikembangkan dan menjadi pilar utama pembangunan daerah.

Sektor unggulan yang berperan dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pertanian dan perkebunan, khususnya komoditas kelapa sawit dan karet, menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pedesaan. Di sisi lain, kekayaan laut yang melimpah menjadikan sektor perikanan dan kelautan, termasuk perikanan tangkap dan budidaya tambak, sebagai sumber penghidupan utama bagi masyarakat pesisir. Sektor minyak dan gas bumi, terutama di wilayah Duri, memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah serta menjadi penggerak sektor penunjang lainnya.

Selain itu, sektor perdagangan dan jasa berkembang pesat seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan pertumbuhan wilayah perkotaan. Industri pengolahan juga mulai menunjukkan peran penting, terutama dalam pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang memberikan nilai tambah ekonomi. Kombinasi dari seluruh sektor unggulan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkalis memiliki struktur ekonomi yang cukup kuat dan berpotensi untuk tumbuh secara berkelanjutan. Selama kurun waktu 2020 -2024 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis seperti terlihat pada grafik berikut:



Gambar III-1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis Termasuk Minyak Bumi Dan Gas dengan Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Data pada Grafik III. 1 diatas memmplihatkan bahwa Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika pemulihan yang belum stabil pasca pandemi. Tahun 2020 menjadi titik terendah dengan kontraksi sebesar -3,30%, menandakan dampak signifikan dari gangguan aktivitas ekonomi akibat COVID-19. Pada tahun 2021, perekonomian Bengkalis mulai menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 0,51%, meskipun masih sangat terbatas. Tren positif berlanjut pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing dengan pertumbuhan sebesar 2,22% dan 2,77%. Namun, laju pertumbuhan kembali melambat menjadi hanya 0,93% di tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa struktur ekonomi Bengkalis masih menghadapi tantangan dalam menjaga momentum pemulihan dan pertumbuhan jangka panjang.

Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Riau, terlihat bahwa Bengkalis mengalami pemulihan yang lebih lambat dan pertumbuhan yang lebih rendah secara konsisten. Provinsi Riau yang juga mengalami kontraksi pada tahun 2020 (-1,13%) namun mampu mencatatkan pertumbuhan signifikan pada tahun-tahun berikutnya, bahkan mencapai puncaknya pada 2022 dengan angka 4,55%. Sampai dengan tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Riau tetap relatif tinggi (3,52%), menunjukkan ketahanan dan akselerasi pemulihan yang lebih baik dibandingkan Bengkalis.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis dalam beberapa tahun terakhir erat kaitannya dengan dominasi sektor minyak dan gas bumi (migas) dalam

struktur ekonominya. Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor ini menjadikan perekonomian Bengkalis rentan terhadap fluktuasi produksi dan harga migas

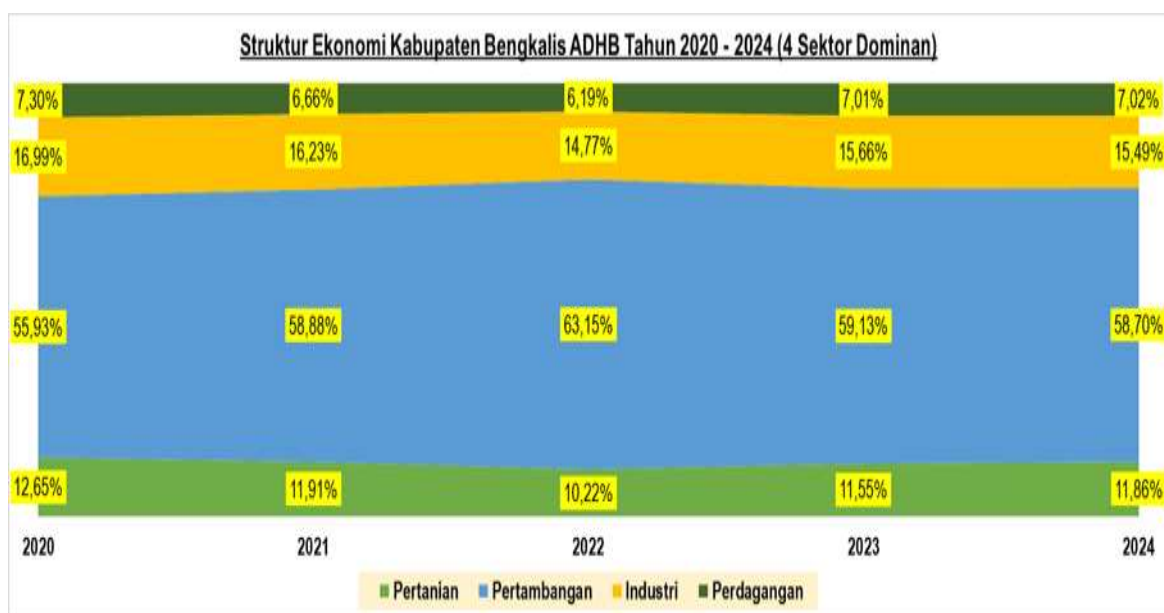
Dengan demikian disparitas ini mencerminkan perlunya perbaikan dalam strategi pembangunan ekonomi daerah Bengkalis, termasuk penguatan sektor-sektor unggulan lokal, peningkatan investasi, serta pengelolaan fiskal dan program pemulihan ekonomi yang lebih terarah dan efektif.

Struktur Perekonomian.

Struktur perekonomian menggambarkan kontribusi relatif dari berbagai sektor ekonomi terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Produk Domestik Bruto (PDB) suatu wilayah atau negara. Struktur ini menjadi indikator penting dalam menilai arah dan karakteristik pembangunan ekonomi, serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara umum, struktur perekonomian dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu sektor primer (pertanian, kehutanan, dan perikanan), sektor sekunder (industri pengolahan, konstruksi, dan pertambangan), serta sektor tersier (perdagangan, transportasi, jasa keuangan, dan jasa lainnya). Perubahan dalam struktur ini mencerminkan proses transformasi ekonomi, dari ketergantungan terhadap sektor primer menuju dominasi sektor industri dan jasa.

Struktur perekonomian juga dapat menggambarkan tingkat ketahanan dan kemandirian ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi yang terlalu bergantung pada satu sektor tertentu cenderung rentan terhadap guncangan eksternal, seperti fluktuasi harga komoditas global atau bencana alam. Oleh karena itu, diversifikasi ekonomi menjadi strategi penting dalam mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis dilihat dari kontribusi masing-masing sektor menurut lapangan usaha terlihat pada gambar berikut:



Gambar III-2 Struktur Perekonomian Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

Dari gambar diatas terlihat bahwa struktur ekonomi Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 hingga 2024 didominasi kuat dari sektor pertambangan, yang secara konsisten menyumbang lebih dari 55% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB). Kontribusi tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar 63,15%. Kenyataan ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Bengkalis sangat bergantung pada eksplorasi dan produksi sumber daya alam, terutama yang berasal dari sektor migas atau mineral. Dominasi ini mencerminkan karakteristik daerah yang kaya akan potensi tambang dan menjadikan sektor tersebut sebagai tulang punggung ekonomi lokal.

Dominasi sektor pertambangan minyak dalam struktur ekonomi Kabupaten Bengkalis ini ini disatu sisi memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun demikian ketergantungan yang terlalu tinggi pada sektor ini menyimpan sejumlah kelemahan serius. Salah satu kelemahan utama adalah sifat sumber daya minyak yang tidak terbarukan, sehingga potensi cadangan yang menipis dapat menjadi ancaman besar bagi keberlanjutan ekonomi daerah. Selain itu, harga minyak sangat dipengaruhi oleh fluktuasi pasar global dan dinamika geopolitik, yang menyebabkan ketidakstabilan dalam penerimaan daerah.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, pemerintah Kabupaten Bengkalis perlu melakukan diversifikasi ekonomi secara bertahap dan terencana. Sektor-sektor alternatif seperti pertanian berkelanjutan, industri pengolahan, pariwisata, serta UMKM harus diperkuat agar dapat menjadi penopang ekonomi baru. Peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal juga menjadi kunci, agar masyarakat dapat beradaptasi dan berperan aktif dalam berbagai sektor. Selain itu, sebagian pendapatan dari migas dapat dialokasikan sebagai dana abadi dan investasi strategis jangka panjang, guna menciptakan ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Sektor lainnya seperti pertanian, industri, dan perdagangan menunjukkan kontribusi yang jauh lebih kecil. Sektor pertanian, meskipun penting dalam mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat desa, hanya memberikan kontribusi sekitar 10–12% sepanjang periode tersebut. Sementara sektor industri dan perdagangan masing-masing berkisar di angka 6–7% dan 14–17%. Tren ini menandakan perlunya diversifikasi ekonomi agar Bengkalis tidak terlalu bergantung pada sektor pertambangan yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Penguatan sektor sekunder dan tersier menjadi strategi penting untuk menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Inflasi

Inflasi adalah suatu kondisi di mana harga-harga barang dan jasa secara umum cenderung naik dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dapat diukur dengan menghitung perubahan rata-rata harga konsumen dalam suatu periode tertentu, biasanya diukur dengan menggunakan indeks harga konsumen (IHK).

Inflasi yang sedikit biasanya dianggap sebagai hal yang normal dan dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, inflasi yang terlalu tinggi dan tidak terkendali dapat mengakibatkan dampak negatif pada perekonomian, seperti menurunnya

daya beli masyarakat, menurunnya investasi, dan menurunnya nilai tukar mata uang suatu negara

Perhitungan angka inflasi di Provinsi Riau dilakukan di 4 Kabupaten/Kota antara lain: Kota Dumai, Kota Pekanbaru, dan Tembilan dan Kampar. Angka Inflasi Kabupaten Bengkalis merujuk pada angka inflasi Kota Dumai karena secara geografis lebih dekat. Pertimbangan menggunakan angka Inflasi Kota Dumai adalah karena kedekatan jarak dibanding dengan kota lainnya yang menghitung angka inflasi. Adapun angka inflasi Kota Dumai selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik berikut:

Tabel III-1 Tingkat Inflasi di Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Riau	2,42	1,54	6,81	2,50	2,50
Tembilahan	3,30	1,09	4,82	1,53	2,45
Pekanbaru	2,24	1,55	7,04	2,50	1,89
Dumai	2,88	1,66	6,46	2,78	2,68
Kampar	na	na	na	na	3,25

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2025

Tabel III-1 diatas menunjukkan pengendalian inflasi Kota Dumai relatif lebih terarah dibandingkan tiga kota/kabupaten lainnya. Meski pada tahun 2022 Kota Dumai mencatat inflasi tinggi sebesar 6,46%, lonjakan ini masih lebih rendah dibanding Pekanbaru (7,04%) dan hanya sedikit di atas Tembilahan (4,82%). Namun yang menonjol dari Kota Dumai adalah konsistensi pemulihan—dengan penurunan inflasi yang bertahap dan terkontrol menjadi 2,78% di 2023 dan 2,68% di 2024. Ini menandakan efektivitas kebijakan daerah dalam meredam dampak tekanan harga menunjukkan kemampuan adaptasi sektor perdagangan dan distribusi yang cukup baik.

Sebaliknya, Pekanbaru meski merupakan pusat ekonomi utama, memperlihatkan gejala inflasi yang lebih liar dan tidak terkendali dalam periode yang sama. Setelah ledakan inflasi di 2022, Pekanbaru memang menurun ke 2,50% dan 1,89%, tetapi tren tajam ini cenderung menunjukkan respons reaktif, bukan strategi stabilisasi yang berkelanjutan. Tembilahan bahkan menunjukkan ketidakstabilan yang lebih serius, dengan fluktuasi ekstrem dari 1,09% (2021) ke 4,82% (2022), lalu kembali anjlok ke 1,53% (2023). Fluktuasi semacam ini dapat menimbulkan ketidakpastian harga dan mengganggu daya beli masyarakat secara signifikan.

Sementara Kampar, meski hanya memiliki satu data di 2024 (3,25%), langsung mencatat inflasi tertinggi dibanding ketiga daerah lain pada tahun tersebut. Fakta ini menjadi catatan awal bahwa daerah tersebut perlu mengantisipasi potensi ketidakterkendalian harga jika pola ini berlanjut. Dalam lanskap ini, Dumai tampil sebagai kota yang tidak hanya berhasil mengurangi tekanan inflasi secara bertahap, tetapi juga menunjukkan kestabilan yang berharga bagi pembangunan ekonomi jangka menengah. Jika tren ini dipertahankan, Dumai yang merupakan rujukan inflasi Kabupaten Bengkalis berpeluang menjadi benchmark penanganan inflasi daerah di Riau

Walaupun pengendalian inflasi di Kota Dumai lebih baik dibandingkan kabupataen Kota liannya, namun keberadaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah terutama di Kabupaten

Bengkalis menjadi sangat penting terutama untuk menjaga jangan sampai terjadi berkurangnya pasokan barang-barang yang beredar di pasar yang dapat memicu terjadi inflasi.

Angka Pengangguran.

Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja aktif yakni mereka yang berada dalam usia kerja dan mampu bekerjatidak memiliki pekerjaan, namun secara aktif mencari pekerjaan dan siap untuk bekerja. Ini bukan sekedar angka statistik, melainkan potret nyata ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan serapan tenaga kerja.

Pengangguran terbuka dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti ketidakcocokan antara keterampilan dan pekerjaan yang tersedia, fluktuasi ekonomi, kurangnya peluang kerja, dan berbagai masalah struktural di pasar tenaga kerja. Pengangguran terbuka memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian, seperti menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya kemiskinan, dan menurunnya pertumbuhan ekonomi. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bengkalis selama kurun waktu 2020- 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber: BPS Provinsi Riau 2025

Gambar III-3 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2020-2024

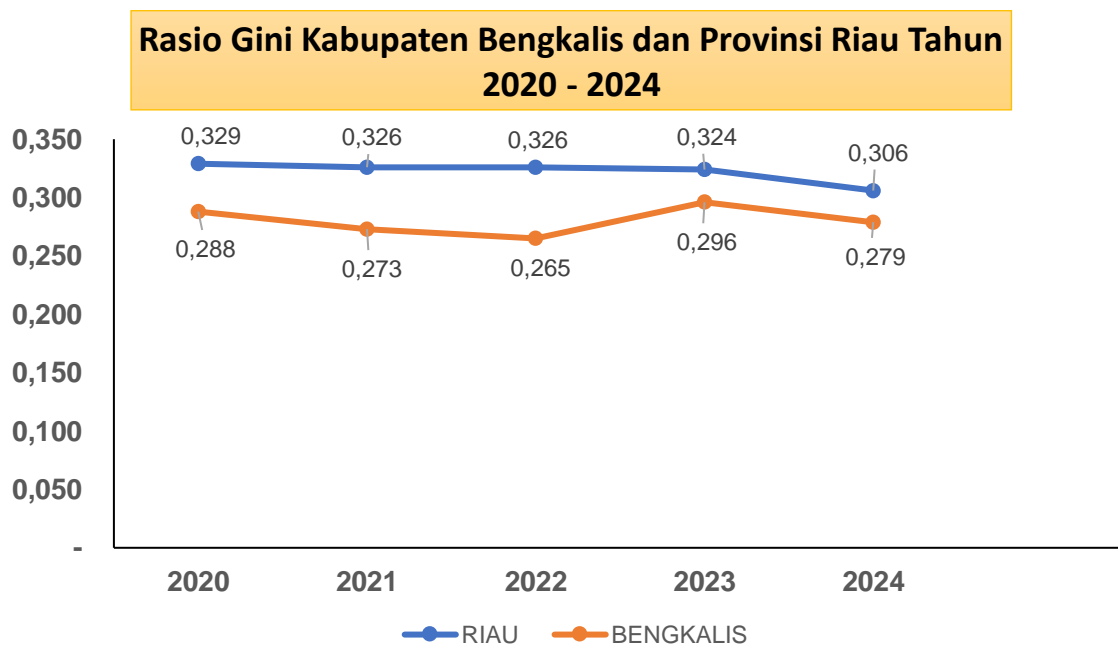
Pada Grafik di atas terlihat bahwa Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Bengkalis sepanjang 2020-2024 menunjukkan tren penurunan, namun tetap jauh lebih tinggi dibandingkan Provinsi Riau. Pada 2020, TPT Bengkalis mencapai 9,31%, jauh di atas rata-rata provinsi yang 6,32%. Hal ini mengindikasikan bahwa Bengkalis menghadapi kendala serius dalam penyerapan tenaga kerja, kemungkinan akibat terbatasnya peluang kerja dan sektor ekonomi yang kurang berkembang.

Selama periode berikutnya, Bengkalis memang mengalami penurunan TPT yang cukup signifikan, terutama di 2021 dan 2024, namun angka ini masih lebih tinggi dibanding Provinsi Riau yang stabil di kisaran 3,7%–4,4%. Kestabilan angka pengangguran di Bengkalis pada tahun 2022 dan 2023 di atas 7% menandakan adanya stagnasi, dimana upaya penyerapan tenaga kerja belum optimal dan belum mampu mengatasi masalah struktural yang ada.

Perbedaan yang cukup besar antara Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau menegaskan perlunya kebijakan strategis dan terintegrasi untuk membuka lapangan kerja baru, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan mendorong investasi di sektor produktif. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan melakukan intervensi yang tepat, supaya tidak tertinggal lebih jauh dalam hal pengurangan pengangguran dibandingkan wilayah lain di Riau yang relatif lebih berhasil menekan TPT secara konsisten.

Indek Gini Rasio.

Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan dalam suatu populasi atau negara. Ini adalah angka antara 0 dan 1, di mana 0 mengindikasikan kesetaraan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama) dan 1 mengindikasikan ketidaksetaraan sempurna (satu individu memiliki seluruh pendapatan sementara yang lainnya tidak memiliki pendapatan sama sekali). Pada umumnya, indeks Gini dianggap sebagai indikator penting dalam mengukur ketidaksetaraan ekonomi dan sering digunakan dalam analisis sosial dan ekonomi. Adapun Indek Gini Rasio Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut:



Sumber: Indikator Strategis Statistik Sosial Kabupaten Bengkalis 2020, LPPD Bengkalis 2021

Gambar III-4 Gini Ratio Kabupaten Bengkalis tahun 2020 – 2024

Grafik data memperlihatkan bahwa selama periode 2020-2024 Gini Rasio Kabupaten Bengkalis menunjukkan tren yang relatif stagnan dan bahkan sedikit membaik sejak tahun 2020 hingga 2024. Dimulai dari angka 0,288 pada tahun 2020, Gini Rasio ini sempat menurun hingga 0,265 pada tahun 2022, yang menunjukkan penurunan kesenjangan pendapatan di wilayah Bengkalis. Namun demikian pada tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 0,296, yang mengindikasikan sedikit memburuknya pemerataan

pendapatan. Angka Gini Rasio di bawah 0,3 ini masih relatif rendah dan menunjukkan kondisi kesenjangan yang tidak terlalu besar, meskipun fluktuasi tersebut perlu diwaspadai agar tidak terjadi peningkatan ketimpangan yang signifikan.

Sebaliknya, Gini Rasio Provinsi Riau cenderung lebih tinggi dan relatif stabil, dengan angka sekitar 0,329 di tahun 2020 dan menurun tipis hingga 0,306 pada tahun 2024. Ini menandakan bahwa secara umum, kesenjangan pendapatan di tingkat provinsi masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Bengkalis. Meskipun terjadi sedikit penurunan, Gini Rasio Provinsi Riau tetap berada di kisaran 0,3 ke atas, yang menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang lebih nyata dan ini menjadi tantangan sosial ekonomi yang lebih besar dibanding Bengkalis

Perbandingan ini menegaskan bahwa Kabupaten Bengkalis secara relatif memiliki tingkat pemerataan pendapatan yang lebih baik daripada rata-rata Provinsi Riau, meskipun ada tanda-tanda fluktuasi yang perlu diwaspadai. Pemerintah daerah dan provinsi harus fokus pada upaya pengentasan kesenjangan sosial, terutama di Riau yang menunjukkan angka Gini Rasio lebih tinggi. Strategi kebijakan yang tepat dapat meliputi pengembangan ekonomi inklusif, peningkatan akses pendidikan dan lapangan kerja, serta distribusi sumber daya yang lebih merata agar kesenjangan di tingkat provinsi dapat dikurangi dan tidak memicu ketidakstabilan sosial.

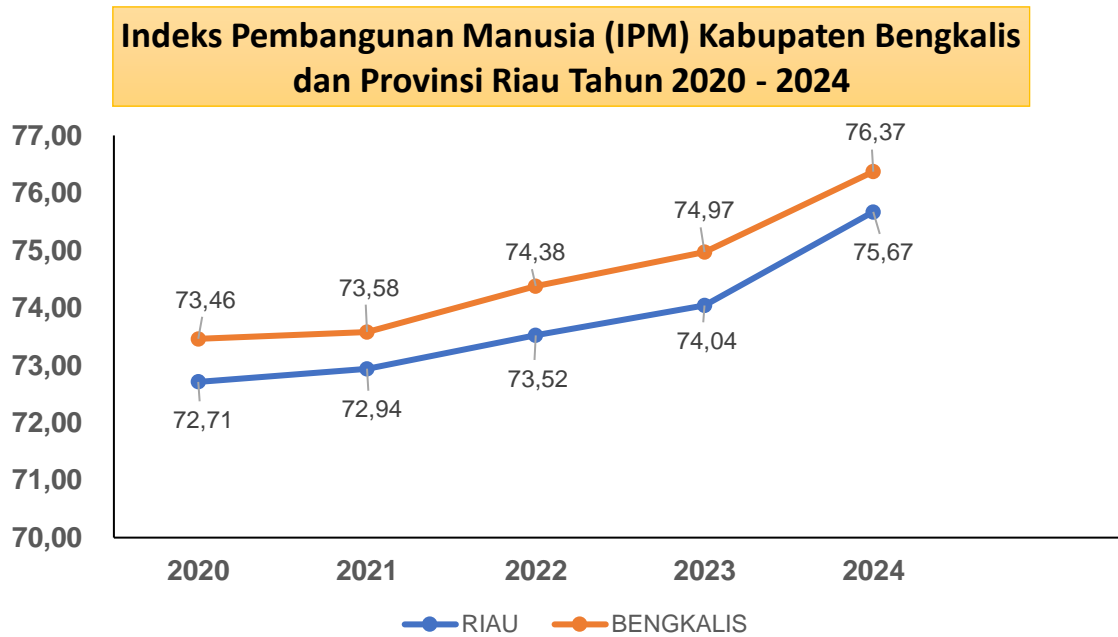
Indek Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dalam suatu wilayah. IPM mengukur tiga dimensi utama yaitu kesehatan (dilihat dari angka harapan hidup saat lahir), pendidikan (dilihat dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (diukur berdasarkan pendapatan per kapita atau daya beli). Dengan demikian, IPM bukan hanya sekadar indikator ekonomi, tetapi juga mencerminkan aspek sosial dan kualitas hidup secara menyeluruh.

Pentingnya IPM dalam perencanaan pembangunan daerah terletak pada kemampuannya untuk memberikan gambaran yang lebih holistik tentang kesejahteraan masyarakat. IPM menjadi tolok ukur yang sangat berguna untuk mengetahui sejauh mana pembangunan di suatu daerah berhasil meningkatkan kualitas hidup penduduknya, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga pendidikan dan kesehatan. Dengan menggunakan data IPM, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan di berbagai sektor, sehingga perencanaan pembangunan bisa difokuskan pada bidang-bidang yang membutuhkan intervensi paling mendesak.

IPM juga berperan sebagai dasar untuk menetapkan prioritas pembangunan, merancang kebijakan yang tepat sasaran, dan mengukur efektivitas program pembangunan secara berkelanjutan. Dengan fokus pada peningkatan IPM, pembangunan daerah tidak hanya bertujuan mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memastikan tercapainya pembangunan manusia yang inklusif dan berkeadilan. Hal ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas, dan produktif, yang

pada akhirnya akan memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang di daerah tersebut. Adapun angka IPM Kabupaten Bengkalis 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar III-5 Indek Pembangunan Manusia (IPM) 2020-2024

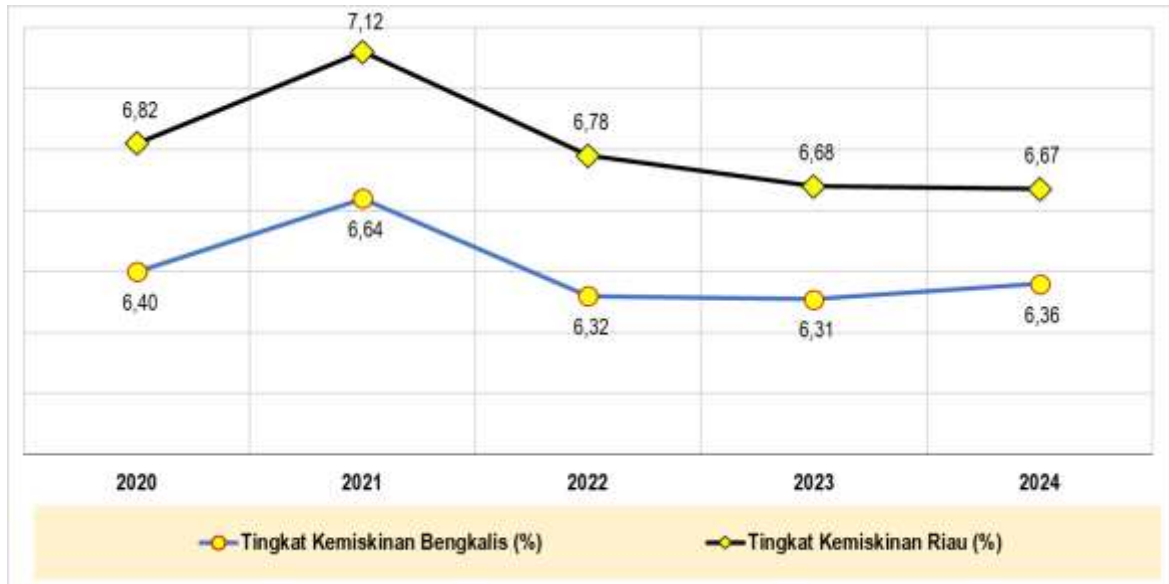
Dari Grafik diatas memperlihatkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bengkalis menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, dengan nilai yang naik dari 73,46 pada tahun 2020 menjadi 76,37 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan kemajuan dalam aspek-aspek penting pembangunan manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup di Bengkalis. Namun, meskipun terjadi peningkatan, laju kenaikan IPM Bengkalis relatif stabil dan tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan Provinsi Riau.

Di sisi lain, IPM Provinsi Riau juga mengalami peningkatan signifikan selama periode yang sama, dari 72,71 pada tahun 2020 menjadi 75,67 pada tahun 2024. Meskipun nilai absolut IPM Riau masih berada di bawah Bengkalis setiap tahunnya, laju pertumbuhan IPM Riau terlihat lebih cepat terutama sejak tahun 2022, yang menunjukkan bahwa secara provinsi ada percepatan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh berbagai program pembangunan dan pemerataan yang lebih intensif di tingkat provinsi

Perbandingan ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Bengkalis memang sudah berada di posisi yang lebih tinggi dalam hal IPM dibandingkan rata-rata Provinsi Riau, namun gap tersebut mulai mengecil seiring waktu karena percepatan pembangunan di tingkat provinsi. Untuk menjaga keunggulan dan mempercepat pembangunan manusia, Bengkalis perlu terus memperkuat sektor pendidikan, layanan kesehatan, dan ekonomi yang inklusif agar pertumbuhan IPM dapat lebih optimal dan berkelanjutan. Sementara itu, Provinsi Riau harus mempertahankan akselerasi ini agar peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dapat merata di seluruh kabupaten dan kota.

Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan dua komponen dalam menghitung garis kemiskinan, yaitu garis kemiskinan makanan, dan garis kemiskinan non makanan, sehingga pendataan penduduk miskin dilakukan terhadap penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Adapun perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis periode 2018-2023 dapat dilihat pada Garfik berikut:



Gambar III-6 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bengkalis 2020-2024

Secara umum tingkat kemiskinan di Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan dari 6,40% pada tahun 2020 menjadi 6,31% pada tahun 2023, namun sedikit meningkat pada tahun 2024 menjadi 6,36%. Sedangkan kemiskinan di Riau dari 6,82% pada tahun 2020 menjadi 6,67 pada tahun 2024.

Jika dianalisis secara lebih mendalam, penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Riau lebih dinamis dibandingkan dengan Bengkalis yang cenderung stagnan. Hal ini dapat disebabkan oleh kebijakan pembangunan dan program sosial yang lebih masif serta terintegrasi di tingkat provinsi. Sementara itu, Kabupaten Bengkalis perlu meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan akses layanan dasar, terutama di daerah pedesaan yang menjadi konsentrasi kemiskinan. Keterbatasan infrastruktur dan lapangan kerja juga menjadi hambatan utama yang harus diatasi untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

Solusi strategis yang dapat diterapkan untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Bengkalis antara lain adalah pengembangan sektor ekonomi lokal yang berkelanjutan,

seperti pertanian, perikanan, dan UMKM berbasis potensi daerah. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin akan membuka akses mereka ke pekerjaan yang lebih baik. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat program bantuan sosial yang tepat sasaran dan mengoptimalkan sinergi dengan sektor swasta serta lembaga non-pemerintah. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, diharapkan tingkat kemiskinan di Bengkalis dapat terus menurun dan sejajar bahkan lebih baik dari tingkat kemiskinan di Provinsi Riau.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2026

Tantangan perekonomian Kabupaten Bengkalis pada tahun 2026 adalah:

1) Ketergantungan pada Sumber Daya Alam

Kabupaten Bengkalis masih sangat bergantung pada sektor pertambangan dan minyak bumi. Ketergantungan ini membuat perekonomian daerah rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan berisiko terhadap keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

Keterbatasan Infrastruktur dan Aksesibilitas

Keterbatasan infrastruktur, seperti transportasi, listrik, dan air bersih, menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terpencil. Hal ini juga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dan mengurangi daya saing daerah dalam menarik investasi.

Tantangan dalam Pengembangan UMKM

Meskipun terdapat upaya pembinaan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tantangan seperti kurangnya akses permodalan, pemasaran, dan teknologi masih menjadi hambatan. Program pembinaan dan penyiapan satu data UMKM menjadi fokus untuk mengatasi tantangan ini.

Keterbatasan Sumber Pendanaan

Keterbatasan anggaran daerah menuntut pemerintah untuk kreatif dalam mencari sumber pendanaan tambahan. Upaya "jemput bola" dana pusat melalui koordinasi intensif dengan kementerian terkait menjadi strategi untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan dalam Peningkatan Daya Saing Daerah

Peningkatan daya saing daerah menjadi tantangan utama dalam menghadapi persaingan global. Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan infrastruktur menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Bengkalis.

Tingginya Angka Kemiskinan

Persentase penduduk miskin masih cukup signifikan dan belum menunjukkan penurunan drastis. Dampak kemiskinan dirasakan dalam keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Ekonomi yang Terbatas

Ketergantungan pada sektor primer tanpa pengembangan ekonomi alternatif membuat ketahanan ekonomi rentan. Perlunya pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan industri kecil menengah (IKM) yang lebih berkelanjutan.

Sedangkan prospek perekonomian Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadinya pemulihan ekonomi secara global dan regional dengan berbagai program yang sudah dilakukan, diperkirakan akan terjadi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 dan 2026. Kondisi ini akan dapat mendorong ekonomi daerah perkembangan dan peningkatan ekonomi Kabupaten Bengkalis.
- 2) Kabupaten Bengkalis menjadi tujuan investasi yang menarik bagi investor dalam dan luar negeri. Ini dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.
- 3) Industri kreatif telah menjadi sektor yang semakin penting yang dapat berkontribusi terhadap ekonomi daerah Kabupaten Bengkalis.
- 4) Peningkatan pendidikan dan pelatihan dapat membantu mendorong inovasi, meningkatkan keterampilan pekerja, dan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
- 5) Penguatan UMKM dan Ekonomi Kerakyatan. Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan terus mendorong pemberdayaan UMKM melalui pelatihan, pendanaan, serta digitalisasi usaha. Bantuan keuangan desa/kelurahan sebesar Rp1 miliar per tahun menjadi stimulan penting dalam memutar roda ekonomi lokal dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat bawah
- 6) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Pulau Rupa Dengan pengusulan Pulau Rupa sebagai KEK pariwisata, Bengkalis berpeluang meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. KEK ini akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, akomodasi, serta pelatihan SDM pariwisata, yang turut mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir.

Berdasarkan kondisi diatas diproyeksikan perekonomian Kabupaten Bengkalis tahun 2026 adalah seperti tabel berikut :

Tabel III-2 Proyeksi Perkenomian Kabupaten Bengkalis 2026

No	Uraian	Proyeksi
1	Pertumbuhan Ekonomi	1,5% - 2 %
2	Angka Inflasi	2,0% - 2,5%
3	Angka Pengangguran Terbuka	5,0% - 5.5%
4	Indeks Gini Rasio	0,280 – 0,291
5	Angka Kemiskinan	6,0% - 6,2 %
6	Indeks Pembangunan Manusia	75,50 - 75,80
7	PDRB per kapita :	

No	Uraian	Proyeksi
	ADHK (juta)	133,15 – 134,95
	ADHB (juta)	297,55 – 299,45
8	Kontribusi PDRB di Provinsi	16,50%
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.	73,71

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah Kebijakan Keuangan Daerah adalah panduan strategis bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan pro-rakyat. Berikut adalah garis besar arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Bengkalis :

1) Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a) Optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah.
- b) Digitalisasi sistem perpajakan daerah.
- c) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD, termasuk BUMD dan aset daerah.

Peningkatan Efisiensi Belanja Daerah

- a) Prioritas belanja pada sektor yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar).
- b) Penerapan value for money dalam pengeluaran daerah.
- c) Pengendalian belanja pegawai yang berlebihan.

Perencanaan dan Penganggaran yang Terintegrasi

- a) Sinkronisasi antara RKPD, KUA-PPAS, dan APBD.
- b) Penguatan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
- c) Berorientasi pada hasil (output dan outcome based budgeting).

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

- a) Penguatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah.
- b) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan (opini WTP dari BPK).
- c) Reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan berbasis kinerja.

Pengembangan Pembiayaan Alternatif

- a) Kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga (KPBU).
- b) Pemanfaatan pinjaman daerah yang produktif dan terukur.
- c) Dana abadi pendidikan, lingkungan, atau lainnya sesuai kebutuhan daerah.

Keuangan Daerah yang Berbasis Pembangunan Berkelanjutan

- a) Anggaran responsif gender, ramah lingkungan, dan inklusif.

- b) Alokasi belanja yang mendukung SDGs (Sustainable Development Goals).
- c) Pendekatan pembangunan hijau dan ekonomi sirkular.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Perkembangan kehidupan masyarakat akan diikuti dengan meningkatnya kebutuhan. Keadaan ini tentu akan berdampak pada meningkatnya pendanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu sumber-sumber pendapatan daerah juga harus ditingkatkan. Kondisi saat ini Kabupaten Bengkalis dihadapkan pada ketersediaan anggaran pendapatan yang terbatas. Meredahnya penyebaran Virus Covid-19 merupakan peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah. Berkenaan dengan hal tersebut untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis maka langkah-langkah kebijakan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi PAD dilakukan dengan digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Pemerintah daerah juga mendorong perluasan objek baru (ekstensifikasi) dan memperkuat pemungutan yang sudah ada (intensifikasi) melalui pembenahan data dan pengawasan yang lebih ketat.
- b. Peningkatan dana transfer dari pemerintah pusat dilakukan dengan mendorong kinerja pengelolaan keuangan dan pelayanan publik agar daerah memperoleh Dana Insentif Daerah (DID). Selain itu, pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dioptimalkan sesuai kebutuhan sektoral dan prioritas pembangunan. Untuk itu, kualitas laporan keuangan terus ditingkatkan guna mempertahankan opini WTP dan menarik alokasi transfer yang lebih besar dari pusat.
- c. Memperkuat kerja sama dengan swasta dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dengan mengembangkan program-program kerja sama dengan swasta seperti, pengelolaan aset daerah oleh pihak swasta, dan sebagainya.
- d. Optimalisasi Pengelolaan aset daerah melalui penguatan pengawasan yang ketat dan pemanfaatan aset yang lebih produktif, agar aset tidak sekadar menjadi beban inventaris, tetapi berkontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan dan efisiensi pelayanan publik..
- e. Memperkuat sinergi antar daerah: dengan mengembangkan program-program kerja sama antar daerah seperti pengembangan wisata bersama, pengembangan kawasan industri bersama, dan sebagainya.

Dengan kebijakan-kebijakan tersebut diatas diperkirakan akan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Berdasarkan asumsi tersebut perkiraan pendapatan daerah 2026-2027 secara rinci disajikan sebagai berikut:

Tabel III-3 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu

NO	JENIS PENERIMAAN	REALISASI		BERJALAN	TARGET	
		2023	2024	2025	2026	2027
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	614,588,429,804.39	404,020,796,658.72	782,874,854,145.00	525.840.917.212,00	492,804,743,818.34
1,1	Pajak Daerah	106,094,877,800.42	137,788,533,547.00	246,532,500,000.00	256.875.000.000,00	265,107,307,500.00
1,2	Retribusi Daerah	14,326,950,569.00	175,269,009,198.46	173,365,554,145.00	176.108.468.360,00	186,049,358,489.30
1,3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	316,861,797,346.00	73,977,162,709.00	327,000,000,000.00	77.000.000.000,00	25,500,000,000.00
1,4	Lain - Lain Pendapatan Asli daerah yang sah	177,304,804,088.97	16,986,091,204.26	35,976,800,000.00	15.857.448.852,00	16,148,077,829.04
2	Pendapatan Transfer	3,407,347,653,865.00	3,121,720,075,159.00	2,434,389,763,814.00	1.383.925.527.704,00	2,754,665,236,344.66
2.1	Transfer Dana Pusat	3,211,081,404,574.00	2,992,706,803,607.00	2,262,305,040,000.00	1.295.390.116.000,00	2,630,379,370,579.14
2.3.	Transfer Pemerintah Provinsi	196,266,249,291.00	129,013,271,552.00	172,084,723,814.00	88.535.411.704,00	124,285,865,765.51
3	Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	0	0	0	0	0
	Jumlah	4,021,936,083,669.39	3,525,740,871,817.72	3,217,264,617,959.00	1.909.766.444.916,00	3,247,469,980,162.99

Pada data tabel III. 3 di atas memperlihatkan bahwa proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 sebesar Rp.525.840.917.212 miliar. Hal ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan dengan realisasi PAD pada tahun berjalan yang mencapai Rp782,9 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, karena adanya ketidakpastian pendapatan dari publik interest yang masuk dalam Pendapatan pengeolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga berdampak langsung pada total PAD yang diproyeksikan lebih rendah.

Di sisi lain, pendapatan transfer pada tahun berjalan sebesar Rp.2,434 triliun diproyeksikan mengalami penurunan pada tahun 2026, yakni sebesar Rp 1.383.925.527.704 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan transfer tetap menjadi sumber utama pendapatan daerah dan memberikan kontribusi signifikan dalam menutupi kekurangan dari penurunan PAD. Kenaikan transfer ini diharapkan dapat mendukung pembiayaan daerah dalam menjalankan program dan kegiatan pemerintahan dengan lebih optimal.

Secara keseluruhan, total pendapatan daerah pada tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp.1.909.766.444.916 triliun. Terdapat penurunan pada PAD dan pendapatan transfer menjadi faktor yang mempengaruhi stabilitas keuangan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut dalam mengelola potensi PAD agar ketergantungan pada pendapatan transfer dapat dikurangi, sekaligus meningkatkan kemandirian fiskal daerah di masa mendatang. Evaluasi dan strategi pengelolaan aset serta diversifikasi sumber pendapatan menjadi langkah penting yang harus diprioritaskan.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah.

Arah kebijakan belanja daerah adalah untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Adapun arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2026 adalah:

- 1) Prioritas pembangunan yang jelas dalam rangka mengalokasikan anggaran yang tepat dan efektif. Prioritas alokasi anggaran yang dilakukan adalah belanja wajib dan mengikat, belanja untuk pencapaian visi dan misi Kepala daerah dan belanja lainnya.
- 2) Pengendalian belanja, untuk memastikan anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan dapat memenuhi tujuan pembangunan daerah. Pengendalian belanja meliputi pengawasan, evaluasi, dan pengendalian penggunaan anggaran.
- 3) Peningkatan kualitas belanja dengan cara mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dilakukan dengan memperkuat manajemen keuangan daerah, meningkatkan kualitas layanan publik, dan meningkatkan akuntabilitas publik.
- 4) Pemanfaatan teknologi informasi, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah. Teknologi informasi membantu proses

pengadaan barang dan jasa, monitoring penggunaan anggaran, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.

- 5) Sinergi antar daerah dalam penggunaan anggaran. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan program-program kerja sama antar daerah seperti pengembangan sumber daya manusia bersama, pembangunan infrastruktur bersama, dan sebagainya.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 taun akuntasni. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sementara belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Kebijakan dalam alokasi anggaran belanja di Kabupaten Bengkalis 2026 masih memperlihatkan bahwa proporsi belanja operasi lebih besar dibandingkan dengan belanja lainnya. Secara lebih rinci perkembangan belanja dan prediksi dapat dilihat pada tabel III.4 berikut ini

Tabel III-4 Realisasi dan Proyeksi Pengeluaran Daerah Kabupaten Bengkulu

NO	JENIS BELANJA	REALISASI		BERJALAN		TARGET
		2023	2024	2025	2026	2027
	TOTAL BELANJA	4,227,671,123,678.05	3,615,947,720,604.17	3,292,715,704,834.00	3.065.748.137.965,00	3,328,096,688,884.26
1.	BELANJA DAERAH	3,620,557,410,448.05	3,114,623,237,821.17	2,938,356,605,661	2.707.845.447.800,27	2,968,404,485,268.71
1.1	BELANJA OPERASI	2,729,054,015,689.05	2,652,305,698,094.02	2,500,591,824,746	2.314.597.300.798,44	2,526,139,962,265.21
	Belanja Pegawai	1,163,398,270,080.00	1,273,396,081,405.00	1,170,984,227,040	1.275.751.574.028,00	1,383,723,343,916.08
	Belanja Barang dan Jasa	1,381,790,584,075.05	1,234,871,516,209.16	1,234,144,020,365	949.588.404.355,44	1,045,516,314,169.15
	Belanja Subsidi	26,215,958,998.00	21,920,833,286.00	12,040,485,841	5.000.000.000,00	12,221,695,152.91
	Belanja Hibah	123,667,935,263.00	100,381,666,143.86	57,976,691,500	58.556.458.415,00	58,849,240,707.08
	Belanja Bantuan Sosial	33,981,267,273.00	21,735,601,050.00	25,446,400,000	25.700.864.000,00	25,829,368,320.00
1.2	BELANJA MODAL	891,490,372,209.00	461,578,403,627.15	415,645,346,124	392.248.147.001,83	419,812,190,718.89
	Belanja Tanah	0.00	0.00	1,000,000,000	-	1,010,025,000.00
	Belanja Peralatan dan Mesin	129,460,420,955.00	85,347,971,046.00	86,058,436,825	86.488.729.009,13	86,921,172,654.17
	Belanja Gedung dan Bangunan	133,063,665,969.00	71,466,581,186.51	98,535,315,319	99.027.991.895,60	99,523,131,855.07
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	618,021,154,762.00	283,810,720,565.64	211,751,593,980	188.339.926.097,10	213,874,403,709.65
	Belanja Aset Tetap Lainnya	10,896,502,523.00	20,779,718,829.00	18,300,000,000	18.391.500.000,00	18,483,457,500.00
	Belanja Aset Lainnya	48,628,000.00	173,412,000.00			
1.3	BELANJA TAK TERDUGA	13,022,550.00	739,136,100.00	22,119,434,791	1.000.000.000,00	22,452,332,284.60
	Belanja Tak Terduga	13,022,550.00	739,136,100.00	22,119,434,791	1.000.000.000,00	22,452,332,284.60
2	TRANSFER	607,113,713,230.00	501,324,482,783.00	354,359,099,173	357.902.690.164,73	359,692,203,615.55

NO	JENIS BELANJA	REALISASI		BERJALAN	TARGET	
		2023	2024	2025	2026	2027
	Transfer Bagi Hasil ke Desa					
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	12,818,526,500.00	0.00	26,128,595,173	26.389.881.124,73	26,521,830,530.35
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-				-
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	594,295,186,730.00	501,324,482,783.00	328,230,504,000	331.512.809.040,00	333,170,373,085.20
	Transfer Bantuan Keuangan lainnya	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00

Mencermati data pada tabel di atas terlihat bahwa proyeksi belanja daerah tahun 2026 adalah sebesar Rp 3.065.748.137.965 triliun, yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun berjalan 2025 ini. Belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan nilai mencapai Rp 2.314.597.300.798,44 triliun, menunjukkan kebutuhan yang tinggi untuk menjalankan aktivitas rutin pemerintahan dan pelayanan publik. Peningkatan belanja operasi ini menandakan adanya perencanaan belanja yang lebih intensif untuk mendukung kegiatan operasional daerah.

Selain itu, belanja modal diproyeksikan sebesar Rp 392.248.147.001,83 miliar, berkurang dari tahun sebelumnya. Keadaan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk memperkuat infrastruktur dan investasi daerah. Belanja modal yang lebih besar ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembangunan fisik yang berkelanjutan. Sementara itu, belanja tak terduga dan belanja transfer juga mengalami penurunan meskipun dalam proporsi yang relatif lebih kecil, masing-masing menjadi sebesar Rp 1 miliar dan Rp 357.902.690.164,73 miliar.

Secara keseluruhan, peningkatan belanja di semua jenis menunjukkan adanya komitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan serta pengelolaan pembangunan. Namun, dengan proyeksi total belanja yang melebihi pendapatan daerah, khususnya dibandingkan dengan pendapatan yang diperkirakan sekitar Rp 1.909.766.444.916 triliun, perlu perhatian khusus dalam menjaga keseimbangan fiskal agar defisit dapat diminimalkan dan keberlanjutan keuangan daerah tetap terjaga. Strategi efisiensi dan pengelolaan anggaran yang cermat akan menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan secara optimal.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 diarahkan pada SILPA yang diupayakan memanfaatkan pembiayaan dalam mengatasi defesit dalam anggaran. Sementara itu kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2026 diarahkan untuk penyertaan modal daerah. Adapun target penerimaan pembiayaan dan target pengeluaran pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III-5 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkalis

NO	JENIS PENERIMAAN	REALISASI		BERJALAN		TARGET
		2023	2024	2025	2026	2027
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	293,406,324,261.33	87,854,841,328.67	125,451,086,875	50.000.000.000	80,626,708,721.27
1,1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran	293,268,675,966.33	87,671,284,252.67	124,251,086,875	50.000.000.000	80,626,708,721.27

NO	JENIS PENERIMAAN	REALISASI		BERJALAN		TARGET
		2023	2024	2025	2026	2027
	Sebelumnya					
1,2	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	--
1,3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang disahkan			-	-	-
1,4	Penerimaan Pinjaman Daerah	137,648,295.00	183,557,076.00	1,200,000,000	-	-
1,5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		-		-	-
1,6	Penerimaan Pembiayaan lainnya		-		-	-
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah		-	50,000,000,000	-	
2,1	Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo					
2,2	Penyertaan Modal			50,000,000,000		
2,3	Pemberian Pinjaman Daerah					
2,4	Pembentukan Dana Cadangan		-		-	-
2,5	Pemberian Pinjaman Daerah					
2,6	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya					-
2,5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		--		-	-
	Pembiayaan Neto	293,406,324,261.33	87,854,841,328.67	75,451,086,875	50.000.000.000	80,626,708,721.27

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 Kabupaten Bengkalis mengacu pada sasaran pembangunan penggalan pertama dari RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025-2029. Sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2026 Kabupaten Bengkalis juga disusun berdasarkan telaah terhadap: hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2024; Capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 untuk tahun 2025; Identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional yang bersumber kepada Rancangan Kerja Pembangunan Nasional dan Provinsi Riau Tahun 2026; dan Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan Tahun 2026.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah di dalam RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2026, perlu mempedomani dan diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional, provinsi Riau, dan Kabupaten Bengkalis sendiri agar arah pembangunan dapat dilakukan secara sinergi antar jenjang pemerintahan. Keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bengkalis dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi Riau dijelaskan berikut ini.

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan ke dua dalam RPJMN 2025-2029 yang menjadi tahap pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Berdasarkan Dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 tema pembangunan adalah. "Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif".

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- 3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z), dan penyandang disabilitas.

- 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dengan Indikasi Sasaran Pembangunan Nasional sebagai berikut:

- Indeks Modal Manusia (Poin); 0,57
- Pertumbuhan Ekonomi (Persen) ; 5,8 - 6,3
- Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) ; 4,44 - 4,96
- Tingkat Kemiskinan (Persen) ; 6,5 – 7,5
- Gini Rasio (Poin) ; 0,377 - 0,380
- Penurunan intensitas emisi GRK (%) ; 37,14

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2026

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam penetapan arah pembangunan daerah hendaknya selaras dengan arah pembangunan nasional. Hal ini perlu dilakukan agar berbagai kebijakan pembangunan daerah memiliki link and match dengan pembangunan nasional. Mengacu pada pemikiran tersebut maka dalam penyusunan tema pembangunan Provinsi Riau tahun 2026 disamping mengacu pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau tahun 2025-2045 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029, juga mengacu pada tema RKP Nasional tahun 2026 adalah Perkuatan Fondasi Transformasi Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah Dan Ekonomi Inklusif Yang Berkelanjutan.

Dengan indikator capaian yang hendak dicapai sebagai berikut;

- Indeks Modal Manusia (Poin); 0,57
- Pertumbuhan Ekonomi (Persen) ; 3,92 - 4,28
- Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) ; 3,38 - 3,62
- Tingkat Kemiskinan (Persen) ; 4,95 - 5,86
- Gini Rasio (Poin) ; 0,299 - 0,302
- Penurunan intensitas emisi GRK (%) ; 49,39

Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Riau 2026

- TRANSFORMASI SOSIAL dengan penekanan pada Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan (Kemiskinan, Jaminan Sosial), Agama dan Budaya.

- TRANSFORMASI EKONOMI dengan penekanan pada Peningkatan Produktifitas (Pertanian, Perkebunan) Peningkatan Nilai Tambah (IKM, UMKM, Hilirisasi, Koperasi) dan Inovasi
- TRANSFORMASI TATA KELOLA dengan penekanan antara lain Peningkatan Kapasitas ASN Implementasi Tata Kelola Pemerintah Dan Pelayanan Publik Berbasis IT
- INFRASTRUKTUR dengan penekanan pada Peningkatan Infrastruktur (Infrastruktur Dasar, Kawasan Ekonomi, Kawasan Strategis)

Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah Provinsi Riau dengan indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel IV-1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2026

Trasformasi	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target 2026	Program Strategis Gubernur
Trasformasi Sosial	Pendidikan	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	10,06 - 10,06 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Gratis : SMA/SMK dan Madrasah, serta Dukungan Penguatan Pendidikan Dasar di Kab/Kota • Beasiswa Pendidikan Sarjana S1, S2, S3 bagi Mahasiswa Berprestasi & Tenaga Pendidik • Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik yang merata dan berkeadilan • Dukungan dan Kerjasama Universitas / Perguruan Tinggi • Beasiswa Pendidikan bagi Penyandang Difabilitas dan Kelompok Marjinal • Penguatan Pendidikan Moralitas dan Keagamaan • Dukungan Penguatan Pendidikan Anak Usia Dini • Penguatan Sarana dan Prasarana Kependidikan
			Harapan Lama Sekolah	13,63 - 13,64 Tahun	
	Kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Sehat dan produktif	Umur Harapan Hidup	74,58 Tahun	
		Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas keluarga, dan	Indeks Ketimpangan Gender	0,42 - 0,417 Poin	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Penguatan Universal Health Coverage dan Peningkatan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Riau • Percepatan Penurunan Stunting Sejak Dini (Ibu Hamil dan Balita) dan

Trasformasi	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target 2026	Program Strategis Gubernur
		masyarakat inklusif	Indeks Kualitas Keluarga	0,43 Poin	<p>Pencegahan Wasting (Gizi Buruk) melalui Dukungan Asupan Bergizi dan Sosialisasi Makanan Sehat dan Bergizi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Posyandu dan Rumah Sakit • Pencegahan dan Antisipasi Dini Penyebaran Wabah & Penyakit Menular • Peningkatan Jumlah dan Kompetensi Dokter dan Tenaga Medis, serta Distribusi yang merata
	Kesejahteraan (Kemiskinan, Jaminan Sosial)	Berkurangnya Kesenjangan Antar Masyarakat dan Antar Wilayah	Persentase Penduduk Miskin Desa	6,32	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Desa • Peningkatan Peluang Kerja dan Penurunan Angka Pengangguran • Penuntasan Kemiskinan Ekstrim dan Penurunan Angka Kemiskinan Daerah • Penguatan Jiwa Usaha / Entrepreneur dan Peningkatan Peluang Usaha di Masyarakat • Dukungan Permodalan UMKM • Dukungan Penguatan dan Permodalan Usaha Koperasi
Meningkatkan Pemberdayaan, Produktivitas, dan Pendapatan Masyarakat		Persentase Penduduk Miskin Kota	5,99		
Meningkatnya perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif		Tingkat Pengeluaran Perkapita Masyarakat Miskin/Garis Kemiskinan (Ribu Rupiah)	740.092		
		Tingkat Pengangguran Terbuka	3,38 - 3,62 Persen		
			Persentase Penduduk Miskin yang memiliki setidaknya satu Jaminan Sosial dan bantuan Sosial	27,94	
	Agama dan Budaya	Menguatnya nilai-nilai budaya Melayu sebagai jati diri masyarakat Riau dalam rangka Pemajuan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	62,50	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi peran mesjid raya (mesjid raya annur provinsi Riau, mesjid raya nurul wathan, mesjid raya maqari, mesjid alhidayah gubernuran) untuk pengajian kitab-

Trasformasi	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target 2026	Program Strategis Gubernur
		Kebudayaan Melayu Riau			kitab ulama klasik dan modern negeri melayu berhaluan ahlussunah waljamaah, bermazhab syafii dan bertasawuf sunni serta menjadikan objek wisata religi untuk mengenalkan budaya melayu
		Meningkatnya Kerukunan Sosial Antar masyarakat dan Kehidupan Bermasyara kat yang Kondusif, Aman, Nyaman	Indeks kerukunan umat beragama	72,93	<ul style="list-style-type: none"> Gerakan Masyarakat Bebas Judi, Narkoba dan Keluarga Bahagia
Trasformasi Ekonomi	Peningkatan Produktifitas (Pertanian, Perkebunan)	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	27,97 Poin	<ul style="list-style-type: none"> Hilirisasi Produk Pada Sektor - Sektor Unggulan Penguatan dan Pengembangan Kawasan Industri di Provinsi Riau Dukungan Pembangunan Pusat - Pusat Pertumbuhan Ekonomi
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dan kesejahteraan Petani	Indeks Ketahanan Pangan	71,93 Poin	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan Pengembangan Potensi Unggulan di Provinsi Riau untuk Pemerataan dan Stimulus Pembangunan Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Reorientasi Pembangunan Sektor – Sektor Perekonomian, Pertanian, Perdagangan, Wisata, Industri dan Sektor Strategis Lainnya
			Nilai Tukar Petani	174, 58 NTP	
	Peningkatan Nilai Tambah (IKM, UMKM, Hilirisasi, Koperasi)	Peningkatan daya saing investasi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	32,76 Triliun Rupiah	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan Permodalan UMKM Penguatan Kapasitas BUMD dan BLUD Fasilitasi dan Dukungan Kenyamanan Serta Kemudahan Berinvestasi Dukungan Penguatan dan Permodalan Usaha Koperasi Penguatan Riset dan Inovasi Serta Pemanfaatan Teknologi Digital
		Meningkatnya nilai tambah pariwisata	Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara	27.629,36 Milyar Rupiah	
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,06 Poin	
			Persentase Penurunan intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	49,39 Persen	
		Mengurangi Risiko Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana Daerah	128,80 Poin	
	Inovasi	Meningkatnya hasil Riset dan	Indeks Kapabilitas Inovasi	2,48 Poin	Riau Mantap; Mendorong Ketahanan

Trasformasi	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target 2026	Program Strategis Gubernur
		Inovasi untuk pembangunan Daerah			Energi serta Pemanfaatan Energi Berkelanjutan
		Meningkatnya Kerjasama Pembangunan	Persentase kerjasama pembangunan yang sudah dilaksanakan	Persen	
Tranformasi Tatakelola	Peningkatan Kapasitas ASN	Meningkatnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional	Indeks Profesionalitas ASN	79,22 Poin	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Professional dan Berintegritas • Pertemuan dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa
			Nilai survey Indeks Berakhlak	73,64 Poin	
			Nilai survey penilaian integritas	67,14 poin	
	Implementasi TataKelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis IT	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,97 Poin	
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	73,04 Poin	
			Capaian akuntabilitas Kinerja	75,30 Poin	
Capaian akuntabilitas keuangan	WTP				
Infrastruktur	Peningkatan Infrastruktur (Kawasan Ekonomi, Kawasan Strategis Provinsi, Kawasan Industri)	Meningkatnya Konektivitas Daerah	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi	0,59 Poin	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Jalan Mantap Provinsi Riau • Peningkatan Penyediaan Air Bersih • Pembangunan Rumah Layak Huni dan Sanitasi • Dukungan Penyelesaian Outer Ring Road Metropolitan Pekanbaru • Mendorong Pengembangan Kota Tematik • Pembangunan Kawasan untuk Kawasan Strategis
		Meningkatnya cakupan dan Kualitas pelayanan infrastruktur dasar	Indeks layanan infrastruktur dasar	77,85 Poin	

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026

Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2026 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029. Dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bengkalis tahun 2026 maka hal ini mengacu pada visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029, yang juga berpedoman pada visi RPJPD Provinsi Riau dan RPJPD Kabupaten Bengkalis, isu

strategis pembangunan Kabupaten Bengkalis dan juga memperhatikan visi RPJMN 2025-2045.

RKPD Kabupaten Bengkalis juga merupakan kristalisasi dari komitmen pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap masyarakat dalam pencapaian Visi Pembangunan Daerah seperti termuat di dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025-2029, yaitu:

“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju , dan Sejahtera Serta Unggul di Indonesia”

Agar pencapaian Visi Pembangunan 2025-2029 dapat dilaksanakan dengan baik, maka ditetapkanlah sejumlah misi, tujuan dan sasaran pembangunan untuk mendukung pencapaian tersebut. Dimana keterhubungan misi, tujuan dan sasaran dapat dijelaskan pada Tabel IV-2. berikut ini.

Tabel IV-2 Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME
(1)	(2)	(3)	(4)
VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA SERTA UNGGUL DI INDONESIA			
1. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing.	1.1. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan SDA	1.1.1. Terwujudnya perekonomian masyarakat yang kokoh dan berkeadilan	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri
			Meningkatnya pekerja indonesia yang terlindungi
			Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan
			Meningkatnya pelaksanaan penanaman modal
		1.1.2. Terciptanya iklim investasi yang kondusif dan Berkelanjutan	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata
		1.1.3. Terwujudnya Pariwisata sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri
			Meningkatnya daya saing UMKM
		1.1.4. Terwujudnya ketahanan pangan	Meningkatnya diservikasi dan ketahanan pangan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME
		daerah	masyarakat
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan
		1.1.5. Terwujudnya Petani yang Sejahtera	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana peternakan
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana perkebunan
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana peternakan
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana perkebunan
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya
		1.1.6. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan
		1.1.7. Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME
		1.1.8. Meningkatnya kualitas kepemudaan daerah	<p>Meningkatnya daya saing kepemudaan</p> <p>Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga</p>
		1.1.9. Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	<p>Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan</p> <p>Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak</p>
		1.1.10. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat miskin dan rentan	<p>Meningkatnya rehabilitasi sosial</p> <p>Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial</p>
<p>2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter</p>	<p>2.1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang integritas, dinamis, dan masyarakat berkarakter dengan penguatan nilai agama dan budaya Melayu</p>	<p>2.1.1. Terciptanya Tatakelola Pemerintahan Baik, Bersih dan akuntabel</p>	<p>Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat</p> <p>Terselenggaranya urusan pemerintah daerah</p> <p>Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan</p> <p>Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)</p> <p>Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi</p> <p>Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum</p> <p>Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan</p> <p>Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program keluarga berencana</p> <p>Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)</p>

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang perekonomian dan SDA
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika
		2.1.2. Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik	Meningkatnya tata kelola anggaran
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan
			Menurunya terjadi penyelewangan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan
		2.1.3. Meningkatkan budaya kerja ASN Yang profesional dan Berintegritas	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional
		2.1.4. Meningkatkan pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan
		2.1.5. Terciptanya kerukunan umat beragama	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan
		2.1.6. Meningkatkan pelestarian budaya melayu	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah
3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat	3.1. Meningkatkan konektivitas dan kualitas infrastruktur wilayah secara berkelanjutan serta mendorong pengembangan kawasan perbatasan yang tangguh dan berwawasan lingkungan	3.1.1. Terbangunnya konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi air
		3.1.2. Ketersediaan infrastruktur dasar yang handal dan merata antarwilayah	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi-(Perkim)
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum
			Meningkatnya layanan persampahan regional
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman
			Meningkatnya pembangunan rumah layak huni dalam rangka pencegahan kawasan permukiman kumuh
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman
		3.1.3. Berkembangnya kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan identitas wilayah	Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan
		3.1.4. Terjaganya kualitas lingkungan dan meningkatnya ketangguhan daerah dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati
			Meningkatnya tata kelola persampahan
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran

4.1.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Menyusun Rencana Kerja dan Pembangunan Daerah dalam implementasinya harus mempertimbangkan aspek politis dan bottom up yang bersifat lebih aspiratif melalui rumusan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan Pasal 78 dan Pasal 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunan Rancangan RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, dan Pokok-pokok pikiran DPRD, dimasukkan kedalam e-planning.

Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan secara tertulis disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Usulan Program yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD disesuaikan dengan Bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah untuk selanjutnya diintegrasikan dengan program kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis. Berikut ringkasan pokok pikir Anggota Dewan Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2026.

Tabel IV-3 Konsistensi Pokok-pokok Pikiran DPRD dengan Rumusan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD Tahun 2026	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
1.	<p>A. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, optimalisasi pelayanan kesehatan, pelayan publik, pemberdayaan UMKM dan Tenaga Kerja di Kabupaten Bengkalis</p> <p>B. Pada sektor pendidikan yang memerlukan perhatian dan penanganan terkait sarana dan prasarana, infrastruktur dan Pendidikan Sumber Daya Manusia.</p>	Produktivitas
2.	<p>A. Pada sektor pendidikan yang memerlukan perhatian dan penanganan terkait sarana dan prasarana, infrastruktur dan Pendidikan Sumber Daya Manusia.</p> <p>B. Penanganan abrasi pada wilayah Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Bandar Laksemana, Rukat dan</p>	Transformasi dan Inovasi

No	Pokok-pokok Pikiran DPRD Tahun 2026	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
	Rupat Utara	
3.	Optimalisasi program dan kegiatan pengembangan sektor pertanian terutama pada kluster kawasan yang fokus pada agro industri melalui dukungan Program dan kebijakan yang bertujuan untuk memajukan industri pertanian di Kabupaten Bengkalis	Swasembada Pangan
4.	Penuntasan pembangunan jalan poros pada tiap tiap Kecamatan yang dapat menghubungkan antar desa dan antar kecamatan yang merupakan kebutuhan penting dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

4.2 Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2026

Penyusunan RKPD Kabupaten Bengkalis mempedomani RKP dan RKPD Provinsi Riau tahun 2026, melalui penyelarasan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional, provinsi dengan prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis. Tema RKPD Kabupaten Bengkalis tahun 2026 yaitu:

“Peningkatan Produktivitas Melalui Transformasi dan Inovasi untuk Swasembada Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif”.

Tema RKPD tersebut menjadi panduan dalam menentukan dan menjabarkan prioritas daerah ke dalam program-program prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2026. Untuk itu, pembangunan Kabupaten Bengkalis tahun 2026 mengusung 4 prioritas pembangunan yaitu:

- Produktivitas
- Transformasi dan Inovasi
- Swasembada Pangan
- Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, terutama yang berkorelasi dengan upaya untuk pencapaian visi “Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju Dan Sejahtera Serta Unggul Di Indonesia” dan misi pembangunan Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis. Produktivitas menjadi Prioritas utama dalam proses pembangunan tahun 2026. Dalam konteks ini, kebijakan diarahkan untuk mengurangi kesenjangan sosial, memberdayakan masyarakat miskin, serta meningkatkan kapasitas SDM lokal agar mampu bersaing dalam transformasi ekonomi. Pendekatan pembangunan

berbasis inklusif dan partisipatif menjadi kunci untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah. Prioritas pembangunan ini menunjang fokus utama pembangunan pencapaian misi melalui fokus utama pembangunan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, produktifitas dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan, serta peningkatan produktivitas untuk mewujudkan perekonomian yang berdaya saing. Dengan menjadikan produktivitas sebagai priotitas pembangunan diharapkan dapat membantu penyelesaian permasalahan dan isu strategis terkait Peningkatan daya saing ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Industri kreatif serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Transformasi dan Inovasi daerah merupakan penggerak transformasi yang memungkinkan Kabupaten Bengkalis beradaptasi terhadap tantangan dan peluang baru, khususnya di era digital dan ekonomi hijau. Dalam perencanaan jangka pendek, inovasi diarahkan pada tata kelola pemerintahan yang responsif dan berbasis teknologi, pemanfaatan potensi lokal secara kreatif, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi, pelaku usaha, dan komunitas. Penguatan ekosistem inovasi menjadi penting untuk mendorong munculnya solusi-solusi baru dalam pelayanan publik, pengembangan UMKM, dan sektor strategis seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata. Dengan menjadikan transformasi dan inovasi sebagai prioritas pembangunan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan atau isi strategis terkait dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis digital serta peningkatan kualitas SDM.

Swasembada pangan diarahkan untuk mendukung efisiensi ekonomi dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks keberlanjutan, hal ini memerlukan dukungan pembangunan infrastruktur peningkatan produktivitas pangan lokal di Kabupaten Bengkalis denagn memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta mitigasi terhadap perubahan iklim. Fokus pada penyediaan sarana dan prasarana pertanian, kelautan dan perikanan, transportasi publik, dan energi terbarukan menjadi prioritas dalam membangun fondasi jangka pendek yang kokoh dan berorientasi masa depan. Melalui prioritas pembangunan pada Swasembada Pangan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan atau isi strategis terkait dengan Peningkatan daya saing ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Industri kreatif

Prioritas pembangunan ini saling terintegrasi dalam kerangka peningkatan modal dasar transformasi daerah, yang bukan hanya bertumpu pada fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas manusia dan institusi, sehingga Kabupaten Bengkalis mampu tumbuh inklusif, adaptif, dan berdaya saing dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Untuk dapat melihat sinkronisasi data keselarasan antara prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan RKPD

Tabel IV-4 Singkronisasi Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Bengkalis Tahun 2026

	Nasional	Provinsi	Kab.Bengkalis
Tema	<i>KEDAULATAN PANGAN, ENERGI, EKONOMI YANG</i>	<i>PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI DALAM MENINGKATKAN DAYA</i>	<i>PENINGKATAN PRODUKTIVITAS MELALUI</i>

	Nasional	Provinsi	Kab.Bengkalis
	PRODUKTIF DAN INKLUSIF	SAING DAERAH DAN EKONOMI INKLUSIF YANG BERKELANJUTAN	TRANSFORMASI DAN INOVASI UNTUK SWASEMBADA PANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF
Indikator Sasaran	Indeks Modal Manusia (Poin); 0,57	Indeks Modal Manusia (Poin); 0,57	Indeks Pembangunan Manusia 77,02 - 77,28 Point
	Pertumbuhan Ekonomi (Persen) ; 5,8 - 6,3	Pertumbuhan Ekonomi (Persen) ; 3,92 - 4,28	Pertumbuhan Ekonomi (Persen) ; 1,71 - 2,88
	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) ; 4,44 - 4,96	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) ; 3,38 - 3,62	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) ; 5,16 - 5,56
	Tingkat Kemiskinan (Persen) ; 6,5 – 7,5	Tingkat Kemiskinan (Persen) ; 4,95 - 5,86	Tingkat Kemiskinan (Persen) ; 6,12 - 6,20
	Gini Rasio (Poin) ; 0,377 - 0,380	Gini Rasio (Poin) ; 0,299 - 0,302	Gini Rasio (Poin) ; 0,242 - 0,246
	Penurunan intensitas emisi GRK (%) ; 37,14	Penurunan intensitas emisi GRK (%) ; 49,39	Penurunan intensitas emisi GRK (%) ; 17,17
Prioritas	1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	TRANSFORMASI SOSIAL dengan penekanan pada Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan (Kemiskinan, Jaminan Sosial), Agama dan Budaya.	Produktivitas Produktivitas menjadi Prioritas utama dalam proses pembangunan tahun 2026. Dalam konteks ini, kebijakan diarahkan untuk mengurangi kesenjangan sosial, memberdayakan masyarakat miskin, serta meningkatkan kapasitas SDM lokal agar mampu bersaing dalam transformasi ekonomi. Pendekatan pembangunan berbasis inklusif dan partisipatif menjadi kunci untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah
	2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	TRANSFORMASI EKONOMI dengan penekanan pada Peningkatan Produktifitas (Pertanian, Perkebunan) Peningkatan Nilai Tambah (IKM, UMKM, Hilirisasi, Koperasi) dan Inovasi	Transformasi dan Inovasi daerah : merupakan penggerak transformasi yang memungkinkan Kabupaten Bengkalis beradaptasi terhadap tantangan dan peluang baru, khususnya di era digital dan ekonomi hijau. Dalam perencanaan jangka pendek, inovasi diarahkan pada tata kelola pemerintahan yang responsif dan berbasis

	Nasional	Provinsi	Kab.Bengkalis
			teknologi, pemanfaatan potensi lokal secara kreatif, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi, pelaku usaha, dan komunitas. Penguatan ekosistem inovasi menjadi penting untuk mendorong munculnya solusi-solusi baru dalam pelayanan publik, pengembangan UMKM, dan sektor strategis seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata.
	3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI TATA KELOLA dengan penekanan antara lain Peningkatan Kapasitas ASN Implementasi Tata Kelola Pemerintah Dan Pelayanan Publik Berbasis IT	Swasembada pangan : diarahkan untuk mendukung efisiensi ekonomi dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks keberlanjutan, hal ini memerlukan dukungan pembangunan infrastruktur peningkatan produktivitas pangan lokal di Kabupaten Bengkalis dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta mitigasi terhadap perubahan iklim. Fokus pada penyediaan sarana dan prasarana pertanian, kelautan dan perikanan, transportasi publik, dan energi terbarukan menjadi prioritas dalam membangun fondasi jangka pendek yang kokoh dan berorientasi masa depan
	4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z), dan penyandang disabilitas.	INFRASTRUKTUR dengan penekanan pada Peningkatan Infrastruktur (Infrastruktur Dasar, Kawasan Ekonomi, Kawasan Strategis)	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif : Sektor unggulan yang berperan dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pertanian dan perkebunan, khususnya komoditas kelapa sawit dan karet, menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pedesaan. Di sisi lain, kekayaan laut yang melimpah menjadikan sektor
	5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai		

	Nasional	Provinsi	Kab.Bengkalis
	tambah di dalam negeri.		perikanan dan kelautan, termasuk perikanan tangkap dan budidaya tambak, sebagai sumber penghidupan utama bagi masyarakat pesisir. Sektor minyak dan gas bumi, terutama di wilayah Duri, memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah serta menjadi penggerak sektor penunjang lainnya
	6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.		
	7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.		
	8) Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		

Tabel IV-5 Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026

TEMA	PRIORITAS	URUSAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (RP)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Peningkatan produktivitas melalui transformasi dan inovasi untuk swasembada pangan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Produktivitas	Pendidikan	Program pengelolaan pendidikan	83.505.000.000	Dinas pendidikan
			Program pengembangan kurikulum	380.000.000	
			Program pendidik dan tenaga kependidikan	85.000.000	
		Pekerjaan umum dan penataan ruang	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	45.777.718.000	Dinas PUPR
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	1.838.879.000	
			Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	4.175.754.000	
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	8.217.739.000	
			Program penataan bangunan gedung	20.825.773.500	
			Program penyelenggaraan jalan	43.472.592.972	
			Program pengembangan jasa konstruksi	892.673.000	
			Program penyelenggaraan penataan ruang	1.780.214.000	
			Tenaga kerja	Program perencanaan tenaga kerja	
		Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja		1.247.063.660	
		Program penempatan tenaga kerja		115.949.580	
		Program hubungan industrial		5.266.215.031	
		Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	134.400.000	DPPPA
			Program perlindungan perempuan	70.000.000	
		Sosial	Program pemberdayaan sosial	3.221.370.550	Dinas sosial
			Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	12.500.000	
			Program rehabilitasi sosial	4.100.546.965	

TEMA	PRIORITAS	URUSAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (RP)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		Perhubungan	Program perlindungan dan jaminan sosial	28.913.600.000	Dinas perhubungan	
			Program penanganan bencana	1.199.200.000		
			Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	38.175.982.385		
			Program pengelolaan pelayaran	65.040.484.000		
		Transformasi dan inovasi daerah:	Penelitian dan pengembangan	Program penelitian dan pengembangan daerah	550.000.000	Badan riset dan inovasi daerah
				Perencanaan	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	2.199.996.175,
			Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah		1.950.000.372	
			Keuangan	Program pengelolaan keuangan daerah	403.563.022.384	Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah
				Program pengelolaan barang milik daerah	3.149.000.000	
				Program pengelolaan pendapatan daerah	5.675.000.000	
		Pendidikan dan pelatihan	Program pengembangan sumber daya manusia	993.337.948,	BKPP	
		Swasembada pangan;	Pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	475.000.000	Dinas ketahanan pangan
				Program penanganan kerawanan pangan	200.000.000	
				Program pengawasan keamanan pangan	75.000.000	
			Pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	2.820.082.000	DTPHP
Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	5.892.000.000					

TEMA	PRIORITAS	URUSAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (RP)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
			Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	1.030.000.000			
			Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100.000.000			
			Program perizinan usaha pertanian	190.651.382			
			Program penyuluhan pertanian	1.958.050.000			
		Kelautan dan perikanan	Program pengelolaan perikanan tangkap	3.108.400.000		Dinas perikanan	
			Program pengelolaan perikanan budidaya	2.948.000.000			
			Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	72.000.000			
			Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	614.800.000			
		Lingkungan hidup	Program perencanaan lingkungan hidup	449.999.137		Dinas lingkungan hidup	
			Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1.353.168.300			
			Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	5.404.182.224			
			Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	79.999.154			
			Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	242.419.322			
			Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	100.000.720			
			Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	290.802.889			
		Pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Koperasi, usaha kecil, dan menengah	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi		400.000.000	Dinas koperasi dan UKM
				Program pendidikan dan latihan perkoperasian		200.000.000	
Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	100.100.000						
Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	100.000.000						

TEMA	PRIORITAS	URUSAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (RP)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Perindustrian	Program pengembangan umkm	1.895.000.000	Dinas peragangan dan perindustrian
			Program perencanaan dan pembangunan industri	1.870.000.000,	
			Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	75.000.000	
		Pariwisata	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	4.963.730.000	Dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga
			Program pemasaran pariwisata	1.996.639.510	
			Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	83.880.000	
		Perdagangan	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	300.000.000	Dinas peragangan dan perindustrian
			Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	6.000.000.000	
			Program standardisasi dan perlindungan konsumen	200.000.000	

Sementara itu, sinkronisasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) dengan Program Prioritas Daerah Tahun 2026 perlu dilakukan supaya prioritas daerah yang telah ditetapkan bisa memenuhi standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan akan memiliki arah yang benar dengan mengutamakan syarat-syarat pelayanan minimal pada masing-masing bidang pelayanan dasar. Peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan standar pelayanan minimal. Sinkronisasi SPM dengan Program Prioritas Daerah tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV-6 Sinkronisasi SPM dengan Program Prioritas Daerah Tahun 2026

No	Urusan	SPM	Program Prioritas Daerah
1	Pendidikan	A. Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	1 Program Pengelolaan Pendidikan
		B. Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan Asesmen Nasional	2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		C. Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	3 Program Pengembangan Kurikulum
		D. Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan Asesmen Nasional (Pendidikan Kesetaraan)	
		E. Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	
2	Kesehatan	A. Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		B. Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		C. Jumlah bayi lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

No	Urusan	SPM	Program Prioritas Daerah
			Kesehatan
		D. Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	4 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
		E. Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	5 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		F. Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	
		G. Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	
		H. Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	
		I. Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	
		J. Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	
		K. Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	
3	Pekerjaan Umum	A. Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	1 Program Penyelenggaraan Jalan
		B. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	2 Program Pengembangan Jasa Konstruksi
			3 Program Penataan Bangunan Gedung
			4 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

No	Urusan	SPM	Program Prioritas Daerah
			5 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
			6 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			7 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
			8 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			9 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4	Perumahan Rakyat	A. a. Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		B. c. Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	2 Program Pengembangan Perumahan
			3 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
			4 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
			5 Program Kawasan Permukiman

No	Urusan	SPM	Program Prioritas Daerah		
			6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
			7 Program Peningkatan		
			8 Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		
5	Trantibumlinmas	A.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	1	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		B.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		C.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	3	Program Penanggulangan Bencana
		D.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
		E.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
6	Sosial	A.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	1	Program Pemberdayaan Sosial
		B.	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	2	Program Penanganan Bencana
		C.	Jumlah Warga Negara lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

No	Urusan	SPM	Program Prioritas Daerah
		D. Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	4 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
		E. Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			6 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
			7 Program Rehabilitasi Sosial
			8 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan pada RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan melalui tahapan penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan tahunan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik melalui Konsultasi Publik Ranwal RKPD maupun Musrenbang RKPD Tahun 2026. Penentuan program dan kegiatan daerah Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 tahun perencanaan pertama, diupayakan mempunyai keberpihakan terhadap permasalahan pembangunan di Kabupaten Bengkalis, serta memperhatikan keterkaitan dengan prioritas pembangunan nasional Tahun 2026 maupun Provinsi Riau.

Dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis di tahun 2024 masih menggambarkan tingginya ketergantungan daerah pada produksi sektor migas dan turunannya perlu disikapi oleh Kabupaten Bengkalis untuk mengurangi ketergantungan tersebut dengan berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah maupun diversifikasi sektor-sektor non migas, termasuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sebagai “agen of change” pembangunan di masa depan. Namun Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga menyadari bahwa masih belum optimalnya aksesibilitas utama antar wilayah di Kabupaten Bengkalis yang perlu segera di selesaikan agar pertumbuhan ekonomi produktif masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa harus bergantung kepada migas.

Selain itu, upaya pembangunan daerah tahun 2026 dan kewajiban mencukupi mandatori pendidikan, kesehatan, peningkatan kualitas ASN dan pengawasan hendaknya sedikit banyak telah menyebabkan refocusing dalam indikator program, kegiatan dan sub kegiatan pada perangkat daerah pelaksana.

Semua kondisi tersebut di atas telah tersaji dalam Rekapitulasi jumlah program, kegiatan dan pagu per prioritas disajikan pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Perumusan prioritas pembangunan didasari dari:

- 1) Hasil evaluasi capaian pembangunan sampai dengan tahun sebelumnya dan tahun berjalan,
- 2) Isu strategis dan target pembangunan global/nasional/daerah,
- 3) Arahan pemerintah pusat yang relevan dengan kondisi daerah dan,
- 4) Arahan RPJMD serta RPJPD Kabupaten Bengkalis

Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, terutama yang berkorelasi dengan upaya untuk:

- 1) Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap Sustainable Development Goals (17 target pembangunan berkelanjutan dunia),

Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan dan penguatan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

- 2) Pencapaian visi dan misi Pembangunan Kabupaten Bengkalis.
- 3) Pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan prioritas dan keunggulan kompetiti daerah; dan
- 4) Penyelesaian isu-isu strategis dan mengatasi permasalahan-permasalahan pembangunan terkait.

Untuk mandatori anggaran yang diamanatkan, anggaran urusan Pendidikan berjumlah Rp 657.585.097.294 atau 21,27 persen dari total anggaran belanja tahun 2026. Selajutnya pada urusan kesehatan Rp 620.702.521.663, atau 20,07 persen dan Pendidikan dan Pelatihan ASN memiliki anggaran Rp 17.180.465.266 atau sebesar 0,5 persen dari total anggaran tahun 2026, serta Urusan APIP sebesar Rp. 14.478.209.154 atau sebesar 0,4 persen dari total anggaran tahun 2026.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Tabel VI-1 berikut ini menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran prioritas RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025–2029 pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026.

Tabel VI-1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Prioritas RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2026

NO (1)	INDIKATOR (2)	SATUAN (3)	TARGET 2026 (4)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	1,71 - 2,88
2	Indeks Daya Saing Daerah	angka	3,10
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,16 - 5,56
4	Rasio Gini	angka	0,242 - 0,246
5	Pendapatan Perkapita	angka	311,87 - 315,41
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	angka	77,02 - 77,28
7	Tingkat Kemiskinan	%	6,12 - 6,20
8	Indeks Reformasi Birokrasi	angka	68,04
9	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan	%	8
10	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan.	%	100
11	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	angka	66
12	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	angka	76,19
13	Penurunan Intensitas emisi GRK (%)	angka	17,17

Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu IKK tingkat dampak (impact) dan IKK tingkat hasil (outcome). IKK tingkat dampak (impact) memuat IKU pemerintah daerah maupun IKU perangkat daerah. IKK tingkat dampak (impact) merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD yang juga merupakan IKU pemerintah daerah, serta indikator kinerja tujuan dan sasaran seluruh Renstra Perangkat Daerah yang juga merupakan IKU perangkat daerah. Sementara indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat hasil (outcome) digunakan untuk menggambarkan indikator kinerja program dan target per tahun selama 5 (lima) tahun. Untuk target IKK pada setiap urusan pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI-2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	2026
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI		
1	Indeks Ketahanan Pangan	angka	67,59
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	11,09
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	4.850,38
4	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum Bersih	%	76,04
5	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum Layak	%	96,1
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	angka	73,71
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	92,19
8	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	6,37
9	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	29,34
10	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	17,17
11	Indeks Risiko Bencana	angka	122,38
12	Indeks Ketahanan Daerah	angka	36
13	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,76%
14	Rasio Penduduk	%	104,74
15	Kepadatan Penduduk	Orang/Km2	79,39
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	1,71 - 2,88
2	Tingkat Kemiskinan	%	6,12 - 6,20
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	311,87 - 315,41
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,16 - 5,56
5	Indeks Gini	angka	0,242 - 0,246
6	Indeks Pembangunan Manusia	angka	77,02 - 77,28
7	Usia Harapan Hidup	tahun	74,55
8	Indeks Keluarga Sehat	angka	0,354
9	Prevalensi Stunting	%	9,2 - 6,86
10	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9,77
11	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,78
12	Angka Literasi/Numerasi	%	
a	Skor Literasi SD	angka	64,88
b	Skor Numerasi SD	angka	58,76
c	Skor Literasi SMP	angka	72,88
d	Skor Numerasi SMP	angka	65,55
13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	angka	50,16
14	Indeks Masyarakat Digital	angka	49,03
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	60,36
16	Indeks Perlindungan Anak	angka	64,65
17	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	angka	67,7
18	Indeks Ketimpangan Gender	angka	0,39

No	Indikator	Satuan	2026
19	Indeks Pembangunan Pemuda	angka	
a	Jumlah Prestasi Olahraga	cabang	16
b	Persentase Wirausaha Muda	%	0,08
20	Indeks Zakat Nasional	angka	0,65
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH		
1	Angka Ketergantungan	%	43,07
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	16,42
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	0,32
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	0,46
5	Rasio Kewirausahaan	%	4,51
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,23
7	Indeks Inovasi Daerah	angka	43,55
8	Indeks Ekonomi Hijau	angka	61,1
9	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	angka	29,14
10	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	36,73
11	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	angka	6,16
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	20,51
13	Rasio Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	% PDRB	56,33
14	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	82,15
15	Persentase Desa Mandiri	%	85
16	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,082
17	Tingkat Inflasi	%	2,75 - 3,57
18	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	angka	4,9
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM		
1	Indeks Reformasi Hukum	angka	52,78
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	angka	2,97
3	Indeks Pelayanan Publik	angka	4,43
4	Indeks Integritas Nasional	angka	72,99
5	Persentase Penegakan Perda	%	100,00%
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%	65,88
7	Indeks Demokrasi Indonesia	angka	77,15
8	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (IPKKU)	angka	78
9	Indeks Daya Saing Daerah	angka	3,1
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	95,8
	INDIKATOR KINERJA KUNCI		
A	Pendidikan		
1	Skor Literasi/Numerasi		
a	Skor Literasi SD	angka	64,88
b	Skor Numerasi SD	angka	58,76
c	Skor Literasi SMP	angka	72,88
d	Skor Numerasi SMP	angka	65,55

No	Indikator	Satuan	2026
2	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	9,77
3	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,78
B	Kesehatan		84,97
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	angka	45,35
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	angka	5,15
3	Indeks Keluarga Sehat	angka	0,354
4	Prevalensi Balita Stunting	%	9,2 - 6,86
C	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	angka	
2	Persentase Gedung Pelayanan Layak	%	100
D	Perumahan dan Kawasan Pemukiman		
1	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	82,15
2	Rasio pemukiman layak huni	%	99,59
3	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	52,56
E	Ketertarikan, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat		
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	angka	
2	Persentase Penanggulangan Bencana Banjir	%	95
3	Persentase Penanggulangan Bencana Kebakaran	%	100
4	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (IPKKU)	angka	78
5	Indeks Manajemen Satlinmas	angka	75
6	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan Kebakaran	%	100
7	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100
F	Sosial		
1	Persentase Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya	%	100
2	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya	%	100
3	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya	%	100
4	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya	%	100
5	Persentas Korban Bencana korban Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	%	100
G	Tenaga Kerja		
1	Tingkat Kesempatan Kerja	%	94,65
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	68
H	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	angka	90,49

No	Indikator	Satuan	2026
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	angka	0,39
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	angka	64,65
I	Pangan		
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	angka	67,59
2	Persentase desa bebas dari status rawan pangan	%	98,99
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	93,32
J	Pertanahan		
1	Jumlah sengketa lahan yang diselesaikan melalui mediasi	angka	3
H	Lingkungan Hidup		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	angka	73,71
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	angka	64,46
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	angka	81,82
4	Indeks Kualitas Lahan	angka	74,59
I	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
1	Rasio Penduduk ber KTP per satuan	%	99,62
2	Rasio pasangan berakte nikah	%	85,94
3	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	67,73
J	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	angka	0,9307
K	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	angka	67,7
L	Perhubungan		
1	Rasio konektivitas antar wilayah	%	66
M	Komunikasi dan Informatika		
1	Indeks SPBE	angka	2,97
2	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	angka	3
N	Koperasi Usaha Kecil Menengah		
1	Pertumbuhan volume usaha koperasi	%	5
2	Jumlah UKM menjalin kemitraan	Unit Usaha	25
O	Penanaman Modal		
1	Persentase peningkatan investasi	%	29
P	Kepemudaan dan Olahraga		
1	Indeks Partisipasi Olahraga	angka	
Q	Statistik		
1	Indeks Pembangunan Statistik	angka	2,6
R	Persandian		
1	Tingkat Kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	
S	Kebudayaan		
1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan	%	8

No	Indikator	Satuan	2026
2	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan.	%	100
T	Perpustakaan		
1	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Bengkulu	angka	50,16
2	Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	angka	
U	Kearsipan		
1	Indeks Pengelolaan Kearsipan	angka	
2	Tingkat Digitalisasi Arsip	%	
	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	35,48
V	Kelautan dan Perikanan		
1	Jumlah produksi perikanan (Ton)	ton	9.805
2	Jumlah produksi olahan perikanan (ton)	ton	105
W	Pariwisata		
1	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	0,32
2	Jumlah Wisatawan Mancanegara	jiwa	3.526
3	Jumlah Wisatawan Nusantara	jiwa	256.554
X	Pertanian		
1	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	%	13,42
Y	Energi dan Sumber Daya Mineral		
1	Rasio Elektrifikasi	%	93,44
Z	Perdagangan		
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	6,5
AA	Perindustrian		
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	16,42
AB	Transmigrasi		
1	Pendapatan Per Kapita di Wilayah Transmigrasi	Na	Na
AC	Sekretariat Daerah	Rp Juta	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	angka	68,04
AD	Sekretariat DPRD		
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	93,18
AE	Perencanaan		
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	angka	82
AF	Keuangan		
1	Opini BPK		WTP
AG	Kepegawaian		
1	Indeks Profesionalitas ASN	angka	78,6
AH	Pendidikan dan Pelatihan		
1	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	angka	27,09
AI	Penelitian dan Pengembangan		

No	Indikator	Satuan	2026
1	Indeks Inovasi Daerah	angka	44,37
1	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	%	42
AJ	Pengawasan		
1	Maturitas Penyelenggaraam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		Level 3
AK	Kesatuan Bangsa dan Poliktik		
1	Indeks Harmoni Sosial	angka	6,6
AL	Pengelola Perbatasan		
1	Persentase pengelolaan wilayah perbatasan	%	76,27
AM	Kecamatan Bengkalis		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	95,5
AN	Kecamatan Bandar Laksamana		
	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	81,8
AO	Kecamatan Pinggir		
	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	97,45
AP	Kecamatan Siak Kecil		
	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	90
AQ	Kecamatan Rumat Utara		
	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	96
AR	Kecamatan Rumat		
	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	91,5
AS	Kecamatan Talang Muandau		
	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	95,5
AT	Kecamatan Bantan		
	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	80,55
AU	Kecamatan Bathin Solapan		
	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	94,5
AV	Kecamatan Mandau		
	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	95,5
AW	Kecamatan Bukit Batu		
	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	95

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 merupakan tahun pertama dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029. Program dan kegiatan yang dituangkan berdasarkan skala prioritas pencapaian visi dan misi daerah yang juga merupakan akumulasi berbagai aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan capaian kinerja daerah pada tahun sebelumnya serta sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2026 yang bersumber dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Selain itu, juga mempertimbangkan isu terkini baik nasional dan internasional yang memerlukan antisipasi pada tahun 2026. RKPD Tahun 2026 ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2026 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 yang selanjutnya menjadi pedoman untuk penyusunan RAPBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026.